ASKRINDO Syariah

Laporan Tahunan
Annual Report 2019



PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN
BERSAMA MITRA

Sustainable Growth with Our Partner

NAVIGASI
Navigation

Laporan tahunan ini memuat kata "Askrindo Syariah" yang didefinisikan sebagai PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang menjalankan bisnis di bidang penjaminan pembiayaan, *suretyship* dan transaksi perdagangan. Adakalanya kata "Perseroan" dan "Kami" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah secara umum.

This Annual Report contains "Askrindo Syariah", which is defined as PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah that is engaged in financing guarantee, suretyship and trading transaction. The word "The Company" and "We" is also used for convenience to mention PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah in general.



PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN BERSAMA MITRA

Sustainable Growth with Our Partner



Secara keseluruhan, 2019 merupakan tahun yang cukup baik bagi Perseroan. Di tengah moderasi kondisi ekonomi, Perseroan berhasil menjaga stabilitas kinerja seluruh sektor usaha portofolio bisnis Penjaminan dan membukukan capaian yang positif. Selain portofolio usaha, Perseroan juga terus memperkuat komitmen dan *trust* dalam kerja sama dengan seluruh mitra Perseroan. Selama tahun 2019, Perseroan melanjutkan kerja sama dengan berbagai mitra, baik Lembaga Keuangan Bank maupun Non-Bank Syariah. Kerja sama dan sinergi yang kuat dengan Mitra selama tahun 2019 berhasil menopang kinerja Perseroan.

Ke depan, Perseroan memandang optimis peluang usaha di tahun mendatang yang didukung oleh sinergi bersama mitra. Selain menjaga kualitas kerja sama dengan mitra eksisting, Perseroan juga telah mempersiapkan pengembangan bisnis ke Lembaga Keuangan di berbagai wilayah Indonesia. Didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan Teknologi Informasi (TI) yang handal, Perseroan optimis dapat tumbuh dan berkembang di tahun mendatang demi tercapainya Pertumbuhan Berkelanjutan Bersama Mitra.

The year 2019 was overall a favorable year for the Company. Amidst economic moderation, the Company managed to maintain stable performance at all of the Guarantee business portfolios and booked positive performance. In addition to our business portfolio, the Company also continuously strengthens the commitment and trusts in cooperation with all of our partners. Throughout 2019, the Company advanced cooperation with various partners, both Banking and Non-Banking Sharia Financial Institutions. Strong cooperation and synergy with our Partners have successfully supported the Company's performance.

Going forward, the Company optimistically views business opportunities in the future driven by the synergy with our partners. Besides maintaining the quality of cooperation with existing partners, the Company has also prepared business development towards various regions across Indonesia. Supported by competent Human Capital and reliable Information Technology (IT), the Company is optimistic to continuously grow and develop in the upcoming years to achieve Sustainable Growth with Our Partners.

Daftar isi
Table of Contents

Navigasi
Navigation 2

Tema
Theme 3

Daftar Isi
Table of Contents 4

Hasil dan Capaian Tahun 2019
Result and Achievement in 2019 6

Kerja Sama Strategis Tahun 2019
Strategic Cooperation in 2019 8

01 **KILAS KINERJA 2019**
2019 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights 14

Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights Chart 16

Ikhtisar Operasional
Operational Highligths 17

Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya
Stocks and Other Securities Highlights 18

Kronologis Pencatatan Saham
Shares Listing Chronology 18

Kronologis Pencatatan Obligasi, Sukuk dan Efek Lainnya
Bonds, Sukuk and Other Securities Listing Chronology 18

Peristiwa Penting Tahun 2019
Significant Events in 2019 19

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications 23

Strategi Perseroan Tahun 2019
Corporate Strategy in 2019 24

02 **LAPORAN MANAJEMEN**
MANAGEMENT REPORT

Laporan Dewan Komisaris
Report from Board of Commissioners 28

Laporan Direksi
Report from Board of Directors 36

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019
Statement of Responsibility from Board of Commissioners and Board of Directors on Annual Report 2019 45

03 **PROFIL PERUSAHAAN**
COMPANY PROFILE

Identitas Perusahaan
Company Identity 48

Wilayah Operasional
Operational Areas 49

Sekilas Askrindo Syariah
Askrindo Syariah at a Glance 50

Jejak Langkah
Milestones 51

Kegiatan usaha
Business Activities 52

Produk dan Jasa
Products and Services 53

Visi, Misi & Budaya Perusahaan
Vision, Mission & Corporate Values 54

Makna Logo Perseroan
Company's Logo Definition 55

Struktur Organisasi
Organization Structure 56

Profil Dewan Komisaris
Profile of Board of Commissioners 58

Profil Direksi
Profile of Board of Directors 61

Profil Dewan Pengawas Syariah
Profile of Sharia Supervisory Board 64

Profil Eksekutif PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Profile of Executives PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 69

Informasi Pemegang Saham
Shareholder Information 72

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition 73

Kepemilikan Saham oleh Direktur, Komisaris, dan Dewan Pengawas
Share Ownership by Director, Commissioner, and Supervisory Board 74

Informasi Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama
Information on Subsidiaries, Associated Companies, and Joint Venture Companies 74

Informasi Dalam Situs Perseroan
Information on the Company's Website 75

Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professions 76

Informasi Jasa Berkala Lembaga Profesi dan Penunjang Perusahaan Tahun 2019
Information on Regular Service provided by the Company's Supporting Institutions and Professions in 2019 76

04 **TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS**
BUSINESS SUPPORTING REVIEW

Sumber Daya Manusia
Human Resources 80

Teknologi Informasi
Information Technology 88

05 **ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN**
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Tinjauan Makroekonomi Global
Global Macroeconomic Review 96

Tinjauan Ekonomi Nasional
National Economic Review 96

Tinjauan Industri Penjaminan Syariah
Sharia Guarantee Industry Review 98

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segments 104

Tinjauan Keuangan
Financial Review 106

Laporan Posisi Keuangan
Statements of Financial Position 106
Laporan Laba Rugi
Statement of Profit or Loss 110
Laporan Arus Kas
Statements of Cash Flows 114
Kemampuan Membayar Hutang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Debt and Receivables Collectability 113
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure 115
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Expenditure 116
Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku
Capital Expenditure Realization in Current Fiscal Year 116
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Comparison Between Target and Projection at Beginning 2019 With Achievement (Realization) 116
Prospek Usaha
Business Prospect 116
Target/Proyeksi Tahun 2020
Target/Projection in 2020 118
Aspek Pemasaran
Marketing Aspect 120
Kebijakan Dividen
Dividend Policy 122
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliated Party 122
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen
Employee and/or Management Stock Option Plan 124
Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policy 125

06 TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Landasan Penerapan GCG
GCG Implementation Framework 128
Asesmen/Evaluasi Praktik GCG
GCG Assessment/Evaluation 130
Perbaikan GCG Signifikan Tahun 2019
Significant GCG Improvement in 2019 130
Mekanisme dan Struktur Tata Kelola
Governance Structure and Mechanism 131
Informasi Megenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information About Majority and Controlling Shareholders 132
Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders 132
Dewan Komisaris
Board Of Commissioners 134
Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board 144
Direksi
Board of Directors 145
Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board 153
Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship 156
Komite Audit
Audit Committee 157
Komite di Bawah Direksi
Committees Under the Board of Directors 160
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary 164
Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Internal Audit Unit (IAU) 168
Unit Kepatuhan
Compliance Unit 171
Sistem Pengendalian Intern
Internal Control System 172
Manajemen Risiko
Risk Management 172
Tabel Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko Perseroan 2019 Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko
Overview of The 2019 Risk Level 175
Auditor Eksternal
External Auditors 181
Keterbukaan Informasi
Information Disclosure 182
Kode Etik
Code of Conduct 183
Perkara Hukum yang Dihadapi Selama 2019
Legal Cases in 2019 185
Informasi Sanksi Administratif
Information About Administrative Sanctions 185
Pernyataan Anti Gratifikasi, Korupsi dan Penyuapan
Anti Gratification, Corruption and Bribery Statements 185
Pernyataan Penolakan Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik
Declaration of Prohibition to Fund Political Activities 185
Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistle Blowing System 186

07 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility to The Environment 194
Tanggung Jawab Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan
Social Responsibility in Social Community Aspect 196
Tanggung Jawab Bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Ketenagakerjaan
Responsibility in Occupational Health, Safety and Employment Aspect 199
Tanggung Jawab Terhadap Produk dan Jasa
Responsibility on Products and Services 201

08 LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENTS

Hasil dan Capaian Tahun 2019
Result and Achievement in 2019

Pendapatan Kafalah
Kafalah Revenue



Pendapatan Kafalah meningkat sebesar 39%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp156,03 miliar.

Kafalah Revenue increased by 39%, compared to realization in 2018 of Rp156.03 billion.

Pendapatan Kafalah Bersih
Net Kafalah Revenue



Pendapatan Kafalah Bersih meningkat sebesar 52%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp80,93 miliar.

Net Kafalah Revenue Kafalah increased by 52%, compared to realization in 2018 of Rp80.93 billion.

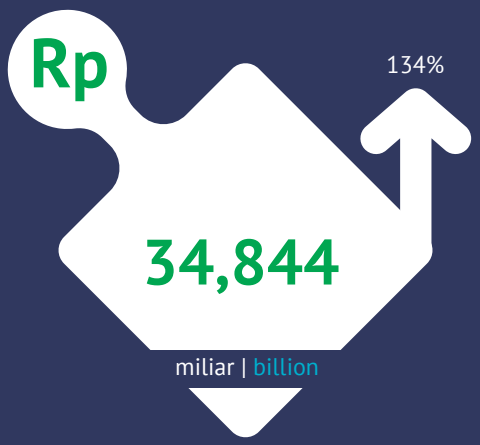
Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year



Laba Tahun Berjalan meningkat sebesar 160%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp14,08 miliar.

Profit for the year increased by 160%, compared to realization in 2018 of Rp14.08 billion.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Profit for the Year



Laba Komprehensif Tahun Berjalan meningkat sebesar 134%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp14,90 miliar.

Comprehensive Profit for the year increased by 134%, compared to realization in 2018 of Rp14.90 billion.

Aset
Assets



Aset meningkat sebesar 55%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp401,23 miliar.

Assets increased by 55%, compared to realization in 2018 of Rp401.23 billion.

Ekuitas
Equity



Ekuitas meningkat sebesar 57%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp325,53 miliar.

Equity increased by 57%, compared to realization in 2018 of Rp325.53 billion.

Skor Tingkat Kesehatan
Soundness Level Score



Skor Tingkat Kesehatan Perseroan di 2019 meningkat dibandingkan skor tahun 2018 sebesar 78,50.

The Company's Soundness Level Score in 2019 increased compared to the score in 2018 of 78.50.

Skor GCG
GCG Score



Skor GCG di 2019 meningkat dibandingkan skor tahun 2018 sebesar 73,30.

GCG Score in 2019 increased compared to the score in 2018 of 73.30.

Kerja Sama Strategis Tahun 2019
Strategic Cooperation in 2019

No	Nama Mitra Partner Name	Perjanjian Kerjasama Cooperation Agreement	Tanggal Awal Start Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date
1.	Bank Syariah Mandiri	PKS Mikro Micro Cooperation Agreement	4 Januari | January 2019	4 Januari | January 2021
2.	Bank Syariah Mandiri	PKS Mikro Pola Aliansi Alliance Scheme Micro Cooperation Agreement	4 Januari | January 2019	4 Januari | January 2021
3.	Bank Syariah Mandiri	PKS Mikro melalui *Alternate Channel* Tokopedia Micro Cooperation Agreement via Tokopedia as Alternate Channel	4 Januari | January 2019	4 Januari | January 2021
4.	Bank Syariah Mandiri	PKS Mikro Golbertap Non Aliansi Non-Alliance Golbertap Micro Cooperation Agreement	4 Januari | January 2019	4 Januari | January 2021
5.	At Tayibah Al Multazam Group	MOU/Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding	8 Januari | January 2019	8 Januari | January 2021
6.	BPRS Gunung Slamet	PKS Induk Parent Cooperation Agreement	11 Februari | February 2019	11 Februari | February 2021
7.	BPRS HIK Bekasi	PKS Induk Parent Cooperation Agreement	29 Januari | January 2019	21 Januari | January 2021
8.	BPRS HIK Bekasi	PKS Lampiran I Konsumtif Tunjangan Appendix I Consumer Allowance Cooperation Agreement	29 Januari | January 2019	21 Januari | January 2021
9.	Bank Riau Kepri	PKS Induk Parent Cooperation Agreement	28 Februari | February 2019	28 Februari | February 2021
10	Bank Riau Kepri	PKS Turunan KUR Sub-KUR Cooperation Agreement	28 Februari | February 2019	28 Februari | February 2021
11.	Bank Riau Kepri	PKS Turunan FLPP Sub-FLPP Cooperation Agreement	28 Februari | February 2019	28 Februari | February 2021
12.	Totalindo	MOU KBG dan *Suretyship* KBG and Suretyship MOU	27 Februari | February 2019	27 Februari | February 2020
13.	Bank BRI Syariah	PKS FLPP FLPP Cooperation Agreement	4 Maret | March 2019	4 Maret | March 2021
14.	Bank BPD DIY	PKS Induk Parent Cooperation Agreement	14 Agustus | August 2019	14 Agustus | August 2024
15.	Bank Nagari	PKS Konsumtif Consumer Cooperation Agreement	12 April 2019	12 April 2019

No	Nama Mitra Partner Name	Perjanjian Kerjasama Cooperation Agreement	Tanggal Awal Start Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date
16.	Bank Mega Syariah	PKS Induk Parent Cooperation Agreement	4 Mei | May 2019	4 Mei | May 2022
17.	Bank Mega Syariah	PKS Lampiran I KBG Umroh Appendix I KBG Umroh Cooperation Agreement	4 Mei | May 2019	4 Mei | May 2022
18.	Bank Syariah Mandiri	PKS KBG Umum General KBG Cooperation Agreement	16 April 2019	16 April 2020
19.	Bank BPD DIY	PKS Konsumtif Consumer Cooperation Agreement	14 Agustus | August 2019	14 Agustus | August 2019
20.	LPDB KUMKM	PKS Lembaga Perantara Pola Executing Intermediary Institution with Executing Scheme	26 April 2019	26 April 2021
21.	BPRS HIK INDUK	PKS Penjaminan Guarantee Holding Cooperation Agreement	29 April 2019	29 April 2021
22.	Bank Sumsel Babel	PKS KUR KUR Cooperation Agreement	15 Mei | May 2019	15 Mei | May 2021
23.	Bank Syariah Mandiri	PKS KBG Umum (*Excess Limit Fasilitas Commercial Line*) General KBG MOU (Excess Limit Commercial Line Facility)	20 Juni | June 2019	22 November 2021
24.	Asosiasi Haji Umrah PATUHI	Nota Kesepahaman Pemberangkatan Umroh Umroh Pilgrimage Memorandum of Understanding	12 Juli | July 2019	12 Juli | July 2020
25.	Bank Sumsel Babel	PKS Lampiran I Pembiayaan Konsumtif Appendix I Consumer Financing Cooperation Agreement	16 Juli | July 2019	16 Juli | July 2021
26.	Amartha Fintech	PKS Induk Parent Cooperation Agreement	17 Juli | July 2019	17 Juli | July 2021
27.	Amartha Fintech	PKS Lampiran I Mikro Tanggung Renteng - Life Appendix I Severally Liable Micro Cooperation Agreement	17 Juli | July 2019	17 Juli | July 2021

No	Nama Mitra Partner Name	Perjanjian Kerjasama Cooperation Agreement	Tanggal Awal Start Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date
28.	Amartha Fintech	PKS Lampiran II Tanggung Renteng - *Non Life* Appendix II Non-Life Insurance Severally Liable Cooperation Agreement	17 Juli | July 2019	17 Juli | July 2021
29.	Bank Syariah Mandiri	PKS Penjaminan Reksus SBSN SBSN Reksus Guarantee Cooperation Agreement	16 Juli | July 2019	16 Juli | July 2021
30.	MDL 525	MOU Penjaminan Umroh Umroh Guarantee MOU	29 Juli | July 2019	29 Juli | July 2021
31.	Asuransi Tripakarta (TRIPA)	PKS Penjaminan dan Asuransi Bersama Joint Guarantee and Insurance Cooperation Agreement	1 Juli | July 2019	1 Juli | July 2021
32.	Bank Nagari	PKS PPR FLPP PPR FLPP Cooperation Agreement	21 Agustus | August 2019	21 Agustus | August 2022
33.	Bank Riau Kepri	PKS Induk *Host to Host* dan OSA Host to Host and OSA Parent Cooperation Agreement	28 Februari | February 2019	28 Februari | February 2021
34.	Bank Riau Kepri	PKS KUR *Online* Online KUR MOU	28 Februari | February 2019	28 Februari | February 2021
35.	Bank Syariah Mandiri	PKS *Supply Chain Financing* Supply Chain Financing Cooperation Agreement	29 Agustus | August 2019	22 Agustus | August 2022
36.	Parsindo	Mou Penjaminan Syariah Sharia Guarantee MOU	4 September 2019	4 September 2020
37.	Bank Muamalat Indonesia	PKS NDA (Perjanjian Kerahasiaan) Non-Disclosure Agreement (NDA) Cooperation Agreement	29 September 2019	Sepanjang masih ber PKS (Produk) Based on valid period of the Cooperation Agreement (Products)
38.	Bank Syariah Mandiri	PKS Induk Parent Cooperation Agreement	20 September 2019	20 September 2021
39.	Bank Syariah Bukopin	PKS Konsumtif Consumer Cooperation Agreement	14 Oktober | October 2019	14 Oktober | October 2022
40.	Bank Syariah Bukopin	PKS Produktif Productive Cooperation Agreement	14 Oktober | October 2019	14 Oktober | October 2021

No	Nama Mitra Partner Name	Perjanjian Kerjasama Cooperation Agreement	Tanggal Awal Start Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date
41.	Bank Jabar Banten Syariah	PKS Induk Parent Cooperation Agreement	23 Oktober | October 2019	23 Oktober | October 2021
42.	BPRS Dana Amanah	PKS KBG PLN KBG PLN Cooperation Agreement	22 November 2019	22 November 2021
43.	BPRS Sukowati Sragen	PKS *Project Financing* Project Financing Cooperation Agreement	22 November 2019	22 November 2021
44.	Ammana Fintek Syariah	PKS OSA & *Host to Host* OSA & Host to Host Cooperation Agreement	27 November 2019	27 November 2021
45.	Bank Syariah Mandiri	PKS Induk Parent Cooperation Agreement	6 Desember | December 2019	6 Desember | December 2021
46.	Bank Syariah Mandiri	PKS Induk Parent Cooperation Agreement	6 Desember | December 2019	6 Desember | December 2021
47.	Bank NTB Syariah	PKS Konsumtif Consumer Cooperation Agreement	19 Oktober | October 2018	19 Oktober | October 2021
48.	Bank NTB Syariah	PKS Produktif Productive Cooperation Agreement	19 Oktober | October 2018	19 Oktober | October 2021
49.	Bank NTB Syariah	PKS *Project Financing* Project Financing Cooperation Agreement	19 Oktober | October 2018	19 Oktober | October 2021
50.	Bank NTB Syariah	PKS Tunas Sejahtera Tunas Sejahtera Cooperation Agreement	19 Oktober | October 2018	19 Oktober | October 2021
51.	Bank NTB Syariah	PKS Pensiunan Pensioner Cooperation Agreement	19 Oktober | October 2018	19 Oktober | October 2021
52	Bank NTB Syariah	PKS Renovasi Rumah Pasca Bencana Post-Disaster House Renovation Cooperation Agreement	19 Oktober | October 2018	19 Oktober | October 2021

Catatan | Note :

PKS : Perjanjian Kerja Sama | Cooperation Agreement

OSA : Aplikasi Sistem Online | Online System Application

01

KILAS KINERJA 2019

2019 Performance Highlights





Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights

Dalam juta rupiah | In million rupiah

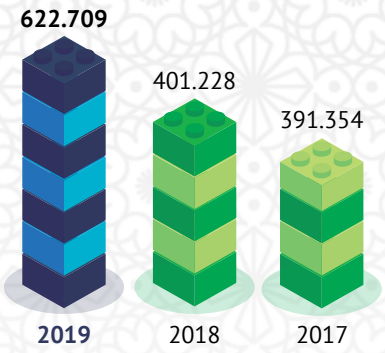
IKHTISAR POSISI KEUANGAN	2019	2018	2017	SUMMARY OF FINANCIAL POSITIONS
Kas dan bank	24.312	15.712	35.762	Cash on hand and in banks
Piutang Imbal Jasa Kafalah	18.296	6.751	5.913	Kafalah Fee Receivables
Piutang penjaminan ulang	23.062	7.989	8.380	Re-guarantee receivables
Aset Investasi	527.262	349.848	318.885	Investment Assets
Aset tetap	13.983	11.315	10.289	Fixed assets
Jumlah Aset	622.709	401.228	357.209	**Total Assets**
Utang ta'widh	6.809	1.734	8.319	Ta'widh payables
Utang penjaminan ulang	11.704	11.989	285	Re-guarantee payables
Utang zakat	2.392	962	228	Zakah payables
Utang pajak	8.388	5.912	2.477	Taxes payables
Jumlah Liabilitas	112.333	75.697	80.719	**Total Liabilities**
Jumlah Ekuitas	510.375	325.531	310.636	**Total Equity**
IKHTISAR LABA RUGI	**2019**	2018	2017	**SUMMARY OF PROFIT AND LOSS**
Imbal Jasa Kafalah	317.280	223.485	176.300	Kafalah Fee
Jumlah Pendapatan Kafalah	216.973	156.030	122.290	Total Kafalah Income
Jumlah Beban Kafalah	94.022	75.099	(80.599)	Total Kafalah Expense
Pendapatan Kafalah Bersih	122.951	80.932	41.690	Net Kafalah Income
Pendapatan Investasi	20.028	12.655	16.965	Investment Income
Beban Usaha	87.485	66.609	(52.624)	Operating Expenses
Laba Usaha	55.494	26.978	6.032	Operating Income
Beban Lain-Lain	(3.063)	(4.249)	(752)	Other Expenses
Laba Sebelum Zakat dan Pajak	52.431	22.729	6.784	Profit Before Zakah and Income Tax
Zakat	(1.311)	(568)	(170)	Zakah
Laba Sebelum Pajak	51.120	22.161	6.614	Profit Become Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(14.558)	(8.076)	(388)	Income Tax Expense
IKHTISAR LABA RUGI	**2019**	2018	2017	**SUMMARY OF PROFIT AND LOSS**
Laba Bersih Tahun Berjalan	36.562	14.085	6.226	Net Income for The Year
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	34.844	14.896	6.459	Total Comprehensive Income for The Year
Laba per Saham (Rupiah penuh)	-	-	-	Earning per Share

Dalam juta rupiah | In million rupiah

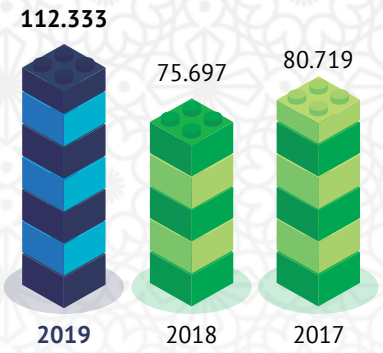
LAPORAN ARUS KAS	2019	2018	2017	STATEMENTS OF CASH FLOWS
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	41.643	13.485	26.458	Cash provided by operating activities
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(183.042)	(33.535)	1.877	Cash used in investing activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	150.000	-	-	Cash Flows from Financing Activites
RASIO KEUANGAN	**2019**	2018	2017	**FINANCIAL RATIO**
ROA	10%	6%	2%	ROA
ROE	9%	4%	2%	ROE
Solvabilitas	554%	530%	485%	Solvency
Likuiditas	556%	1212%	200%	Liquidity
Yield on Investment (YOI)	5%	4%	5%	Yield on Investment (YOI)
BOPO	3%	(27%)	6%	BOPO
NPM	12%	6%	4%	NPM
Gearing Ratio	19 kali	32 kali	30 kali	Gearing Ratio
Rasio Efektivitas Operasi	17%	6%	3%	Operating Efficiency Ratio
Rasio Efektivitas Subrogasi	22%	14%	10%	Subrogation Efficiency Ratio

Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights Chart

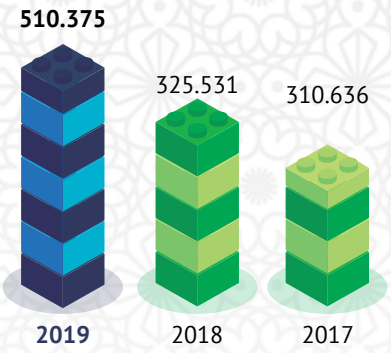
Jumlah Aset
Total Assets
(dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah)



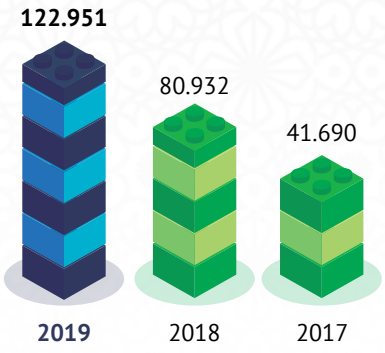
Jumlah Liabilitas
Total Liabilities
(dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah)



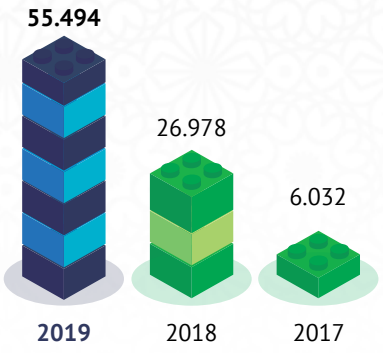
Jumlah Ekuitas
Total Equity
(dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah)



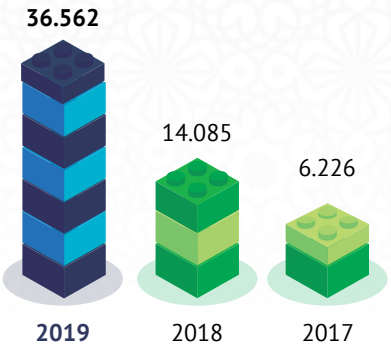
Jumlah Pendapatan Kafalah Bersih
Net Kafalah Income
(dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah)



Laba Usaha
Operating Profit
(dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah)



Laba Bersih Tahun Berjalan
Profit for the Year
(dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah)



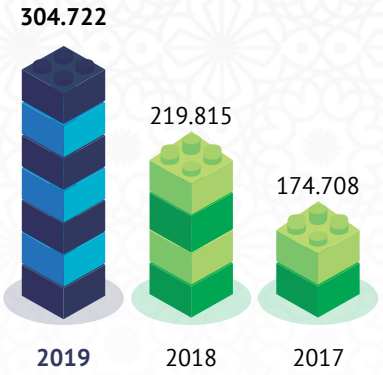


Ikhtisar Operasional
Operational Highligths

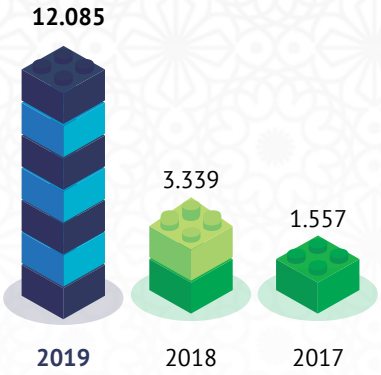
Dalam juta rupiah | In million rupiah

JENIS PRODUK | TYPE OF PRODUCT	2019	2018	2017
Imbal Jasa Kafalah Pembiayaaan | Financing Kafalah Fee	304.722	219.815	174.708
Imbal Jasa Kafalah Bank Garansi | Guarantee Bank Kafalah Fee	12.085	3.339	1.557
Imbal Jasa Kafalah Surety | Surety Kafalah Fee	472	330	35
JUMLAH | TOTAL	317.280	223.484	176.300

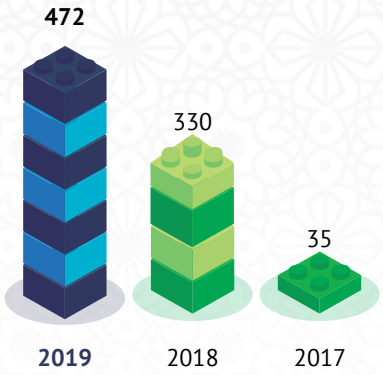
Imbal Jasa Kafalah Pembiayaaan
Financing Kafalah Fee
(dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah)



Imbal Jasa Kafalah Bank Garansi
Guarantee Bank Kafalah Fee
(dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah)



Imbal Jasa Kafalah Surety
Surety Kafalah Fee
(dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah)





Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya
Stocks and Other Securities Highlights

INFORMASI HARGA SAHAM
Hingga tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan dan memperdagangkan sahamnya kepada publik dan tidak terdaftar di bursa efek. Dengan demikian, Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai jumlah saham yang beredar, harga dan volume perdagangan saham maupun informasi mengenai kapitalisasi pasar selama dua tahun, dalam bentuk tabel maupun grafik pada Laporan Tahunan 2019.

INFORMASI EFEK LAINNYA
Hingga tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan dan/atau mencatatkan obligasi, sukuk, maupun efek lainnya di bursa manapun, sehingga di Laporan Tahunan 2019 tidak menyajikan informasi mengenai kronologi penerbitan dan pencatatan obligasi, sukuk, dan efek lainnya.

STOCK PRICE INFORMATION
As of 2019, the Company has not issued and traded its shares to public and it has not been listed in the stock exchange. Therefore, the Company does not provide information regarding the number of listed shares, prices, and volume of share trading, as well as the information on market capitalization for two years, either in table or graphic in the 2019 Annual Report.

OTHER SECURITIES INFORMATION
As of 2019, the Company did not issue and/or record any bonds, sukuk, and other securities in any stock exchange, so there is no information on the chronology of issuance and record of bonds, sukuk, and other securities in the 2019 Annual Report.

Kronologis Pencatatan Saham
Shares Listing Chronology

Perseroan belum menerbitkan dan memperdagangkan sahamnya kepada publik termasuk *private placement* dan/atau pencatatan saham, maka pada Laporan Tahunan 2019 Perseroan tidak mencantumkan informasi mengenai penerbitan saham dan tindakan korporasi atas saham yang dimiliki.

Company has not issued or publicly trading its shares, or having any private placement and/or listing of shares, the 2019 Annual Report does not disclose information regarding issuance of shares or corporate actions upon the Company's shares.

Kronologis Pencatatan Obligasi, Sukuk dan Efek Lainnya
Bonds, Sukuk and Other Securities Listing Chronology

Per 31 Desember 2019, Perseroan tidak menerbitkan dan/atau mencatatkan obligasi, sukuk, maupun efek lainnya di bursa manapun, sehingga di Laporan Tahunan 2019 tidak memiliki informasi mengenai kronologi penerbitan dan pencatatan obligasi, sukuk, dan efek lainnya.

As of December 31, 2019, the Company did not issue and/or list any bonds, sukuk or other securities on any stock exchange, therefore, the 2019 Annual Report did not disclose any information regarding chronology of the issuance and listing of bonds, sukuk and other securities.

Peristiwa Penting Tahun 2019
Significant Events in 2019

01



2 Februari 2019
February 2, 2019

CSR Pembuatan Sumur Air Bersih di Desa Sepanang, Kabupaten Jeneponto, Makassar.
Clean Water Supply CSR at Sepanang Village, Jeneponto Regency, Makassar.

02



28 Februari 2019
February 28, 2019

Penandatanganan Kerjasama dengan Bank Riau Kepri (Penjaminan FLPP dan KUR) di Hotel Mulia, Jakarta.
Signing of Cooperation Agreement with Bank Riau Kepri (FLPP and KUR Guarantee) at Mulia Hotel, Jakarta.

03



7 – 9 Maret 2019
March 7-9, 2019

Jakarta Syariah Halal Festival (Jashfest) di Cendrawasih *Room* Jakarta Convention Center, Jakarta.
Jakarta Syariah Halal Festival (Jashfest) at Cendrawasih Room Jakarta Convention Center, Jakarta.

04



14 Maret 2019
March 14, 2019

Penandatanganan Kerjasama dengan Gapensi di Jakarta Convention Center.
Signing of Cooperation Agreement with Gapensi at Jakarta Convention Center.

05



5 April 2019
April 5, 2019

Penandatanganan Kerjasama dengan Bank Mega Syariah (Penjaminan KBG dan Umroh) di Menara Bank Mega Syariah, Jakarta.
Signing of Cooperation Agreement with Bank Mega Syariah (KBG and Umroh Guarantee) at Bank Mega Syariah Tower, Jakarta.

06



7 April 2019
April 7, 2019

***Golf Gathering* 2019 di Bogor Raya *Golf Club*, Bogor.**
Golf Gathering 2019 at Bogor Raya Golf Club, Bogor.

07



12 April 2019
April 12, 2019

Penandatanganan Kerjasama dengan Bank Nagari (Pembiayaan Konsumtif) di Kantor Pusat Askrindo Syariah, Jakarta.
Signing of Cooperation Agreement with Bank Nagari (Consumer Financing) at Head Office Askrindo Syariah, Jakarta.

08



26 April 2019
April 26, 2019

Penandatanganan Kerjasama dengan LPDB KUMKM (Pembiayaan Syariah) di Kantor KPM Bekasi.
Signing of Cooperation Agreement with LPDB KUMKM (Sharia Financing) at KPM Office, Bekasi.

09



15 Mei 2019
May 15, 2019

Buka Puasa Bersama Mitra "Membangun Sinergi, Berbagi Meraih Berkah Ramadhan" di Hotel Aryaduta Jakarta.
Breakfasting Event with Partners "Building Synergy, Sharing Gaining Blessings of Ramadan" at Aryaduta Hotel, Jakarta.

10



28 Mei 2019
May 28, 2019

Penandatanganan Kerjasama dengan Induk HIK (Pembiayaan Konsumtif) di Kantor Pusat Askrindo Syariah.
Signing of Cooperation Agreement with Induk HIK (Consumer Financing) at Head Office Askrindo Syariah.

11



22 Agustus 2019
August 22, 2019

***Fun Bowling Kick Off Agency Award* 2019 di Artha Gading Bowling Center, Jakarta.**
Fun Bowling Kick Off Agency Award 2019 at Artha Gading Bowling Center, Jakarta.

12



17–20 Oktober 2019
October 17-20, 2019

***Financial Expo* (Fin Expo) 2019 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta.**
Financial Expo (Fin Expo) 2019 at Kota Kasablanka Mall, Jakarta.

13



22 – 24 November 2019
November 22 - 24, 2019

IB Vaganza di Solo Paragon Mall, Solo, Jawa Tengah.
IB Vaganza at Solo Paragon Mall, Solo, Central Java.

14



24 November 2019
November 24, 2019

CSR Penghijauan (penanaman pohon, pemberian tempat sampah dan kursi taman) di Tandon Ciater Tangerang Selatan.
Greening CSR (trees planting, trash bin and park bench donation) at Ciater Reservoir, South Tangerang.

15



1 Desember 2019
December 1, 2019

GASS (Gowes Askrindo Syariah) dan Puncak Peringatan Milad ke 7 di The Green BSD City.
GASS (Gowes Askrindo Syariah) and Celebration of 7th Anniversary at The Green BSD City.

16



17 Desember 2019
December 17, 2019

Penyaluran KUR dan Implementasi Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon, Jawa Barat.
KUR Disbursement and Implementation of Islamic Boarding School Sharia Financing at KHAS Kempek Islamic Boarding School, Cirebon, West Java.

17



19 Desember 2019
December 19, 2019

Pemberian Penghargaan sebagai Penjamin KUR 2019 Terbaik II di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian RI, Jakarta.
Award as 2nd Best KUR Guarantor 2019 at Coordinating Ministry of Economic Affairs, Jakarta.

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications



PENGHARGAAN | AWARDS

No.	Nama Penghargaan Name Achievement	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Lembaga yang Memberikan Penghargaan Awarding Institution
1	Penjamin KUR 2019 Terbaik II 2nd Best KUR Guarantor 2019	12 Desember 2019 December 12, 2019	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Coordinating Ministry of Economic Affairs

SERTIFIKASI | CERTIFICATIONS

No.	Nama Sertifikat Name Achievement	Masa Berlaku Valid Period	Lembaga yang Memberikan Penghargaan Awarding Institution
1	ISO 9001 - 2015	15 Februari 2020 February 15, 2020	United Registrar of System Certification
2	ISO 27001 – 2013	17 November 2021 November 17, 2021	PT ACS Registrasi Indonesia

Strategi Perseroan Tahun 2019
Corporate Strategy in 2019

PENINGKATAN KINERJA MELALUI PENGELOLAAN BISNIS PENJAMINAN SYARIAH YANG BERKESINAMBUNGAN

Dengan fondasi bisnis dan operasional yang lebih kuat, Perseroan terus melangkah menjadi salah satu perusahaan penyedia penjaminan syariah terdepan di Indonesia. Sesuai dengan sasaran, strategi dan kebijakan utama, Perseroan telah merumuskan strategi untuk tahun 2019, sebagai berikut:

PERFORMANCE IMPROVEMENT THROUGH SUSTAINABLE SHARIA GUARANTEE BUSINESS MANAGEMENT

With stronger business and operational foundations, the Company moves forward towards the leading sharia guarantee provider company in Indonesia. According to the main goals, strategies and policies, the Company has formulated strategies for 2019, as follows:

Sasaran Strategis
Strategic Goals

Peningkatan kinerja Perseroan melalui pengelolaan bisnis penjaminan syariah yang berkesinambungan.

The Company's performance improvement through a sustainable sharia guarantee business.

Kompetensi Inti
Core Competency

Layanan penjaminan syariah berbasis TI.

IT-based sharia guarantee services.



Strategi Umum
General Strategy

Pengelolaan portofolio bisnis penjaminan syariah yang menguntungkan dengan pemanfaatan *gearing ratio* yang optimal serta dukungan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Profitable sharia guarantee business portfolio management supported by optimum gearing ratio as well as quality Information Technology and Human Resources.

Strategi Utama
Main Strategy

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi bisnis secara optimal
2. Permodalan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis penjaminan
3. Penerapan *prudent underwriting* serta optimalisasi hasil subrogasi
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang berdayaguna
5. Pengembangan SDM yang berkualitas

1. Optimum business intensification and extensification
2. Adequate capital to support guarantee business growth
3. Implementation of prudent underwriting and subrogation yield optimization
4. Implementation of effective Information Technology
5. Quality HR development

Kebijakan Utama
Main Policy

1. Sinergi bisnis dengan Askrindo Group
2. Fokus pada pengembangan portofolio bisnis yang berkualitas

1. Business Synergy with Askrindo Group
2. Focus on quality business portfolio development

Indikator Keberhasilan
Achievement Indicator

EAT ⩾ Rp40 miliar/billion

Mutu Organisasi
Organization Quality

Skor KPKU/ KPKU Score : 400
Skor GCG/ GCG Score : 80



02

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

Laporan Dewan Komisaris
Report from Board of Commissioners



"Berdasarkan implementasi strategi dan program kerja pada tahun 2019, Dewan Komisaris menilai secara umum Perseroan telah dikelola dengan sangat baik dan cukup adaptif terhadap perubahan kondisi aktual."

"Based on implementation of strategies and work programs in 2019, the Board of Commissioners views the Company generally has been managed very well and fairly adaptive to changes in current conditions."

Budi Wisakseno

Komisaris Utama | Komisaris Independen
President Commissioner |
Independent Commmissioner

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,
Our Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Pertama-tama, kami sampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Perseroan") berhasil melalui tahun 2019 yang penuh tantangan dan mencatat kinerja yang positif. Atas nama Dewan Komisaris, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi selama tahun 2019.

PANDANGAN ATAS PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI TAHUN 2019

Dewan Komisaris melihat bahwa pergerakan indikator-indikator makroekonomi masih bergerak lambat pada tahun 2019. Eskalasi ketegangan hubungan dagang, khususnya kelanjutan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta melemahnya aktivitas perdagangan dan manufaktur dunia menyebabkan ketidakpastian dan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Seiring melemahnya permintaan, pertumbuhan ekonomi di negara maju terkoreksi menjadi 2% dimana laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga diprediksi akan melambat. *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami penurunan dari 3,6% pada tahun 2018 menjadi 3,0% pada tahun 2019.

Di sisi lain, Dewan Komisaris melihat ekonomi Indonesia cukup berdaya tahan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi sektor swasta. Per 31 Desember 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,02%, cukup baik walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan 5,17%

First of all, we would express our praise and grace to the Almighty God for all of His blessings and guidance that brought PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Company") to close challenging 2019 and recorded a positive performance. On behalf of Board of Commissioners, allow us to present supervisory report over the Company's management done by the Board of Directors throughout 2019.

OVERVIEW ON 2019 MACROECONOMICS

The Board of Commissioners saw that the macroeconomic indicators were shifted relatively slow throughout 2019.. Escalation of tension in trade relations, especially the prolong United States and China trade war and the weakening of global trade and manufacturing activities due to uncertainty and pressure on economic growth in both developed and developing countries. As the demand weakens, economic growth in developed countries was corrected to 2% where the rate of economic growth in developing countries was also predicted to slow down. The International Monetary Fund (IMF) projected that the global economic growth will fall from 3.6% in 2018 to 3.0% in 2019.

On the other hand, the Board of Commissioners analyzed that Indonesian economy will remain resilient supported by household consumption and private sector investment. As of December 31, 2019, the Central Statistics Agency (BPS) noted that the Indonesian economy managed to grow by 5.02%, was fairly positive despite slightly

pada tahun 2018. Di tengah kondisi tersebut, sektor infrastruktur masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tahun 2019 meskipun sejumlah sektor lain juga turut berperan, salah satunya sektor jasa keuangan dan asuransi/reasuransi umum, baik konvensional maupun syariah.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan sektor jasa keuangan pada tahun 2019 masih bergerak positif. Pada tahun 2019, aset perbankan syariah tumbuh 10,07% (YoY) dan membukukan pangsa pasar sebesar 5,99% terhadap perbankan nasional. Terkait bisnis pembiayaan, OJK mencatat total aset Perusahaan Penjaminan syariah tumbuh 61,59% dibandingkan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan syariah secara umum masih berkembang cukup baik pada tahun 2019.

PANDANGAN ATAS TANTANGAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI ASKRINDO SYARIAH TAHUN 2019

Seiring dengan moderasi kondisi makro ekonomi dan di sisi lain, peluang pertumbuhan bisnis di sektor penjaminan syariah, Dewan Komisaris mencermati beberapa kondisi yang dapat menjadi tantangan terhadap realisasi kinerja Perseroan serta telah memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dan Manajemen untuk menjaga stabilitas kinerja Perseroan di tengah tantangan-tantangan tersebut. Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan Direksi untuk terus berhati-hati dalam mengembangkan portfolio penjaminan khususnya terkait kriteria *gearing ratio* agar tetap optimal sesuai dengan ketentuan regulator dan kebutuhan usaha serta operasional Perseroan.

Selain faktor permodalan, Dewan Komisaris juga tak henti-henti memberikan arahan terkait aspek risiko dalam portofolio usaha dan kegiatan operasional Perseroan. Pada tahun 2019, Dewan Komisaris mencatat bahwa kegiatan pengembangan usaha dan pangsa pasar penjaminan syariah masih beririsan dengan sektor asuransi. Hal ini bertujuan agar Perseroan dapat menjaga keunggulan kompetitif serta memberikan *assurance* yang memadai kepada mitra perbankan untuk mendukung posisi Perseroan dalam pasar penjaminan syariah.

Berdasarkan implementasi strategi dan program kerja oleh Direksi dan Jajaran Manajemen pada tahun 2019, Dewan Komisaris menilai secara umum Perseroan telah dikelola dengan sangat baik dan cukup adaptif terhadap perubahan kondisi aktual. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah Direksi dalam melakukan pergeseran fokus bisnis dari *Conditional Automatic Cover* (CAC) menjadi *Case by Case* (CBC). Dewan Komisaris menilai strategi tersebut berhasil mengoptimalkan lini usaha reasuransi

lower than 5.17% in 2018. Amidst these conditions, the infrastructure sector was still being an economic growth pillar for 2019 period in addition to several other sectors that also shared positive contribution such as financial services sector and general insurance/reinsurance, both conventional and sharia.

Based on data published by the Financial Services Authority (OJK), the development of the financial services sector in 2019 was still indicating positive trend. In 2019, sharia banking assets grew by 10.07% (YoY) and posted a market share of 5.99% to national banks. Regarding the financing business, OJK recorded that total assets of the sharia Guarantee indicated grew by 61.59% compared to 2018. This shows that, generally, the sharia financial services sector was still developing properly in 2019.

VIEW ON ASKRINDO SYARIAH'S CHALLENGE AND STRATEGY IMPLEMENTATION IN 2019

Along with macro economic moderation and opportunities for business growth in the sharia guarantee sector, meanwhile, the Board of Commissioners has also assessed several conditions that may encourage challenges to the Company's performance achievement as well as has provided suggestion and advise to the Board of Directors and Management to maintain the Company's performance stability amidst those challenges. The Board of Commissioners has constantly reminded the Board of Directors to always be prudent in developing the guarantee portfolio, especially related to the gearing ratio criteria to stay optimal in compliance with provisions applied by the regulator as well as the Company's business and operational needs.

In addition to the capital factor, the Board of Commissioners has also provided continuous guidance on risk aspects in the Company's business portfolio and operational activities. In 2019, the Board of Commissioners noted that business development activities and market share of sharia guarantees were still related to the insurance sector. This aimed to ensure the Company will be able to maintain competitive advantage and provide adequate assurance to banking partners to support the Company's position in the sharia guarantee market.

Based on implementation of strategies and work programs by the Board of Directors and Management in 2019, the Board of Commissioners views the Company generally has been managed very well and fairly adaptive to changes in current conditions. The Board of Commissioners would also appreciate initiatives taken by the Board of Directors in shifting our business focus from Conditional Automatic Cover (CAC) to Case by Case (CBC). The Board of Commissioners considers the strategy to be successful in

dan memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap kinerja Perseroan, khususnya pada semester II tahun 2019. Dewan Komisaris juga mengapresiasi strategi Direksi untuk melakukan penataan struktur organisasi dan membentuk Divisi *Non Cash Financing* pada tahun 2019. Pembentukan divisi tersebut merupakan strategi yang tepat untuk mengembangkan potensi pendapatan Perseroan, khususnya dari margin *short-term* dengan portofolio risiko yang cukup *acceptable*.

Terkait aspek operasional, Dewan Komisaris juga mengapresiasi upaya Direksi dan segenap Jajaran Manajemen untuk memperkuat aspek operasional, khususnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI). Adaptasi terhadap perkembangan TI merupakan hal yang harus dilakukan dan harus dioptimalkan untuk membangun bisnis yang *seamless* dan efisien. Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai inisiatif TI yang berhasil dieksekusi pada tahun 2019, antara lain penambahan Bank Umum Syariah (BUS) sebagai mitra penjaminan *host-to-host*.

Selain strategi yang berkaitan dengan aspek bisnis dan operasioanl, Dewan Komisaris juga melihat bahwa keunggulan Perseroan pada tahun 2019 secara signifikan didukung oleh kerja sama yang semakin baik dengan seluruh mitra. Dewan Komisaris mengapresiasi keberhasilan Perseroan dalam berpartisipasi kerja sama strategis dengan mitra utama pada tahun 2019, baik mitra perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank syariah, termasuk dengan BMT dan Koperasi Syariah. Dewan Komisaris percaya, kerja sama tersebut merupakan landasan yang kuat untuk mencapai **Pertumbuhan Berkelanjutan Bersama Mitra** di tahun mendatang.

Seiring pertumbuhan Perseroan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus mendukung langkah dan strategi Direksi, serta mengupayakan hubungan dan dukungan yang diperlukan dari seluruh pihak, termasuk dari pemegang saham. Terkait dukungan tersebut, Dewan Komisaris menyambut baik realisasi tambahan setoran modal oleh Pemegang Saham pada akhir Desember 2019 juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat kinerja Perseroan pada tahun 2019.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Dewan Komisaris menilai kinerja Perseroan pada tahun 2019 cukup memuaskan. Dengan total penjaminan mencapai Rp10,09 triliun, Perseroan mencatat capaian pertumbuhan laba tahun berjalan secara positif dengan realisasi laba tahun berjalan sebesar Rp36.562 juta atau mencapai 90,35% dari target RKAP 2019. Hal lain yang juga perlu diapresiasi adalah kinerja Divisi *Non Cash Financing* yang belum lama ditingkatkan pemberdayaannya dan terlihat sudah berusaha optimal membukukan Ujroh sebesar Rp12,56 miliar dari target sebesar Rp20 miliar. Kemajuan kinerja Divisi *Non Cash Financing* merupakan salah satu

optimizing the reinsurance business line and contributes significantly to the Company's performance, especially in the second half of 2019. The Board of Commissioners would also appreciate the Board of Directors' strategy to transform the organization structure and established the Non-Cash Financing Division in 2019. Establishment of this division is seen as the right strategy to develop the Company's revenue potential, especially from short-term margins with acceptable risk portfolio.

Operational wise, the Board of Commissioners would also appreciate the attempts taken by the Board of Directors and all Management to strengthen operational aspects, particularly Human Resources (HR) and Information Technology (IT) development. Adaptation with the IT development is considered important to be done and shall be optimized to build a seamless and efficient business. The Board of Commissioners would appreciate range of IT initiatives that were successfully executed in 2019, including the addition of a sharia commercial bank as a host-to-host guarantee partner.

In addition to strategies related to business and operational aspects, the Board of Commissioners also witnessed that the Company's excellence in 2019 has been significantly supported by better cooperation with all partners. The Board of Commissioners appreciates success of the Company in participating in strategic cooperation with key partners in 2019, both banking partners and Sharia non-bank financial institutions, including BMT and Sharia Cooperative. The Board of Commissioners believes, this cooperation will become a strong foundation to achieve **Sustainable Growth with Partners** in the coming year.

As the Company grows, the Board of Commissioners is committed to continuously support initiatives and strategies of the Board of Directors, and to strive relationships and support required from everyone, including the shareholders. Related to this support, the Board of Commissioners gladly welcomes realization of additional paid-up by the Shareholders by end of December 2019 another support that strengthened the Company's performance in 2019.

Despite facing various challenges, the Board of Commissioners considers the Company's performance in 2019 has been satisfying. With total guarantees realization achieving Rp10.09 trillion, the Company recorded positive growth of profit for the year with the realization of Rp36,562 million or 90.35% of the RKAP 2019 target. Another accomplishment to be appreciated is the performance of the Non-Cash Financing Division which has recently been enhanced and empowered, and considered to optimally work and record Ujroh amounted Rp12.56 billion from a target of Rp20 billion. Progress of the Non-Cash Financing Division's performance becomes

peluang pertumbuhan Perseroan di masa depan dengan prospek yang masih sangat baik dan *lost ratio* yang relatif kecil. Ke depan, Dewan Komisaris berharap Perseroan dapat terus mengoptimalkan diversifikasi pendapatan imbal jasa kafalah dari bermacam portofolio bisnis pembiayaan di para Mitra *Makful Lahu*/Pihak Penerima Penjaminan/Lembaga Keuangan syariah tentunya dengan tetap menjaga kemampuan dan Kehati-hatian atas *Business Risk* para *Makful Anhu*/Pihak Debitur/Pihak Terjamin.

PROSPEK USAHA

Mempertimbangkan kondisi dan capaian pada tahun 2019, Dewan Komisaris melihat Perseroan akan menyongsong tahun 2020 dengan optimis. Optimisme tersebut salah satunya akan didukung oleh sinergi dan hubungan kerja sama yang solid dengan seluruh mitra, penguatan portofolio bisnis serta adanya realisasi tambahan modal dari pemegang saham yang akan memperkuat laju usaha dan operasional Perseroan di tahun 2020 mendatang.

Terkait peluang usaha di tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan terkait implementasi program kerja di tahun depan, yakni agar Direksi mempertimbangkan Strategi Subsitusi Penjaminan Pembiayaan Mikro, disampaikan kepada Manajemen *Makful Lahu* untuk bisa mengganti Penutupan Penjaminan Pembiayaan Mikro yang lebih baik kualitas peringkat kolektibilitasnya berdasarkan atas Kolektibilitas Pembiayaan Mikro yang *track record* nya memang sudah terlihat baik, yang mana terdapat disebaran daerah Kantor Cabang Bank Umum Syariah.

Salah satu arahan yang disampaikan kepada Direksi yaitu berkaitan dengan perkembangan lanskap perbankan syariah yang dapat mengalami perubahan cukup signifikan pada tahun 2020. Seiring dengan rencana konversi beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi bank syariah, Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi untuk mempersiapkan pengembangan bisnis ke daerah dengan potensi konversi menjadi perbankan syariah, khususnya di wilayah Sumatera. Dewan Komisaris menilai langkah tersebut akan mengimbangi upaya untuk mengejar pertumbuhan dari sektor komersial yang masih akan tetap prospektif di tahun mendatang.

Penguatan aspek TI juga sebaiknya terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan di tahun mendatang, baik dari sisi operasional, bisnis maupun aspek regulasi. Tidak hanya untuk mendorong kegiatan operasi yang lebih cepat dan efisiensi yang lebih baik, Dewan Komisaris meyakini implementasi TI pada sektor jasa penjaminan akan berkontribusi terhadap penguatan Tata Kelola Perusahaan, khususnya dalam meminimalisir risiko operasional dan memperkuat aspek pengawasan serta kepatuhan.

one of the Company's growth opportunities in the future with a very good prospect and a relatively small lost ratio. Going forward, the Board of Commissioners wishes that the Company will continuously optimize diversification of kafalah fee income from various financing business portfolios at *Makful Lahu* Partners/Guarantee Recipients/ Sharia Financial Institutions, surely by maintaining capability and prudent principle to the *Makful Anhu* Business Risk/Debtor/Guaranteed Parties.

BUSINESS PROSPECT

Considering the conditions and achievements in 2019, the Board of Commissioners views that the Company will approach 2020 with optimism. This optimism will be supported by solid synergy and cooperations with all partners, business portfolio strengthening and realization of additional capital from the shareholders that will strengthen the Company's business and operational growth within the next 2020.

Related to business opportunities in 2020, the Board of Commissioners has provided directions related to implementation of work programs in the next year, including a suggestion to the Board of Directors to consider the Micro Financing Guarantee Substitution Strategy, submitted to *Makful Lahu* Management to alternate the Micro Financing Guarantee Underwriting which is considered having better quality based on its of the Micro Financing Collectability rate, which has good track record and distributed in the Sharia Commercial Bank Branch Office.

One of the direction given to the Board of Directors is related to the development of the sharia banking landscape which may experience a significant change in 2020. Along with the plan of several Regional Development Banks (BPD) conversion to sharia banks, the Board of Commissioners has provided direction to the Board of Directors to prepare business development to several provinces with potential of sharia banking conversion, especially in Sumatra. The Board of Commissioners considers the initiative will offset our efforts to pursue growth from the commercial sector which will remain prospective in the upcoming year.

Strengthening IT aspects should also continue to be done by considering the Company's needs within the mext year, both in terms of operational, business and regulatory aspects. Not only to encourage faster operations and better efficiency, the Board of Commissioners believes that IT implementation in the guarantee services sector will contribute to strengthen Corporate Governance, particularly in minimizing operational risk and strengthening supervision and compliance aspects.

PANDANGAN DAN PERAN DEWAN KOMISARIS TERKAIT PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Direksi serta memberikan nasihat atau saran dan memastikan Direksi telah menjalankan tugas pengelolaan Perseroan dengan baik, selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah merealisasikan program kerja terkait bidang Audit, Nominasi dan Remunerasi, Manajemen Risiko serta implementasi *Whistle Blowing System* di Perseroan.

Dewan Komisaris telah secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Mekanisme pengawasan tersebut dilaksanakan baik secara langsung melalui kegiatan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan, koordinasi dalam rapat gabungan bersama Direksi maupun secara tidak langsung melalui pelaksanaan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris. Pada tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan monitoring meliputi bidang *underwriting*, investasi, akuntansi dan keuangan, organisasi dan SDM, GCG, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal visi, misi dan budya kerja, teknologi informasi dan aspek lainnya meliputi reasuransi, piutang, aktiva tetap dan *recoveries*.

Selain bentuk pengawasan tersebut, Dewan Komisaris juga telah memberikan arahan kepada Direksi terhadap 4 (empat) bidang dengan rincian, sebagai berikut:

1. *Underwriting* : 14 arahan
2. Investasi : 14 arahan
3. Keuangan dan Umum : 14 arahan
4. Pengendalian : 14 arahan

Berdasarkan pelaksanaan tugas selama tahun 2019, Dewan Komisaris menilai praktik GCG, termasuk pelaksanaan tugas Komite Audit dan *Whistle Blowing System* telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris juga mengapresiasi capaian skor *assessment* GCG tahun 2019 sebesar 78,48 dari total nilai maksimal 100 yang setara dengan 78,48% dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG yaitu BAIK. Dewan Komisaris berharap, seluruh pilar dan aspek GCG dapat terus diperkuat untuk memastikan tumbuh kembang Perseroan tidak hanya berdasarkan skala usaha tetapi juga menjadi perusahaan yang mengedepankan landasan etika, moral dan kepatuhan.

VIEW AND ROLE OF BOARD OF COMMISSIONERS RELATED TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE

In accordance with duties and responsibilities of the Board of Commissioners in performing supervision over performance of the Board of Directors as well as providing suggestion or advice and ensuring the Board of Directors has carried out their duties to manage the Company properly, in 2019, the Board of Commissioners has implemented work programs related to Audit, Nomination and Remuneration, Risk Management and Whistle Blowing System implementation in the Company.

The Board of Commissioners has proactively monitored and provided feedback to the Board of Directors. The oversight mechanism is carried out either directly through monitoring the follow-up actions on submitted recommendations, coordination in joint meetings with the Board of Directors or indirectly through the implementation of functions of the Committee under the Board of Commissioners. In 2019, the Board of Commissioners has conducted supervision and monitoring including on underwriting, investment, accounting and finance, organization and HR, GCG, risk management and internal control systems, vision, mission and work culture, information technology and other aspects including reinsurance, receivables, fixed assets and recoveries.

In addition to the supervision, the Board of Commissioners has also provided directions to the Board of Directors in 4 (four) aspects with details, as follows:

1. Underwriting : 14 directions
2. Investment : 14 directions
3. Finance and General : 14 directions
4. Controlling Activities : 14 directions

Based on the duty implementation throughout 2019, the Board of Commissioners views that the GCG practices, including implementation of Audit Committee and Whistle Blowing System duties have been running well in compliance with the law and regulation. The Board of Commissioners also appreciated the GCG assessment score achievement in 2019, which is 78.48 of total maximum score of 100 or equivalent to 78.48% with the classification of GCG implementation quality is GOOD. The Board of Commissioners expects that all of the GCG pillars and aspects of GCG will be continuously strengthened to ensure the Company's growth and development not only based on business scale but also towards a company that prioritizes ethical, moral and compliance foundations.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Berkaitan dengan komposisi Dewan Komisaris, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2019. Sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 10 September 2019, Perseroan mengangkat Bapak Firman Berahima sebagai Komisaris. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2019, sebagai berikut:

Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Budi Wisakseno
Komisaris	: Bambang Hermanto
Komisaris	: Firman Berahima

APRESIASI

Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung pencapaian kinerja Perseroan pada tahun 2019. Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan, termasuk Askrindo Grup dan Pemerintah atas dukungan mandat yang diberikan dalam melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja keras Direksi, jajaran Manajemen dan seluruh pegawai yang telah bekerja keras dengan ikhlas melewati setiap tantangan dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk tumbuh kembang Perseroan.

Kepada seluruh mitra bisnis, *Makful Lahu*, kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang baik selama tahun 2019. Semoga kerja sama yang telah terbangun dapat menjadi fondasi untuk kita melangkah bersama dan tumbuh berkelanjutan bersama di masa depan.

CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

In terms of Board of Commissioners composition, there is a change in Board of Commissioners composition in 2019. According to Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS) on September 10, 2019, the Company appointed Mr. Firman Berahima as Commissioner. Therefore, as of December 31, 2019, the Board of Commissioners composition is as follows:

President Commissioner/ Independent Commissioner	: Budi Wisakseno
Commissioner	: Bambang Hermanto
Commissioner	: Firman Berahima

APPRECIATION

As our closing remarks, the Board of Commissioners would express our utmost gratitude and appreciation to everyone for supporting the Company's performance in 2019. To our Shareholders, the Board of Commissioners would thank every trusts given, including to Askrindo Group and the Government for supports for their mandates to perform supervision over the Company's management. The Board of Commissioners would also express the highest appreciation for hard work of the Board of Directors, the Management and all employees for their work hard with sincerity to turned every challenge into opportunity for the Company's growth and development.

To all of our business partners, *Makful Lahu*, thank you for your trusts and harmonious cooperation throughout 2019. May this cooperation will place a foundation for us to move forwards and achieve sustainable growth in the future.

Jakarta, 30 Juni | June 30, 2020

Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners



Budi Wisakseno
Komisaris Utama | Komisaris Independen
President Commissioner | Independent Commissioner



Firman Berahima
Komisaris
Commissioner

Budi Wisakseno
Komisaris Utama | Komisaris Independen
President Commissioner | Independent Commissioner

Bambang Hermanto
Komisaris
Commissioner

Laporan Direksi
Report from Board of Directors



"Selain portofolio usaha, Perseroan juga terus memperkuat komitmen dan *trust* dalam kerja sama dengan seluruh mitra Perseroan untuk mewujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan Bersama Mitra."

"In addition to business portfolio, the Company also continuously strengthens our commitment and trust, and cooperations with all of the Company's partners to achieve Sustainable Growth with Partners."

Soegiharto

Direktur Utama
President Director

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,
Our Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Di tengah berbagai dinamika dan kondisi yang mempengaruhi perkembangan sektor usaha penjaminan syariah di Indonesia, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Perseroan") berhasil melalui tahun 2019 dengan baik dan membangun landasan menuju fase digitalisasi yang dicanangkan oleh Perseroan di tahun mendatang. Atas nama Direksi, perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan pengelolaan Perseroan untuk periode tahun buku 2019.

KONDISI UMUM DAN TANTANGAN TAHUN 2019

Secara umum, pertumbuhan ekonomi global dan nasional mengalami perlambatan pada tahun 2019. Dalam *World Economic Outlook* yang diterbitkan bulan Oktober 2019, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 mengalami penurunan dari 3,6% pada tahun 2018 menjadi 3,0% pada tahun 2019. Kondisi tersebut antara lain masih diwarnai oleh kelanjutan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta dinamika geopolitik di berbagai wilayah dunia yang berdampak pada negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di tingkat domestik, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tercatat sebesar 5,02% pada tahun 2019, cukup baik walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan 5,17% pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi sektor bangunan seiring pelaksanaan proyek infrastruktur strategis nasional. Di sisi lain, kinerja ekspor masih tertahan dan harga berbagai komoditas Indonesia di pasar internasional juga mengalami penurunan.

Amidst couple of dynamics and conditions that affect development of the sharia guarantee business sector in Indonesia, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (the "Company") successfully passed 2019 and built the foundation for digitalization phase that is planned to be launched by the Company in the next year. On behalf of the Directors, allow us to present the Company's management report for the fiscal year 2019 period.

GENERAL OVERVIEW AND CHALLENGES IN 2019

Global and national economic growth were generally slow down in 2019. Referring to World Economic Outlook published in October 2019, International Monetary Fund (IMF) projected that world economic growth in 2019 would fell from 3.6% in 2018 to 3.0% in 2019. These conditions were among others overshadowed by the prolong United States and China trade war as well as geopolitical dynamics in various regions across the world that affecting developing countries, including Indonesia.

At domestic level, the Central Statistics Agency (BPS) reported, overall, Indonesia's economic growth ,managed to achieve 5.02% in 2019, was considered fairly satisfying despite slightly lower than 5.17% in 2018. The economic growth in 2019 was supported by household consumption and investment for construction sector in line with implementation of national strategic infrastructure projects. Meanwhile, export performance was still restrained and prices of various Indonesian commodities also declined in the international market.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pengembangan industri jasa keuangan syariah nasional berhasil mencapai kemajuan yang cukup signifikan dalam 2 (dua) dekade terakhir, baik dari aspek kelembagaan, infrastruktur penunjang, regulasi dan sistem pengawasan serta *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Pada tahun 2019, aset perbankan syariah mencatat pertumbuhan sebesar 10,07% (YoY) dengan pangsa pasar sebesar 5,99% terhadap perbankan nasional. Secara spesifik untuk perusahaan penjaminan syariah, OJK mencatat total aset perusahaan penjaminan syariah sebesar Rp2,23 triliun per 31 Desember 2019 atau tumbuh 61,59% dibandingkan Rp1,38 triliun per akhir tahun 2018 dengan pertumbuhan imbal jasa penjaminan sebesar 35,38% dari Rp653 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp884 miliar pada tahun 2019.

TANTANGAN TAHUN 2019

Tahun 2019 secara keseluruhan merupakan tahun yang cukup baik bagi Perseroan, meskipun secara umum kondisi ekonomi mengalami perlambatan namun seluruh sektor usaha portofolio penjaminan Perseroan membukukan realisasi yang positif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Perseroan pada tahun 2019 adalah terkait faktor penguatan modal untuk memenuhi kriteria *gearing ratio* Perseroan agar tetap optimal dan mendukung kegiatan penjaminan yang dilakukan selama tahun 2019.

Di sisi lain, pangsa pasar usaha penjaminan syariah pada tahun 2019 masih seringkali beririsan dengan perusahaan atau penyedia jasa asuransi syariah. Di sisi lain, alokasi *Ujroh* untuk perusahaan reasuransi juga dinilai masih cukup besar pada tahun 2019. Di tengah kondisi tersebut, Perseroan menghadapi tantangan khususnya terkait ketentuan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk tetap kompetitif serta menstimulus sektor perbankan terhadap posisi perseroan sebagai salah satu lembaga penjaminan syariah.

STRATEGI PERSEROAN TAHUN 2019

Untuk menghadapi tantangan serta menjaga stabilitas kinerja Perseroan pada tahun 2019, Direksi telah menyusun langkah strategis meliputi seluruh lini usaha dan operasional Perseroan. Salah satu strategi utama yang diimplementasikan oleh Perseroan pada tahun 2019 adalah perubahan fokus dari sebelumnya *Conditional Automatic Cover* (CAC) menjadi *Case by Case* (CBC) dan mengoptimalkan lini usaha reasuransi. Pergeseran fokus strategi tersebut berhasil berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Perseroan selama tahun 2019, khususnya mulai terlihat sejak Semester II – 2019.

Untuk memperkuat portofolio usaha, Perseroan juga telah membentuk divisi baru pada tahun 2019 yaitu Divisi *Non Cash Financing*. Pembentukan Divisi *Non Cash Financing* di Perseroan merupakan langkah untuk mengoptimalkan kontribusi pendapatan margin *short-term* dengan portfiolio risiko yang relatif *acceptable*. Melalui Divisi *Non Cash Financing*, Perseroan dapat melakukan kegiatan penjaminan *Custom Bonds* pada tahun 2019 dan diharapkan dapat menunjukkan prospek pertumbuhan yang cukup baik terhadap pendapatan Perseroan di tahun mendatang.

The Financial Services Authority (OJK) noted that development of national Islamic financial services industry has achieved significant progress within the last 2 (two) decades, both in terms of institutional, supporting infrastructure, regulation and audit systems as well as public awareness and literacy in sharia financial services. In 2019, Sharia banking assets recorded a growth of 10.07% (YoY) with a market share of 5.99% of national banking sector. Specifically for the sharia guarantee company, OJK recorded total assets of the sharia guarantee company grewby 61.59% achieving Rp2.23 trillion as of December 31, 2019 compared to Rp1.38 trillion as end of 2018 with growth of the guarantee service yields of 35.38% from Rp653 billion in 2018 to Rp884 billion in 2019.

CHALLENGES IN 2019

Overall, 2019 was a satisfying year for the Company despite the economic conditions were generally slowing, all of the Company's guarantee portfolio business sector posted positive achievement. One of the main challenges faced by the Company in 2019 was related to capital strengthening factors to fulfil the Company's gearing ratio criteria in order to remain optimal and support the guarantee activities carried out throughout 2019.

On the other hand, market share of sharia guarantee business in 2019 still was often crossing with companies or sharia insurance service providers. On the other hand, allocation of *Ujroh* for reinsurance companies is also considered to remain significant in 2019. Amidst these conditions, the Company encountered several challenges, especially related to the provisions of Risk Weighted Assets (RWA) to remain competitive and to stimulate the banking sector to the company's position as one of the sharia guarantee institutions.

COMPANY 'S STRATEGY IN 2019

To solve these challenges and maintain the Company's performance stability in 2019, the Board of Directors has prepared strategic initiatives covering all business lines and operations of the Company. One of the key strategies implemented by the Company in 2019 is to shift our focus from Conditional Automatic Cover (CAC) to Case by Case (CBC) and optimize the reinsurance business line. The shifting in strategy focus has successfully contributed to the Company's performance achievement in 2019, specifically started to arise from the 2nd half of 2019.

To strengthen business portfolio, the Company has also established a new division in 2019, which is Non-Cash Financing Division. The establishment of Non Cash Financing Division in the Company becomes an initiative to optimize contribution from short-term margin revenue with a relatively acceptable risk portfolio. Through Non Cash Financing Division, the Company is eligible to provide Custom Bonds guarantee activities in 2019 and expected to demonstrate a positivr growth prospect for the Company's revenue in the upcoming year.

Selain portofolio usaha, Perseroan juga terus memperkuat komitmen dan *trust* dalam kerja sama dengan seluruh mitra Perseroan. Untuk mewujudkan **Pertumbuhan Berkelanjutan Bersama Mitra**, selama tahun 2019 Perseroan melanjutkan kerja sama dengan berbagai mitra, baik Mitra Perbankan maupun Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah, termasuk dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah. Didukung oleh kerja sama yang kuat, kontribusi dari kerja sama dengan perbankan syariah dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencapai kurang lebih 90% dari seluruh portofolio penjaminan Perseroan pada tahun 2019, dengan beberapa mitra utama selain PNM antara lain Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah (BRIS), NTB Syariah dan Bahana Artha Ventura (BAV). Beberapa porsi Perseroan dalam kerja sama strategis dengan mitra pada tahun 2019 antara lain dipercaya untuk melakukan penjaminan dana *Supply Chain Financing* (SCF) dan Pembiayaan Implan oleh BSM serta penjaminan penyaluran dana oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Realisasi tambahan setoran modal oleh Pemegang Saham pada akhir Desember 2019 juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat kinerja Perseroan pada tahun 2019. Melalui tambahan modal tersebut, Perseroan memiliki kemampuan untuk menyasar peluang bisnis lebih banyak lagi dan melakukan ekspansi produk. Dalam aspek operasional, Perseroan juga melakukan berbagai inisiatif terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan langkah digitalisasi yang tengah dipersiapkan oleh Perseroan. Pengembangan SDM pada tahun 2019 antara lain dilaksanakan melalui pelaksanaan *training* kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi, sedangkan dari sisi TI Perseroan berhasil melakukan penambahan *channel* sistem integrasi data penjaminan dengan mitra bisnis menggunakan teknologi *Host to Host*, implementasi *hyperconverged infrastructure* pada DRC, implementasi *back-up* jaringan di kantor cabang menggunakan teknologi SD-WAN. Melalui penguatan tersebut, Perseroan optimis akan berkontribusi nyata dalam memperkuat kinerja di masa depan.

PERBANDINGAN KINERJA DAN TARGET TAHUN 2019

Didukung oleh implementasi strategi secara efektif dan penuh kehati-hatian, Perseroan berhasil membukukan kinerja yang baik pada tahun 2019. Secara keseluruhan, Perseroan mencatat total penjaminan sebesar Rp10,09 triliun pada tahun 2019, menurun 3,25% dibandingkan Rp10,43 triliun pada tahun 2018. Dari segmen produktif, produk Penjaminan Mikro masih menjadi kontributor terbesar mencapai 66,56% dari total penjaminan di segmen produktif. Di sisi lain, untuk segmen konsumtif, Penjaminan Implan mencatat kontribusi sebesar 49,88% dengan nilai klaim sebesar 26,07%.

Melalui Divisi *Non Cash Financing*, Perseroan berhasil membukukan *Ujroh* sebesar Rp12,56 miliar dari target sebesar Rp20 miliar. Capaian ini dinilai cukup baik mengingat peluang pertumbuhan Divisi *Non Cash Financing* di tahun mendatang serta *lost ratio* yang relatif kecil dibandingkan target.

In addition to the business portfolio, the Company also continuously strengthens commitment and trust in cooperation with all of the Company's partners. To achieve **Sustainable Growth with Partners**, throughout 2019, the Company advanced cooperation with various partners, both Banking Partners and Sharia Non-Bank Financial Institutions, including with Baitul Maal wa Tamwil (BMT) and Sharia Cooperative. Supported by strong cooperation, contributions from cooperation with sharia banking and PT Permodalan Nasional Madani (PNM) achieving approximately 90% of the Company's entire guarantee portfolio in 2019, with several key partners in addition PNM are including Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah (BRIS), NTB Syariah and Bahana Artha Ventura (BAV). Some of the Company's portions in the strategic cooperation with partners during 2019 included the mandate to act as guarantor for Supply Chain Financing (SCF) proceeds and Implant Financing by BSM and guaranteeing fund disbursement by the Institute for Revolving Fund Management for Small and Medium Enterprises and Cooperatives (LPDB-KUMKM) .

Realization of additional paid-up capital by the Shareholders by end of December 2019 also became another factor that strengthened the Company's performance in 2019. The additional capital strengthened capacity of the Company to purse more business opportunities and expand our products. Operational wise, the Company also has implemented various initiatives related to HR capacity and capability as well as Information Technology development amidst the digitalization that is being prepared by the Company. In 2019, the HR development was carried out by providing training of employees to develop their competencies, meanwhile, in IT aspect, the Company has successfully added security data integration system channels with business partners using Host to Host technology, implementation of hyperconverged infrastructure in DRC, implementation of back- up the network at the branch office using SD-WAN technology. Through this enhancements, the Company is confident that these initiatives will contribute significantly in strengthening our future performance.

COMPARISON BETWEEN PERFORMANCE AND TARGET IN 2019

Supported by the implementation of effective and prudent strategies, the Company booked a positive performance in 2019. Overall, the Company recorded total guarantees achieving Rp10.09 trillion in 2019, decreased by 3.25% compared to Rp10.43 trillion in 2018. In productive segment, Micro Guarantee products still became the largest contributor with 66.56% share of total guarantees in productive segment. On the other hand, for the consumer segment, Implant Guarantees booked a 49.88% contribution with a claim value of 26.07%.

Through the Non-Cash Financing Division, the Company managed to book *Ujroh* amounted Rp12.56 billion from a target of Rp20 billion. This achievement is considered fairly satisfying considering growth opportunities of the Non Cash Financing Division in the upcoming years and a relatively small lost ratio compared to the target.

Secara komparatif dengan target, realisasi target kinerja Perseroan pada tahun 2019 secara umum mencapai atau mendekati target yang ditetapkan dengan capaian realisasi beban-beban di bawah target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Kafalah sebesar Rp216.973 juta pada tahun 2019 atau 88,515% dari target RKAP sebesar Rp245.125 juta.
2. Realisasi Beban Kafalah sebesar Rp94.022 juta pada tahun 2019 atau 80,36% dari target RKAP sebesar Rp117.004 juta.
3. Penerimaan *Ujroh* Kafalah sebesar Rp317.280 juta pada tahun 2019 atau 86,92% dari target RKAP sebesar Rp365.000 juta.
4. Pendapatan Investasi sebesar Rp20.028 pada tahun 2019 atau 93,09% dari target RKAP sebesar Rp21.515 juta.
5. Realisasi Beban Usaha sebesar Rp87.485 juta pada tahun 2019 atau 97,97% dari target RKAP sebesar Rp89.298 juta.
6. Laba Tahun Berjalan sebesar Rp36.562 juta pada tahun 2019 atau 91,13% dari target RKAP sebesar Rp40.122 juta.

Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019 telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini akuntan "Wajar Tanpa Modifikasi".

PROSPEK USAHA

Memasuki tahun 2020, Perseroan memandang prospek pertumbuhan di tahun depan dengan optimis. Di tengah berbagai tantangan terhadap sektor jasa keuangan syariah di tahun depan, didukung oleh pertumbuhan mitra, sinergi yang semakin kuat, ekspansi produk dan tambahan modal dari Pemegang Saham, Perseroan optimis dapat mencapai kinerja yang lebih baik di tahun 2020.

Untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan di tahun 2020, Direksi telah mempersiapkan strategi dan prospek usaha yang diharapkan dapat menjaga stabilitas kinerja Perseroan. Prospek usaha yang disusun oleh Direksi salah satunya mempertimbangkan pertumbuhan dan pergerakan mitra Perseroan yang mulai bergerak ke sektor komersial di mana sekitar 70% mitra Perseroan bergerak di sektor mikro pada tahun-tahun sebelumnya. Selain menjaga kualitas kerja sama dengan mitra eksisting, Perseroan juga telah mempersiapkan pengembangan bisnis ke daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berpotensi melakukan konversi menjadi Bank Syariah, antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu dan Kepulauan Riau.

Terkait dengan peta kompetisi yang semakin ketat di sektor jasa keuangan syariah, Perseroan juga terus berupaya untuk berkoordinasi dengan pihak regulator untuk memperoleh dukungan, baik dari sisi regulasi maupun peluang kerja sama strategis. Untuk tahun 2020, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan antara lain Penjaminan Umroh dengan Kementerian Agama serta beberapa kerja sama lainnya.

Comparatively with the target, realization of the Company's performance target in 2019 generally reached or approached the target set with the expenses achievement below the target, with details as follows:

1. Realization of Kafalah Income achieved Rp216,973 million in 2019 or 88.515% of the target RKAP of Rp245,125 million.
2. Realization of Kafalah Expenses achieved Rp94,022 million in 2019 or 80.36% of the target RKAP of Rp117,004 million.
3. Kafalah *Ujroh* revenues achieved Rp317,280 million in 2019 or 86.92% of the target RKAP of Rp365,000 million.
4. Investment income achieved Rp20,028 in 2019 or 93.09% of the target RKAP of Rp21,515 million.
5. Operating Expenses Realization achieved Rp87,485 million in 2019 or 97.97% of the target RKAP of Rp89,298 million.
6. Profit for the current year achieved Rp36,562 million in 2019 or 91.13% of the RKAP target of Rp40,122 million.

The Company's Financial Statements for 2019 had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners with "Unqualified" opinions.

BUSINESS PROSPECT

Approaching 2020, the Company views future growth prospects optimistically. In the midst of various challenges to the sharia financial services sector within the next year, supported by partner growth, stronger synergies, product expansion and additional capital from our shareholders, the Company is optimistic that we will record a better performance in 2020.

To optimize growth opportunities in 2020, the Board of Directors have prepared business strategies and prospects that are expected to maintain the Company's performance stability. One of the business prospects prepared by the Board of Directors is to consider growth and initiatives of the Company's partners who have begun to shift towards the commercial sector, where around 70% of the Company's partners have been engaged in the micro sector since previous years. In addition to maintaining quality of cooperation with existing partners, the Company has also prepared business development to several regions with Regional Development Banks (BPD) with a possibility to convert into Sharia Banks, including the Aceh, West Sumatra, Bengkulu and the Riau Islands Provinces.

Related to the fiercer competition landscape in the sharia financial services sector, the Company also strives to coordinate with regulators to gain support, both in terms of regulations and strategic cooperation opportunities. In 2020, the Company plans to cooperate with various government agencies including Umrah Guarantee with the Ministry of Religion and other collaborations.

Dalam rangka menyongsong digitalisasi, Perseroan juga telah membangun fondasi untuk mendukung transformasi digital di tahun 2020. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah melalui penguatan *core system* serta pengembangan *mobile apps* untuk *cash loan* dan penggunaan *e*-Polis. Melalui inisiatif digital tersebut, Perseroan terus mendorong efisiensi, transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini usaha dan operasional Perseroan.

PERKEMBANGAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai salah satu pelaku jasa keuangan syariah, Perseroan terus berkomitmen untuk memperkuat praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menjaga kepercayaan seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 54/SEOJK.05/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin dan peraturan terkait lainnya, Perseroan meyakini GCG merupakan menjadi elemen penting dalam membangun reputasi dan kredibilitas serta bisnis yang beretika.

Dalam praktik GCG, Perseroan menempatkan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) sebagai salah satu faktor penting untuk memastikan kegiatan usaha dan operasional yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Perseroan telah memiliki mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh Organ Perseroan dengan penanggung jawab pada Satuan Pengawasan Internal di bawah pengawasan langsung Direktur Utama.

Sebagai perwujudan dari komitmen terhadap GCG, Perseroan juga telah melaksanakan evaluasi GCG melalui asesmen sesuai kriteria dan indikator dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S-MBU/2012. Untuk periode tahun 2019, total nilai implementasi GCG yang diperoleh oleh Perusahaan adalah sebesar 78,48 dari total nilai maksimal 100 yang setara dengan 78,48% dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG yaitu BAIK. Ke depan, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas praktik GCG guna menghadirkan layanan penjaminan syariah terdepan dan terpercaya untuk seluruh mitra, nasabah dan juga masyarakat Indonesia.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Berkaitan dengan komposisi Direksi, kami laporkan tidak ada perubahan komposisi Direksi selama tahun 2019.

In order to approach the digitalization, the Company has also built a foundation to support digital transformation in 2020. An initiative that has been implemented is the core system strengthening and mobile apps development for cash loans and using e-Policy. Through these digital initiatives, the Company seeks to improve efficiency, transparency and accountability in all lines of business and operations within the Company.

PROGRESS OF CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE

As one of the sharia financial services providers, the Company is always be committed to strengthen Good Corporate Governance practices to maintain trust of all shareholders and stakeholders. Pursuant to the Financial Services Authority (SEOJK) Circular No. 54/SEOJK.05/2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for the Insurance Providers and other relevant regulations, the Company believes that GCG is an important element to build reputation and credibility and ethical business.

In GCG practice, the Company has adapted prudent principle as a key factor to ensure that the business and operational activities run by the Company are always comply with the regulatory framework. Therefore, the Company has established internal and external supervision mechanisms that is carried out continuously and involves all of the Company's Organs with Internal Audit Unit as the Person-In-Charge that is under direct supervision of the President Director.

As a manifestation of our GCG commitment, the Company has also carried out a GCG assessment based on criteria and indicators as stipulate din thee Secretary to the Minister of SOE Decree No. SK-16/S-MBU/2012. For the 2019 period, total the Company achieved total GCG assessment score is 78.48 of total maximum score of 100, which is equivalent to 78.48% with GCG quality predicate is GOOD. Going forward, the Company is committed to continuously improve quality of GCG practices in order to provide leading and trusted sharia guarantee services for all partners, customers and also the Indonesian people.

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In terms of the Board of Directors composition, we would report that there is no changes in the Board of Directors composition in 2019.

PENUTUP DAN APRESIASI

Akhir kata, mewakili segenap Manajemen, kami sampaikan terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung tercapainya kinerja Perseroan yang positif pada tahun 2019. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Pemegang Saham atas dukungan nyata dan mandat yang diberikan terhadap tumbuh kembang Perseroan hingga saat ini. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Komisaris atas setiap masukan dan pengawasan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan Perseroan selama tahun 2019.

Kami juga mengapresiasi kerja sama yang harmonis dengan seluruh mitra usaha serta kerja keras dan kerja ikhlas dari seluruh karyawan. Kami percaya, dukungan dan keikhlasan yang diberikan oleh seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan merupakan modal nyata untuk membawa Perseroan semakin baik lagi di tahun-tahun mendatang.

CLOSING AND APPRECIATION

Finally, on behalf of the Management, we would extend our utmost gratitude to everyone for supporting the Company's positive performance achievement in 2019. We would also thank our Shareholders for the tangible support and mandate to the Company's growth and development recently. We would also like to thank the Board of Commissioners for every suggestion and supervision to the Company's management throughout 2019.

We would also appreciate harmonious cooperation with all business partners as well as the hard and sincere works of all employees. We believe, these support and sincerity from all shareholders and stakeholders reflect a tangible strength capital to lead the Company even better in the upcoming year.

Jakarta, 30 Juni | June 30, 2020

Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Commissioners

Soegiharto
Direktur Utama
President Director



Subagio Istiarno
Direktur Keuangan
Director of Finance

Soegiharto
Direktur Utama
President Director

Supardi Najamuddin
Direktur Pemasaran
Director of Marketing

Dewan Komisaris dan Direksi

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Board of Commissioners and Board of Directors of
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah



Firman Berahima
Komisaris
Commissioner

Bambang Hermanto
Komisaris
Commissioner

Budi Wisakseno
Komisaris Utama | Komisaris Independen
President Commissioner | Independent Commissioner

Soegiharto
Direktur Utama
President Director

Supardi Najamuddin
Direktur Pemasaran
Director of Marketing

Subagio Istiarno
Direktur Keuangan
Director of Finance

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Statement of Responsibility from Board of Commissioners and Board of Directors on Annual Report 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 2019 Annual Report have been fully disclosed and being responsible upon accountability of this Annual Report's contents.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 30 Juni | June 30, 2020

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Budi Wisakseno
Komisaris Utama | Komisaris Independen
President Commissioner | Independent Commissioner

Bambang Hermanto
Komisaris
Commissioner

Firman Berahima
Komisaris
Commissioner

Direksi
Board of Directors



Soegiharto
Direktur Utama
President Director

Subagio Istiarno
Direktur Keuangan
Director of Finance

Supardi Najamuddin
Direktur Pemasaran
Director of Marketing

03

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



Identitas Perusahaan
Company Identity

Nama Perusahaan
Company Name
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Riwayat Perubahan Nama
Change of Company Name

- 29 November 2012 bernama PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah
- 14 Desember 2012 bernama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- November 29, 2012 with the name PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah
- December 14, 2012 with the name PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Tanggal Pendirian
Date of Establishment
29 November 2012
November 29, 2012

Tanggal Pendirian dan Tanggal efektif Perubahan Nama Perusahaan
Date of Establishment and Effective Date of Change of Company Name

- 29 November 2012 bernama PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah | November 29, 2012 with the name of PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah
- 14 Desember 2012 bernama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah | December 14, 2012 with the name of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Bidang Usaha
Line of Business
Penjaminan Pembiayaan Berbasis Syariah
Sharia-based Financing Guarantee

Kepemilikan Saham
Share Ownership

- PT Asuransi Kredit Indonesia: 99,99%;
- Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo: 0,01%.

Akta Pendirian Perusahaan
Company's Deed of Establishment
Akta No. 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-61610. AH.01.01 tanggal 3 Desember 2012.
Deed No. 45 on November 29, 2012 of Hadijah, S.H., notary in Jakarta. This deed of establishment was ratified by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-61610.AH.01.01 on December 3, 2012.

Akta Perubahan Terakhir
Last Deed Amendment
Akta No. 4 tanggal 08 Oktober 2019 oleh Hadijah, SH., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Komisaris.
Deed No. 4 on October 08, 2019 of Hadijah, S.H., notary in Jakarta, regarding the change of Board of Commissioners.

Modal Dasar
Authorized Capital
400.000 lembar saham atau Rp400.000.000.000
400,000 shares or Rp400,000,000,000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued Capital and Paid-up Capital
400.000 lembar saham atau
Rp400.000.000.000
400,000 shares or Rp400,000,000,000

Alamat lengkap
Office Address
Kantor Pusat | *Headquarter*
Gedung Primagraha Persada
Jalan Gedung Kesenian No. 3-7,
Jakarta Pusat 10710.
Phone : +62 21 351 7525
Contact Center : +62 21 350 8479

Situs Perseroan
Company's Website
www.askrindosyariah.co.id



Wilayah Operasional
Operational Areas



Kantor Pemasaran | Marketing office

Kantor Cabang | Branch office

No.	Kantor | Office	Alamat | Address
1	Kantor Cabang Jakarta 1 Jakarta 1 Branch Office	Gedung Primagraha Persada, Jl. Gedung Kesenian No. 3-7 Jakarta Pusat, 10710.
2	Kantor Cabang Jakarta 2 Jakarta 2 Branch Office	Ruko Perkantoran 7, Jl. Tebet Raya No. 9D Tebet Jakarta Selatan.
3	Kantor Cabang Bandung Bandung Branch Office	Jl. Maskumambang No. 29 Bandung.
4	Kantor Cabang Medan Medan Branch Office	Jl. Sei Belutu No. 93 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kec. Medan Selayang, 20131.
5	Kantor Cabang Palembang Palembang Branch Office	Jl. Basuki Rahmat No. 1607B, Simpang Polda, Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan, 30128.
6	Kantor Cabang Makassar Makassar Branch Office	Jl. Onta Lama No. 105D, Kel Mandala, Kec Mamajang, Makassar, 90135.
7	Kantor Cabang Semarang Semarang Branch Office	Komplek Rukan Pemuda Mas (DP Mall) Blok A Kav. B1 Jl. Pemuda No. 150, Semarang- Jawa Tengah, 50132.
8	Kantor Cabang Surabaya Surabaya Branch Office	Ruko Mega Galaxy Jl. Kertajaya Indah Timur Kav. 16C - 2, Surabaya, Jawa Timur.
9	Kantor Pemasaran Bekasi Bekasi Marketing Office	Ruko Bekasi Mas Blok C 14 Jl. Ahmad Yani Bekasi Selatan, Jawa Barat, 17141.
10	Kantor Pemasaran Tangerang | Tangerang Marketing Office	Ruko BSD Sektor VII Blok RK No. 10, Jl. Pahlawan Seribu Serpong, Tangerang, 15311.
11	Kantor Pemasaran Yogyakarta | Yogyakarta Marketing Office	Jl. Kebun Raya I, Ruko B, Kota Gede Yogyakarta, 55171.
12	Kantor Pemasaran Pontianak Pontianak Marketing Office	Jl. M. Sohor No. 29 E-F Pontianak, 78121.
13	Kantor Pemasaran Balikpapan Balikpapan Marketing Office	Jl Jenderal Sudirman No. 22A Balikpapan, Kalimantan Timur 76114.
14	Kantor Pemasaran Malang Malang Marketing Office	Jl. Mayjen Panjaitan No. 135 Kav. A Malang, Jawa Timur 65113.
15	Kantor Pemasaran Pekanbaru Pekanbaru Marketing Office	Jl.. Teuku Umar No. 18 A Pekanbaru, Riau 28282.
16	Kantor Pemasaran Padang Padang Marketing Office	Gedung Rangkiang Ventura Kav. 4, Jl. Khatib Sulaiman No. 9, Padang-Sumatera Barat 25173.
17	Kantor Pemasaran Mataram Mataram Marketing Office	Jl. Sriwijaya No. 318 D, Mataram-Nusa Tenggara Barat 83126.
18	Kantor Pemasaran Manado Manado Marketing Office	Jl. 17 Agustus No.45, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara.
19	Kantor Pemasaran Bandar Lampung | Bandar Lampung Marketing Office	Jl. M. Yamin No.32 GH, Rawalaut, Bandar Lampung 35127.
20	Kantor Pemasaran Bogor Bogor Marketing Office	Jl. Raya Pajajaran Ruko No. 68, Bogor-Jawa Barat.
21	Kantor Pemasaran Sukabumi Sukabumi Marketing Office	Jl. Sudirman No.81, Sukabumi-Jawa Barat.
22	Kantor Pemasaran Tasikmalaya | Tasikmalaya Marketing Office	Jl. Yudanegara No.28 Tasikmalaya-Jawa Barat.
23	Kantor Pemasaran Purwokerto | Purwokerto Marketing Office	Jl. Gatot Subroto No.16 C, Purwokerto-Jawa Tengah.
24	Kantor Pemasaran Surakarta Surakarta Marketing Office	Jl. Dr. Rajiman No.376 B, Surakarta-Jawa Tengah 57141.
25	Kantor Pemasaran Jambi Jambi Marketing Office	Jl. A.R. Hakim No.5-6, Telanai Pura-Jambi.
26	Kantor Pemasaran Banda Aceh | Banda Aceh Marketing Office	Perkantoran Aceh Square, Jl. Teuku Imeum Lueng Bata, Aceh.
27	Kantor Pemasaran Batam Batam Marketing Office	Komp. Graha Kadin Blok F No.1, Jl. Engku Puri Batam Centre, 29453.
28	Kantor Pemasaran Jakarta Selatan | South Jakarta Marketing Office	Komp. Wijaya Grand Center Blok A No.6, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
29	Kantor Pemasaran Banjarmasin | Banjarmasin Marketing Office	Jl. Achmad Yani KM. 6,9 No.2, Banjarmasin 70249.
30	Kantor Pemasaran Samarinda | Samarinda Marketing Office	Jl. M.T. Haryono No.93 G, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124.

Sekilas Askrindo Syariah

Askrindo Syariah at a Glance

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Askrindo Syariah/ Perseroan") merupakan perusahaan penjaminan syariah pertama Indonesia yang didirikan pada akhir tahun 2012 dengan pemegang saham mayoritas adalah PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo, yaitu salah satu Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi kredit sejak tahun 1971.

Pembentukan Askrindo Syariah merupakan respon dari Askrindo atas perkembangan dunia perkreditan/ pembiayaan yang menuntut adanya Lembaga penjaminan pembiayaan berbasis syariah.

Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri pembiayaan, baik Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank Syariah pembentukan Askrindo Syariah merupakan pengejawantahan dari rencana jangka panjang Askrindo sebagai upaya optimalisasi modal dan memperbesar sumbangsihnya dalam industri penjaminan secara nasional.

Terkait dengan hal itu, maka salah satu pedoman utama dalam pengembangan usahanya Askrindo Syariah adalah berorientasi kepada pengembangan jejaring usaha Askrindo secara keseluruhan, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Askrindo Syariah/the Company") is the first sharia guarantee company in Indonesia established in 2012 with the majority shareholder is PT Asuransi Kredit Indonesia or Askrindo, a state-owned enterprise engaged in credit insurance since 1971.

The establishment of Askrindo Syariah was a response from Askrindo towards the development of credit/ financing sector, which demanded a sharia-based financing guarantee institution.

Along with the rapid growth of the financing industry, both Sharia Banking and Non-Banking Financial Institutions, establishment of Askrindo Syariah also manifests Askrindo's long-term plan as an initiative to optimize capital and increase contributions in the national guarantee industry.

Related to this purpose, one of the main guidelines applied in Askrindo Syariah's business development is oriented towards overall business network development, both in operational and non-operational aspects.



Jejak Langkah
Milestones

2012

- Perseroan didirikan dengan nama PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah pada 29 November 2012.
- Perseroan mengubah nama menjadi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah pada 14 Desember 2012.
- The Company was established with the name PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah on November 29, 2012.
- The Company had its name changed into PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah on December 14, 2012.



2013

Pembukaan kantor pemasaran 6 (enam) kota yakni Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Banjarmasin.

The Company inaugurated marketing offices in 6 (six) cities such as Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang and Banjarmasin.

2014

Perseroan memperluas jaringan usaha dengan membuka kantor pemasaran pada tahun 2014 di 8 (delapan) kota yakni Pontianak, Makassar, Denpasar, Malang, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Palembang.

In 2014, the Company expanded its business network by opening marketing offices in 8 (eight) cities, such as Pontianak, Makassar, Denpasar, Malang, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Palembang.

2015

- Penambahan modal disetor dari Pemegang Saham.
- Membuka 1 kantor pemasaran di Padang, Sumatera Barat.
- Additional Paid-in Capital from Shareholders.
- Opening 1 marketing office in Padang (West Sumatra).



2016

Perseroan ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai salah satu perusahaan penjamin KUR Syariah.

The Company was appointed as one of the guarantee companies for Sharia Micro Loans (KUR) by the Coordinating Ministry of Economic Affairs.

2017

Senantiasa berperan di tengah tantangan bisnis.

Always Taking a Role in the Midst of Business Challenges.

2018

Meresmikan 5 (lima) Kantor Pemasaran menjadi Kantor Cabang di Medan, Palembang, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Inaugurated 5 (five) Marketing Offices to become Branch Offices in Medan, Palembang, Semarang, Surabaya and Makassar.



2019

- Peresmian Teras Mitra di KPM Tangerang, KPM Bekasi, KPM Yogyakarta, KC Semarang, dan KC Palembang.
- Perseroan mendapatkan sertifikat pemeringkatan dari Pefindo (*Credit Rating Industry*) dengan peringkat idA+ (*Single A plus; Stable Outlook*).
- Penambahan Modal Disetor Perseroan sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) sehingga total Modal Disetor Perseroan menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah).
- Inauguration of Teras Mitra in KPM Tangerang, KPM Bekasi, KPM Yogyakarta, KC Semarang, and KC Palembang.
- The Company earned a rating certificate from Pefindo (Credit Rating Industry) with idA + rating (Single A plus; Stable Outlook).
- Additional Paid Up Capital of Rp150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah) resulted Total Paid in Capital amounted Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah).

Kegiatan Usaha
Business Activities

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha di bidang penjaminan dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Sebagai perusahaan penjaminan yang usaha pokoknya melakukan penjaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; dan
b. Melakukan usaha-usaha lain yang masih memiliki keterkaitan dengan usaha kafalah (penjaminan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Based on the last amendment to the Company's Articles of Association, the Company's purposes and objectives are to apply and support government policies and programs in economic and national development sector in general, particularly business in Financing Guarantee sector that is based on sharia principles, as well as to optimize the utilization of the Company's resources to generate high quality and highly competitive services in order to increase the Company's value by applying good corporate governance principle.

In order to achieve the above purposes and objectives, the Company performs the main business activities as follows:

a. As a financing guarantee company with the main business of providing financing guarantee with sharia principles; and
b. Carrying out other businesses that still have linkages with the kafalah business (guarantee) based on the applicable requirements.



Produk dan Jasa
Products and Services

Dalam menjalankan bisnis sebagai lembaga penjaminan berbasis syariah, Askrindo Syariah mempunyai beberapa produk penjaminan antara lain:

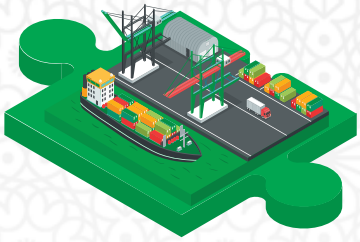
In conducting business as a sharia-based guarantee institution, Askrindo Syariah has several guarantee products including:



Kafalah Pembiayaan (Produktif dan Konsumtif)
Kafalah Financing (Productive and Consumptive)



Kafalah *Suretyship* (*Surety Bond* dan Bank Garansi)
Kafalah Suretyship (Surety Bond and Bank Guarantee)



Kafalah Transaksi Perdagangan (Domestik dan Internasional)
Kafalah Trading Transactions (Domestic and International)

1. **Kafalah Pembiayaan (Produktif dan Konsumtif)**
   Jasa Penjaminan Pembiayaan yang diberikan oleh Askrindo Syariah (*Kafil*) bagi pengusaha (*Makful Anhu*) dalam upaya memperoleh pembiayaan produktif maupun konsumtif dari Bank Syariah ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah (*Makful Lahu*).

2. **Kafalah *Suretyship* (*Surety Bond* dan Bank Garansi)**
   Surety Bond dan Bank Garansi adalah produk *Suretyship* berbasis syariah yang memberikan jaminan kepada kontraktor atau Bank Penerbit Bank Garansi/Penerima Jaminan/*Makful Lahu* atas kemampuan *Principal* / Terjamin/*Makful Anhu* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *Principal*/Terjamin dan *Obligee*.

3. **Kafalah Transaksi Perdagangan (Domestik dan Internasional)**
   Kafalah Transaksi Perdagangan oleh *Kafil* dimana *Makful Lahu* memberikan jaminan kepada *Makful Anhu* terhadap kemungkinan gagalnya pembayaran sejumlah piutang oleh *Makful Anhu* kepada *Makful Lahu*.

1. **Kafalah Financing (Productive and Consumptive)**
   A Financing Guarantee Services provided by Askrindo Syariah (*Kafil*) for entrepreneurs (*Makful Anhu*) with regards to attempt in obtaining productive and consumer financing from Sharia Banks or Non-Bank Sharia Financial Institutions (*Makful Lahu*).

2. **Kafalah Suretyship (Surety Bond and Guarantee Bank)**
   Surety Bond and Bank Guarantee are sharia-based Suretyship product that provides guarantee to Contractor or The Bank Issuing Bank Guarantee/ Obligee/*Makful Lahu* regarding the capability of Principal/*Makful Anhu* in fulfilling their obligations based on main agreement between the Principal and Obligee.

3. **Kafalah Trading Transactions (Domestic and International)**
   Kafalah Trading Transaction by *Kafil* where the *Makful Lahu* provides assurance to the *Makful Anhu* concerning any possibility of receivables default by *Makful anhu* to *Makful Lahu*.

Visi, Misi & Budaya Perusahaan
Vision, Mission & Corporate Values

VISI Vision

Menjadi perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global.
Becoming a prominent sharia-based financing guarantee company to support national economic development and play a role in the global market.

MISI Mission

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah nasional.
Contribute to national sharia economy development.

2. Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah.
Provides easy access to all stakeholders of sharia-based financing business.

3. Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait.
Provides financing guarantee services by prioritizing prudential principle as to provide financial protection to all related parties.

4. Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai Perusahaan.
Improving services and product innovation continuously to enhance company values.

5. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan integritas.
Implementing good corporate governance that upholds professionalism and integrity principles.

Budaya Perusahaan | Corporate Culture

Amanah (Reliability)
Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang hakiki dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan berperilaku secara terpuji.
Upholding true honesty in fulfilling work responsibilities and acting truthfully.

Profesional (Professionalism)
Kompeten dan unggul di bidangnya, berdedikasi tinggi, kreatif, disiplin, berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
Having competence and excellence in its field, high dedication, creativity, discipline, positive thoughts and upholding ethics and integrity of profession.

Inovasi (Innovation)
Berupaya secara maksimal dan selalu melakukan terobosan dalam pelayanan.
The Company endeavors to always be the pioneer in providing services.

Visi, Misi dan Budaya berikut telah dibahas, dikaji, ditinjau kembali serta disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
The following Vision, Mission & Corporate Culture has been discussed, analyzed, reviewed, and approved by both Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Makna Logo Perseroan
Meaning of the Company Logo

MAKNA LOGO
Warna Logo Perseroan terdiri dari warna biru dan hijau yang memiliki arti sebagai berikut:

Warna Biru Tua, Menyimbolkan Askrindo Syariah sebagai Perusahaan Penjaminan yang solid.

Dark blue Color, Symbolizing Askrindo Syariah as a solid Guarantee Company.

Warna Hijau Daun, Menyimbolkan kesucian, kenikmatan, kesenangan dan ketenangan.

Leaf Green Color, Symbolizing purity, pleasure, happiness, and tranquility.

Dengan **bentuk logo** yang diamanatkan oleh Induk Perusahaan Askrindo, Askrindo Syariah diharapkan menjadi perusahaan penjaminan pembiayaan yang nomor satu, kokoh, modern, dan inovatif dalam memberikan layanan kepada mitra bisnis di seluruh Indonesia.

With the **form of logo** as mandated by the Askrindo as the Parent Company, Askrindo Syariah is expected to be a financing guarantee company that is leading, strong, modern, and innovative in delivering services to business partners throughout Indonesia.

Lambang Alpha-Kappa dengan warna biru dan hijau merupakan identitas Askrindo Syariah sebagai anak perusahaan PT Askrindo.

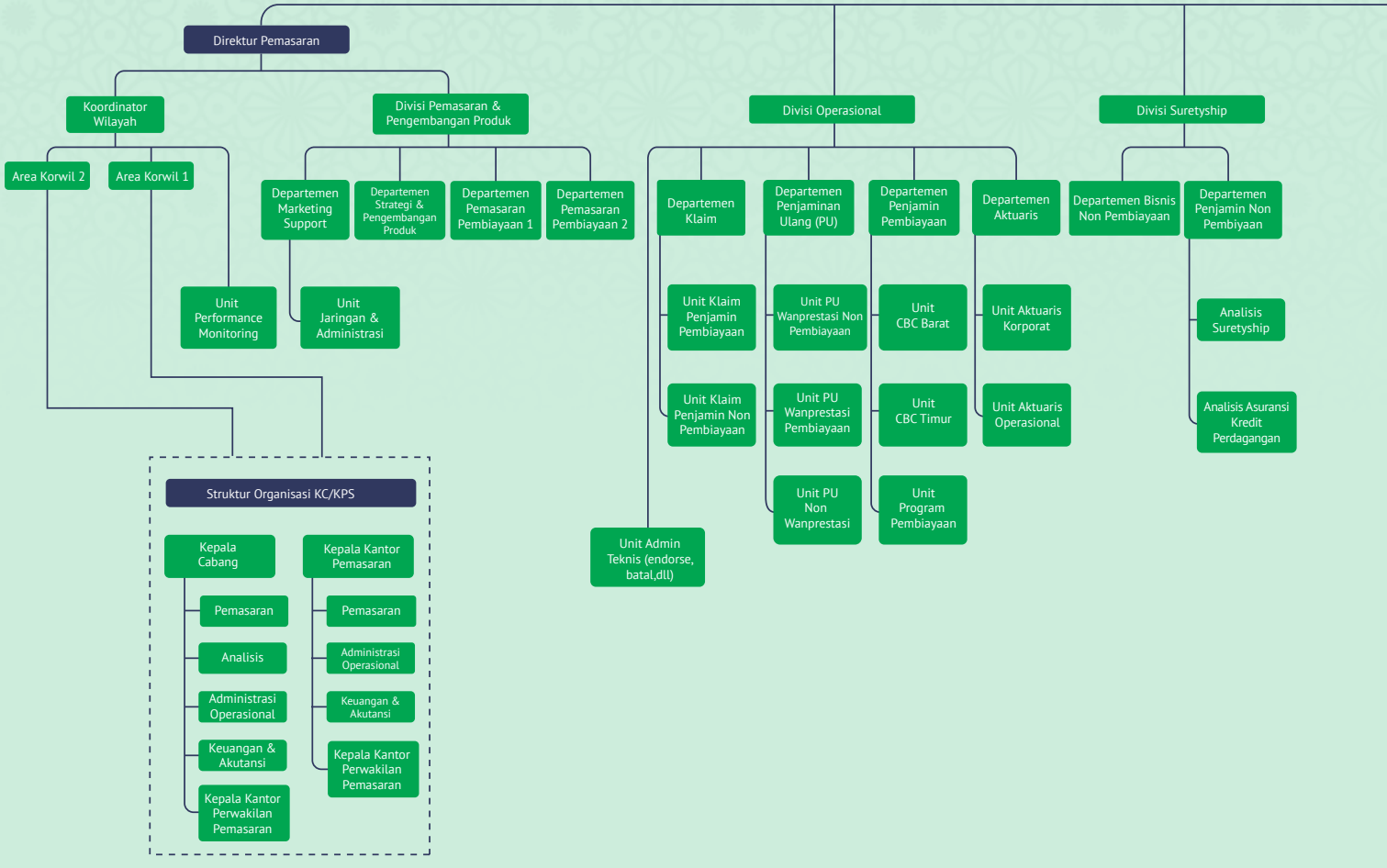
The symbol of Alpha-Kappa with the blue and green colors is an identity of Askrindo Syariah as a subsidiary of PT Askrindo.

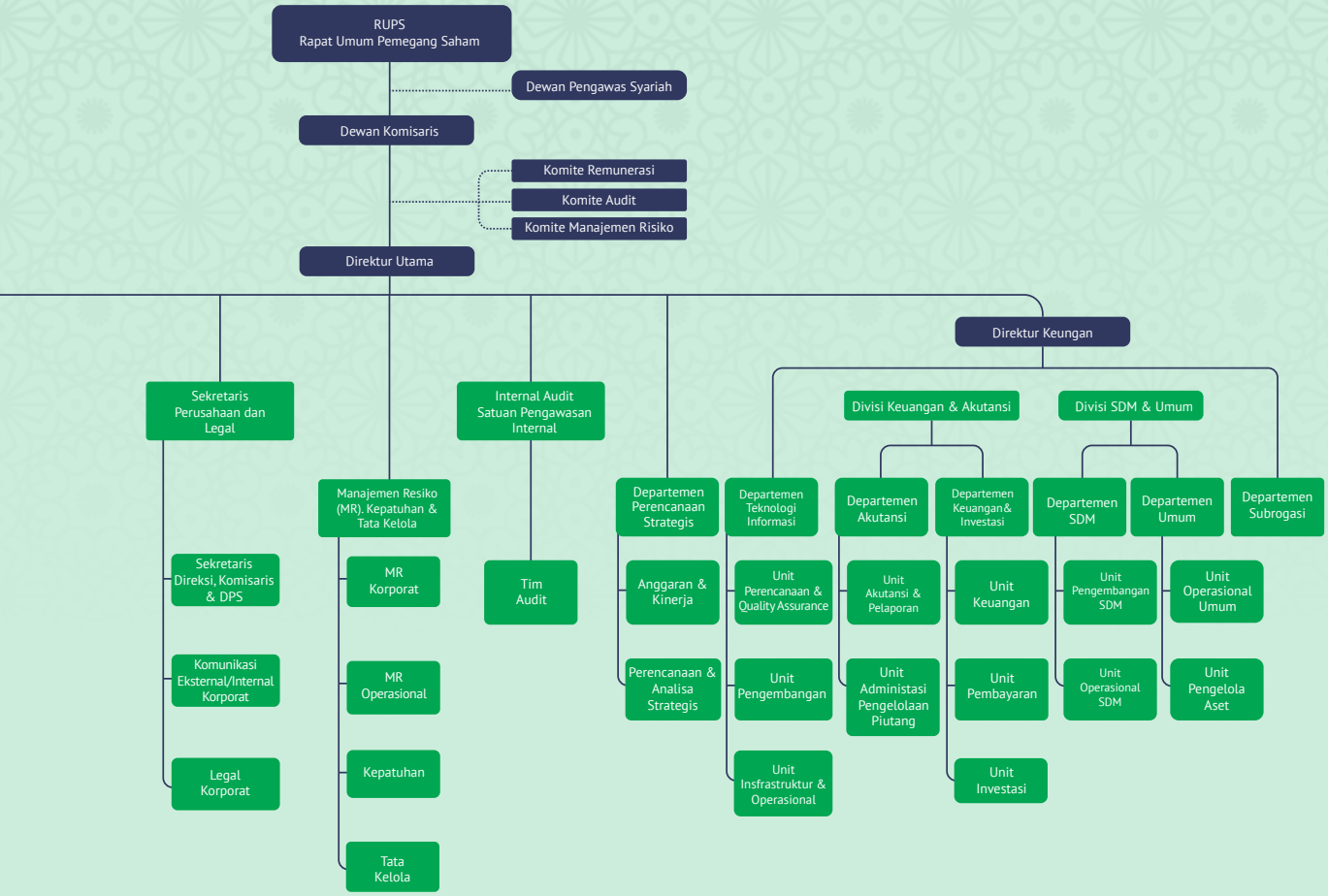
LOGO MEANING
The company's logo has two colors, blue and green, which have the meaning as follows:

Struktur Organisasi
Organization Structure

Dalam rangka perbaikan dan perubahan organisasi, Perseroan telah memperbarui struktur organisasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah No.213/KEP-DIR/SDM/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Struktur Organisasi 2019 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

In order to improve and transform the organization, the Company has updated the organization structure according to PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Board of Directors Decree No. 213/KEP-DIR/SDM/XI/2019 on November 26, 2019 concerning PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Organization Structure 2019.




RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham
Dewan Pengawas Syariah
Dewan Komisaris
Komite Remunerasi
Komite Audit
Komite Manajemen Risiko
Direktur Utama
Direktur Keungan
Sekretaris Perusahaan dan Legal
Internal Audit Satuan Pengawasan Internal
Manajemen Resiko (MR), Kepatuhan & Tata Kelola
Divisi Keuangan & Akutansi
Divisi SDM & Umum
Departemen Perencanaan Strategis
Departemen Teknologi Informasi
Departemen Akutansi
Departemen Keuangan& Investasi
Departemen SDM
Departemen Umum
Departemen Subrogasi
Sekretaris Direksi, Komisaris & DPS
Komunikasi Eksternal/Internal Korporat
Legal Korporat
MR Korporat
MR Operasional
Kepatuhan
Tata Kelola
Tim Audit
Anggaran & Kinerja
Perencanaan & Analisa Strategis
Unit Perencanaan & Quality Assurance
Unit Pengembangan
Unit Insfrastruktur & Operasional
Unit Akutansi & Pelaporan
Unit Administasi Pengelolaan Piutang
Unit Keuangan
Unit Pembayaran
Unit Investasi
Unit Pengembangan SDM
Unit Operasional SDM
Unit Operasional Umum
Unit Pengelola Aset

Profil Dewan Komisaris
Profile of Board of Commissioners



Budi Wisakseno

Jabatan | Position:
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Supervisory Independent Commissioner

Periode | Period:
2017-2022

Data Pribadi | Personal Data:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia. Usia 65 tahun. Kelahiran Jakarta 18 Juni 1954.
Indonesian Citizen, lives in Jakarta, Indonesia. Age 65 years old. Born in Jakarta on June 18, 1954.

Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-83/MBU/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 dan Keputusan RUPSLB tanggal 17 Mei 2016.

Appointment Basis
Appointed as President Commissioner/ Independent Commissioner according to Minister of State-Owned Enterprise Letter No. S-83/MBU/01/2016 on January 25, 2016 and EGMS Resolutions on May 17, 2016.

Pendidikan
- (S1) Ekonomi, Universitas Trisakti Jakarta (1980).

Education
- Bachelor's Degree Economics, Universitas Trisakti Jakarta (1980).

Keahlian
- Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- Pembiayaan Perdagangan

Expertise
- Risk Management and Compliance
- Trade Finance

Riwayat Profesi
- PT Bank BRI Syariah sebagai Direktur Kepatuhan (2008-2014);
- PT Bank Syariah Mega sebagai Direktur Kepatuhan (2007- 2008);
- PT Bank Tugu sebagai Direktur Utama (2003-2007);
- PT Bank Muamalat Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan, Direktur Operasi, Direktur *Finance*, *General Manager* Operasi dan *General Manager* SDM (1995-2002);
- Rabobank Jakarta sebagai *Operation Manager* (1993-1994);
- PT Bank Danamon Jakarta sebagai *Deputy General Manager Trade Finance & Correspondent Banking Division* (1992-1994);
- PT Bank Universal Jakarta sebagai Kepala Divisi Ekspor Impor dan Devisa (1989-1992);
- CITIBANK Jakarta sebagai Staf Clerical Operasional (1979-1981).

Professional History
- PT Bank BRI Syariah as Compliance Director (2008-2014);
- PT Bank Syariah Mega as Compliance Director (2007- 2008);
- PT Bank Tugu as President Director (2003- 2007);
- PT Bank Muamalat Indonesia as Compliance Director, Finance Director, General Manager of Operational, and General Manager of Human Resources (1995-2002);
- Rabobank Jakarta as Operation Manager (1993-1994);
- PT Bank Danamon Jakarta as Deputy General Manager trade Finance & Correspondent Banking Division (1992-1994);
- PT Bank Universal Jakarta as Head of Export and Import and Foreign Exchange Division (1989-1992);
- CITIBANK Jakarta as Operational Clerical staff (1979-1981).

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain
Per 31 Desember 2019, Budi Wisakseno tidak menjabat posisi lain di grup maupun perusahaan/instansi lain.

Concurrent Position in Group/Other Institutions
As of December 31, 2019, Budi Wisakseno has not served in any other position in the group or other companies/institutions.



Bambang Hermanto

Jabatan | Position:
Komisaris | Commissioner

Periode | Period:
2018-2023

Data Pribadi | Personal Data:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia. Usia 64 tahun. Kelahiran Surabaya, 23 Desember 1955.
Indonesian Citizen, lives in Jakarta, Indonesia. Age 64 years old. Born in Surabaya on December 23, 1955.

Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SR-267/MBU/04/2018 tanggal 23 April 2018 dan Keputusan RUPSLB tanggal 16 Mei 2018.

Appointment Basis
Appointed as Commissioner according to Minister of State-Owned Enterprise Letter No. SR-267/MBU/04/2018 on April 23, 2018 and EGMS Resolutions on May 16, 2018.

Pendidikan
- Ajun Akuntan, PAAP Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya (1979);
- Ajun Akuntan/Sarjana Muda Akuntansi, Sekolah tinggi Akuntansi Negara (1980);
- (S1) Akuntansi STIESIA Surabaya (1989);
- Profesi Akuntan Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi, Universitas Airlangga Surabaya (1999).

Education
- Junior Accountant, PAAP Faculty of Economy, Universitas Airlangga Surabaya (1979);
- Junior Accountant/Associate Degree of Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980);
- (S1) STIESIA Surabaya (1989);
- Accountant Profession at the Directorate General of High Education, Universitas Airlangga Surabaya (1999).

Keahlian
- Akuntan
- Pemeriksaan Khusus

Expertise
- Accountant
- Special Audit

Riwayat Profesi
- PT Asuransi Kredit Indonesia sebagai Komite Audit (2012-2017);
- PT Reasuransi Nasional sebagai Komite Audit (2012-2013);
- BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor Ahli Madya (2008-2011);
- Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Pusat sebagai Kepala Sub-Bagian Tata Usaha (2006-2008);
- BPKP Perwakilan Provinsi DKI II sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan (2002-2006);
- BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Kepala Seksi Pengawasan Penerimaan Pusat (2000-2002);
- BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai Ketua tim Pemeriksaan (1986-1999);
- Kantor Pengawasan Anggaran Banjarmasin/ BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Anggota Tim (1981-1986).

Professional History
- PT Asuransi Kredit Indonesia as Audit Committee (2012-2017);
- PT Reasuransi Nasional as Audit Committee (2012-2013);
- BPKP Representative of East Java Province as Associate Expert Auditor (2008-2011);
- Central BPKP Auditor Functional Development Center as Head of Administration Sub-Division (2006-2008);
- BPKP DKI Province II Representative as Head of Program and Report Sub-Division (2002-2006);
- BPKP West Kalimantan Province Representative as Head of Central Reception Audit Section (2000-2002);
- BPKP Representative of East Java Province as Chief of Audit Team (1986-1999);
- Banjarmasin Budget Supervision Office / BPKP Kalimantan Province Representative (1981-1986).

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain
Per 31 Desember 2019, Bambang Hermanto tidak menjabat posisi lain di grup maupun perusahaan/instansi lain.

Concurrent Position in Group/Other Institutions
As of December 31, 2019, Bambang Hermanto has not served in any other position in the group and other companies/institutions.



Firman Berahima

Jabatan | Position:
Komisaris | Commissioner

Periode | Period:
2019-2024

Data Pribadi | Personal Data:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia. Usia 46 tahun. Kelahiran Bonepute Luwu, 26 September 1973.
Indonesian Citizen, lives in Jakarta, Indonesia. Age 46 years old. Born in Bonepute Luwu on September 26, 1973.

Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SR-560/MBU/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan Keputusan RUPSLB tanggal 10 September 2019.

Pendidikan
- (S1) Manajemen Pemasaran Universitas Hasanuddin Makassar (1997).

Keahlian
Teknik Analisa Penjaminan dan Asuransi Kredit

Riwayat Profesi
PT Askrindo sebagai:
- Direktur Kepatuhan dan SDM (2016-2020);
- Kepala Kantor Cabang Jakarta Kemayoran (Kelas I) dan Koordinator Wilayah Jakarta I (2015 – 2016);
- Kepala Kantor Cabang Semarang (Kelas I) (2013 – 2015);
- Kepala Kantor Cabang Semarang (Kelas II) (2010 – 2013);
- Kepala Kantor Cabang Banjarmasin (2008 – 2010);
- Kepala Kantor Perwakilan Gorontalo (2007 – 2008);
- Kepala Bidang Pemasaran dan Pertanggungan Cabang Utama Cikini, Jakarta (2005 – 2007);
- Kepala Kantor Pemasaran Samarinda (2004 – 2005);
- Kantor Pemasaran Cabang Manado (2000 – 2003);
- Pegawai Pelaksana Cabang Makassar (1997).

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain
Per 31 Desember 2019, Firman Berahima menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM di PT Askrindo.

Appointment Basis
Appointed as Commissioner according to Minister of State-Owned Enterprise Letter No. SR-560/MBU/04/2019 on August 27, 2019 and EGMS Resolutions on September 10, 2019

Education
- Bachelor's Degree Marketing Management Universitas Hasanuddin Makassar (1997).

Expertise
Guarantee and Credit Insurance Analysis Method.

Professional History
PT Askrindo as:
- Compliance and HR Director (2016 - 2020);
- Head of Jakarta Kemayoran Branch (Class I) and Coordinator of Jakarta I Area (2015 – 2016);
- Head of Semarang Branch Office (Class I) (2013 – 2015);
- Head of Semarang Branch Office (Class II) (2010 – 2013);
- Head of Banjarmasin Branch Office (2008 – 2010);
- Head of Gorontalo Representative Office (2007 – 2008);
- Head of Marketing and Insurance Division Cikini Main Branch, Jakarta (2005 – 2007);
- Head of Samarinda Marketing Office (2004 – 2005);
- Marketing Office Manado Branch (2000 – 2003);
- Staff in Makassar Branch (1997).

Concurrent Position in Group/Other Institutions
As of December 31, 2019, Firman Berahima is appointed as Compliance and HR Director at PT Askrindo.

Profil Direksi
Profile of Board of Directors



Soegiharto

Jabatan | Position:
Direktur Utama | President Director

Periode | Period:
2018-2023

Data Pribadi | Personal Data:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia. Usia 53 tahun. Kelahiran Jakarta, 19 Oktober 1966.
Indonesian Citizen, lives in Jakarta, Indonesia. Age 53 years old. Born in Jakarta on October 19, 1966.

Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SR-586/MBU/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 dan Keputusan RUPSLB tanggal 22 Januari 2018.

Pendidikan
- (S2) Magister Manajemen (Keuangan), STM PPM Jakarta (2002);
- (S1) Administrasi dan Keuangan, Universitas Pancasila (1991).

Keahlian
Pemasaran Produk

Riwayat Profesi
- Kepala Cabang Jakarta Kemayoran PT Askrindo (2016-2017);
- Kepala Divisi PT Askrindo (2015-2016);
- Kepala Cabang merangkap Korwil DKI Jakarta II PT Askrindo (2014-2015);
- Kepala Cabang Jakarta Cikini (Kelas 1) PT Askrindo (2011-2014).

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain
Per 31 Desember 2019, Soegiharto tidak menjabat posisi lain di grup maupun perusahaan/instansi lain.

Appointment Basis
Appointed as President Director according to Minister of State-Owned Enterprise Letter No. SR-586/MBU/10/2017 on October 5, 2017 and EGMS Resolutions on January 22, 2018.

Education
- Master's Degree Master of Management (Finance), STM PPM Jakarta (2002);
- Bachelor's Degree Administration and Finance, Universitas Pancasila (1991).

Expertise
Product Marketing

Professional History
- Head of Jakarta Kemayoran Branch Office PT Askrindo (2016-2017);
- Division Head PT Askrindo (2015-2016);
- Branch Manager with concurrent service as Area Coordinator of DKI Jakarta II PT Askrindo (2014-2015);
- Branch Manager of Jakarta Cikini (Class 1) PT Askrindo (2011-2014).

Concurrent Position in Group/Other Institutions
As of December 31, 2019, Soegiharto has not served in any other position in the group and other companies/institutions.



Subagio Istiarno

Jabatan | Position:
Direktur Keuangan | Director of Finance

Periode | Period:
2017-2022

Data Pribadi | Personal Data:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia. Usia 57 tahun. Kelahiran Solo, 4 November 1962.
Indonesian Citizen, lives in Jakarta, Indonesia. Age 57 years old. Born in Solo on November 4, 1962.

Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SR-586/MBU/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 dan Keputusan RUPSLB tanggal 19 Oktober 2017.

Pendidikan
- Program Profesi Akuntan (PPAk) Universitas Indonesia (2003);
- (S2) Magister Manajemen, STIE IPWI Jakarta (2001);
- (S1) Sarjana Akuntansi, STIE Swadaya Jakarta (1993);
- (D3) Akuntansi, STAN Jakarta (1984).

Keahlian
- Akuntansi & Keuangan
- Auditing

Riwayat Profesi
- PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala SPI (2012- 2017);
- PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Divisi SDM dan Umum (2010-2012);
- PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (2004-2010);
- PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Bagian Akuntansi/ Administrasi Keuangan (1996-2004);
- Bertugas di BPKP pada Deputi Pengawasan BUMN di Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan-Subditwas Asuransi dan LKBN (1996);
- Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor (1984-1996).

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain
Per 31 Desember 2019, Subagio Istiarno tidak menjabat posisi lain di grup maupun perusahaan/instansi lain.

Appointment Basis
Appointed as Director of Finance according to Minister of State-Owned Enterprise Decree No. SR-586/MBU/10/2017 on October 5, 2017 and EGMS Resolutions on October 19, 2017.

Education
- Accountant Profession Program (PPAk) Universitas Indonesia (2003);
- Master's Degree Master of Management, STIE IPWI Jakarta (2001);
- Bachelor's Degree Bachelor of Accounting, STIE Swadaya Jakarta (1993);
- Diploma 3 Accounting, STAN Jakarta (1984).

Expertise
- Accounting & Finance
- Auditing

Professional History
- PT Reasuransi Nasional Indonesia as Head of SPI (2012-2017);
- PT Reasuransi Nasional Indonesia as Head of Human Resources and General Affairs Division (2010-2012);
- PT Reasuransi Nasional Indonesia as Head of Finance and Accounting Division (2004-2010);
- PT Reasuransi Nasional Indonesia as Head of Accounting/Finance Administration Unit (1996- 2004);
- Assigned in BPKP at the State-Owned Enterprise Supervisory Deputy in Directorate of Financial Institution Supervision – Subdirectorate of Insurance and LKBN (1996);
- BPKP South Sulawesi Province Representative as Auditor (1984-1996).

Concurrent Position in Group/Other Institutions
As of December 31, 2019, Subagio Istiarno has not served in any other position in the group and other companies/institutions.



Supardi Najamuddin

Jabatan | Position:
Direktur Pemasaran | Director of Marketing

Periode | Period:
2019-2024

Data Pribadi | Personal Data:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia. Usia 49 tahun. Kelahiran Bulukumba, 4 Oktober 1970.
Indonesian Citizen, lives in Jakarta, Indonesia. Age 49 years old. Born in Bulukumba on October 4, 1970.

Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Pemasaran berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SR-586/MBU/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 dan Keputusan RUPSLB tanggal 17 Januari 2019.

Appointment Basis
Appointed as Director of Marketing according to Minister of State-Owned Enterprise Letter No. SR-586/MBU/10/2017 on October 5, 2017 and EMGS Resolutions on January 17, 2019.

Pendidikan
- (S2) Master Bidang Perbankan Islam, Universitas Indonesia Jakarta, Jakarta (2007);
- (S1) Ekonomi Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar (1995).

Education
- Master's Degree Master of Sharia Banking, Universitas Indonesia, Jakarta, (2007);
- Bachelor's Degree Accounting Economy, Universitas Hasanuddin Makassar (1995).

Keahlian
Pemasaran

Expertise
Marketing

Riwayat Profesi
- PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai *Senior Executive Vice President* (Januari 2018);
- BNI Syariah sebagai *Division Head* Divisi Pengelolaan dan Pengadaan Aset Tetap (2017-2018);
- BNI Syariah sebagai *Network and General Affairs Division* (2014-2016);
- BNI Syariah sebagai *Division Head of Funding and Transactional Division* (2015);
- BNI Syariah sebagai Staf Khusus Direksi (2014);
- BNI Syariah sebagai *Division Head* Divisi Komunikasi, Jaringan dan Logistik (2013);
- BNI Syariah sebagai *Division Head* Divisi Pengendalian Keuangan dan Operasional (2011);
- BNI Syariah sebagai *Branch Manager* Kantor Cabang Fatmawati (2010).

Professional History
- PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah as Senior Executive Vice President (January 2018);
- BNI Syariah as Division Head, Fixed Assets Management and Procurement Division (2017-2018);
- BNI Syariah as Network and General Affairs Division (2014-2016);
- BNI Syariah as Division Head of Funding and Transactional Division (2015);
- BNI Syariah as Special Staff of the Board of Directors (2014);
- BNI Syariah as Head of Communication, Network, and Logistics Division (2013);
- BNI Syariah as Division Head, Finance and Operations Controlling Division (2011);
- BNI Syariah as Branch Manager at Fatmawati Branch Office (2010).

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain
Per 31 Desember 2019, Supardi Najamuddin tidak menjabat posisi lain di grup maupun perusahaan/instansi lain.

Concurrent Position in Group/Other Institutions
As of December 31, 2019, Supardi Najamuddin has not served in any other position in the group and other companies/institutions.

Profil Dewan Pengawas Syariah
Profile of Sharia Supervisory Board



Daud Rasyid

Jabatan | Position:
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Head of Sharia Supervisory Board

Periode | Period:
2018-2023

Data Pribadi | Personal Data:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia. Usia 57 tahun. Kelahiran Tanjung Balai, 3 Desember 1962.
Indonesian Citizen, lives in Jakarta, Indonesia. Age 57 years old. Born in Tanjung Balai on December 3, 1962.

Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI No. U-236/DSN-MUI/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Keputusan RUPSLB tanggal 16 Mei 2018.

Appointment Basis
Appointed as Head of Sharia Supervisory Board according to National Sharia Board MUI No. U-236/DSN-MUI/III/2018 on March 29, 2018 and EGMS Resolutions on May 16, 2018.

Pendidikan
- Ph.D dalam bidang Syariah, Universitas Kairo, Mesir (1996);
- M.A. dalam bidang Syariah, Universitas Kairo, Mesir (1990);
- B.A. dalam Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Medan, Indonesia (1983).

Education
- Ph.D in Sharia, University of Cairo, Eqypt (1996);
- M.A. in Sharia, University of Cairo, Egypt (1990);
- B.A. in Islamic Law, Universitas Islam Negeri Medan, Indonesia (1983).

Keahlian
Ahli Hadits

Expertise
Hadits Expert

Riwayat Profesi
- Dosen - Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Jakarta, Indonesia (2000-2012);
- Dosen - Fakultas Hukum Islam, Universitas Islam Negeri, Bandung (1998-sekarang);
- Graduate Instructor - Universitas Ibnu Khaldun, Bogor (2000-2008);
- Kepala Departemen - Departemen Hadits (Program Pascasarjana) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung (1999-2004);
- Graduate Instructor – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (1996-1999); dan
- Sekolah Pascasarjana - Universitas Indonesia, Departemen Studi Timur Tengah, Jakarta (2002).

Professional History
- Lecturer - Institute of Islamic and Arabic Sciences, Jakarta, Indonesia (2000-2012);
- Lecturer - Faculty of Islamic Law, The State Institute for Islamic Studies, Bandung (1998-now);
- Graduate Instructor - Ibnu Khaldun University, Bogor (2000-2008);
- Department Head – Department of Hadits (Postgraduate Program) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung (1999-2004);
- Graduate Instructor - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (1996-1999); and
- Postgraduate School - Universitas Indonesia, Department of Middle East Studies, Jakarta (2002).

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain
Per 31 Desember 2019, Daud Rasyid tidak menjabat posisi lain di grup maupun perusahaan/instansi lain.

Concurrent Position in Group/Other Institutions
As of December 31, 2019, Daud Rasyid has not served in any other position in the group and other companies/institutions.



Muhammad Zubair

Jabatan | Position:
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Periode | Period:
2018-2023

Data Pribadi | Personal Data:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia. Usia 57 tahun. Kelahiran Probolinggo, 21 Juni 1962.
Indonesian Citizen, lives in Jakarta, Indonesia. Age 57 years old. Born in Probolinggo on June 21, 1962.

Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI No. U-236/DSN-MUI/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Keputusan RUPSLB tanggal 16 Mei 2018.

Pendidikan
- (S1) Program Studi Administrasi Negara FISIP, Universitas Jember (1988);
- (S2) Program Studi PSDM Universitas Indonesia (2004).

Keahlian
Asuransi Syariah

Riwayat Profesi
- Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) (2011–2016);
- Wakapoksi Komisi VII DPR RI (2009);
- Wakil Sekretaris FKB DPR RI (2008-2009);
- Anggota FKB DPR RI, Komisi VII (2007-2009);
- Anggota BURT DPR RI (2007-2008);
- Pemimpin Cabang Syariah PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Cabang Syariah (2003-2007);
- Asisten Manajer SDM PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (2001-2003);
- Wakil Kepala Cabang Jakarta Veteran PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1999-2000);
- Wakil Kepala Cabang Jakarta Gandaria PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1997-1999);
- Kasi Reasuransi PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1994-1997);
- Staff Teknik PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1991-1994);
- Staff Pengawasan Intern PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1990-1991); dan
- Guru Madrasah Tsanawiyah Riyadus sholihin Rangkang, Kraksaan-Probolinggo (1988-1990).

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain

Per 31 Desember 2019, Muhammad Zubair tidak menjabat posisi lain di grup maupun perusahaan/instansi lain.

Appointment Basis
Appointed as Member of Sharia Supervisory Board according to National Sharia Board MUI No. U-236/DSN-MUI/III/2018 on March 29, 2018 and EGMS Resolutions on May 16, 2018.

Education
- Bachelor's Degree State Administrative Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember (1988);
- Master's Degree Human Resources Development Study Program, Universitas Indonesia (2004).

Expertise
Sharia Insurance

Professional History
- Member of Profession Certification National Agency (BSNP) (2011–2016);
- Vice Chairman of Commission VII DPR RI (2009);
- Vice Secretary of FKB DPR RI (2008-2009);
- Member of FKB DPR RI, Commission VII (2007-2009);
- Member of Home Affairs Committee (BURT) DPR RI (2007-2008);
- Head of Sharia Branch at PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (2003-2007);
- Assistant Manager of Human Resources PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (2001-2003);
- Deputy Head of Jakarta Veteran Branch PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1999-2000);
- Deputy Head of Jakarta Gandaria Branch at PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1997-1999);
- Head of Reinsurance Section at PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1994-1997);
- Technical Staff at PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1991-1994);
- Internal Audit Staff at PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1990-1991); and
- Teacher at Madrasah Tsanawiyah Riyadus sholihin Rangkang, Kraksaan-Probolinggo (1988-1990).

Concurrent Position in Group/Other Institutions
As of December 31, 2019, Muhammad Zubair has not served in any other position in the group and other companies/institutions.



Deni Nuryadin

Jabatan | Position:
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Periode | Period:
2018-2023

Data Pribadi | Personal Data:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia. Usia 52 tahun. Kelahiran Majalengka, 25 Mei 1967.
Indonesian Citizen, lives in Jakarta, Indonesia. Age 52 years old. Born in Majalengka on May 25, 1967.

Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI No. U-236/DSN-MUI/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Keputusan RUPSLB tanggal 16 Mei 2018.

Pendidikan
- S3 Jurusan Konsentrasi Keuangan Syariah, UIN sekolah Paska Ekonomi Islam (sedang berlangsung);
- S2 Jurusan Strata Dua Keuangan dan Perbankan Syariah, STIE KH. Ahmad Dahlan (2014);
- S1 Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Pancasila, Jakarta (1992).

Keahlian
Keuangan & Perbankan Syariah

Riwayat Profesi
- Asisten Ahli Dosen Tetap Prodi Ekonomi Islam dan Ketua Lab Keuangan dan Filantrophy Islami, UHAMKA (2016-sekarang);
- Tenaga Ahli Produk Syariah FINTECH, PT Danako Syariah (2017-sekarang);
- Anggota DPS, BPRS Matahari Artha Dana (2017-sekarang);
- Procurement Manager, Bank BRI Syariah Pusat (2012-2017);
- Marketing Manager, Bank BRI Syariah (2011- 2012);
- AO Senior Retail & Linkage, Bank BRI Syariah (2010-2011);
- Team Leader, Bank Mega Syariah (2007-2009);
- Direktur Unit Simpan Pinjam, Koperasi ESQ 165 (2005-2007);
- Instruktur DIKLAT Orientasi BSM (Manager), Lembaga Pengelola ZIS Bank Syariah Mandiri (2002-2004);
- Manajer Pengembangan Syariah, PT Kalimaya Perkasa Finance (1998-2001);
- Senior Account Officer Div. PPL, Bank Putera Surya Perkasa (1996-1998).

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain
Per 31 Desember 2019, Deni Nuryadin tidak menjabat posisi lain di grup maupun perusahaan/ instansi lain.

Appointment Basis
Appointed as Member of Sharia Supervisory Board according to National Sharia Board MUI No. U-236/DSN-MUI/III/2018 on March 29, 2018 and EGMS Resolutions on May 16, 2018.

Education
- Doctoral Degree Majoring Sharia Finance, UIN Sekolah Paska Ekonomi Islam (ongoing);
- Master's Degree in Sharia Finance and Banking, STIE KH. Ahmad Dahlan (2014);
- Bachelor of Economics Degree in Management, Universitas Pancasila, Jakarta (1992).

Expertise
Sharia Banking & Finance

Professional History
- Expert Assistant to Permanent Lecturer, Islamic Economics Studies and Head of Islamic Finance and Philanthropy Labs, UHAMKA (2016-present);
- FINTECH Sharia Product Expert, PT Danako Syariah (2017-present);
- Member of DPS, BPRS Matahari Artha Dana (2017-present);
- Procurement Manager, Bank BRI Syariah Headquarter (2012-2017);
- Marketing Manager, Bank BRI Syariah (2011-2012);
- AO Senior Retail & Linkage, Bank BRI Syariah (2010-2011);
- Team Leader, Bank Mega Syariah (2007-2009);
- Director of Savings and Loans Unit, ESQ 165 Cooperative (2005-2007);
- BSM Orientation Training and Education Instructor (Manager), Bank Syariah Mandiri ZIS Management institute (2002-2004);
- Sharia Development Manager, PT Kalimaya Perkasa Finance (1998-2001);
- Senior Account Officer of Div. PPL, Bank Putera Surya Perkasa (1996-1998).

Concurrent Position in Group/Other Institutions
As of December 31, 2019, Deni Nuryadin has not served in any other position in the group and other companies/institutions.



Daud Rasyid
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Deni Nuryadin
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Muhammad Zubair
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Profil Eksekutif
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Profile of Executives PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah



Baitus Luckman Hakim
Kepala Divisi Operasional
Head of Operations Division

Shakti Agustono Rahardjo
Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Head of Finance & Accounting Division

Khairul Fata
Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk
Head of Marketing and Product Development Division

Sumarjono
Kepala Satuan Pengawas Internal
Head of Internal Audit Unit

Heddy Fachradi
Kepala Divisi SDM dan Umum
Head of HR and GA Division

Baitus Luckman Hakim
Kepala Divisi Operasional
Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional Perseroan sejak tahun 2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Cabang Jakarta 1 (2016-2019) dan Kepala Cabang Surabaya (2013-2016). Sebelum bergabung di Askrindo Syariah, beliau pernah menjabat sebagai Sub *Branch Manager* KCP Buleleng PT Bank Syariah Mandiri (2012-2013), *Micro Banking District Manager* Surabaya PT Bank Syariah Mandiri (Jan 2012-Mar 2012), *Account Officer and Microbanking Head* Denpasar PT Bank Syariah Mandiri (2010-2012), *Manager of Consumer Corporate Segmen and Branch Channeling Acquisition* PT Bank BII-Maybank Tbk. (2008-2009), Assistant Manager CEPS Jakarta HSBC (2007-2008), *District Sales Team Manager Region* 1 (Ciledug, Serpong, Ciputat Tangerang Selatan) Citibank (Citifinansial) (Januari 2007-September 2007).

Beliau meraih gelar Magister Sains Management jurusan Marketing & Finance dari Universitas Airlangga Surabaya pada 2016 dan B.sc in Physics jurusan Material & Computing Science dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada tahun 2004.

Shakti Agustono Rahardjo
Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. saat ini berdomisili di Jakarta.

Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi sejak Februari tahun 2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi SDM & Umum (2017-2019), Kepala Kantor Pemasaran (KPM) Tangerang & Lampung (2016-2017), Kepala Divisi Keuangan, Akuntansi, SDM & Umum (2013-2016).

Sebelum bergabung di Askrindo Syariah, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan & Administrasi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, BUMD Bogor (2011-2013), Presiden Direktur PT Asuransi Takaful Umum (2000-2008), Kepala Divisi Keuangan & Administrasi-Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Takaful Umum (1996-2000), Manajer Keuangan & Akuntansi PT Syarikat Takaful Indonesia (1993-1996), Manajer Keuangan & Akuntansi PT Alexander Lippo Indonesia (sekarang:PT AON Indonesia) (1993), Manajer Akuntansi PT Daya Tata Matra (DATAM), (1992-1993) dan Senior Auditor Ernst & Young (1990-1992).

Beliau mendapatkan gelar S1 Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1989.

Baitus Luckman Hakim
Head of Operations Division
Indonesian Citizen, 39 years old. Currently lives in Jakarta, Indonesia.

Appointed as Head of Operations Division in the Company since January 2019. Previously, he was appointed as Jakarta 1 Branch Manager (2016-2019), Surabaya Branch Manager (2013-2016), Sub-Branch Manager of KCP Buleleng, PT Bank Syariah Mandiri (2012-2013), Surabaya Micro Banking District Manager, PT Bank Syariah Mandiri (Jan 2012-Mar 2012), Account Officer and Microbanking Head, PT Bank Syariah Mandiri, Denpasar (2010-2012), Manager of Consumer Corporate Segment and Branch Channeling Acquisition, PT Bank BII-Maybank Tbk. (2008-2009), Assistant Manager of CEPs Jakarta HSBC (2007- 2008), District Sales Team of Manager Region 1 (Ciledug, Serpong, Ciputat, South Tangerang) Citibank (Citifinansial) (January 2007-September 2007).

He earned his Master of Science in Management majoring Marketing & Finance from Universitas Airlangga, Surabaya, in 2016 and B.Sc in Physics majoring Materials & Computing Science from Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya in 2004.

Shakti Agustono Rahardjo
Head of Finance & Accounting Division
Indonesian Citizen, 54 years old. Currently lives in Jakarta.

Appointed as Head of Finance & Accounting Division in the Company since February 2019 Previously, he worked as Head of HR Development & GA Division (2017-2019), Head of Tangerang & Lampung Marketing office (KPM) (2016-2017), Head of Finance, Accounting, HR & General Affairs Division (2013-2016).

Prior to joining with Askrindo Syariah, he was assigned as Director of Finance & Administration of Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, Bogor ROE (2011-2013), President Director of PT asuransi Takaful Umum (2000-2008), Head of Finance & Administration Corporate Secretary Division of PT Asuransi Takaful Umum (1996-2000), Finance & Accounting Manager of PT Syarikat Takaful Indonesia (1993-1996), Financial & Accounting Manager of PT Alexander Lippo Indonesia (now: PT AON Indonesia) (1993), Accounting Manager of PT Daya Tata Matra (DATAM), (1992-1993) and Senior Auditor of Ernst & Young (1990-1992).

He earned his Bachelor of Accounting Degree from Universitas Indonesia in 1989.

Khairul Fata
Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk
Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran sejak tahun 2017. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Jakarta 2 (2016-2017). Sebelum bergabung pada Askrindo Syariah, beliau menjabat berbagai posisi di PT Asuransi Takaful Indonesia di antaranya Group *Head of Technical Division* (Januari 2012-Agustus 2012), *Group Head of Marketing Division* (2006-2011), *Branch Manager* Jakarta-Pondok Indah (2004-2006), *Marketing Manager Broker & Direct- Head Office* (2002-2004), *Branch Manager* Jakarta-Saharjo (2000-2002), *Reinsurance Section Manager* (1998-2000) *Claims Section Manager* (1997-1998), dan *Underwriting Staff* (1995-1997). Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman lainnya di antaranya sebagai *Management Trainee* PT Asuransi BSAM (1994-1995) dan Staf Akuntansi PT Ayuningrum Kencana (1992-1994).

Beliau meraih gelar S1 jurusan Manajemen dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada 1991.

Sumarjono
Kepala Satuan Pengawas Internal
Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Saat ini berdomisili di Semarang, Indonesia.

Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal sejak Desember tahun 2019. Sebelum bergabung di Askrindo Syariah, beliau pernah menjadi Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan pengalaman kerja selama 21 tahun sebagai Auditor BPKP. Jabatan Fungsional Auditor yang pernah diembannya antara lain: Auditor Ahli Madya pada Deputi Akuntan Negara BPKP Pusat, Jakarta (2019), Auditor Ahli Muda pada Deputi Akuntan Negara BPKP Pusat, Jakarta (2015-2019), Auditor Ahli Muda pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Semarang (2010 – 2015), Auditor Ahli Pertama pada BPKP Perwakilan Jambi, Jambi (2008 – 2010), Auditor Pelaksana Lanjutan di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Jambi (2004 – 2008), Auditor Pelaksana di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Jambi (1999 – 2004).

Beliau mendapatkan gelar S2 Jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro pada tahun 2015.

Khairul Fata
Head of Marketing and Product Development Division
Indonesian Citizen, 52 years old. Currently lives in Jakarta, Indonesia.

Appointed as Head of Marketing and Product Development Division since 2017. Previously, he was appointed as Jakarta 2 Branch Manager (2016-2017). Before joining Askrindo Syariah, he was assigned in various important positions at PT Asuransi Takaful Indonesia, among others, Group Head of Technical Division (January 2012-August 2012), Group Head of Marketing Division (2006-2011), Branch Manager of Jakarta-Pondok Indah (2004-2006), Marketing Manager of Broker & Direct-Head office (2002-2004), Jakarta-Saharjo Branch Manager (2000- 2002), Reinsurance Section Manager (1998-2000), Claims Section Manager (1997-1998), and Underwriting Staff (1995-1997). In addition, he also has other working experiences, including Management Trainee at PT Asuransi BSAM (1994-1995), and Accounting Staff of PT Ayuningrum Kencana (1992-1994).

He earned his Bachelor of Management Degree from Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, in 1991.

Sumarjono
Head of Internal Audit Unit
Indonesian citizen, 43 years old. Currently lives in Semarang.

He is appointed as Head of Internal Audit Unit since December 2019. Prior to joining with Askrindo Syariah, he worked as Auditor at Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with 21 years of work experience as an BPKP Auditor. Experience as Auditor's Functional Positions are including: Senior Expert Auditor at the Central BPKP Deputy Accountant, Jakarta (2019), Junior Expert Auditor at the Central BPKP Deputy Accountant, Jakarta (2015-2019), Junior Expert Auditor at Central Java BPKP Representative, Semarang (2010 - 2015), First Expert Auditor at Jambi BPKP Representative, Jambi (2008 - 2010), Advanced Executive Auditor at Jambi BPKP Representative, Jambi (2004-2008), Executing Auditor at BPKP Representative Jambi, Jambi (1999 - 2004).

He earned his Master's Degree in Accounting from Universitas Diponegoro in 2015.

Heddy Fachradi
Kepala Divisi SDM dan Umum
Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi SDM dan Umum sejak tahun 2019. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional (2017-2019) dan Kepala Divisi Pemasaran (2016-2017).

Sebelum bergabung di Askrindo Syariah, beliau menjabat sebagai *Sharia Branch Manager* PT Asuransi Staco Mandiri (2003-2013), *Claim Motor Underwriter Staff* (2000-2002), *Motor Underwriter Staff* (2000-2001), dan *Marketing Staff* (1995-2000).

Beliau meraih gelar S1 Jurusan Marketing Manajemen dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 1990.

Heddy Fachradi
Head of HR and GA Division
Indonesian Citizen, 53 years old. Currently lives in Jakarta, Indonesia.

He is appointed as Head of Human Resources and General Affair Division since 2019. Previously, he served as Head of Operations Division (2017-2019) and Head of Marketing Division (2016-2017).

Prior to joining with Askrindo Syariah, he served as Sharia Branch Manager, PT Asuransi Staco Mandiri (2003-2013), Claims Motor Underwriter Staff (2000-2002), Motor Underwriter Staff (2000-2001), and Marketing Staff (1995-2000).

He earned his Bachelor's Degree Majoring Marketing Management from Universitas Padjadjaran, Bandung, in 1990.

Informasi Pemegang Saham
Shareholders Information

Per 31 Desember 2019, pemegang saham utama dan pengendali PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah PT Asuransi Kredit Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%.

As of 31 December 2019, majority and controlling shareholders of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah are PT Asuransi Kredit Indonesia with 99.99% shares ownership and Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) with 0.01% shares ownership.



Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, SH., Notaris di Jakarta, Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000 terbagi atas 400.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 100.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000.

Pursuant to Deed No. 45 on November 29, 2012 of Hadijah, SH., Notary in Jakarta, the Company's Authorized Capital is stipulated at Rp400,000,000,000, which is divided into 400,000 shares, with the par value of each share of Rp1,000,000. From the authorized capital, the issued and paid-up capital is 25% or 100,000 shares with the overall par value of Rp100,000,000,000.

Berdasarkan akta tersebut diatas sesuai pasal 4 ayat 2 struktur modal Perseroan adalah sebagai berikut:

Based on article 4 paragraph 2 of the above deed, the Company's capital structure is as follows:

Uraian Description	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage	Nominal Saham (Dalam Juta Rp) Nominal Share (In Rp Million)
PT Asuransi Kredit Indonesia	99.999	99%	99.999
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1%	1
Jumlah | Total	**100.000**	**100%**	**100.00**

Pada tahun 2019, terdapat penambahan Modal Disetor sebesar Rp150.000.000.000 sebagaimana tertuang dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) No.34 tanggal 20 Januari 2020 yang aktanya dibuat oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta. Penambahan modal tersebut belum dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta. Jumlah Modal Saham yang dimiliki oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp400.000.000.000.

In 2019 there was an additional paid-in Capital Amounting to Rp150,000,000,000 as stated in the deed of the Annual General Meeting of Shareholders (RUPST) No.34 on January 20, 2020 notarial made by Hadijah, S.H., Notary in Jakarta. The addition is not yet recorded in the administration of Financial Servies Authority (OJK) Jakarta. Total paid-in share capital owned by PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah as of December 31, 2019 amounted to Rp400,000,000,000.

Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0028810.AH.01.11 tanggal 12 Februari 2020.

The change has been enacted by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia under Decree Number AHU-0028810.AH.01.11 dated February 12, 2020.

Uraian Description	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage	Nominal Saham (Dalam Juta Rp) Nominal Share (In Rp Million)
PT Asuransi Kredit Indonesia	399.999	99%	399.000
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1%	1
Jumlah | Total	**400.000**	**100%**	**400.000**

Kepemilikan Saham oleh Direktur, Komisaris, dan Dewan Pengawas

Shares Ownership by Director, Commissioner, and Supervisory Board

Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak memiliki saham PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

All members of the Company's Board of Directors, the Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board do not have direct and indirect shares ownership of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Informasi Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

Information on Subsidiaries, Associated Companies and Joint Venture Companies

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak memiliki anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan perusahaan ventura bersama.

Up to the end of 2019, the Company has not have any subsidiaries, associated companies, and joint venture companies



Informasi Dalam Situs Perseroan

Information on the Company's Website



Guna meningkatkan transparansi dan akses *stakeholder* atas informasi serta kinerja Perseroan yang aktual dan terkini, Perseroan menyediakan situs resmi yang dapat diakses di www.askrindosyariah.co.id. Situs Perseroan dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, informasi di dalam situs meliputi:

1. Informasi umum tentang Perseroan yang terdiri dari: Profil Perusahaan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Makna Logo, Budaya Perusahaan, Profil Manajemen, Mitra Bisnis, dan Komposisi Tenaga Ahli;
2. Informasi produk meliputi Kafalah Pembiayaan, Kafalah Transaksi Perdagangan, Kafalah *Suretyship* (Bank Garansi dan *Surety Bond*);
3. Informasi terkait Media yang terdiri dari Berita, Kerja sama, Eksternal, Internal, CSR, Cabang, Informasi, Penghargaan, Pengetahuan, Serba Serbi, UPZ, Video, dan Galeri;
4. Informasi tentang kinerja, terdiri dari: Laporan Tahunan, Perizinan, Pemeringkatan, Laporan keuangan, Penghargaan, dan Tata Kelola;
5. Peluang, terdiri dari karir dan Pengadaan Barang & Jasa; dan
6. Hubungi Kami, terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang dan FAQ.

In order to increase transparency and access of the stakeholder to the Company's information as well as the latest and actual performance, the Company provides an official website that can be accessed at www.askrindosyariah.co.id. The Company's website is created with compliance to the prevailing laws and regulations. In general, information on the website are including:

1. General information about the Company consisting of: Company Profile, Vision and mission, Organization Structure, Logo Meaning, Corporate Culture, Management Profile, Business Partners, and Composition of Experts;
2. Product information including Kafalah Financing, Kafalah Trade Transaction, Kafalah Suretyship (Bank Guarantees and Surety Bonds);
3. Media information consisting of News, Cooperation, External, Internal, CSR, Branch, Information, Appreciation, Knowledge, Various, UPZ, Video, and Gallery;
4. Performance information, consisting of: Annual Report, Permits, Rating, Financial Statements, Awards, and Governance;
5. Opportunities, consisting of careers and Procurement of Goods & Services; and
6. Contact Us, including address of Head Office, Branch Offices and FAQs.

Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professions

Kantor Akuntan Publik | Public Accounting Firm
KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12910
Telp : (021) 51401340
Fax : (021) 51401350
Email : contact@rsm.co.id

Aktuaria | Actuary
PT Prima Bhaksana Lestari
Graha BKKKS Lt.1
Jl. Salemba Tengah No.51
Jakarta 10440
Telp : (021) 51401340
: (021) 51401350

Pemeringkat Efek | Credit Rating Agency
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Panin Tower Senayan City, Lt.17
Jl. Asia Afrika Lot.19
Jakarta 10270
Telp : (021) 72782380
Fax : (021) 72782370

Konsultan Hukum | Legal
Amir Syamsudin & Partners
Menara Sudirman Lt.9
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta 12190
Telp : (021) 5220855
Fax : (021) 5220840
Email : kharisma@amirsyam.com

Informasi Jasa Berkala Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan Tahun 2019
Information on Regular Service Provided by Supporting Institutions and Professions in 2019

No.	Jenis Lembaga/Profesi Institution Type/ Profession	Nama Lembaga/Profesi Institution Name/ Profession	Jasa yang Diberikan Service Provided	Periode Penugasan Assignment Period	Biaya Fee
1.	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Audit Laporan Keuangan Audit of Financial Statements	Tahun Buku 2019 Fiscal Year 2019	Rp108.300.000
2.	**Pemeringkat Efek** Credit Rating Agency	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	Pemeringkatan Perusahaan Rating Company	2019	Rp110.000.000
3.	**Aktuaria** Actuary	PT Prima Bhaksana Lestari	Perhitungan PSAK 24 PSAK Calculation 24	25 November | November 2019 s/d 24 Desember | December 2019	Rp9.680.000
4.	**Konsultan Hukum** Legal Consultant	Amir Syamsudin & Partners	Konsultan Hukum Legal Consultant	2 Mei | May 2018 s/d 2 Mei | May 2020	Rp462.000.000





04

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

Business Supporting Review



Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Supporting Review



Sumber Daya Manusia
Human Resources

Perseroan senantiasa menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset utama dan mitra dalam mencapai tujuan bisnis. SDM menjadi elemen penting kesuksesan kinerja Perseroan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berupaya untuk senantiasa mengembangkan sistem pengelolaan SDM yang dimiliki.

Perseroan melalui Departemen SDM juga mendorong setiap individu untuk terus meningkatkan keahlian dan keterampilan sesuai bidangnya masing-masing. Sejalan dengan kondisi bisnis yang terus berkembang, Perseroan juga memastikan setiap karyawan memiliki kompetensi yang memadai dengan tuntutan tugas dan kewajiban masing-masing individu. Perseroan mewujudkan hal ini dengan menyelenggarakan pembelajaran dan pengembangan SDM secara intensif.

The Company continuously treats human resources as the primary asset and partner in achieving its business objective. Human resources become an important element in the success of the Company's performance to provide the best service to all customers. Being aware of such condition, the Company is striving to constantly develop the management system of the human resources.

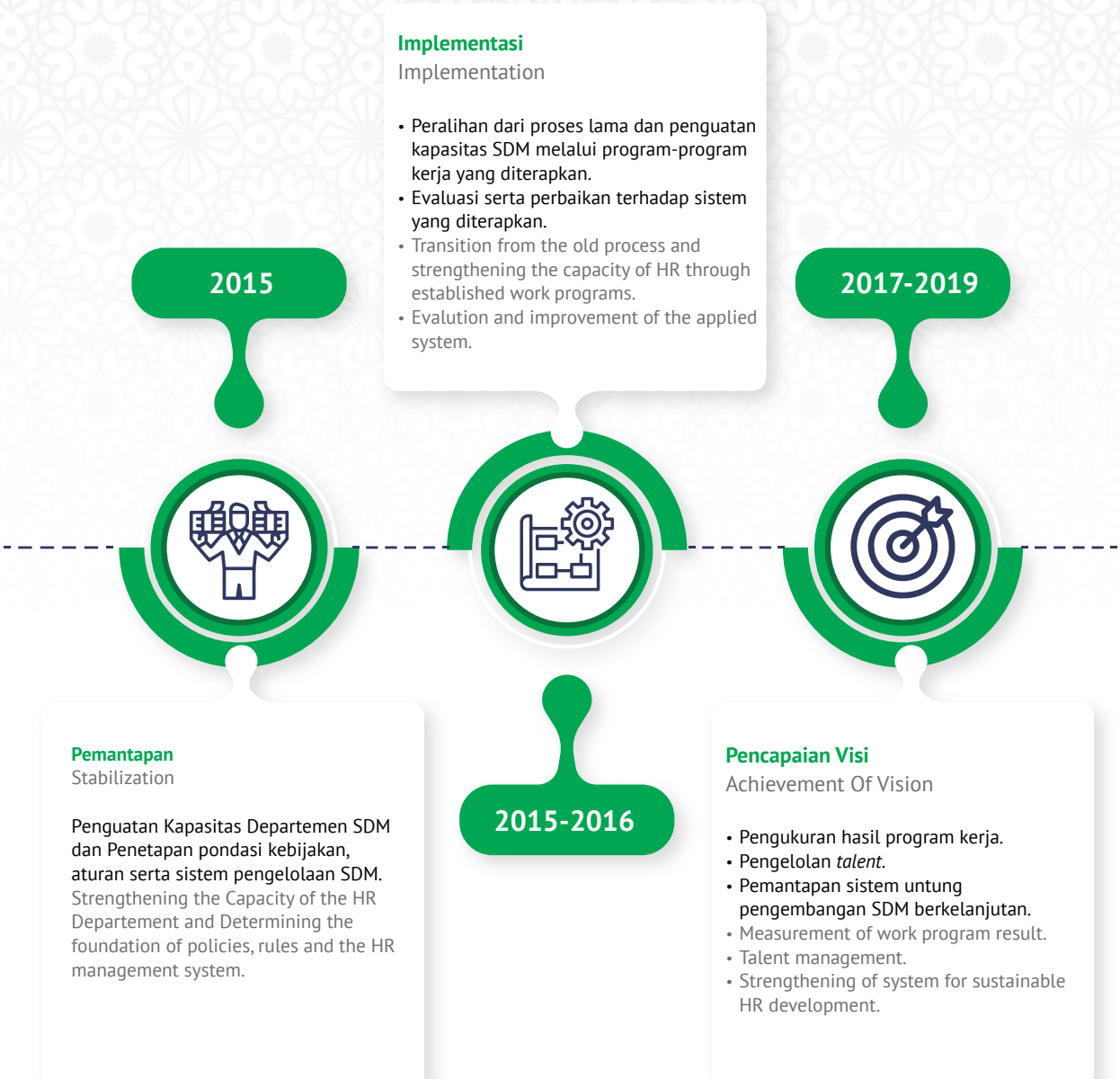
Through the Human Resources Department, the Company encourages each individual to keep improving their expertise and skills in each respective field. In line with the growing business condition, the Company also ensures that each employee has sufficient competence for their duties and obligations. The Company realizes it by organizing intensive Human Resources learning and development.

ROADMAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menjalankan pengelolaan SDM secara jelas agar pengembangan SDM lebih terarah sehingga mampu menunjang kebutuhan Perseroan dalam menghadapi dinamika yang ada. Secara umum, rencana pengembangan SDM ke depan adalah menyiapkan *performance oriented personnel* sebagai *key driver* pertumbuhan bisnis sesuai dengan visi misi Perseroan. Dalam merencanakan pengelolaan SDM, Perseroan telah menyusun *roadmap* pengelolaan SDM sebagai berikut:

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ROADMAP

The Company carries out human resources management clearly, so they will be more directed and able to support the Company's needs in facing the existing dynamics. Generally, the future plan of Human Resources development is to prepare performance-oriented personnel as the key driver of business growth in accordance with the Company's vision and mission. In planning the Human Resources management, the Company has formulated a Human Resources roadmap as follows:

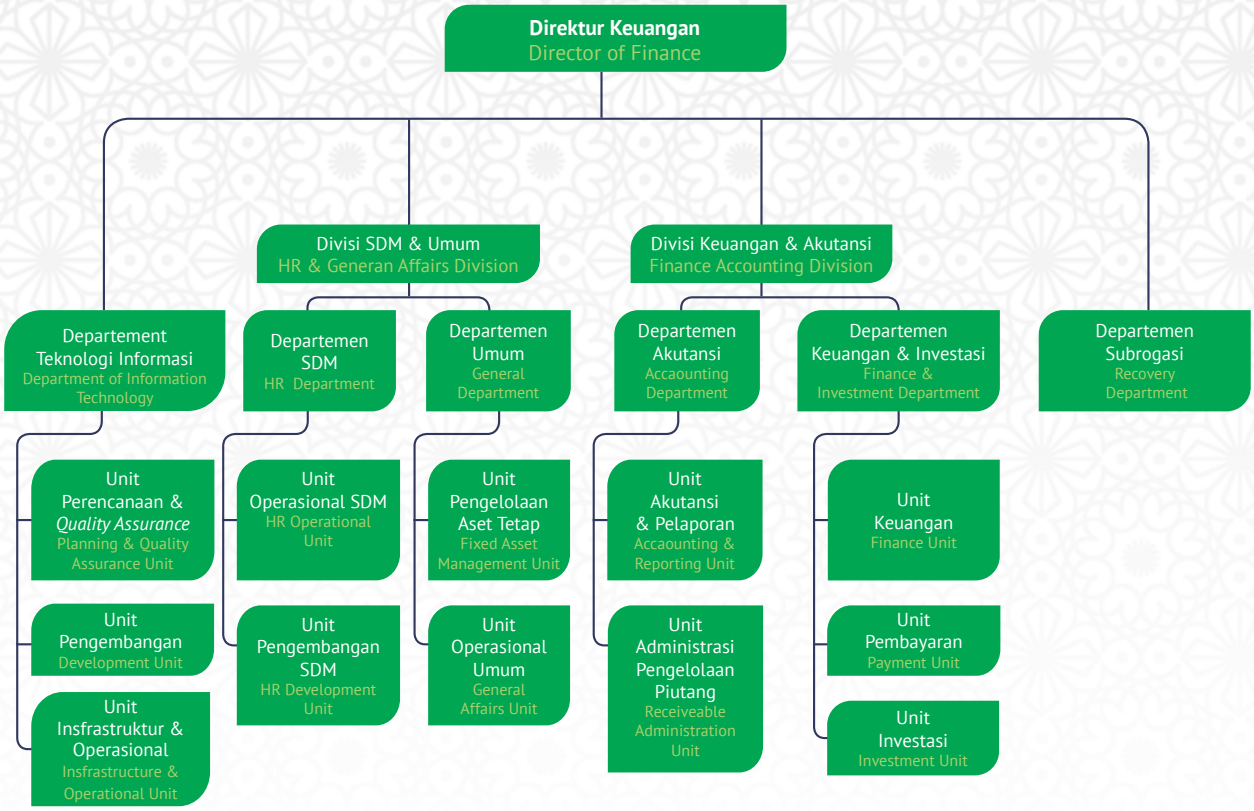


STRUKTUR PENGELOLA SDM

Pengelolaan SDM Perseroan menjadi tangggung jawab Divisi SDM dan Umum dan diawasi oleh Komite Personalia. Pelaksanaan tugas oleh Divisi tersebut dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Direktur Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, struktur organisasi pengelola SDM ditunjukkan sebagai berikut:

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRUCTURE

The management of the Company's HR is under responsibility of the HR and General Affairs Division and oversight by the Personnel Committee. The duties performed by the Division are directly reported to the Director of Finance. Therefore, the organization structure of human resources management is illustrated as follows.



REKRUTMEN DAN PENGEMBANGAN KARIR

Perseroan melakukan rekrutmen dengan prinsip keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki kandidat. Kandidat dijaring melalui iklan, situs Perseroan, *job fair*, referensi dan media rekrutmen lainnya. Perseroan merekrut lulusan baru secara selektif dari perguruan tinggi terkemuka yang mempunyai indeks prestasi dan potensi yang baik. Calon karyawan diberikan pelatihan intensif untuk mempercepat proses adaptasi dengan pekerjaan di lapangan.

Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat jabatan tertinggi berdasarkan kemampuannya. Perseroan memiliki program pengembangan karir yang lebih tertata serta promosi jabatan dan *grade* didasarkan pada penilaian kinerja dan melalui seleksi yang berjenjang. Di sepanjang tahun 2019, Perseroan merekrut sebanyak 26 karyawan baru yang berasal dari berbagai latar belakang untuk menjabat berbagai posisi di Perseroan.

RECRUITMENT AND CAREER DEVELOPMENT

The Company conducts recruitment with transparency, fairness, and equality. The selection process is performed based on the needs and competence of the candidates. Candidates are informed through advertisements, the Company's website, job fair, references, and other recruitment media. The Company selectively recruits fresh graduates from well-known universities that have good grade points and potentials. Candidates of employees are provided with intensive training to accelerate the adaptation process to the work in the field.

Each employee has the same opportunity to reach the highest position level based on their skills. The Company has a well-managed career development program and position and grade promotion based on the performance assessment and tiered selection. During 2019, the Company recruited 26 new employees from various backgrounds to be in different positions in the Company.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja SDM, khususnya dalam proses remunerasi, *talent management*, *training & development* serta penilaian kinerja, maka telah diterapkan penggunaan *Human Capital Management System*. Saat ini progres pekerjaan sudah mencapai 100%, adapun proses *Human Capital* yang sudah dapat dilakukan melalui sistem adalah sentralisasi *payroll*, *master data* pegawai, kamus kompetensi serta *key performance indicator* untuk Pimpinan Unit Usaha dan seluruh pegawai.

PROGRAM SDM TAHUN 2019

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, Perseroan di sepanjang tahun 2019 telah menjalankan beberapa program kegiatan strategis, antara lain:

1. Menyusun dan mengevaluasi pedoman SDM Perseroan.
2. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi *Human Resource Information System* bekerjasama dengan konsultan dan Departemen TI.
3. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, baik langsung maupun melalui internet (*e-learning*).
4. Menyusun *job description* unit kerja.

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2019, Perseroan memiliki jumlah SDM sebanyak 166 karyawan, naik 2,5% dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 162 karyawan. Kenaikan jumlah pegawai terjadi karena menyesuaikan kebutuhan Perseroan. Meski demikian, jumlah SDM pada tahun 2019 telah sejalan dengan kebutuhan operasional Perusahaan dari sisi kuantitas, dengan mempertimbangkan peningkatan produktivitas setiap pegawai.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM

As an effort to improve the HR performance, particularly in remuneration process, talent management, training & development, and performance evaluation, the Human Capital Management system is implemented. Currently, the working progress has reached 100%, while the human capital processes that can be one through the system are payroll centralization, employee master data, competence dictionary, and key performance indicator for Leaders of Business units and all employees.

HUMAN RESOURCES PROGRAM IN 2019

In order to improve the human resources quality, in 2019, the Company has implemented several strategic programs as follows:

1. Formulating and evaluating the Company's HR guideline.
2. Optimizing the utilization of Human Resource Information System Program, cooperating with consultants and IT Department.
3. Organizing education programs and trainings continuously in order to develop the human resources competence, both directly and through internet (e-learning).
4. Formulating job description for business units.

HUMAN RESOURCES STATISTICS

In 2019, the Company has total of 166 employees, increased by 2.5% compared to 162 employees in 2018. The increase in employees number was due to adjustment to the Company's needs. However, total employees in 2019 has been in line with the Company's operational needs in terms of quantity, considering higher productivity of each employee.

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Table of Total Employees Based on Position

Uraian | Description	2019	2018
Manager	27	20
Supervisor	17	18
Staff	122	124
Jumlah | Total	166	162

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Table of Total Employees Based on Education Level

Uraian | Description	2019	2018
S2 | Post Graduate	11	11
S1 | Bachelor's	149	146
Diploma | Diploma	5	7
SMA | Senior High School	1	1
Jumlah | Total	166	162

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Table of Total Employees Based on Age

Uraian | Description	2019	2018
<20-35	115	114
36-45	38	36
46-56	13	12
Jumlah | Total	166	162

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Table of Total Employees Based on Employment Status

Uraian | Description	2019	2018
Tetap | Permanent	144	138
Kontrak | Contract	22	24
Jumlah | Total	166	162

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender
Table of Total Employees Based on Gender

Uraian | Description	2019	2018
Laki-laki | Male	106	103
Perempuan | Female	60	59
Jumlah | Total	166	162

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Lokasi
Table of Total Employees Based on Location

Uraian | Description	2019	2018
Kantor Pusat | Head Office	75	71
Kantor Cabang Jakarta 1 | Jakarta Branch Office 1	5	6
Kantor Cabang Jakarta 2 | Jakarta Branch Office 2	7	7
Kantor Cabang Bandung | Bandung Branch Office	6	5
Kantor Cabang Medan | Medan Branch Office	4	5
Kantor Cabang Palembang | Palembang Branch Office	6	5
Kantor Cabang Makassar | Makassar Branch Office	4	4
Kantor Cabang Semarang | Semarang Branch Office	4	5
Kantor Cabang Surabaya | Surabaya Branch Office	7	6
Kantor Pemasaran Bekasi | Bekasi Marketing Office	5	5
Kantor Pemasaran Tangerang | Tangerang Marketing Office	5	5
Kantor Pemasaran Yogyakarta | Yogyakarta Marketing Office	4	3
Kantor Pemasaran Pontianak | Pontianak Marketing Office	1	1
Kantor Pemasaran Balikpapan | Balikpapan Marketing Office	4	4

Uraian | Description	2019	2018
Kantor Pemasaran Malang | Malang Marketing Office	3	4
Kantor Pemasaran Pekanbaru | Pekanbaru Marketing Office	4	2
Kantor Pemasaran Padang | Padang Marketing Office	5	4
Kantor Pemasaran Purwokerto | Purwokerto Marketing Office	1	1
Kantor Pemasaran Sukabumi | Sukabumi Marketing Office	1	1
Kantor Pemasaran Banda Aceh | Banda Aceh Marketing Office	2	2
Kantor Pemasaran Jambi | Jambi Marketing Office	1	1
Kantor Pemasaran Bandar Lampung | Bandar Lampung Marketing Office	1	1
Kantor Pemasaran Bogor | Bogor Marketing Office	1	1
Kantor Pemasaran Jakarta Selatan | South Jakarta Marketing Office	2	2
Kantor Pemasaran Surakarta | Surakarta Marketing Office	2	2
Kantor Pemasaran Mataram | Mataram Marketing Office	4	4
Kantor Pemasaran Denpasar | Denpasar Marketing Office	0	0
Kantor Pemasaran Palu | Palu Marketing Office	0	2
Kantor Pemasaran Tasikmalaya | Tasikmalaya Marketing Office	0	1
Kantor Pemasaran Cirebon | Cirebon Marketing Office	0	1
Kantor Pemasaran Kediri | Kediri Marketing Office	0	1
Kantor Pemasaran Batam | Batam Marketing Office	1	0
Kantor Pemasaran Banjarmasin | Banjarmasin Marketing Office	1	0
Total	166	162

SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Insan Perseroan dipersiapkan untuk menjadi SDM yang efektif, produktif dan memiliki integritas melalui pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aktual di lapangan dan di masa depan. Perseroan memetakan program pengembangan SDM lebih terstruktur yang mencakup pemetaan kebuatuhan SDM sampai dengan beberapa tahun ke depan, serta memperkuat program pelatihan dan pengembangan dengan menyusun kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan.

Setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang setara dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan potensi, kemampuan dan ketrampilan yang dipersyaratkan. Perseroan menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai melalui pembelajaran dan pengembangan. Jenis pembelajaran dan pengembangan bervariasi, mulai dari diklat pembentukan diri, diklat pengembangan keterampilan, hingga diklat khusus.

EDUCATION AND TRAINING SYSTEM

The Company's personnel are prepared to be Human Resources who are effective, productive and have integrity through training that is adjusted to the actual practical needs and demands recently and in the future. The Company has mapped a more structured HR development program that covers Manpower Planning needs for the next few years, as well as strengthening training and development programs by developing a curriculum that was able to answer the requirements.

Each employee will receive equal opportunity to develop competency based on the required potential, abilities and skills. The Company has organized various forms of training to develop employee's knowledge and competencies through learning and development. Types of learning and development are varied, ranging from self-education training, skills development training up to specific training.

Pelatihan Keuangan dan Akuntansi
Financial and Accounting Training

No	Pelatihan | Training	Waktu Date	Tempat Location	Penyelenggara Provider	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	**Pelatihan Pengelolaan dan Pengendalian Kas** Cash Management and Control Training	Agustus 2019 August 2019	Jakarta	DHN Consulting	1.695.000
2	**Pelatihan Brevet A&B Terpadu** Integrated Brevet A&B Training	Agustus – Desember 2019 August – December 2019	Jakarta	Ikatan Akuntan Indonesia	4.860.000
3	**Pelatihan Brevet A&B Terpadu + ESPT** Integrated Brevet A&B Training + ESPT	Oktober – Januari 2019 October – January 2019	Jakarta	PPA - FEUI Depok	4.500.000
4	**Tax Training**	Oktober 2019 October 2019	Jakarta	PT Reasuransi Nasional Indonesia	Free
5	**In house Training "Tax Training (Pelatihan Pajak)"** In house Training "Tax Training"	Agustus 2019 August 2019	Jakarta	Abraham Consulting	45.230.000
6	**Workshop Perhitungan Nilai UDP tutup buku 2019** UDP Value Calculation Workshop closes book 2019	Desember 2019 December 2019	Jakarta	Internal (Divisi Keuangan & Akuntansi)	74.146.000

Pelatihan Risk Management
Risk Management Training

No	Pelatihan | Training	Waktu Date	Tempat Location	Penyelenggara Provider	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	**Sosialisasi dari PEFINDO** Socialization by PEFINDO	Oktober 2019 October 2019	Jakarta	PEFINDO Biro Kredit	Free
2	**Sosialisasi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas Peraturan Mengenai Lembaga Penjamin** Dissemination and Hearings Meeting (RDP) on Regulations on Insurance Providers	November 2019	Bandung	Non Bank (DP3B) Otoritas Jasa Keuangan	6.000.000
3	**Sosialisasi Tindak Pidana Umum & Sharing Session Menghadapi Panggilan Perkara Pidana & Perdata dan Analisa Bentuk Badan Hukum** Socialization of Public Crimes & Sharing Session in Facing Criminal & Civil Case Calls and Analysis of Legal Entity Forms	November 2019	Jakarta	PT Askrindo	Free

Pelatihan Secretary Management
Secretary Management Training

No	Pelatihan | Training	Waktu Date	Tempat Location	Penyelenggara Provider	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	**Training Public Speaking**	Januari | January 2019	Jakarta	Golden Mind	3.800.000

Pelatihan Surety Bond & Bank Guarantee
Surety Bond & Bank Guarantee Training

No	Pelatihan | Training	Waktu Date	Tempat Location	Penyelenggara Provider	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	Pelatihan Perkembangan *Surety Bond* dalam Industri Bisnis Asuransi dan Penjaminan di Indonesia Training on Surety Bond Development in the Insurance and Guarantee Business Industry in Indonesia	Januari 2019 January 2019	Jakarta	Hukum Online	3.080.000

Pelatihan *Soft Skill*
Soft Skill Training

No	Pelatihan | Training	Waktu Date	Tempat Location	Penyelenggara Provider	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	Millennial Sales Master Workshop Training	Maret 2019 March 2019	Jakarta	Essential Business Solution	2.550.000
2	In House Training "Leadership Training"	November 2019	Jakarta	Kubik Leadership	89.000.000
3	In House Training "Self Development Series Training : From Great to Excellent"	Desember 2019 December 2019	Jakarta	Magister Profesi S2 Psikologi Universitas Indonesia	15.900.000

Pelatihan Lainnya (HR, Business Management)
Other Trainings (HR, Business Management)

No	Pelatihan | Training	Waktu Date	Tempat Location	Penyelenggara Provider	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	Capital Budgeting Training	Maret 2019 March 2019	Jakarta	PPM Management	5.300.000
2	Corporate Budgeting Training	Agustus 2019 August 2019	Jakarta	DHN Consulting	3.590.000
3	Human Capital National Conference	November 2019	Jakarta	PPM Management	6.000.000
4	Designing Competency Model Training	Desember 2019 December 2019	Jakarta	PPM Management	5.200.000

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Besarnya investasi di bidang pengembangan SDM yang dikeluarkan Perseroan selama tahun 2019 mencapai Rp1.065.000.000 atau setara dengan 2% dari total biaya tenaga kerja tahun 2019.

EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Guna mengukur efektivitas atas pelaksanaan sistem pelatihan dan pengembangan bagi SDM, Perseroan senantiasa menjalankan evaluasi setelah penyelenggaraan pelatihan. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan, bukan sebagai faktor penentu atau merupakan hasil akhir suatu proses/kegiatan di pengembangan SDM, baik dalam pengangkatan karyawan (promosi) maupun proses mutasi karyawan, ataupun sebagai dasar untuk meningkatkan kebutuhan training lanjutan SDM di masa mendatang.

COMPETENCE DEVELOPMENT BUDGET

Amount of investment in HR development aspect allocated by the Company reached Rp1,065,000,000 in 2019, or equivalent to 2% of total labor costs in 2019.

EVALUATION ON COMPETENCE DEVELOPMENT

In order to measure effectiveness of HR training and development system implementation, the Company always conducts evaluations after the training is done. Result of the evaluation become one of the considerations, not as a determining factor or end result in HR development process/activity, both in employees appointment (promotions) and mutation process, or as a consideration to upgrade advance HR training requirements in the future.

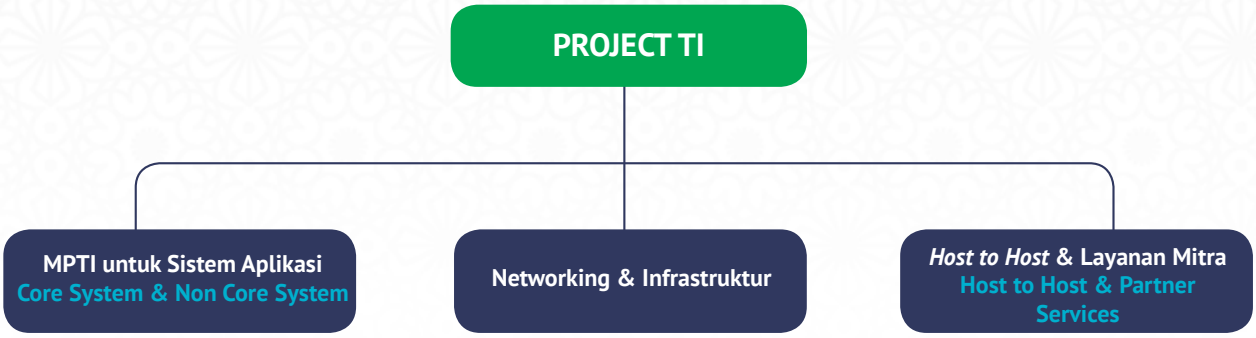
Teknologi Informasi
Information Technology

Perseroan telah menyusun *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) 2018 – 2023 dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sebagai panduan dalam membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan serta meningkatkan kehandalan Teknologi Informasi dalam kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Implementasi Teknologi Informasi di Perseroan meliputi sistem fungsional, sistem produksi penjaminan pembiayaan dan penjaminan *suretyship*, sistem transaksi perdagangan, sistem keuangan dan akuntasi serta sistem Sumber Daya Manusia. Selama tahun 2019, Perseroan terus mendorong perbaikan aspek Teknologi Informasi untuk menciptakan proses kerja yang lebih cepat, efektif dan efisien serta meminimalisir *human error* dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sektor usaha penjaminan.

Pada tahun 2019, pengembangan Teknologi Informasi di Perseroan berfokus pada 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:

The Company has formulated Information Technology Master Plan (MPTI) 2018-2023 and Information Security Management System (SMKI) as guideline to develop, implement, operate and enhance reliability of Information Technology in the Company's business and operational activities. Information Technology implementation in the Company covers functional systems, financing guarantee production and suretyship guarantees, trade transaction, financial and accounting and Human Resources systems. During 2019, the Company will continuously encourage improvement in Information Technology reliability aspects to create faster, more effective and efficient work processes and minimize human error as well as to maintain compliance with all prevailing law and regulation in the guarantee business sector.

In 2019, Information Technology development in the Company is focused on 3 (three) aspects, as follows:



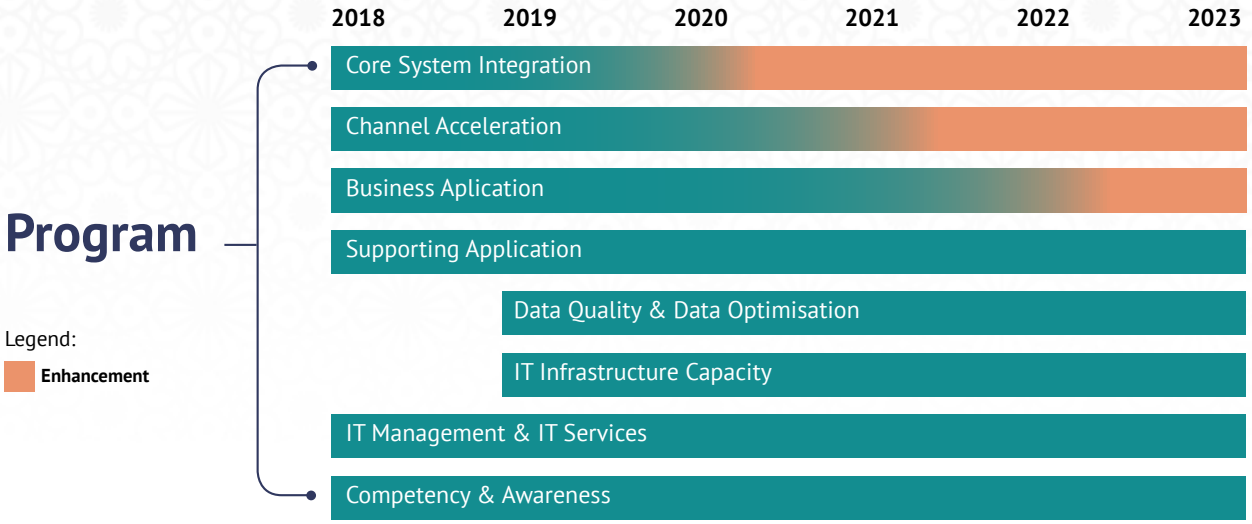
Sesuai MPTI 2018 – 2023, Perseroan juga telah merancang arah pengusahaan (*roadmap*) Teknologi Informasi Askrindo Syariah untuk mencapai visi TI yaitu **"memberikan layanan Teknologi Informasi yang handal bertaraf internasional yang dapat mendukung dan mendorong inovasi bisnis."** Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui inisiatif dan

Based on the MPTI 2018 – 2023, the Company has designed Askrindo Syariah Information Technology Roadmap to achieve IT vision to **"provide reliable and international-standard to support and drive business innovation."** Achievement of the vision is done through designated initiative and timeline with each set target and

timeline yang telah dirancang dengan sasaran dan tujuan masing-masing meliputi aspek *people*, *process*, *technology (application/infrastructure)* yang digambarkan sebagai berikut:

goals covering people, process, technology (application/infrastructure) aspects as illustrated below:





Program Transformasi Teknologi Informasi

Pada tahun 2019, Perseroan telah melaksanakan rangkaian program kerja bidang Teknologi Informasi sebagai bagian dari Transformasi Teknologi Informasi di

Information Technology Transformation Program

In 2019, the Company has implemented series of Information Technology work program as part of Information Technology Transformation in the Company.

Perseroan. Penjelasan mengenai realisasi transformasi Teknologi Informasi pada tahun 2019, sebagai berikut:

Explanation about Information Technology transformation realization in 2019 is as follows:

Program	Agenda Rapat | Meeting Agenda
Core System Integration	• *Enhancement* Sistem Aplikasi *Core System* • Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan & Akuntansi • Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung Integrasi • Enhancement Core System Application System • Finance & Accounting Application System Development • Integration Supporting Application System Development
Channel Acceleration	• Pengembangan Sistem Aplikasi *Suretyship* • *Enhancement* Sistem Aplikasi *Channel Online* untuk Mitra Bisnis • Pengembangan Sistem Integrasi Data Penjaminan dengan Mitra Bisnis • Pengembangan Sistem Aplikasi Pembayaran *Ujrah*. • Suretyship Application System Development • Enhancement Online Channel Application System for Business Partners • Guarantee Data Integration System Development with Business Partners • Application System Development for Ujrah Payment
Business Application	• Pengembangan Sistem Aplikasi *Call Center* • Pengembangan Sistem Aplikasi *Customer Relationship Management* (CRM) • Pengembangan Sistem Aplikasi Audit internal • Pengembangan Sistem Aplikasi Pengadaan • *Enhancement* Sistem Aplikasi SDM. • Call Center Application System Development • Customer Relationship Management (CRM) Application System Development • Internal Audit Application System Development • Procurement Application System Development • HR Application System Enhancement
Supporting Application	• *Enhancement* Sistem Aplikasi Manajemen Surat Elektronik (MSE) • Implementasi *Email Corporate*, Pengembangan Sistem Aplikasi *Project Management* • *Enhancement Tools IT Service Management* • Implementasi *Tools* Pengelolaan Jaringan & Infrastruktur TI • Pengembangan *Landing Page* Sistem Aplikasi • Implementasi Sistem Pengelolaan Komputer Secara Terpusat. • Enhancement Electronic Mail Management (MSE) Application System • Implementation of Corporate Email, Project Management Application System Development • Enhancement IT Service Management Tools • Implementation of IT Network & Infrastructure Management Tools • Application System Landing Page Development • Implementation of Centralized Computer Management System
Data Quality & Data Optimization	• Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Data Perusahaan • Penyusunan Skema Klasifikasi dan Standar Data • Pelaksanaan Perbaikan Kualitas Data pada *Database* Perusahaan • Implementasi *Tools* MIS, EIS (Sistem *Dashboard*) dan *Data Analytical*. • Preparation of Corporate Data Governance Policy • Preparation of Data Classification and Standard Scheme • Implementation of Data Quality Improvement at Corporate Database • Implementation of MIS, EIS (Dashboard System) and Analystical Data Tools
IT Infrastructure & Capacity	• Penyusunan Rencana Peningkatan Kapasitas Penyimpanan Data dan Jaringan • Implementasi *Backup* Jaringan pada Cabang • Pengadaan Server pada *Disaster Recovery Center* (DRC) • Peningkatan *availability* layanan TI pada area kritikal (KP dan DC) • Peningkatan Pengelolaan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*. • Preparation of Data Storage and Network Capacity Upgrade Plan • Implementation of Network Backup at Branch • Server Procurement at Disaster Recovery Center (DRC) • Improvement of IT service availability at critical area (KP and DC) • Improvement of Data Center and Disaster Recovery Center Management

Program	Agenda Rapat | Meeting Agenda
IT Management & IT Services	• Pembaruan Struktur Organisasi TI dan Tata Kerja Divisi/Departemen TI • Peningkatan Peran ITSC • Pembaruan Kebijakan dan Prosedur TI • Kajian Ulang Pasca Implementasi Sistem Aplikasi, Pengujian Keamanan Sistem Informasi Perusahaan • Evaluasi *Business Continuity Plan* TI (BCP TI) • Pelaksanaan Audit TI secara berkala • Pelaksanaan *Surveillance* Audit ISO 28001 (*Information Security Management Service*) • Implementasi Sertifikasi ISO 20000 (IT *Service Management*) • Penyusunan TI *Service Catalog* dan SLA TI • Evaluasi *Master Plan* TI. • IT Organization Structure and IT Division/Department Work Procedure Update • ITSC Role Improvement • IT Policy and Procedure Improvement • Review Post-Implementation of Application System, Corporate Information System Security Testing • Implementation of IT Audit regularly • Implementation of ISO 28001 (Information Security Management Service) Surveillance Audit • Implementation of ISO 20000 Certification (IT Service Management) • Preparation of IT Service Catalog and SLA • IT Master Plan Evaluation
Competency & Awareness	• Peningkatan Kompetensi SDM TI • Peningkatan *IT Security Awareness* Perusahaan • Pelaksanaan *Training* TI kepada *User*. • IT Personnel Competency Development • Corporate IT Security Awareness Improvement • Implementation of IT Training to User

Realisasi *Master Plan* Teknologi Informasi Tahun 2019

Inisiatif dan program kerja Teknologi Informasi sesuai MPTI yang berhasil direalisasikan pada tahun 2019, sebagai berikut:

Realization of Information Technology Master Plan in 2019

Information Technology initiatives and work program based on MPTI that are successfully implemented in 2019, as follows:

Inisiatif | Initiatives	Target	%
Penyusunan Rencana Peningkatan Kapasitas Penyimpanan Data dan Jaringan (Pengadaan Nutanix) **Preparation of Data Storage and Network Capacity Upgrade Plan (Nutanix Procurement)**	Oktober October	100%
Pengadaan Server pada *Disaster Recovery Center* (Pengadaan Nutanix) **Server Procurement for Disaster Recovery Center (Nutanix Procurement)**	Oktober October	100%
Implementasi *Backup* Jaringan pada Cabang (Sophos Red) **Implementation of Network Backup at Branch (Sophos Red)**	Desember December	100%
Pengembangan Sistem Aplikasi *Suretyship* (BSB, Mob App) **Suretyship Application System Development (BSB, Mob App)**	Februari February	100%

Inisiatif | Initiatives	Target	%
Pengembangan Sistem Aplikasi *Call Center* Call Center Application System Development	Februari February	100%
Implementasi *Email Corporate* Corporate Email Implementation	Februari February	100%
Pengembangan Sistem Aplikasi *Project Management* Project Management Application System Development	Juni June	100%
Pembaruan Kebijakan dan Prosedur TI IT Policy and Procedure Update	Juni June	100%
Enhancement Sistem Aplikasi *Channel Online* untuk Mitra Bisnis (*Mobile*, Situs *Online*, dll) Online Channel Application System Enhancement for Business Partners (Mobile, Website Online, others)	Desember December	100%
Pengembangan Sistem Aplikasi Pembayaran Ujrah (BNI Syariah, BSM, BSB) Ujrah Payment Application System Development (BNI Syariah, BSM, BSB)	Desember December	100%
***Enhancement* Sistem Aplikasi Manajemen Surat Elektronik (MSE)** Electronic Mail Management (MSE) Application System	September	100%
Implementasi *Tools* MIS, EIS (Sistem *Dashboard*) dan Data *Analytical* dengan Tableau Implementation of MIS, EIS Tools (Dashboard System) and Analytical Data with Tableau	Desember December	100%
Pembaruan Struktur Organisasi TI dan Tata Kerja Divisi/Departemen TI IT Organization Structure and IT Division/Department Work Procedure Update	November	100%
Peningkatan IT *Security Awareness* Perusahaan Corporate IT Security Awareness Improvement	Oktober October	100%

Tata Kelola TI

Implementasi Teknologi Informasi di Perseroan juga diarahkan untuk mendukung Tata Kelola Tekonologi Informasi. Pada tahun 2019, Tata Kelola TI di Perseroan menggunakan standard COBIT 4.1 yang dikembangkan oleh TI *Governance Institute* dan merupakan bagian dari *Information System Audit and Control Association* (ISACA) sesuai dengan acuan pada Permen BUMN No. Per-02/1VIBU/2013 tentang Panduan Penyusunan

IT Governance

Information Technology implementation in the Company is also aligned to support Information Technology Governance. In 2019, IT Governance in the Company has applied COBIT 4.1 standard, which was developed by IT Governance Institute and is part of the Information System Audit and Control Association (ISACA) in accordance with the reference to Minister of State Enterprises Regulation No. Per-02/1VIBU/2013 concerning Guidelines for

Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. Kerangka Kerja COBIT 4.1 terdiri dari 4 (empat) domain utama, yaitu:

- *Plan & Organize* (Perencanaan)
- *Acquire & Implement* (Pengembangan)
- *Deliver & Support* (Operasional)
- *Monitor & Evaluate* (Pengawasan)

Pelatihan TI

Pada tahun 2019, Perseroan mengikut sertakan personil TI dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Preparation of Information Technology Management in State-Owned Enterprises. The COBIT 4.1 Framework covers 4 (four) main domains, as follows:

- Plan & Organize (Planning)
- Acquire & Implement (Development)
- Deliver & Support (Operational)
- Monitor & Evaluate (Monitoring)

IT Training

In 2019, the Company participated IT personnel in training and competency development, as follows:

Pelatihan TI
IT Training

No	Pelatihan | Training	Waktu Date	Tempat Location	Penyelenggara Provider	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	**Android Developer Training**	Maret – Juni 2019 March – June 2019	Jakarta	Webhozz Training	10.000.000
2	**In House Training "Implementasi Aplikasi Openbravo"** "Implementation of Openbravo Application"	September 2019	Jakarta	CV Teknologi Nusantara (Loginusa)	20.300.000

Profil Kepala Departemen Teknologi Informasi
Profile of Head of Information Technology Department



Sugita Alnardi

Plt. Kepala Departemen Teknologi Informasi
Alternate Head of Information Technology Department

Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Saat ini berdomisili di Bekasi.

Beliau menjabat sebagai Plt. Kepala Departemen TI sejak Juni tahun 2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Unit Pengembangan (2018-2019); *Senior Staff System Analyst & User Representative* (2016-2018). Sebelum bergabung di Askrindo Syariah, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi MIS *Micro Banking Group* PT Bank Syariah Mandiri (2014-2015), *Programmer* & MIS MBG PT Bank Syariah Mandiri (2009-2013), *IT Support* PT Surya Artha Chanya (2006-2009), *Web Admin* PT Newater Persada (2005-2006).

Beliau mendapatkan gelar S1 Jurusan Teknologi Informasi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009.

Indonesian, 36 years. Currently lives in Bekasi.

He is appointed as Act. Head of IT Department since June 2019. Previously, he was assigned as Head of Development Unit (2018 – 2019), Senior Staff System Analyst & User Representative (2016 – 2018). Prior joining with Askrindo Syariah, he worked as Head of MIS Section, Micro Banking Group PT Bank Syariah Mandiri (2014 – 2015), Programmer & MIS MBG PT Bank Syariah Mandiri (2009 – 2013), IT Support PT Surya Artha Chanya (2006 – 2009), Web Admin PT Newater Persada (2005 – 2006).

He earned Bachelor's Degree majoring Information Technology from Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta in 2009.

05

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management's Discussion and Analysis





Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management's Discussion and Analysis

Selama tahun 2019, Askrindo Syariah berhasil mencapai kinerja positif dan terus mendukung tercapainya kemaslahatan masyarakat melalui layanan penjaminan berkualitas.

In 2019, Askrindo Syariah successfully achieved positive performance and always supports achievement of greater benefits for the society by providing excellent guarantee services.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TINJAUAN MAKROEKONOMI GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global 2019 melambat menjadi 2,9% serta diikuti oleh penurunan volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Kondisi ini mendorong ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi sampai triwulan III-2019 dan mengakibatkan berkurangnya aliran modal global ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian pasar yang secara umum masih didominasi oleh berlanjutnya ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dirasakan mulai berkurang pada triwulan akhir 2019, pasca perundingan dagang tahap pertama antara AS dan Tiongkok serta ditempuhnya banyak kebijakan stimulus fiskal dan moneter di berbagai negara guna memitigasi risiko perlambatan ekonomi. Respons tersebut termasuk langkah *the Fed* yang mulai menurunkan suku bunga kebijakan, *Fed Funds Rate*, pada akhir Juni 2019. Selain kebijakan siklikal, kebijakan struktural juga ditempuh di banyak negara guna memperkuat ketahanan ekonomi, meskipun kecepatannya belum sesuai harapan akibat siklus ekonomi dunia yang belum kuat.

TINJAUAN EKONOMI NASIONAL

Dinamika perekonomian global yang terjadi selama tahun 2019 pada akhirnya berdampak pada sejumlah tantangan pada perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi 2019 tidak sekuat pertumbuhan tahun sebelumnya, meskipun tetap berdaya tahan ditopang permintaan domestik yang baik dan stabilitas yang terjaga. Ketahanan ekonomi Indonesia selama tahun 2019 secara signifikan didorong oleh komitmen dan sinergi kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, serta otoritas terkait. Di tengah kinerja sektor eksternal yang kurang menguntungkan, permintaan

MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS GLOBAL MACROECONOMIC REVIEW

Global economic growth in 2019 slowed to 2.9% and was followed by fall of global trade volume and commodity prices. This condition triggered high uncertainty in global financial markets as of third quarter of 2019 and resulted in reduced global capital flows to developing countries, including Indonesia. Market uncertainties, which are still generally dominated by sequence of tensions in trade war between United States and China, began to ease in the final quarter of 2019, after the first phase trade negotiations between te US and China and the adoption of couple of fiscal and monetary stimulus policies in various countries to mitigate the economic slowdown risk. The response included the Fed's initiative to start tapering its benchmark rates, the Fed Funds Rate, as the end of June 2019. In addition to cyclical policies, structural policies were also adopted in many countries to strengthen economic resilience, even though the pace was not as expected due to the sluggish global economic cycle.

NATIONAL ECONOMIC REVIEW

Global economy dynamics occurred throughout 2019 ultimately affected on a number of challenges to domestic economy. In 2019, the economic growth was moderated if compared to previous year's growth, although remained resilient supported by good domestic demand and maintained stability. Indonesia's economic resilience in 2019 was significantly driven by commitment and synergy of the policies implemented by the Government, Bank Indonesia, and related authorities. Amidst sluggish external sector performance, domestic demand remained

domestik tetap kuat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 tetap baik yakni 5,02% (Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2019, Bank Indonesia).

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat berdampak pada turunnya kinerja ekspor Indonesia 2019 di mana ekspor terkontraksi hingga 0,87% pada tahun 2019 dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 6,55% pada tahun 2018. Perbaikan ekspor tercatat sedikit mereda pada semester II 2019 ditopang oleh peningkatan permintaan beberapa produk ekspor, seperti *crude palm oil* (CPO) dan batu bara. Perbaikan ekspor di beberapa komoditas merupakan dampak diversifikasi produk dan tujuan ekspor, serta beberapa kebijakan domestik. Diversifikasi produk ekspor didukung daya saing yang membaik sehingga menopang kinerja positif beberapa produk ekspor seperti produk besi baja, otomotif, *pulp dan waste paper*, emas, dan serat tekstil.

Laju inflasi berhasil dikendalikan tetap rendah di mana Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2019 tercatat 2,72%, menurun dibandingkan dengan capaian 2018 yang mencapai 3,13%. Perkembangan ini membawa inflasi IHK kembali berada dalam kisaran sasaran 3,5±1%, melanjutkan pencapaian 4 tahun terakhir yang juga konsisten berada dalam kisaran sasarannya. Inflasi 2019 yang rendah dipengaruhi faktor siklikal permintaan domestik yang terjaga dan nilai tukar yang terapresiasi, serta inflasi kelompok *Administered Prices* yang rendah. Selain itu, inflasi yang tetap rendah juga dipengaruhi oleh perbaikan struktural seperti peran ekspektasi inflasi dalam pembentukan inflasi yang makin besar dan terjangkar, dampak nilai tukar ke inflasi yang menurun, serta dampak positif sinergi koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi pangan.

Mencermati dinamika perekonomian tahun 2019, Bank Indonesia secara konsisten fokus kepada upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan agar stabilitas sistem keuangan terkendali. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat strategi operasi moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia juga kemudian melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah pada Juni 2019. Selama tahun 2019, Bank Indonesia tercatat menerapkan penurunan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) beberapa kali yaitu pada bulan Juli 2019, BI7DRR diturunkan sebesar 25bps menjadi 5,75%, kemudian kembali menurunkan masing-masing 25bps di bulan Agustus, September, dan Oktober 2019 hingga menjadi 5,00% dan bertahan sampai Desember 2019.

strong thereby capable to underpin Indonesia's economic growth in 2019 to remain positive at 5.02% (Source: Indonesia Economic Report 2019, Bank Indonesia).

The slowing global economic growth affected to the decline in Indonesia's export performance in 2019 where exports contracted to 0.87% in 2019 compared to growth of 6.55% in 2018. The exports recovery recorded a slight easing by the second half of 2019 supported by increasing demand for some export products, such as crude palm oil (CPO) and coal. Improvement in exports of several commodities became consquences of product diversification and export destinations, as well as several domestic policies. Diversification of export products is supported by improved competitiveness that supports the positive performance of several export products such as steel, automotive, pulp and waste paper, gold and textile fiber products.

Inflation rate has been controlled to stay low, with the Consumer Price Index (CPI) inflation stood at 2.72% in 2019, down compared to 3.13% level achieved in 2018. This progress brought CPI inflation rebound around the target range of 3.5 ± 1%, continuing the achievement in the last 4 years which was also consistently within its target range. The low inflation in 2019 was influenced by the cyclical factors of maintained domestic demand and the appreciated exchange rate, as well as low inflation in the Administered Prices group. In addition, inflation that remained low was also influenced by structural improvements such as role of inflation expectations in the formation of increasingly large and anchored inflation, impact of the exchange rate to declining inflation as well as positive impact of the synergy between the Government and Bank Indonesia coordination in controlling the food inflation.

Analyzing the economic dynamics in 2019, Bank Indonesia consistently focused on the efforts to maintain adequate liquidity in the banking system thereby the financial system stability was controlled. This step was taken by strengthening the monetary operations strategy and maintaining the stability of Rupiah exchange rate. Bank Indonesia also relaxed monetary policy through a reduction in the Rupiah Statutory Reserves (GWM) in June 2019. In 2019, Bank Indonesia was noted to have implemented 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tapering several times, such as in July 2019, when BI7DRR was lowered by 25bps to 5.75%, then 25bps tapering, respectively, in August, September and October 2019 to 5.00% and sustained as of December 2019.

TINJAUAN INDUSTRI PENJAMINAN SYARIAH

Perbankan Syariah Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hal tersebut terlihat dari volume usaha yang terus tumbuh, dana investasi dan dana titipan masyarakat serta penyaluran pembiayaan yang terus meningkat. Selain itu ekspansi yang dilakukan perbankan syariah mulai membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari dari pangsa bank syariah terhadap industri perbankan yang sudah menembus 6,01% per Oktober 2019 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau mencapai 513 triliun, dimana pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

Target Pemerintah untuk mencapai pangsa pasar bank syariah dalam jangka panjang sebesar 20% memerlukan beberapa dukungan dan strategi. Beberapa upaya dari Pemerintah sudah dilakukan, misalnya regulasi melalui POJK Nomor 28 tahun 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.

Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan telah diresmikannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 diharapkan dapat mengembangkan dan memicu potensi industri keuangan dan ekonomi syariah termasuk didalamnya perbankan syariah. Dalam MEKSI tersebut ada empat langkah dan strategi utama dalam mendukung ekonomi syariah di Indonesia sebagai berikut :

- Penguatan halal *value chain* dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi.
- Penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini.
- Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal *value chain*.
- Penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

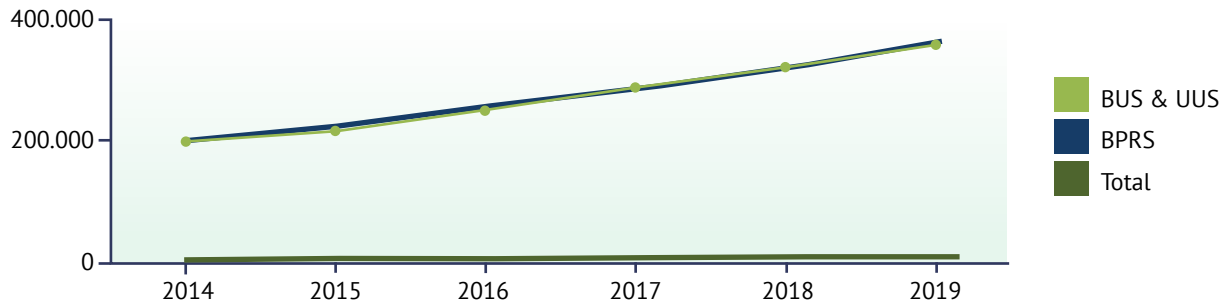
SHARIA GUARANTEE INDUSTRY REVIEW

Indonesian Sharia banking consists of Sharia Commercial Banks (BUS), Sharia Business Units (UUS), and Sharia Rural Financing Banks (BPRS) that are continuously indicating positive growth. This can be inferred from the growing business volume, investment funds and public deposit funds as well as the continued distribution of funding. In addition, the expansion carried out by Islamic banking began to bear fruit. This can be seen from the share of Islamic banks to the banking industry which has penetrated 6.01% as of October 2019 according to the Financial Services Authority (OJK) data or reached 513 trillion, where this achievement is the highest in history.

Government target to reach the Islamic banking market share in the long run by 20% requires some support and strategy. Some initiatives implemented by Government have been carried out, most recently for example through the issuance of POJK Number 28 of 2019 concerning Banking Synergy in One Ownership for the Development of Islamic Banking.

Establishment of National Sharia Finance Committee (KNKS) and the inauguration of the 2019-2024 Indonesian Sharia Economic Master Plan (MEKSI) are expected to develop and trigger potential of the sharia financial and economic industry including the sharia banking. MEKSI includes four main steps and strategies in supporting the sharia economy in Indonesia as follows:

- Strengthening halal value chain with a focus one considered potential and highly competitive sectors.
- Strengthening the Islamic financial sector with a master plan that has been outlined in the Indonesian Sharia Financial Architecture Master Plan (MAKSI) previously and refined into this master plan.
- Strengthening Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector as main driver of the halal value chain.
- Strengthening the digital economy, especially trading (e-commerce, market place) and finance (financial technology) to encourage and accelerate the achievement of other strategies.



Statistik Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah
Sharia Banking Financing Composition Statistics

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Lembaga Keuangan | Financial Institution	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit	199,330	212,996	248,007	285,695	320,193	355,182
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sharia Rural Bank	5,005	5,756	6,663	7,764	9,084	9,943
Total Pembiayaan Syariah **Total Sharia Financial**	**204,335**	**218,762**	**254,670**	**293,459**	**329,277**	**365,125**

Statistik Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah, Dana Pihak Ketiga, LDR dan Aset Perbankan Syariah (BUS, UUS & BPRS)
Statistics of Sharia Banking Financing, Third Party Fund, LDR and Sharia Banking Assets (BUS, UUS & BPRS)

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Komponen | Component	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pembiayaan | Financing	204,335	218,761	254,669	293,459	329,277	365,125
Dana Pihak Ketiga | Third Party Fund	221,886	235,976	285,158	341,875	379,963	425,290
%LDR (*Loan to Deposit Ratio*)	92.1%	92.7%	89.3%	85.8%	86.7%	85.9%
Aset | Assets	283,400	310,363	370,786	451,145	643,006	707,279

Sampai dengan Desember 2019 volume pembiayaan perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) sebesar Rp365,13 triliun yang terdiri dari komposisi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp355,13 triliun dan komposisi BPRS sebesar Rp9,94 triliun. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah Desember 2019 (*year on year*) naik sebesar 10,89% dengan realisasi Desember 2017 sebesar Rp329,28 triliun menjadi Rp365,13.

As of December 2019, volume of sharia banking financing (BUS, UUS and BPRS) achieved Rp365.13 trillion, consisting of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit shares of Rp355.13 trillion and BPRS share of Rp9.94 trillion. Sharia banking financing growth in December 2019 (year on year) increased by 10.89% from the realization as of December 2017 amounting to Rp329.28 trillion to Rp365.13.

Peningkatan pada dana pihak ketiga (DPK) sampai Desember 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 11,93% menjadi Rp425,30 triliun dari Rp379,96 triliun pada tahun 2018. Pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar Rp45,33 triliun dari periode Desember 2018.

As of December 2019, the increase in third party funds (DPK) experienced a growth of 11.93% to Rp425.30 trillion from Rp379.96 trillion in 2018. The sharia banking assets growth increased by Rp45.33 trillion from the December 2018 period.

Pada Desember 2019 komposisi akad pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh akad *murabahah* sebesar Rp168 triliun, kemudian akad *musyarakah* dengan nilai sebesar Rp158,61 triliun, akad *mudharabah* sebesar Rp14,02 triliun dan akad lainnya sebesar Rp838 miliar.

In December 2019, the composition of sharia banking financing contract was dominated by *murabahah* contracts of Rp168 trillion, followed by *musyarakah* contracts of Rp158.61 trillion, *mudharabah* contracts of Rp14.02 trillion and other contracts of Rp838 billion.

Statistik Akad Pembiayaan BUS, UUS, dan BPRS
Statistic of Financing Akad of BUS, UUS and BPRS

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Akad Pembiayaan | Financing Akad	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Akad Mudharabah | Mudharabah Contract	14,476	14,989	15,447	17,214	16,047	14,020
Akad Musyarakah | Musyarakah Contract	49,955	61,365	79,196	102,338	130,479	158,612
Akad Murabahah | Murabahah Contract	121,337	126,602	144,589	156,181	161,746	168,111
Akad Istishna | Istishna Contract	646	781	887	1,210	1,644	2,164
Akad Ijarah | Ijarah Contract	11,625	10,637	9,157	9,253	10,644	10,630
Akad Qardh | Qardh Contract	6,063	4,075	4,877	6,539	7,859	10,749
Lainnya | Others	233	312	516	724	858	838
Total Pembiayaan | Total Financing	**204,335**	**218,761**	**254,669**	**293,459**	**329,277**	**365,125**

Melihat dari komposisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Desember 2019, nilai LDR perbankan syariah mencapai 85,9 %. Hal ini menunjukkan ekspansi pembiayaan masih dilakukan, sehingga menjadi peluang bagi Askrindo Syariah untuk meningkatkan pangsa pasar.

Mengacu pada data statistik akad pembiayaan syariah, dapat diketahui bahwa pembiayaan masih didominasi oleh akad murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja yang bersifat produktif masih tumbuh. Disisi lain pembiayaan untuk komsumsi (pembelian barang) juga mulai bertumbuh.

Considering composition of the Loan to Deposit Ratio (LDR) in December 2019, LDR of the sharia banking reached 85.9%. This indicated that the financing expansion continues that brings opportunity for Askrindo Syariah to increase our market share.

Referring to the sharia financing contract statistics, the financing is reported to be still dominated by murabahah contracts. This shows that productive working capital financing is still growing. Meanwhile, financing for consumer needs (purchase of goods) also startted to grow.

Statistik Pembiayaan dan NPF (BUS, UUS dan BPRS)
Statistics of Financing and NPF (BUS, UUS, and BPRS)

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha Type of Use and Business Category	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Modal Kerja | Working Capital	80,283	82,508	90,100	102,781	108,483	114,988
NPF	5,010	5,228	5,372	5,600	4,228	6,033
Investasi | Investment	42,612	52,798	61,167	68,079	77,047	88,481
NPF	1,896	2,383	3,021	3,823	3,342	2,876
Konsumsi | Consumer	81,440	83,455	103,402	122,598	143,747	161,657
NPF	2,118	2,108	2,349	2,383	2,407	2,821
Total Pembiayaan | Total Financing	**204,335**	**218,761**	**254,669**	**293,459**	**329,277**	**365,125**
Total NPF	**9,024**	**9,719**	**10,742**	**11,806**	**9,977**	**11,730**

Sampai Desember 2019, pembiayaan tidak lancar (NPF) sebesar Rp11,73 triliun atau naik sebesar 17,57% dari Desember 2018. Jumlah pembiayaan secara *year on year* (yoy) dari periode yang sama di Desember 2018 meningkat sebesar 10,89% dari Rp329,28 triliun menjadi Rp365,13 triliun. Sektor konsumsi masih mendominasi dalam komposisi pembiayaan perbankan syariah yang sebesar

As of December 2019, non-performing financing (NPF) achieved Rp11.73 trillion or increased by 17.57% from December 2018. Total financing year-on-year (yoy) from the same period in December 2018 increased by 10.89% from Rp329.28 trillion to Rp365.13 trillion. The consumer sector still dominated composition of sharia banking financing, which amounted to Rp161.66 trillion, followed

Rp161,66 triliun disusul pembiayaan untuk sektor modal kerja yang sebesar Rp144,99 triliun dan sektor investasi yang sebesar Rp88,45 triliun. Walaupun sektor konsumsi mendominasi komposisi pembiayaan, sektor konsumsi menyumbang NPF terendah yang sebesar Rp2,82 triliun. Untuk pembiayaan non-lancar (NPF) yang terbesar sampai dengan Desember 2019 masih didominasi oleh sektor modal kerja yang sebesar Rp6,03 triliun.

PASAR ASKRINDO SYARIAH

a. Perbankan Syariah

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah OJK Desember Tahun 2019, terlihat bahwa pembiayaan perbankan syariah mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Berikut adalah tabel statistik pembiayaan syariah:

by financing for the working capital sector of Rp144.99 trillion and the investment sector of Rp88.45 trillion. Although the consumption sector still dominated the financing composition, the consumer sector contributed the lowest NPF of Rp2.82 trillion. As of December 2019, the highest non-performing financing (NPF) was still dominated by the working capital sector, which amounted to Rp6.03 trillion.

MARKET OF ASKRINDO SYARIAH

a. Sharia Banking

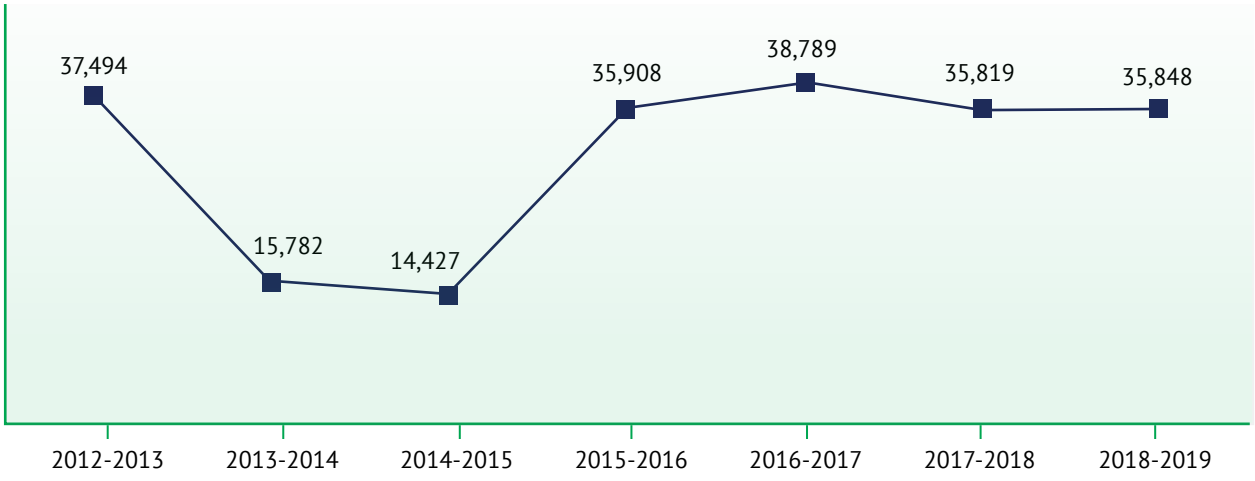
Based on OJK Sharia Banking Statistics Data for December 2019, financing for sharia banking is seen growing every year. The sharia financing statistics table is as follows:

Statistik Pembiayaan Per Jenis Penggunaan (BUS, UUS, dan BPRS)
Statistics of Financing by Disbursement Type (BUS, UUS, and BPRS)

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Jenis Penggunaan Disbursement Type	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BUS & UUS							
Modal Kerja | Working Capital	71,566	77,935	79,949	87,363	99,825	105,055	110,586
Investasi | Investment	33,839	41,718	51,690	60,042	66,848	75,730	86,972
Konsumsi | Consumer	78,715	79,677	81,357	100,602	119,021	139,408	157,624
TOTAL BUS & UUS	184,120	199,330	212,996	248,007	285,695	320,193	355,182
BPRS							
Modal Kerja | Working Capital	2,206	2,348	2,559	2,737	2,956	3,429	4,401
Investasi | Investment	612	893	1,109	1,126	1,231	1,317	1,508
Konsumsi | Consumer	1,615	1,763	2,097	2,800	3,577	4,339	4,034
TOTAL BPRS	**4,433**	**5,005**	**5,765**	**6,663**	**7,764**	**9,084**	9,943
TOTAL PEMBIAYAAN SYARIAH	**188,553**	**204,335**	**218,762**	**254,670**	**293,459**	**329,277**	365,125

Pertumbuhan *Outstanding* Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan (BUS, UUS dan BPRS)
Sharia Financing Outstanding Growth Based on Disbursement Type (BUS, UUS and BPRS)



Pertumbuhan *Outstanding* Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan (BUS, UUS dan BPRS)
Sharia Financing Outstanding Growth Based on Disbursement Type (BUS, UUS and BPRS)

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Jenis Penggunaan Disbursement Type	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Rata-Rata	%
BUS & UUS									
Modal Kerja Working Capital	15,469	6,369	2,014	7,414	12,462	5,230	5,531	8,748	**8.33%**
Investasi | Investment	7,254	7,879	9,972	8,352	6,806	8,882	11,242	8,173	**10.79%**
Konsumsi | Consumer	13,862	962	1,680	19,245	18,419	20,387	18,215	14,968	**10.74%**
TOTAL BUS & UUS	**36,614**	**15,210**	**13,667**	**35,011**	**37,687**	**34,498**	**34,989**	**31,889**	**9.96%**
BPRS									
Modal Kerja Working Capital	370	142	211	178	219	473	973	366	**10.68%**
Investasi | Investment	147	281	215	17	105	86	191	144	**10.92%**
Konsumsi | Consumer	363	148	334	703	777	762	(305)	366	**8.43%**
TOTAL BPRS	**880**	**571**	**760**	**897**	**1,101**	**1,321**	**859**	**876**	**9.64%**
GRAND TOTAL	**37,494**	**15,782**	**14,427**	**35,908**	**38,789**	**35,819**	**35,848**	**32,765**	**9.95%**

Berdasarkan data pertumbuhan pembiayaan syariah di atas, terlihat bahwa pertumbuhan pembiayaan syariah memiliki siklus 5 tahunan. Dimana pertumbuhan terendah yaitu selama tahun 2014 menuju tahun 2015. Sesuai dengan data statistik ditentukan rata-rata pertumbuhan pembiayaan per tahun nya ialah sebesar 9,95%. Dengan memperhitungkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 9,95%, dapat ditentukan Total Pembiayaan Bank umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan BPRS di 5 tahun mendatang. Adapun rincian data adalah sebagai berikut:

Based on the sharia financing growth data above, it can be inferred that the sharia financing growth has the 5-years cycle. The lowest growth was achieved in 2014 towards 2015. Based on the statistics, average financing growth per year is 9.95%. By calculating the financing growth by 9.95%, Total Financing disbursed by Sharia Commercial Bank & Sharia Business Unit and BPRS in the next 5 years can be predicated. Detail explanation of the data is as follows:

Proyeksi *Outstanding* Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan (BUS, UUS dan BPRS) 2019-2023
Projection of Outstanding Financing Based on Disbursement Type (BUS, UUS, and BPRS) 2019-2023

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Jenis Penggunaan | Disbursement Type	2019	2020	2021	2022	2023
BUS & UUS					
Modal Kerja | Working Capital	**110,586**	119,795	129,770	140,576	152,281
Investasi | Investment	**86,972**	96,359	106,758	118,279	131,044
Konsumsi | Consumer	**157,624**	174,548	193,289	214,042	237,024
TOTAL BUS & UUS	**355,182**	**390,701**	**429,816**	**472,897**	**520,349**
BPRS					
Modal Kerja | Working Capital	**4,401**	4,872	5,392	5,968	6,605
Investasi | Investment	**1,508**	1,673	1,856	2,058	2,283
Konsumsi | Consumer	**4,034**	4,374	4,743	5,142	5,576
TOTAL BPRS	**9,943**	**10,918**	**11,990**	**13,168**	**14,464**
TOTAL PEMBIAYAAN SYARIAH	**365,125**	**401,619**	**441,806**	**486,065**	**534,813**

b. Non Perbankan Syariah

Sektor syariah dalam industri *multifinance* syariah (lembaga pembiayaan syariah) terus menunjukkan tren penurunan penyaluran pembiayaan. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang lembaga pembiayaan Desember 2019, piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tercatat Rp30,82 triliun atau meningkat 9,80% dibandingkan dengan periode yang sama Desember 2018 sebesar Rp28,07 triliun. Peningkatan ini terjadi setelah dua tahun sebelumnya mengalami penurunan. Namun, prospek penyaluran pembiayaan *multifinance* memungkinkan terus berkembang, seiring dengan dilaksanakannya amandemen Peraturan OJK No.29/2019 tentang perusahaan pembiayaan, dimana uang muka pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%. Hal itu bisa diterapkan oleh perusahaan pembiayaan dengan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) di bawah 1%.

Di sisi lain, Non-Bank syariah lainnya terus menunjukan pertumbuhan pembiayaan yang positif. Rincian penyaluran pembiayaan Non-Bank syariah tersaji dalam tabel berikut:

b. Non-Sharia Banking

In sharia multifinance industry (sharia financing institution), sharia sector continuously demonstrates a slowing financing disbursement trend. Based on statistics issued by the Financial Services Authority (OJK) on financing institutions for December 2019, financing receivables with sharia principles achieved Rp30.82 trillion, an increased by 9.80% compared to Rp28.07 trillion booked at same period in December 2018. The increment occurred after decreasing for last two years. However, the multifinance financing is projected to continuously grow, along with the implementation of the OJK Regulation No.29/2019 concerning financing companies, regulating down payment for motor vehicle financing is 0%. This is eligible to be applied by finance companies with loss or Non-Performing Financing (NPF) below 1%.

On the other hand, other sharia Non-Banking Financial Institutions (Non-Bank) also consistently demonstrates positive financing growth. Details of Sharia Non-Banking Financial Institutions (Non-Bank) financing disbursement is presented in the following table:

Statistik Non Bank Syariah OJK
OJK's Non Sharia Bank Statistics

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Non Bank	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Modal Ventura Syariah Sharia Venture Capital	314	401	753	870	946	2,321
Pembiayaan Syariah Sharia Financing	20,429	18,399	31,451	28,645	20,014	17,920
Lembaga Mikro Syariah Sharia Micro Institution	N/A	3.4	8.8	12.0	15.4	24.3
Pegadaian Syariah Pegadaian Syariah	N/A	3,749	4,572	5,222	7,094	10,556
Total	**20,743**	**22,553**	**36,784**	**34,750**	**28,070**	30,821

Pertumbuhan *Outstanding* Pembiayaan Non Bank Syariah
Non Sharia Bank Financing Outstanding Growth

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Non Bank	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	%
Modal Ventura Syariah Sharia Venture Capital	87	351	118	76	1,375	17.29%
Pembiayaan Syariah Sharia Financing	(2,030)	13,052	(2,805)	(8,631)	(2,094)	(2.80%)
Lembaga Mikro Syariah Sharia Micro Institution	N/A	5.4	3.1	3	9	21.47%
Pegadaian Syariah Pegadaian Syariah	N/A	823	650	1,872	3,462	16.12%
Total	**(1,942)**	**14,232**	**(2,035)**	**(6,680)**	**2,751**	8.93%

Dengan memperhitungkan pertumbuhan pembiayaan pada masing-masing Non Bank syariah, dapat ditentukan proyeksi pembiayaan di 5 tahun mendatang sebagai berikut:

By calculating financing growth in each sharia Non-Banking Financial Institutions (Non Bank), financing projection for the next 5 years can be estimated, as follows:

Proyeksi *Outstanding* Pembiayaan Non Bank Syariah
Projection of Sharia Non-Banking Financial Institutions (Non Bank) Financing Outstanding

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Non Bank	2019	2020	2021	2022	2023
Modal Ventura Syariah | Sharia Venture Capital	2,321	2,722	3,201	3,765	4,427
Pembiayaan Syariah | Sharia Financing	17,920	18,637	19,382	20,158	20,964
Lembaga Mikro Syariah | Sharia Micro Institution	24	30	36	44	54
Pegadaian Syariah | Pegadaian Syariah	10,556	12,318	14,376	16,776	19,578
Total Non Bank Syariah	30,821	**33,707**	**36,996**	**40,743**	**45,023**

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Kinerja Per Segmen Usaha

Bisnis Perseroan pada tahun 2019 ditunjang oleh beberapa segmen, meliputi segmen produktif, konsumtif, *suretys* dan kontra bank garansi dengan nilai total penjaminan untuk tahun 2019 sebesar Rp22,7 triliun.

Dari sisi segmen produktif, produk penjaminan mikro tercatat masih menyumbang kontribusi terbesar, yaitu sekitar 53,39% dari total seluruh segmen produktif. Sementara dari segmen konsumtif, kontribusi terbesar berasal dari penjaminan konsumtif berbasis penghasilan tetap (potong gaji) sebesar 59,36% dan nilai klaim sebesar 26,07%.

Pada tahun 2019, produk penjaminan pembiayaan (*cash financing*) memberikan kontribusi sebesar 96,04%, sementara segmen *non-cash financing* yaitu *suretyship* dan kontra bank garansi, memberikan kontribusi sebesar 3,96%.

Guna meningkatkan kinerja segmen *non-cash financing*, Perseroan di 2019 menggalakkan perjanjian kerjasama (PKS) dengan beberapa mitra perbankan syariah melalui fasilitas *comercial line* dan mitra korporasi BUMN untuk menerbitkan bank garansi dan *surety bond* serta mengaktifkan kerja sama melalui agen-agen yang ada di seluruh jaringan kantor Perseroan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja *non-cash financing* di masa mendatang.

OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Performance By Business Segment

The Company's business in 2018 was supported by several segments, consisting of productive, consumer, suretys and counter-bank guarantee segments with the total guarantee value amounting to Rp22.7 trillion in 2019.

In terms of productive segment, microfinancing products continued to account for the largest portion, which was around 53.39% of the total productive segment. While from the consumptive segment, the largest contribution came from consumer fixed income guarantee of 59.36% and claim value of 26.07%.

In 2019, cash financing products contributed 96.04%, while the non-cash financing segment, namely suretyship and counter-bank guarantee, contributed 3.96%.

In order to improve the performance of non-cash financing segment, in 2019, the Company enforced Memorandum of Understanding (MOU) with several sharia banking partners and SOE corporate partners to issue guarantee bank and surety bonds as well as activate agents across office network of the Company. This step is expected to improve non-cash financing performance in the future.

Imbal Jasa Kafalah

Per 31 Desember 2019, jumlah pengguna jasa seluruh produk mencapai 3.312.715 debitur, meningkat 1,299% dibandingkan tahun 2018 sejumlah 236.815 Debitur. Perolehan Imbal Jasa Kafalah (IJK) gross pada tahun 2019 mencapai Rp317,28 miliar, meningkat 42,0% dibandingkan 2018 sebesar Rp223,48 miliar sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Kafalah fee Contribution

As of December 31, 2019, the number of service users of all products reached 3,312,715 principals, increased by 1.299% compared to 236,815 principals in 2018. Gross Kafalah Fee Contribution (IJK) achieved Rp317.28 billion in 2019, increased by 26.76% compared to Rp223.48 billion booked in 2018, as presented in the following table:

Dalam juta rupiah | In million rupiah

No.	Jenis Produk | Type of Product	Nilai Ujrah | Ujrah Value	
		2019	2018
1.	**Kafalah Pembiayaan** | Financing Kafalah	**304.722**	219.815
2.	**Kafalah Bank Garansi** | Guarantee Bank Kafalah	**12.085**	3.339
3.	**Kafalah Surety** | Surety Kafalah	**472**	330
Jumlah | Total		**317.280**	**223.484**

Kafalah Pembiayaan

Perseroan menjamin segala jenis pembiayaan, baik pembiayaan skala kecil maupun skala menengah, seperti pembiayaan Mikro, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi, Pembiayaan Kepemilikan Emas dan Penjaminan Proyek-Proyek, yang sifatnya berkelanjutan, dengan skema *stand by loan* yang menggunakan *terms of condition* dan proses *underwriting* yang berhati-hati.

Dari pelaksanaan operasional usaha pada tahun 2019, total pendapatan Imbal Jasa dari segmen kafalah pembiayaan mencapai Rp304.722 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp219.815 juta.

Kafalah Bank Garansi

Dari total nilai kafalah tahun 2019, total Imbal Jasa segmen Kafalah Bank Garansi adalah sebesar Rp12.085 juta dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3.339 juta. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk Bank Garansi oleh perbankan syariah nasional.

Kafalah *Surety*

Pada tahun 2018, dari total nilai kafalah tahun 2019, diperoleh total Imbal Jasa segmen Kafalah *Surety* sebesar Rp472 juta dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp330 juta. Produk Kafalah *Surety* belum memberikan kontribusi yang maksimal dikarenakan pangsa pasar yang belum luas di perbankan syariah.

Financing Kafalah

The Company guarantees all types of financing, both small and medium scale financing, such as Micro financing, Working Capital Financing, Investment Financing, Consumption Financing, Gold Ownership Financing and Project Guarantee, which are of a sustainable nature, with a stand by loan scheme that uses terms of conditions and prudent underwriting processes.

From the implementation of business operations in 2019, total revenue of Fee from kafalah financing segment reached Rp304,722 million compared to Rp219,815 booked in 2018.

Guarantee Bank Kafalah

From the total value of kafalah booked in 2019, total Fee from Kafalah Bank Guarantee segment amounted to Rp12,085 million compared to Rp3,339 million booked in 2018. These results indicated an increase in the use of Bank Guarantee products by national sharia banking.

Surety Kafalah

In 2019, from total value of kafalah booked in 2019, total Fee of Kafalah Surety segment achieved Rp472 million compared to Rp330 million booked in 2018. Kafalah Surety products have not shared maximum contribution as its market share was fairly limited in the sharia banking industry.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Uraian mengenai kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanti, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan opini wajar dalam semua hal yang material, yakni posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas, sesuai standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kinerja keuangan Perseroan ini dibahas dengan memperhatikan penjelasan dari pihak auditor eksternal mengenai catatan Laporan Keuangan Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Following financial performance analysis for the year ended on December 31, 2019 is prepared based on the Company's Financial Statements which are presented in accordance with the generally accepted Financial Accounting Standards (PSAK) in Indonesia. The financial statements have been audited by Public Accounting Firm Abadi Jusuf, Aryanti, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) with unqualified opinion fairly presented in all material respects, including the financial position, financial performance and cash flow, in accordance with Indonesian Financial Accounting standards. The Company's financial performance is discussed by considering notes of the external auditor regarding the company's financial statements, as an integrated part of this annual report.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

ASET | ASSETS

Dalam juta rupiah | In million rupiah

URAIAN	2019 Rp	2018 Rp	Perubahan Change	Persentase Percentage	DESCRIPTION
ASET					**ASSETS**
Kas dan bank	**24.312**	15.712	8.601	54,74%	Cash on hand and in banks
Piutang imbal jasa kafalah	**18.296**	6.751	11.545	171,02%	Kafalah fee receivables
Piutang penjaminan ulang	**23.062**	7.989	15.073	188,68%	Re-guarantee receivables
Piutang hasil investasi	**1.609**	381	1.228	322,03%	Investment income receivables
Investasi					Investments
Deposito berjangka	**436.450**	279.051	157.399	56,40%	Time deposits
Surat berharga syariah negara	**65.205**	-	65.205	100,00%	Government Sukuk
Reksadana	**25.606**	70.797	(45.190)	(63,83%)	Mutual funds
Biaya dibayar di muka	**6.793**	3.666	3.127	85,28%	Prepaid expenses
Aset tetap	**13.983**	11.315	2.668	23,58%	Fixed assets
Aset pajak tangguhan	**5.854**	3.521	2.333	66,25%	Deferred tax assets
Aset tidak berwujud	**1.332**	1.849	(517)	(27,95%)	Intangible assets
Aset lain-lain	**207**	197	10	5,09%	Other assets
JUMLAH ASET	**622.709**	**401.228**	**221.481**	**55,20%**	**TOTAL ASSETS**

ASET

Aset Perseroan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp622.709 juta, tumbuh sebesar Rp221.481 juta atau 55,20% dibandingkan Rp401.228 juta pada tahun 2018. Pertumbuhan aset pada tahun 2019 terutama dikontribusikan oleh aset investasi yang meliputi Deposito Rp436.450 juta, surat berharga syariah Rp65.205 dan Reksadana Rp25.606 juta.

Kas dan Bank

Kas dan bank tumbuh sebesar Rp8.601 juta atau 54,74% dari Rp15.712 juta pada tahun 2018 menjadi Rp24.312 juta pada tahun 2019. Pertumbuhan kas dan bank terutama disebakan oleh kebutuhan dana *cash* di tangan dan bank untuk keperluan operasional.

Piutang Imbal Jasa Kafalah

Piutang imbal jasa kafalah mencatat kenaikan signifikan sebesar Rp11.545 juta atau 171,02% dari Rp6.751 juta pada tahun 2018 menjadi Rp18.296 juta pada tahun 2019. Kenaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya piutang pihak berelasi dari Rp5,38 miliar di 2018 menjadi Rp18,60 miliar dan piutang pihak ketiga dari Rp2,27 miliar di 2018 menjadi Rp2,34 miliar.

Investasi

Perseroan membukukan total investasi sebesar Rp527.262 juta pada tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar Rp177.414 juta atau 50,71% dibandingkan Rp349.848 juta pada tahun 2018. Kenaikan investasi terutama dikontribusikan oleh naiknya deposito berjangka dari Rp279,05 miliar di 2018 menjadi Rp436,45 miliar di 2019, akibat adanya penambahan setoran modal yang terjadi pada akhir tahun 2019.

Aset Tetap

Perseroan membukukan aset tetap sebesar Rp13.983 juta per 31 Desember 2019, mengalami kenaikan sebesar Rp2.668 juta atau 23,58% dibandingkan Rp11.315 juta pada tahun 2018. Kenaikan aset tetap terutama dikontribusikan oleh peralatan komputer Rp6.395 juta di tahun 2018 menjadi Rp9.098 juta di tahun 2019.

ASSETS

As of December 31, 2019, assets booked Rp622,709 million, grew by Rp221,481 million or 55.20% compared to Rp401,228 million booked in 2018. The assets growth in 2019 was mainly contributed from investment assets including Time Deposits of Rp436,450 million, sharia securities of Rp65,205 millio and mutual funds of Rp25,606 million.

Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks grew by Rp8,601 million or 54.74% from Rp15,712 million in 2018 to Rp24,312 million in 2019. The cash on hand and in bank growth was mainly due to cash on hand and in banks requirements for operational needs.

Kafalah Fee Receivables

Kafalah fee receivables recorded significant growth of Rp11,545 million or 171.02% from Rp6,751 million in 2018 to Rp18,296 million in 2019. The increment was mainly driven by increasing payables with related parties from Rp5.38 billion in 2018 to Rp18.60 billion and payables with third parties from Rp2.27 billion in 2018 to Rp2.34 billion.

Investments

The Company booked total investments of Rp527,262 million in 2019, increased by Rp177,414 million or 50.71% compared to Rp349,848 million in 2018. The increasing investment was mainly contributed by increasing time deposits from Rp279.05 billion in 2018 to Rp436.45 billion in 2019, contributed from additional paid-in capital by end of 2019.

Fixed Assets

As of December 31, 2019, the Company booked fixed assets of Rp13,983 million, increased by Rp2,668 million or 23.58% compared to Rp11,315 million in 2018. The increasing fixed assets was mainly contributed from computer equipment of Rp6,395 million in 2018 to Rp9,098 million in 2019.

Dalam juta rupiah | In million rupiah

URAIAN	2019 Rp	2018 Rp	Perubahan Change	Persentase Percentage	DESCRIPTION
LIABILITAS					**LIABILITIES**
Utang ta'widh	**6.809**	1.734	5.076	292,79%	Ta'widh payables
Utang penjaminan ulang	**11.704**	11.989	(285)	(2,38%)	Re-guarantee payables
Pendapatan IJK diterima di muka	**10.503**	8.253	2.250	27,26%	Kafalah fee income in advance
Utang zakat	**2.392**	962	1.430	148,55%	Zakah payables
Utang pajak	**8.388**	5.912	2.477	41,89%	Taxes payables
Biaya yang masih harus dibayar	**5.230**	2.847	2.384	83,72%	Accrued expenses
Estimasi ta'widh retensi sendiri	**24.905**	18.520	6.386	34,48%	Estimated ta'widh reserved
Estimasi IJK yang belum merupakan pendapatan	**37.495**	22.125	15.369	69,46%	Estimated unearneh ujrah
Liabilitas imbalan pascakerja	**4.227**	2.206	2.021	91,61%	Post-employment benefits liabilities
Utang lain-lain	**679**	1.148	(469)	(40,88)%	Other payables
JUMLAH LIABILITAS	**112.333**	**75.697**	**36.637**	**48,40%**	**TOTAL LIABILITIES**

Perseroan mencatat total kewajiban sebesar Rp112.333 juta per 31 Desember 2019, mengalami kenaikan sebesar Rp36.637 juta atau 48,40% dibandingkan Rp75.697 juta pada tahun 2018. Kenaikan jumlah kewajiban Perseroan pada tahun 2019 disebabkan oleh kenaikan ta'widh secara signifikan di 2019, yang mencapai Rp5.076 juta dari realisasi ta'widh per 31 Desember 2018.

Utang Ta'widh

Perseroan mencatat utang ta'widh sebesar Rp6.809 juta pada tahun 2019, naik sebesar Rp5.076 juta atau 292,79% dibandingkan Rp1.734 juta pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya utang pihak berelasi Rp1.727 juta di 2018 menjadi Rp6.695 juta di 2019 dan utang pihak ketiga dari Rp114.71 juta di 2018 menjadi Rp6.41 juta di 2019.

Utang Penjaminan Ulang

Utang penjaminan ulang mengalami penurunan sebesar Rp285 juta atau 2,38% dari Rp11.989 juta pada tahun 2018 menjadi Rp11.704 juta pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh menurunya utang dari pihak berelasi dari Rp11.883 juta di 2018 menjadi Rp11.674 juta di 2019.

Pendapatan IJK Diterima Dimuka

Perseroan mencatat pendapatan IJK diterima di muka sebesar Rp10.503 juta pada tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar Rp2.250 juta atau 27,26% dibandingkan Rp8.253 juta pada tahun 2018.

The Company recorded total liabilities of Rp112,333 million as of December 31, 2019, increased by Rp36,637 million or 48.40% compared to Rp75,697 million in 2018. The increasing liabilities booked by the Company in 2019 was driven by significant increase in ta'widh in 2019, achieving Rp5,076 million from ta'widh realization as of December 31, 2018.

Ta'widh Payables

The Company recorded ta'widh payables of Rp6,809 million in 2019, increased by Rp5,076 million or 292.79% compared to Rp1,734 million in 2018. This was due to increasing payables with related parties from Rp1,727 million in 2018 to Rp6,695 million in 2019 and payables with third parties from Rp114,72 million in 2018 to Rp6,41 million in 2019.

Re-Guarantee Payables

Re-guarantee payables decreased by Rp285 million or 2.38% from Rp11,989 million in 2018 to Rp11,704 million in 2019. This was due to decreasing payables with related parties from Rp11,883 million in 2018 to Rp11,674 million in 2019.

Kafalah Fee Income in Advance

The Company recorded kafalah fee income in advance achieved Rp10,503 million in 2019, increased by Rp2,250 million or 27.26% compared to Rp8,253 million in 2018.

Utang Zakat
Utang zakat per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.392 juta, naik 148,55% atau sebesar Rp1.430 juta dari realisasi di tahun 2018 sebesar Rp962 juta.

Utang Pajak
Utang Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.388 juta, naik 41,89% atau sebesar Rp2.477 juta dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp5.912 juta. Hal ini disebabkan oleh beban pajak yang harus dibayar terdiri dari:

- Pajak Pasal 4 ayat 2 semula di 2018 Rp5.2 juta meningkat sebesar Rp100,2 juta atau 1927% menjadi Rp105 Juta di 2019.
- Pajak Penghasilan 25 semula di 2018 Rp355 juta meningkat sebesar Rp1.457 juta atau 410% menjadi Rp1.813 Juta di 2019.
- Pajak Penghasilan Badan 29 semula di 2018 Rp5.330 juta meningkat sebesar Rp1.048 atau 19,67% menjadi Rp6.378 Juta di 2019.

Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Perseroan mencatat biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp5.230 juta pada tahun 2019, naik sebesar Rp2.384 juta atau 83,72% dibandingkan Rp2.847 juta pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh :

- Biaya Pegawai, naik sebesar Rp2.879 juta atau 176,73% dari Rp1.629 juta di 2018 menjadi Rp4.508 juta di 2018;
- Biaya Jasa Profesional, naik sebesar Rp14.64 juta atau 20,33% dari Rp72.00 juta di 2018 menjadi Rp86.64 juta di 2019;
- Lain-lain, naik Rp399.63 juta atau 83,72% dari Rp236.31 juta di 2018 menjadi Rp635.94 juta di 2019.

Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri
Estimasi ta'widh retensi sendiri tercatat sebesar Rp24.905 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp6.386 juta atau 34,48% dibandingkan Rp18.520 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya nilai ta'widh yang menjadi retensi sendiri.

Estimasi IJK yang Belum Merupakan Pendapatan
Perseroan mencatat estimasi IJK yang belum merupakan pendapatan sebesar Rp37.495 juta pada tahun 2019, naik sebesar Rp15.369 juta atau 69,46% dibandingkan Rp22.125 juta pada tahun 2018.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja
Per 31 Desember 2019, liabilitas imbalan pasca kerja tercatat sebesar Rp4.227 juta, naik sebesar Rp2.021 juta atau 91,61% dibandingkan Rp2.206 juta pada tahun 2018. Kenaikan liabilitas imbalan pasca kerja terutama diakibatkan oleh bertambahnya iuran dari perusahaan yang harus dibayarkan.

Zakah Payables
As of December 31, 2019, zakah payables amounted Rp2,392 million, increased by 148.55% or Rp1,430 million compared to Rp962 million in 2018.

Taxes Payables
As of December 31, 2019, taxes payables amounted Rp8,388 million, increased by 41.89% or Rp2,477 million compared to Rp5,912 million in 2018. This was due self-paid taxes expenses, comprising of:

- Tax Article 4 point 2 from previously was Rp5,2 million in 2018 increased by Rp100.2 million or 1927% to Rp105 million in 2019.
- Income Tax Article 25 from previously was Rp355 million in 2018 increased by Rp1,457 million or 410% to Rp1,813 million in 2019.
- Entity Income Tax Article 29 from previously was Rp5,330 million in 2018 increased by Rp1,048 million or 19.67% to Rp6,378 million in 2019.

Accrued Expenses
The Company booked accrued expenses of Rp5,230 million in 2019, increased by Rp2,384 million or 83.72% compared to Rp2,847 million in 2018. This was contributed from:

- Employee expenses, increased by Rp2,879 million or 176.73% from Rp1,629 million in 2018 to Rp4,508 million in 2018;
- Professional fee, increased by Rp14,64 million or 20.33% from Rp72,00 million in 2018 to Rp86,64 million in 2019;
- Others, increased by Rp399,63 million or 83.72% from Rp236,31 million in 2018 to Rp635,94 million in 2019.

Estimated Ta'widh Reserved
Estimated ta'widh reserved was recorded at Rp24,905 million, increased by Rp6,386 million or 34.48% compared to Rp18,520 million in 2018. The increment was driven by increasing estimated ta'widh reserved.

Unearned Kafalah Fee Income
The Company booked unearned kafalah fee income of Rp37,495 million in 2019, increased by Rp15,369 million or 69.46% compared to Rp22,125 million booked in 2018.

Post-Employment Benefits Liabilities
As of December 31, 2019, post-employment benefits liabilities achieved Rp4,227 million, increased by Rp2,021 million or 91.61% compared to Rp2,206 million in 2018. The increasing post-employment benefits liabilities was due to increasing contributions from the companies to be paid.

Utang Lain-Lain

Perseroan mencatat utang lain-lain sebesar Rp679 juta pada tahun 2019, mengalami penurunan sebesar Rp469 juta atau 40,88% dibandingkan Rp1.148 juta pada tahun 2018.

Other Payables

The Company booked other payables of RP679 million in 2019, decreased by Rp469 million or 40.88% compared to Rp1,148 million booked in 2018.

EKUITAS | EQUITY

Dalam juta rupiah | In million rupiah

URAIAN	2019 Rp	2018 Rp	Perubahan Change	Persentase Percentage	DESCRIPTION
EKUITAS					**EQUITY**
Modal Saham	250.000	250.000	-	-	Share Capital
Tambahan modal disetor	150.000	-	150.000	100,00%	Paid in capital
Komponen ekuitas lainnya:	(1.727)	(9)	(1.718)	18706,16%	Other equity component:
Saldo laba:					Retained earnings:
Telah ditentikan penggunaannya	75.541	61.456	14.085	22,92%	Appropriate
Belum ditentukan penggunannya	36.562	14.085	22.477	159,58%	Unappropriate
JUMLAH EKUITAS	510.375	**325.531**	**184.844**	**56,78%**	**TOTAL EQUITY**

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perseroan, Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp510.375 juta, tumbuh sebesar Rp184.444 juta atau 55,20% dibandingkan Rp325.531 juta pada tahun 2018.

Based on the Company's Financial Statements (Audited), as of December 31, 2019, Equity achieved Rp510,375 million, grew by Rp184,444 million or 55.20% compared to Rp325,531 million booked in 2018.

Komponen ekuitas Perseroan pada tahun 2019 terdiri dari modal saham sebesar Rp250.000 juta, tambahan modal disetor sebesar Rp150.000 juta, komponen ekuitas lainnya sebesar Rp(1.727) juta serta saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp75.541 juta dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp36.562 juta.

In 2019, the Company's equity component comprised of share capital of Rp250,000 million, paid-in capital of Rp150,000 million, other equity component of equity Rp(1,727) million as well as appropriate retained earnings of Rp75,541 million and unappropriate retained earnings of Rp36,562 million.

LAPORAN LABA RUGI

Berdasaran Laporan Keuangan (*Audited*) Perseroan, Laporan Laba (Rugi) Komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Based on the Company's (Audited) Financial Statements, Statement of Comprehensive Profit or Loss for the Years ended on December 31, 2019 and December 31, 2018 is as follows:

Dalam juta rupiah | In million rupiah

URAIAN	2019 Rp	2018 Rp	Perubahan Change	Persentase Percentage	DESCRIPTION
Imbal Jasa Kafalah	317.280	223.485	93.795	41,97%	Kafalah Fee
Pendapatan Kafalah	216.973	156.030	60.943	28,09%	Underwriting Income - net
Beban Kafalah	94.022	75.099	18.923	20,13%	Kafalah Expenses
Pendapatan Kafalah Bersih	122.951	80.932	42.020	34,18%	Net Kafalah Income
Pendapatan investasi	20.028	12.655	7.373	36,81%	Investment income
Beban usaha	87.485	66.609	22.627	25,36%	Operating expenses

URAIAN	2019 Rp	2018 Rp	Perubahan Change	Persentase Percentage	DESCRIPTION
Laba Usaha	55.494	26.978	26.766	49,80%	Operating Income
(Beban) penghasilan Lain-lain	(3.063)	(4.249)	1.185	38,69%	Other (expenses) income
Laba Sebelum Zakat dan Pajak	52.431	22.729	29.702	56,65%	Profit Before Zakah and Income Tax
Zakat	(1.311)	(568)	(743)	56,65%	Zakah
Laba Sebelum Pajak	51.120	22.161	29.959	56,65%	Profit Before Income Tax
Jumlah (beban) manfaat pajak penghasilan	(14.558)	(8.076)	(6.482)	44,53%	Total income tax (expense) benefit
Laba Tahun Berjalan	36.562	14.085	22.477	61,48%	Profit for The Year
Pendapatan Komprehensif Lain	(1.718)	811	(2.529)	147,21%	Other Comprehensive Income
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	34.844	14.896	19.948	57,25%	Comprehensive Income for The Year

Perseroan mencatat pertumbuhan kinerja yang positif pada tahun 2019 dengan capaian laba tahun berjalan sebesar Rp36.562 juta, tumbuh sebesar Rp22.477 juta atau 61,48% dibandingkan Rp14.085 juta pada tahun 2018.

The Company recorded a positive performance growth in 2019 with profit for the year realization of Rp36,562 million, grew by Rp22,477 million or 61.48% compared to Rp14,085 million booked in 2018.

Pendapatan Kafalah

Jumlah pendapatan kafalah merupakan selisih dari imbal jasa kafalah bruto dengan beban penjaminan ulang, penurunan/peningkatan IJK yang belum merupakan pendapatan dan penerimaan kafalah lain.

- **Imbal Jasa Kafalah Bruto**
  Perseroan mencatat imbal jasa kafalah bruto sebesar Rp317.280 juta, naik sebesar Rp93.795 juta atau 41,97% dibandingkan Rp223.485 juta pada tahun 2018. Kenaikan imbal jasa kafalah bruto terutama dikontribusikan oleh :
  1. IJK pembiayaan produktif sebesar Rp222.884 juta naik 32,22% atau sebesar Rp54.310 juta dari Rp168.574 juta di tahun 2018.
  2. IJK pembiayaan konsumtif sebesar Rp81.839 juta naik 59,71% atau sebesar Rp30.597 juta dari Rp51.242 juta di tahun 2018.
  3. IJK *surety* sebesar Rp12.557 juta naik 242% atau sebesar Rp8.888 juta dari Rp3.669 di tahun 2018.

- **Beban Penjaminan Ulang**
  Beban penjaminan ulang tercatat sebesar Rp92.715 juta pada tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar Rp25.761 juta atau 27,79% dibandingkan Rp66.954 juta pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban penjaminan ulang pada kafalah produktif dari Rp15.726 juta di tahun 2018 menjadi Rp62.862 juta di 2019 dan kafalah *surety* dari Rp1.135 di tahun 2018 menjadi Rp3.924 juta di tahun 2019.
- **Penurunan IJK yang Belum Merupakan Pendapatan**
  Pada tahun 2019, penurunan IJK yang belum merupakan pendapatan tercatat sebesar Rp15.369 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp10.055 juta atau 65,42% dibandingkan Rp5.315 juta pada tahun 2018.

Kafalah Income

Total kafalah income is calculated from mismatch of gross kafalah fee contribution with re-guarantee expense, ujrah reserve and other kafalah income.

- **Gross Kafalah Receivables**
  The Company recorded gross kafalah receivables of Rp317,820 million, increased by Rp93,795 million or 29.56% compared to Rp223,485 million booked in 2018. The increasing gross kafalah receivables was mainly contributed from:
  1. Productive financing fee achieved Rp222,884 million, increased by 32.22% or Rp54,310 million from Rp168,574 million in 2018.
  2. Consumer financing fee achieved Rp81,839 million, increased by 59.71% or Rp30,597 million from Rp51,242 million in 2018.
  3. Surety fee achieved Rp12,557 million, increased by 242% or Rp8,888 million from Rp3,669 million. in 2018.
- **Reguarantee Expenses**
  Reguarantee expenses achieved Rp92,715 million in 2019, increased by Rp25,761 million or 27.79% compared to Rp66,954 million in 2018. This was mainly driven by increasing guarantee expenses with kafalah productive from Rp15,726 million in 2018 to Rp62,862 million in 2019 and kafalah surety from Rp1,135 million in 2018 to Rp3,924 million in 2019.

- **Decrease in Unearned Kafalah Fee Revenue**
  In 2019, decrease in unearned kafalah fee revenue is a booked revenue of Rp15,369 million, increased by Rp10,055 million or 65.42% compared to Rp5,315 million in 2018.

- **Penerimaan Kafalah Lain**
  Perseroan mencatat penerimaan kafalah lain sebesar Rp7.778 juta pada tahun 2019, naik sebesar Rp2.963 juta atau 38,10% dibandingkan Rp4.815 juta pada tahun 2018.

Jumlah pendapatan kafalah tercatat sebesar Rp216.973 juta, mengalami kenaikan Rp60.943 juta atau 28,09% dibandingkan Rp156.030 juta pada tahun 2018.

Beban Kafalah
Beban kafalah terdiri dari beban Ta'widh, Ta'widh Reasuransi, beban komisi, Kenaikan (Penurunan) Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri, Pendapatan Subrogasi dan beban kafalah lain. Beban Kafalah per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp94.022 juta, naik sebesar Rp18.923 juta atau 20,13% dibandingkan Rp75.099 juta pada tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

- **Ta'widh**
  Ta'widh tercatat sebesar Rp131.848 juta, naik sebesar Rp4.858 juta atau 3,68% dibandingkan Rp126.990 juta pada tahun 2018. Kenaikan ta'widh disebabkan oleh meningkatnya ta'widh pembiayaan produktif dari Rp94.212 juta di 2018 menjadi Rp106.962 juta di 2019 dan ta'widh *surety* dari nol di 2018 menjadi Rp480 juta di 2019.

- **Ta'widh Reasuransi**
  Pada tahun 2019, ta'widh reasuransi tercatat sebesar Rp54.393 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp7.946 juta atau 14,61% dibandingkan Rp46.447 juta pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ta'widh reasuransi pembiayaan semula Rp46.447 di 2018 menjadi Rp54.393 juta di 2019.

- **Beban Komisi**
  Perseroan mencatat beban komisi sebesar Rp25.591 juta pada tahun 2019, naik sebesar Rp7.600 juta atau 29,70% dibandingkan Rp17.991 juta pada tahun 2018. Kenaikan beban komisi terutama yang disebabkan adanya peningkatan pendapatan kafalah.

- **Pendapatan Subrogasi**
  Pendapatan subrogasi tercatat sebesar Rp17.366 juta, naik sebesar Rp6.281 juta atau 36,17% dibandingkan Rp11.085 juta pada tahun 2018.

- **Kenaikan Estimasi Ta'widh Retensi sendiri**
  Perseroan mencatat kenaikan estimasi ta'widh retensi sendiri sebesar Rp6.386 juta, naik signifikan sebesar Rp19.800 juta atau 310,07% dibandingkan Rp(13.414) juta pada tahun 2018.

- **Beban Kafalah Lain**
  Beban kafalah lain tercatat sebesar Rp1.957 juta, naik sebesar Rp892 juta atau 45,60% dibandingkan Rp1.064 juta pada tahun 2018.

- **Other Kafalah Income**
  The Company recorded other kafalah income at Rp7,778 million in 2019, increased by Rp2,963 million or 38.10% compared to Rp4,815 million in 2018.

Total kafalah income was recorded at Rp216,973 million, increased by Rp60,943 million or 28.09% compared to Rp156,030 million in 2018.

Kafalah Expenses
Kafalah expenses consist of Ta'widh, Ta'widh Reinsurance, Commission Expenses, Subrogation Income and Other Kafalah Expenses. As of December 31, 2019, Kafalah Expenses was recorded at Rp94,022 million, increased by Rp18,923 million or 20.13% compared to Rp75,099 million booked in 2018, with detail, as follows:

- **Ta'widh**
  Ta'widh was recorded at Rp131,848 million, increased by Rp4,848 million or 3.68% compared to Rp126,990 million in 2018. The increasing ta'widh was driven b y increasing productive financing ta'widh by Rp94,212 million in 2018 to Rp106,962 million in 2019 and surety ta'widh from zero in 2018 to Rp480 million in 2019.

- **Ta'widh Reinsurance**
  In 2019, ta'widh reinsurance booked Rp54,393 million, increased by Rp7,946 million or 14.61% compared to Rp46,447 million in 2018. This was due to increasing ta'widh reinsurance financing from previously was Rp46,447 million in 2018 to Rp54,393 million in 2019.

- **Commission Expenses**
  The Company booked commission expenses of Rp25,591 million in 2019, increased by Rp7,600 million or 29.70% compared to Rp17,991 million in 2018. The increasing commission expenses was mainly driven by the more than increase in comission expense mainly due to the increment in kafalah income.

- **Subrogation Income**
  Subrogation income was recorded at Rp17,366 million, increased by Rp6,281 million or 36.17% compared to Rp11,085 million in 2018.

- **Increase in Estimated Ta'widh Own Retention**
  The Company recorded an increase in estimated ta'widh own retention of Rp6,386 million, significantly increased by Rp19,800 million or 310.07% compared to Rp(13,414) million in 2018.

- **Other Kafalah Expenses**
  Other kafalah expenses was recorded at Rp1,957 million, increased by Rp892 million or 45.60% compared to Rp1,064 million in 2018.

Pendapatan Kafalah Bersih
Pada tahun 2019, pendapatan kafalah bersih tercatat sebesar Rp122.951 juta, naik sebesar Rp42.020 juta atau 34,18% dibandingkan Rp80.932 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini dikontribusikan oleh Pendapatan kafalah yang meningkat dari Rp156.030 juta di tahun 2018 menjadi Rp216.973 juta ditahun 2019.

Pendapatan Investasi
Pada tahun 2019, pendapatan investasi tercatat sebesar Rp20.028 juta, naik sebesar Rp7.373 juta atau 36,81% dibandingkan Rp12.655 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini dikontribusikan oleh meningkatnya bagi hasil deposito berjangka Rp11.031 juta di 2018 menjadi Rp13.929 juta di 2019, Surat berharga syariah negara nil di tahun 2018 menjadi Rp4.449 juta di 2019, dan Reksadana Rp1.624 juta di 2018 menjadi Rp1.650 juta di 2019.

Beban Usaha
Perseroan mencatat beban usaha sebesar Rp87.485 juta pada tahun 2019, naik sebesar Rp20.876 juta atau 23,86% dibandingkan Rp66.609 juta pada tahun 2018. Kenaikan beban usaha terutama diakibatkan oleh meningkatnya beban biaya kepegawaian semula Rp39.461 juta menjadi Rp54.032 juta di 2019.

Laba Usaha
Realisasi laba usaha tercatat sebesar Rp55.494 juta pada tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar Rp28.516 juta atau 51,39% dibandingkan Rp26.978 juta pada tahun 2018. Pertumbuhan laba usaha terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan kafalah bersih semula Rp80.932 Juta di tahun 2018 menjadi Rp122.951 juta di tahun 2019 dan hasil investasi (nisbah investasi) semula Rp12.655 Juta di tahun 2018 menjadi Rp20.208 juta di tahun 2019.

Laba Sebelum Zakat dan Pajak
Per 31 Desember 2019, laba sebelum zakat dan pajak tercatat sebesar Rp52.431 juta, naik sebesar Rp29.702 juta atau 56,65% dibandingkan Rp22.729 juta pada tahun 2018. Pertumbuhan laba sebelum zakat dan pajak terutama dikontribusikan oleh meningkatnya laba usaha dan menurunnya beban lain-lain.

Laba Tahun Berjalan
Perseroan mencatat pertumbuhan laba tahun berjalan sebesar Rp22.477 juta atau 61,48% dari Rp14.085 juta pada tahun 2018 menjadi Rp36.562 juta pada tahun 2019. Pertumbuhan laba tahun berjalan terutama dikontribusikan oleh meningkatnya laba sebelum zakat dan pajak.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Laba komprehensif tahun berjalan mengalami pertumbuhan sebesar 57,25% atau Rp19.948 juta dari Rp14.896 juta pada tahun 2018 menjadi Rp34.844 juta pada tahun 2019. Hal ini terutama dikontribusikan oleh meningkatnya laba tahun berjalan.

Net Kafalah Income
In 2019, net kafalah income was recorded at Rp122,951 million, increased by Rp42,020 million or 34.18% compared to Rp80,932 million booked in 2018. The increment was contributed from increasing kafalah income from Rp156,030 million in 2018 to Rp216,973 million in 2019.

Investment Income
In 2019, investment income was recorded at Rp20,028 million, increased by Rp7,373 million or 36.81% compared to Rp12,655 million booked in 2018. The increment was contributed from increasing value of time deposits yields from Rp11,031 million in 2018 to Rp13,929 million in 2019, government sharia bonds was recorded at zero in 2018 to Rp4,449 million in 2019, and Mutual Funds from Rp1,624 million in 2018 to Rp1,650 million in 2019.

Operating Expenses
The Company recorded operating expenses of Rp87,485 million in 2019, increased by Rp20,876 million or 23.86% compared to Rp66,609 million in 2018. The increasing operating expenses was mainly driven by increasing employee costs from previously was Rp39,461 million to Rp54,032 million in 2019.

Operating Income
In 2019, operating income realization was recorded at Rp55,494 million, increased by Rp28,516 million or 51.39% compared to Rp26,978 million in 2018. The operating income growth was mainly driven by net kafalah income from previously was Rp80,932 million in 2018 to Rp122,951 million in 2019 and investment yields (nisbah) from previously was Rp12,655 million in 2018 to Rp20,208 million in 2019.

Profit Before Zakah and Income Tax
As of December 31, 2019, profit before zakah and income tax was recorded at Rp52,431 million, increased by Rp29,702 million or 56.65% compared to Rp22,729 million in 2018. The growth of profit before zakah and income tax was mainly contributed from increasing operating income and decreasing operating expenses.

Profit For The Year
The Company recorded profit for the year growth of Rp22,477 million or 61.48% from Rp14,085 million in 2018 to Rp36,562 million in 2019. The profit for the year growth was mainly contributed from increasing profit before zakah and income tax.

Comprehensive Income For The Year
Comprehensive income for the year grew by 57.25% or Rp19,948 million from Rp14,896 million in 2018 to Rp34,844 million in 2019. This was mainly contributed from increasing profit for the year.

LAPORAN ARUS KAS | STATEMENT OF CASH FLOWS

Dalam juta rupiah | In million rupiah

URAIAN	2019 Rp	2018 Rp	Perubahan Change	Persentase Percentage	DESCRIPTION
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	41.643	13.485	28.158	67,62%	Cash Flows From Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(183.042)	(33.535)	(149.507)	81,68%	Cash Flows From Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	150.000	-	150.000	100,00%	Cash Flows From Financing Activities
Saldo Kas dan Bank awal tahun	15.712	35.762	(20.050)	(127,61)%	Cash and Banks at Beginning of year
Saldo Kas dan Bank akhir tahun	24.312	15.712	8.601	35,38%	Cash and Banks at End of year

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp41.643 juta pada tahun 2019, naik sebesar Rp28.158 juta atau 67,62% dibandingkan Rp13.485 juta pada tahun 2018.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar Rp149.507 juta atau 81,68% dari Rp(33.535) juta pada tahun 2018 menjadi Rp(183.042) juta pada tahun 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2019, Perseroan mencatat arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp150.000 juta yang berasal dari tambahan setoran modal oleh pemegang saham.

Cash Flows from Operating Activities

The Company booked cash flows from operating activities of Rp41,643 million in 2019, increased by Rp28,158 million or 67.62% compared to Rp13,485 million in 2018.

Cash Flows from Investing Activities

Cash flows from investing activities increased by Rp149,507 million or 81.68% from Rp(33,535) million in 2018 to Rp(183,042) million in 2019.

Cash Flows from Financing Activities

In 2019, the Company recorded cash flows from financing activities of Rp150,000 million contributed from additional paid-in capital from the shareholders.

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG

Kemampuan Membayar Hutang

Kemampuan Perseroan dalam membayar utang dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas dan rentabilitas.

1. **Rasio Likuiditas**

   Rasio likuiditas terdiri dari rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas merupakan tingkat kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang diukur dengan perbandingan antara kas + bank + surat berharga jangka pendek dengan liabilitas jangka pendek.

   Sementara, rasio lancar merupakan tingkat kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang diukur dengan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Rasio kas dan rasio lancar Per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 426% dan 556%.

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLES COLLECTABILITY

Ability to Pay Debt

The Company's ability to pay debts can be measured using liquidity and profitability ratios.

1. **Liquidity ratio**

   The liquidity ratio consists of cash ratio and current ratio. Cash ratio represents the level of the Company's ability to fulfill all short-term liabilities as measured by the ratio between cash + banks + short-term securities and short-term liabilities.

   Meanwhile, current ratio represents the level of the Company's ability to fulfill all non-current liabilities measured by the current asets to current liabilities ratio. Cash ratio and current ratio as of December 31, 2019 stood at 426% and 556%, respectively.

Uraian | Description	2019	2018
Rasio Kas | Cash Ratio	426%	21%
Rasio Lancar | Current Ratio	556%	1.213%

2. **Rentabilitas**
Rentabilitas Perseroan terdiri dari *Return on Equity* (RoE) dan *Return on Assets* (RoA). Per 31 Desember 2019, Perseroan mencatat RoE sebesar 9% dan RoA sebesar 10% .

2. **Earning**
The Company's rentability consists of Return on Equity (RoE) and Return on Assets (RoA). As of December 31, 2019, the Company booked RoE of 9% and RoA of 10%.

Uraian | Description	2019	2018
Return on Equity (RoE)	9%	4%
Return on Assets (RoA)	10%	4%

Kolektibilitas Piutang
Kolektibilitas piutang Perseroan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah piutang usaha dengan jumlah pendapatan usaha.

Receivables Collectability
Collectibility of the Company's receivables is calculated based on the ratio between the amount of trade receivables and total revenues.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur Modal
Struktur Modal adalah perimbangan atau perbandingan antara ekuitas dengan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Per tanggal 31 Desember 2019 struktur modal Perseroan sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure
Capital Structure is a balance or ratio between equity and long-term and short-term debt. As of December 31, 2019, the Company's capital structure is as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Jumlah Total
PT Asuransi Kredit Indonesia	249.999	99.9996	249.999.000.000
PT Asuransi Kredit Indonesia (penambahan penyertaan modal)			150.000.000.000
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	0.0004	1.000.000
JUMLAH | TOTAL	**250.000**	**100.0000**	**400.000.000.000**

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha, pemeringkat pinjaman yang kuat dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perseroan telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Perusahaan penjaminan syariah dengan lingkup nasional diwajibkan memiliki modal sendiri (ekuitas) minimum sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Management Policy on Capital Structure
The main objective of the Company's capital management is to ensure that healthy capital ratio is maintained to support business, along with strong loan rating and to maximize return to shareholders. The Company has fulfilled all capital requirements set by external parties.

In accordance with Article 31 paragraph 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.05/2017 concerning the Implementation of Guarantee Institutions Business, sharia insurance companies with a national scope are required to have equity of a minimum of Rp100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) within a maximum period of 3 (three) years after obtaining business license. As of December 31, 2019 and 2018, the Company has complied with these conditions.

Dalam mengelola permodalannya, Perseroan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan Manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui tambahan modal disetor dari pemegang saham.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2019, Perseroan tidak melakukan investasi barang modal.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Perseroan tidak melakukan investasi barang modal, informasi mengenai investasi barang modal (*capital expenditure*) yang direalisasikan pada tahun 2019 tidak tersedia untuk disajikan dalam laporan tahunan ini.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Perseroan tidak mencatatkan informasi dan fakta material yang berpengaruh signifikan setelah tanggal laporan akuntan pada periode tahun buku 2019.

PROSPEK USAHA

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2020 tidak sekuat capaian 2019 sejalan dengan meluasnya dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ke seluruh dunia. Bank Indonesia awalnya pada akhir 2019 sempat memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 akan meningkat dalam kisaran 5,1-5,5%. Prakiraan ini dipengaruhi oleh optimisme pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas yang diprakirakan menopang perbaikan kinerja ekspor dan investasi, terutama investasi nonbangunan. Namun, pasca merebaknya COVID-19 di Tiongkok, pada Februari 2020, Bank Indonesia memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi domestik sedikit menurun menjadi 5,0-5,5% untuk tahun 2020.

In managing its capital, the Company continues to maintain business continuity and maximize benefits for shareholders and other stakeholders.

Underlying Assumption of Management Policy on Capital Structure

The Company manages capital structure and makes adjustments to it, if necessary, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company can adjust dividend payments to shareholders, issue new shares or seek funding through additional paid-in capital from the Shareholders.

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL EXPENDITURE INVESTMENT

In 2019, the Company did not place any capital expenditure investment.

CAPITAL EXPENDITURE REALIZATION IN CURRENT FISCAL YEAR

The Company not placing any capital expenditure investment, information about capital expenditure realization in 2019 is not available to be presented in this annual report.

SUBSEQUENT MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER ACCOUNTANT REPORTING DATE

The Company did not record any subsequent material information and facts after accountant reporting date for fiscal year 2019 period.

BUSINESS PROSPECT

Bank Indonesia projected economic growth in 2020 will be moderated compared to achievements in 2019 in line with the widespread impact of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) outbreak across the world. Initially, by end of 2019, Bank Indonesia estimated Indonesia's economic growth in 2020 would increase around the range of 5.1-5.5%. This forecast was driven by optimism for global economic recovery and improvement in commodity prices which are forecasted to sustain export recovery and investment performance, particularly for non-construction investment. However, following the COVID-19 outbreak in China, in February 2020, Bank Indonesia had the outlook for domestic economic growth revised to slightly decline to 5.0-5.5% for 2020.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN PROYEKSI PADA AWAL 2019 DENGAN HASIL YANG DICAPAI (REALISASI)

Dalam penyusunan RKAP 2019, Perseroan menggunakan asumsi-asumsi berdasarkan arahan pemegang saham. Dasar penyusunan RKAP Perseroan tahun buku 2019 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN serta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan. Perbandingan antara realisasi tahun 2019 dengan anggaran tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Kafalah

Realisasi pendapatan kafalah tahun 2019 sebesar Rp216.973 juta atau tercapai 88,52% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp245.125 juta dan mengalami peningkatan sebesar 39,06% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp156.031 juta.

b. Beban Kafalah

Realisasi beban kafalah tahun 2019 sebesar Rp94.022 juta atau tercapai 80,36% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp117.004 juta dan mengalami penurunan sebesar 25,20% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp75.099 juta.

c. Hasil Investasi

Realisasi hasil investasi tahun 2019 sebesar Rp20.028 juta atau tercapai 93,03% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp21.515 juta dan mengalami penurunan sebesar 58,26% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp12.655 juta.

d. Beban Usaha

Realisasi beban usaha tahun 2019 sebesar Rp87.485 juta atau tercapai 97,97% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp89.289 juta dan mengalami peningkatan sebesar 31,34% jika dibandingkan dengan realisasi 2018 sebesar Rp66.609 juta.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND PROJECTION AT BEGINNING 2019 WITH ACHIEVEMENT (REALIZATION)

In the RKAP 2019 preparation, the Company applied assumptions based on shareholder's aspiration. Basis of the Company's RKAP fiscal year 2019 preparation has been conducted according to provision in the Company's Articles of Association ad refers to the Minister of SOEs Decree No. Kep-101/MBU/2002 on June 4, 2002 concenring preparation of RKAP in SOEs as well as Minister of State-Owned Enterprise Decree No. KEP-100/MBU/2002 on June 4, 2002 concerning Soundness Level Assessment for State-Owned Enterprise and Minister of State Owned-Enterprise Regulation No. PER-10/MBU/2014 on July 25, 2014 concerning Soundness Level Assessment Indicators for State-Owned Enterprise in Financial Services Sector Insurance and Guarantee Services Business. Comparison between realization and budget in 2019 and the realization in 2018 is summarized as follows:

a. Kafalah Income

In 2019, kafalah income realization achieved Rp216,973 million or 88.52% from the RKAP target of Rp245,125 million and increased by 39.06% if compared to Rp156,031 million realization in 2018.

b. Kafalah Expenses

In 2019, kafalah expenses realization achieved Rp94,022 million or 80.36% from RKAP target of Rp117,004 million and decreased by 25.20% if compared to Rp75,099 million realization in 2018.

c. Investment Income

In 2019, investment income realization achieved Rp20,028 million or 93.03% from RKAP target of Rp21,515 million and decreased by 58.26% if compared to Rp12,655 million realization in 2018.

d. Operating Expenses

In 2019, operating expenses realization achieved Rp87,485 million or 97.97% from RKAP target of Rp89,289 million and increased by 31.34% if compared to Rp66,609 million realization in 2018.

e. Laba Setelah Pajak

Laba setelah pajak tahun 2019 sebesar Rp36.562 juta atau 91,13% dari RKAP sebesar Rp40.122 juta dan mengalami kenaikan sebesar 159,58% jika dibandingkan dengan laba bersih setelah pajak tahun 2018 sebesar Rp14.085 juta.

e. Profit After Tax

In 2019, profit after tax achieved Rp36,562 million or 91.13% from RKAP target of Rp40,122 million and increased by 159.58% if compared to profit after tax of Rp14,085 million booked in 2018.

Uraian Description	Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rp			Dalam Persentase (%) in Percentage (%)	
	Realisasi Realization 2018	RKAP 2019	Realisasi Realization 2019	Pencapaian Achievment	Pertumbuhan Growth
Total Pendapatan Total Income	168,686	266,839	237,001	88.82	40.50
Jumlah Beban Total Expenses	145,956	206,303	184,571	89.47	26.46
Laba Sebelum Zakat Profit Before Zakah	22,729	60,537	52,431	86.61	130.68
Zakat Zakah	568	1,634	1,311	80.19	130.68
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	22,161	58,902	51,120	86.79	130.68
Beban Pajak Tax Expenses	8,076	18,781	14,558	77.52	80.26
Laba Setelah Pajak Profit After Tax	14,085	40,122	36,562	91.13	159.58

TARGET/PROYEKSI TAHUN 2020

Pembiayaan syariah baik dari perbankan syariah maupun non bank syariah diharapkan terus bertumbuh. Hal ini menjadi peluang bagi Askrindo Syariah untuk dapat memperbesar posisi *market*-nya. Berdasarkan data OJK dalam statistik perbankan syariah dan non bank syariah, dapat ditentukan proyeksi pembiayaan yang dikucurkan sebagai berikut:

TARGET/PROJECTION IN 2020

The sharia financing, both from the sharia banking and non-banking Financial Institutions is expected to continuously grow. This condition offers an opportunity for Askrindo Syariah to expand our market position. Based on OJK data in sharia banking and non-banking statistics, the financing projections have been stipulated as follows:

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Lembaga Institution	Pertumbuhan Pembiayaan 2020 Financing Growth 2020	Penurunan Portofolio Run Off *5%*	Pembiayaan Baru New Financing
Perbankan Syariah | Sharia Banking	54,750	2,737	57,487
Non Bank Syariah | Sharia Non Bank	4,252	213	4,040
Total Pencairan Pembiayaan Total Financing Disbursement	**59,002**	**2,950**	**61,527**

Potensi Penjaminan (60% dari pencairan pembiayaan) Potential Guarantees (60% of disbursed Financing)	**36,916**

Pada tahun 2020 diproyeksikan pembiayaan Perbankan Syariah (BUS, UUS dan BPRS) serta Non Bank syariah yang membutuhkan penjaminan ialah sebesar Rp36,916 milyar. Hal tersebut merupakan potensi bisnis bagi Askrindo Syariah.

In 2020, financing from Sharia Banking (BUS, UUS and BPRS) and sharia Non Bank is projected requiring total guarantees amounting to Rp36.916 billion. This becomes a potential business for Askrindo Syariah.

Berdasarkan tabel dibawah dapat diketahui jumlah modal sendiri bersih pada Desember tahun 2019 ialah sebesar Rp510 milyar. Dengan kafalah produktif terjamin sebesar Rp6,034 milyar, maka Askrindo Syariah dapat menyerap potensi pembiayaan sebesar 18,99% pada pembiayaan produktif. Kafalah terjamin (agregat) sebesar Rp10,087 milyar, maka Askrindo Syariah dapat menyerap potensi pembiayaan sebesar 31,74%.

Based on the table below, total net equity in December 2019 achieved Rp510 billion with a guaranteed productive kafalah of Rp6.034 billion, where Askrindo Syariah managed to absorb the financing potential of 18.99% for productive financing. Guaranteed kafalah (aggregate) amounted Rp10,087 billion, where Askrindo Syariah managed to absorb the financing potential of 31.74%.

Komponen | Component	Produktif | Productive	Agregat | Aggregate
Kafalah Terjamin | Guaranteed Kafalah	6,304	10,807
Modal Bersih Sendiri | Net Equity	510	510
Gearing Rasio | Gearing	12	20
Potensial | Potential	31,776	31,776
Share Terhadap Pembiayaan | Share in the Financing	18.99%	31.74%

Sedangkan untuk proyeksi *market share* di 2020 dapat dilihat dalam perhitungan tabel sebagaimana berikut:

Meanwhile, market share projection in 2020 can be seen in the calculation table as follows:

Komponen | Component	Produktif | Productive	Agregat | Aggregate
Kafalah Terjamin | Guaranteed kafal	9,964	20,453
Modal Bersih Sendiri | Net Equity	524	524
Gearing Rasio | Gearing	19	39
Potensial | Potential	36,916	36,916
Share Terhadap Pembiayaan | Share in the Financing	26.99%	55.40%

Share terhadap pembiayaan produktif akan meningkat tahun 2020 menjadi 26,99% dari sebelumnya 18,99% dengan asumsi menggunakan GR sebesar 19 kali *gearing ratio* produktif sebesar 19 kali. Sedangkan Kafalah terjamin (agregat) sebesar Rp20,453 Milyar, maka Askrindo Syariah dapat menyerap potensi pembiayaan sebesar 55,40%. Sesuai dengan peraturan OJK yang tersebut di atas pada pasal 28 disebutkan bahwa "Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki nilai penjaminan bagi usaha produkif paling sedikit 25% dari total penjaminan". Tahun 2020 *gearing ratio* produktif diproyeksikan sebesar 19 kali dengan nilai penjaminan produktif yang ditanggung sendiri mencapai Rp9,96 triliun (lebih dari 25% total penjaminan).

In 2020, share to productive financing will increase to 26.99% from 18.99% assuming using GR of 19 times productive gearing ratio of 19 times. While the guaranteed Kafalah (aggregate) of Rp20.453 billion, where Askrindo Syariah has the opportunity to absorb the potential financing of 55.40%. based on with the OJK regulation mentioned above in article 28 explaining that "Guarantee Companies and Sharia Guarantee Companies are required to have a guarantee value for productive businesses of at least 25% of the total guarantee." In 2020, the productive gearing ratio is projected to be 19 times with the value of the productive guarantee being alone, reaching Rp9.96 trillion (more than 25% of total guarantees).

ASPEK PEMASARAN

Pada tahun 2019, Perseroan semakin menggiatkan aktivitas penetrasi pasar dengan melakukan inovasi produk penjaminan syariah dan memastikan terwujudnya *service excellent* atas kerjasama dengan segenap mitra. Selaras dengan upaya ini, Perseroan juga melakukan pengembangan internal dengan menyusun sistem operasi prosedur yang andal, baik di bidang operasional maupun pendukung, memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten, membangun sistem aplikasi teknologi informasi yang terintegrasi, serta menguatkan struktur ekuitas (keuangan) yang prudent.

Guna mencapai sasaran utama, Perseroan juga meningkatkan kontribusi pendapatan melalui optimalisasi sumber bisnis baru yang berasal dari produk Pembiayaan dan *Surety Bond*. Pertumbuhan bisnis baru tersebut diupayakan melalui penguatan serta penambahan jejaring usaha dan inovasi, meliputi *cross selling/bundling*, sinergi/aliansi dengan mitra bisnis yang memberikan *win-win solution*, dan pengembangan produk baru. Beberapa kebijakan utama terkait aktivitas pemasaran tahun 2019 yang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Strategi Umum Pemasaran

a. Menjaga relasi bisnis yang sudah ada dengan memaksimalkan produk-produk penjaminan yang telah dilakukan kerjasama. Saat ini terdapat 15 Bank Umum Syariah (BUS), 17 Unit Usaha Syariah (UUS), 15 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 23 Lembaga Keuangan *Non-Bank* (LKNB), dan 4 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
b. Menetapkan tarif produk dengan mempertimbangkan faktor risiko, biaya akusisi dan biaya reasuransi;
c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra bisnis, baik Perbankan Syariah maupun LKNB Syariah;
d. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi produk, *win-back strategy* serta penggunaan program-promosi yang tepat dan peningkatan layanan untuk meraih *customer engagement*;
e. Meningkatkan kerjasama resiprokal dengan Perbankan Syariah untuk memanfaatkan investasi.

Strategi Wilayah Cabang

a. Meningkatkan 1 (Satu) Kantor Pemasaran menjadi Kantor Cabang, yaitu Kantor Cabang Aceh;
b. Untuk memperbesar *market share*, Perseroan juga akan membuka jaringan kantor baru di Bengkulu;
c. Meningkatkan kompetensi SDM untuk memperkuat bisnis kantor cabang;
d. Menerapkan standarisasi dalam hal *layout* dan desain *interior* maupun *exterior* kantor dan mendirikan Teras Mitra di setiap Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Syariah;
e. Menetapkan target aspiratif setiap *outlet* KC, KPS dan KPPS melalui peningkatan potensi oleh masing-masing pemimpin outlet guna memastikan peningkatan *market share* dan bisnis di daerah masing-masing.

MARKETING ASPECT

In 2019, the Company intensified its market penetration activities by innovating sharia guarantee products and ensuring the realization of service excellence for cooperations with all partners. In line with this effort, the Company also carried out internal development by developing a reliable operating procedure system, both in the operational and support fields, accommodated the needs of competent human resources, built an integrated information technology application system, and strengthened prudent equity (financial) structure.

In order to achieve its main target, the Company also increased revenue contribution through optimization of new business sources derived from Financing and Surety Bond products. The Company strived to grow this new business by strengthening and increasing business networks and innovation, including cross selling/bundling, synergy/alliances with business partners that provide win-win solutions, and new product development. Some of the main policies related to marketing activities in 2019 implemented by the Company were as follows:

General Marketing Strategy

a. Maintaining existing business relationships by maximizing guarantee products that were already included in partnership. Currently there are 15 Sharia Commercial Banks (BUS), 17 Sharia Business Units (UUS), 15 Sharia Smallholder Financing Banks (BPRS), 23 Non-Bank Financial Institutions (LKNB), and 4 Non-Bank Financial Institutions (LKBB);
b. Determining product rates by considering risk factors, acquisition costs and reinsurance costs;
c. Enhancing cooperation with business partners, both Sharia Banking and Sharia LKNB;
d. Carrying out Intensification and Extensification of products, winback strategies, as well as using appropriate programs and improving services to achieve customer engagement;
e. Increasing reciprocal cooperation with Sharia Banking to capitalize on deposit investments in increasing ujrah income.

Branch Area Strategy

a. Upgrading 1 (one) Marketing Office to Branch Office, which is Aceh Branch Office;
b. To increase market share, the Company will open new office network in Bengkulu;
c. Improving HR competencies to strengthen branch office business;
d. Implementing standardization in terms of office layout as well as interior and exterior design and establish Teras Mitra in each Sharia Branch Office and Representative Office;
e. Establishing aspirational targets for each KC, KPS and KPPS outlet by enhancing potential done by each outlet manager to ensure an increase in market share and business in each of their regions.

Pangsa Pasar

Berdasarkan olah data Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Non Bank Syariah Bulan Desember 2019, asumsi total potensi bisnis di 2019 (pembiayaan yang diberikan per tahunnya) sebesar Rp36,662 miliar. Total nilai kafalah penjaminan Askrindo Syariah yang ditanggung sendiri, bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp10,087 miliar. Sehingga *market share* atau pembiayaan yang telah dijamin oleh Askrindo Syariah yaitu sebesar 41,21%. Adapun rincian data ialah sebagai berikut:

Market Share

Based on Sharia Banking Statistics and Sharia Non-Banking Financial Institution Statitics issued in December 2019, assumption of total business potential (annual financing disbursement) in 2019 amounted Rp36.662 billion. Total amount of guarantee kafalah backed by Askrindo Syariah achieved Rp10.087 billion by December 2018. Therefore, market share or financings guaranteed by Askrindo Syariah is 41.21%. The detail data are presented below:

***Market Share* Askrindo Syariah Desember 2019 pada Bank Syariah dan Non Bank Syariah**

Askrindo Syariah Market Share in Sharia Banks and Sharia Non-Bank Financial Industry as of December 2019

Lembaga Institution	Pertumbuhan Pembiayaan Financing Growth	Penurunan Portofolio Run Off *5%*	Pembiayaan Baru New Financing
Perbankan Syariah | Sharia Banking	35,848	1,792	37,640
Non Bank Syariah | Sharia Non Bank	814	41	774
Total Pencairan Pembiayaan Total Financing Disbursement	**36,662**	**1,833**	**38,414**

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Potensi Penjaminan (60% dari pencairan pembiayaan) Potential Guarantees (60% of disbursed Financing)	23,048
Kafalah penjaminan Askrindo Syariah Askrindo Syariah Underwritten kafalah	10,087
***Market Share* Askrindo Syariah**	43.76%

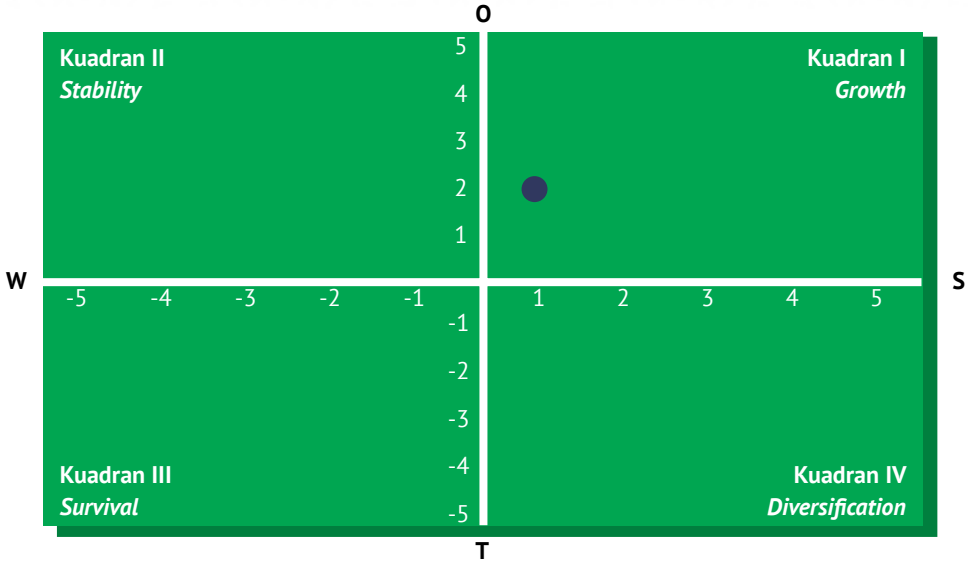
Posisi Askrindo Syariah Saat Ini

Dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi, Perseroan pada tahun 2019 berada pada Posisi "*Growth*."

Current Askrindo Syariah Position

By considering the strength, weakness, opportunity and threat, the Company is at "Growth" stage in 2019.

Matriks SWOT



REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Hingga 31 Desember 2019, Perseroan belum melakukan penawaran umum.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pembagian dividen ditetapkan dari laba bersih yang diperoleh oleh Perseroan dan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Pada tahun 2019, Perseroan belum membayarkan dividen kepada pemegang saham dan seluruh Laba dialokasikan sebagai cadangan umum.

INFORMASI MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada 2019 Perseroan tidak melakukan aksi korporasi apapun.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika:

1) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak:
   a. mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perseroan;
   b. memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perseroan; atau
   c. memiliki pengendalian bersama atas Perseroan.
2) Suatu pihak yang berelasi dengan Perseroan;
3) Suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan sebagai venturer;
4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perseroan atau induknya;
5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir 1) atau 4);
6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir 4) atau 5); atau
7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan.

Berikut merupakan pihak-pihak yang berelasi:

a. PT Asuransi Kredit Indonesia dan Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo merupakan pemegang saham Perusahaan.

REALIZAITON OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

As of December 31, 2019, the Company has not executed any public offering.

DIVIDEND POLICY

Dividend payment is calculated from net income obtained by the Company and is for shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company. In 2019, the Company did not pay dividends to shareholders and all Profits were allocated as general reserves.

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS JOINT/ MERGER, ACQUISITION OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

In 2019, the Company did not execute any corporate action.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION WITH CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTY

A party is considered to be related to the Company if:

1) Either directly or indirectly through one or more intermediaries, a party:
   a. controls, or is controlled by, or is under joint control with the Company;
   b. has interests in the Company that have a significant influence on the Company; or
   c. have joint control of the Company.
2) A party related to the Company;
3) A party is a joint venture where the Company is a venturer;
4) A party is a member of the Company's key managementpersonnel or its parent;
5) A party is a close family member of the individual described in points 1) or 4);
6) A party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for where the voting rights are significant in several entities, directly or indirectly, as set out in points 4) or 5); or
7) A party is a post-employment benefit program for employee benefits from the Company or an entity related to the Company.

The following are related parties:

a. PT Asuransi Kredit Indonesia and Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo are shareholders of the Company.

b. Perusahaan yang sebagian pemegang saham dan pengurus atau manajemennya sama dengan Perusahaan adalah PT Reasuransi Nasional Indonesia dan PT Askrindo Mitra Utama.

Rincian jumlah masing-masing pos aset, liabilitas, pendapatan kafalah dan beban kafalah yang berkaitan dengan pihak yang berelasi beserta persentasenya terhadap total aset, total liabilitas, total pendapatan kafalah dan total beban kafalah sebagai berikut:

b. Companies whose part of its shareholders and management is the same as the Company, namely PT Reasuransi Nasional Indonesia and PT Askrindo Mitra Utama.

The details of the amount of each asset, liability, kafalah revenue and kafalah expenses related to the related parties along with the percentage to total assets, total liabilities, total kafalah revenue and total expenses are as follows:

Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas
Percentage of Total Assets and Liabillities

Aset | Assets **Bank | Cash in Banks *rupiah* (Catatan/Note 4)**	**2019** **Rp**	2018 Rp	**2019** **%**	2018 %
PT Bank Syariah Mandiri	2,352,013,281	1,962,488,490	0.38	0.49
PT Bank BRI Syariah	3,001,268,720	1,916,607,920	0.48	0.48
PT Bank BNI Syariah	1,132,502,902	615,342,231	0.18	0.15
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Syariah	361,070,567	153,768,937	0.06	0.04
SUBJUMLAH | SUBTOTAL	6,846,855,470	**4,648,207,578**	1.04	**1.16**
Bank | Cash in Banks US Dollar (Catatan/Note 4)	**2019** **Rp**	2018 Rp	**2019** **%**	2018 %
PT Bank BNI Syariah	260,354,321	264,643,750	0.04	0.07
Subjumlah/Subtotal	260,354,321	264,643,750	0.04	0.07
JUMLAH | TOTAL	7,107,209,791	**4,912,851,328**	1.08	**1.22**
Piutang jasa imbal kafalah **Kafalah fee receivables (Catatan/Note 5)**				
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	13,016,794,535	965,459,532	2.09	0.24
PT Bank Syariah Mandiri	2,854,718,529	2,378,709,175	0.46	0.59
PT Bank BRI Syariah	1,652,704,548	1,092,923,194	0.27	0.27
PT Bank BNI Syariah	1,075,008,545	944,972,345	0.17	0.24
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk-Unit Syariah	9,057,953	-	00	00
JUMLAH | TOTAL	18,608,284,110	**5,382,064,246**	2.99	**1.34**
Piutang penjaminan ulang **Re guarantee receivables (Catatan Note 6)**				
PT Asrinda Arthasagga	20,621,445,968	844,051,303	3.31	0.21
PT Reasuransi Syariah Indonesia	2,440,112,045	6,460,777,556	0.39	1.61
PT Reasuransi Nasional Indonesia	-	-	0.00	0.00
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	-	331.,014,911	0.00	0.08
PT BNI Life Insurance	-	34,700,187	0.00	0.01
JUMLAH | TOTAL	23,061,558,013	**7,670,543,957**	3.70	**1.91**

Deposita Berjangka | Time Deposits (Catatan/Note 8.a)	2019 Rp	2018 Rp	2019 %	2018 %
PT Bank Syariah Mandiri	101,750,000,000	94,351,439,088	16.34	23.52
PT Bank BNI Syariah	141.400.000.000	46,650,000,000	22.71	11.63
PT Bank BRI Syariah	91,300,000,000	47,650,000,000	14.66	11.88
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Syariah	500,000,000	1,250,000,000	0.08	0.31
JUMLAH | TOTAL	334,950,000,000	**189,901,439,088**	53.79	**0.47**
Reksadana | Mutual fund (Catatan/Note 8.c)				
PT PNM Investment Management	20,680,194,884	70,796,670,934	3.32	**17.64**
Liabilitas | Liabillities **Utang ta'widh | Ta'widh payables** **(Catatan/Note 14)**				
PT Bank Syariah Mandiri	1,069,112,260	861,531,706	0.95	1.14
PT Bank BRI Syariah	782,871,996	764,419,616	0.70	1.02
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	4,808,283,300	65,331,000	4.28	0.09
PT Bank BNI Syariah	34,364,907	30,891,956	0.03	0.04
JUMLAH | TOTAL	6,694,632,463	1,727,174,278	5.96	2.28
Utang penjaminan ulang **Re guarantee receivables (Catatan Note 15)**	**2019 Rp**	2018 Rp	**2019 %**	2018 %
PT Asrinda Arthasagga	10,120,812,928	6,382,160,153	9.01	8.43
PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah	1,483,576,268	4,496,487,559	1,32	5,94
PT Asuransi Kredit Indonesia	-	810,012,290	0.00	1.07
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	-	164,308,340	0.00	0.22
PT Asuransi Asei Indonesia	20,155,000	20,155,000	0.02	0.03
PT Reasuransi Syariah Indonesia	49,702,593	9,977,593	0.04	0.01
JUMLAH | TOTAL	11,674,206,789	**11,883,060,935**	10.39	**15.70**

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Hingga tahun 2019, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Manajemen terkait status Perseroan seabgai anak perusahaan BUMN.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2019, tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN

As of 2019, the Company has not yet offered employee and/or Management stock option plan related to the Company's status as subsidiary of a SOE.

CHANGES IN REGULATION WITH SIGNIFICANT IMPACT TO THE COMPANY

Throughout 2019, there is no change in law and regulation with significant impact to the Company.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2019.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non laba";
- PSAK 1 (Amendemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko ISAK 101: Pendapatan Tangguh Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"; dan
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah."

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf"; dan
- PSAK 22 (Amendemen 2019): "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis".

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2019.

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 71: "Financial Instrument";
- PSAK 72: "Revenue from Contract with Customer";
- PSAK 73: "Lease";
- PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract";
- PSAK 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures";
- PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation";
- ISAK 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements";
- PSAK 1 (Amendment 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";
- PSAK 1 (Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements";
- PPSAK 13: "Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting";
- PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimatesand Errors";
- PSAK 102 (Revised 2019): "Accounting for Murabahah";
- ISAK 101: "Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership"; and
- ISAK 102: "Impairment on Murabahah Receivable".

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 112: "Accounting for Endowments"; and
- PSAK 22 (Amendment 2019): "Business Combinations regarding Definition of Business".

Until the date of the financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.



06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Perseroan berupaya untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan serta menjadi elemen penting dalam membangun reputasi dan kredibilitas serta bisnis yang beretika. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan nilai, perkembangan usaha, daya saing, dan mencapai pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan.

LANDASAN PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di Perseroan mengadaptasi prinsip GCG yaitu TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* atau Kewajaran), *best practice* praktik GCG di Indonesia serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan terus berupaya untuk memperbarui seluruh pedoman secara berkala dan meningkatkan kualitas praktik GCG secara konsisten. Sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan juga merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait penerapan GCG antara lain Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 54/SEOJK.05/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin, Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Keputusan Sekretaris BUMN No. SK-16/SMBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara.

Terkait komitmen pelaksanaan GCG, Direksi telah menetapkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*board manual*) sebagai pedoman Perseroan melalui Surat Keputusan nomor 054/KEP-DIR/XII/2018 dan Surat Keputusan nomor 055/KEP-DIR/XII/2018 tentang Pedoman-pedoman *Good Corporate Governance* pada tanggal 3 Desember 2018.

Selain berdasarkan Pedoman tersebut diatas, penerapan GCG Perseroan juga merujuk antara lain pada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Through implementation of Good Corporate Governance (GCG), the Company strives to maintain trust of our shareholders and stakeholders and being an important element in building reputation as well as credibility and ethical business. The Company is committed to increase value, business development, competitiveness, and continuously achieve long-term business growth.

GCG IMPLEMENTATION FRAMEWORK

GCG implementation in the Company adapts the GCG principles, known as TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness), GCG best practices in Indonesia and provisions in prevailing laws and regulations. The Company continuously strives to regularly update all guidelines and consistently improve quality of GCG practices. As a subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE), the Company also refers to laws and regulations related to implementation of GCG, including Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 54/SEOJK.05/2017 Concerning Good Corporate Governance for Insurance Agency, Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 Concerning Good Corporate Governance Implementation in SOEs and SOE Secretary Decree No. SK-16/S.MBU/2012 Concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Governance in State-Owned Enterprises.

With regards to GCG implementation commitment, the Board of Directors has stipulated Code of Good Corporate Governance (GCG) and Work Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) as the Company's guidelines through Decree number 054/KEP-DIR/XII/2018 and Decree number 055/KEP-DIR/XII/2018 concerning Code of Good Corporate Governance Guidelines on December 3, 2018.

In addition to the above mentioned Guidelines, GCG implementation in the Company also refers to, among others, the following provisions:

1. Republic of Indonesia Law Number 1 of 2016 on Guarantees;
2. Republic of Indonesia Law Number 14 of 2008 on Information Disclosure;
3. Republic of Indonesia Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions;
4. Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 as Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions;
5. Republic of Indonesia Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies;
6. Republic of Indonesia Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE);
7. Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 as Amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption;
8. Republic of Indonesia Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin;
10. Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Notaris nomor 45, tanggal 29 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61610.AH.01 tahun 2012 tanggal 29 November 2012;
11. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anak Perusahaan BUMN;
14. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/2012 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
15. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
17. POJK No. 1/POJK.05/2017 Tentang Perizinan Usaha & Kelembagaan Lembaga Penjamin;
18. POJK No. 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
19. POJK No. 3/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan;
21. POJK No. 27/POJK.05/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan;
22. POJK No 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
23. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
24. POJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
25. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 74/DSNMUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah.

9. Republic of Indonesia President Regulation Number 2 of 2008 concerning Guarantee Agency;
10. The Company's Articles of Association based on Notarial Deed number 45, November 29, 2012 drafted by Notary Hadijah, S.H and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-61610.AH.01 of 2012 on November 29, 2012;
11. Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: PER-01/MBU/2012 concerning the Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises;
12. Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: PER-09/MBU/2012 as Amendment to Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises;
13. Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Board of Directors Members Appointment and Subsidiaries of SOE;
14. Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: PER-07/MBU/2012 concerning Remuneration Guideline for Board of Directors, Board of Commissioners and the Supervisory Board in SOE;
15. Minister of State Owned Enterprises Regulation: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs under the Board of Commissioners/Supervisory Board in State-Owned Enterprises;
16. Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: PER-15/MBU/2012 as Amendment to Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for the Goods and Services Procurement in SOEs;
17. POJK No. 1/POJK.05/2017 Regarding Business & Institutional Permits for Guarantee Agency;
18. POJK No. 2/POJK.05/2017 Concerning Business Implementation of Guarantee Institution;
19. POJK No. 3/POJK.05/2017 Regarding Good Corporate Governance for Insurance Agency;
20. Financial Services Authority Regulation Number 7/POJK.05/2014 concerning Audit on Guarantee Institution;
21. POJK No. 27/POJK.05/2016 Concerning Capability and Compliance Assessment for Main Parties in Insurance Companies, Pension Funds, Financing Companies, and Guarantee Companies;
22. POJK No. 10/POJK.05/2014 on August 27, 2014 concerning Risk-Based Rating for Non-Bank Financial Services Institutions;
23. POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Audit Committee Establishment and Charter;
24. POJK No. 56/POJK.04/2015 Concerning the Internal Audit Unit Establishment and Charter Preparation Guideline;
25. National Sharia Council Fatwa Number: 74/DSNMUI/I/2009 on Sharia Guarantee.

ASESMEN/EVALUASI PRAKTIK GCG

Assessment Good Corporate Governance (GCG) tahun 2019 di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dilaksanakan dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, yang bertujuan untuk menilai implementasi GCG di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan kajian yang meliputi 6 (enam) aspek pokok.

Sesuai dengan hasil penilaian tim, total nilai implementasi GCG yang diperoleh oleh Perusahaan adalah sebesar 78,48 dari total nilai maksimal 100 yang setara dengan 78,48% dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG yaitu **BAIK**. Adapun penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

GCG ASSESSMENT/EVALUATION

Good Corporate Governance Assessment (GCG) in 2019 at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah was carried out using criteria and methodology determined by State Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S-MBU/2012 on June 6, 2012, which aims to assess GCG implementation in PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah with a study covering 6 (six) main aspects.

In accordance with results of the team's assessment, total GCG assessment score obtained by the Company is 78.48 of total maximum score of 100 which is equivalent to 78.48% with quality of GCG implementation predicate is **GOOD**. Description of the score achievement is as follows:

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Testing Aspects/Indicators/Parameters		Bobot Weight	Capaian Tahun 2019 2019 Achievement	
			Skor Score	% Capaian Achievement
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment on Consistent Good Corporate Governance Implementation	7,00	5,33	76,14%
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,59	95,47%
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	30,60	87,43%
IV	Direksi | Board of Directors	35,00	27,12	77,50%
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	6,83	75,94%
VI	Aspek Lainnya | Other Aspects	5,00	-	-
Skor Keseluruhan | Total		10,00	78,48	78,48%
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG **CLASSIFICATION ON GCG IMPLEMENTATION QUALITY**			**Baik | Good**	

PERBAIKAN GCG SIGNIFIKAN TAHUN 2019

Berdasarkan hasil *assessment* GCG tahun 2019, perbaikan GCG yang signifikan di Perseroan, yaitu:

a. Perusahaan memiliki Pedoman-Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang telah dimutakhirkan.
b. Dewan Komisaris telah meningkatkan disiplin implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dari sisi administrasi.
c. Perusahaan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan yang langsung berada dibawah koordinasi Direktur Utama yang dilengkapi dengan unit penunjangnya.
d. Perusahaan telah menyusun Annual Report sesuai standar ARA dan telah mengikuti ARA.

SIGNIFICANT GCG IMPROVEMENT IN 2019

Based on results of GCG assessment in 2019, significant GCG improvements in the Company are as follows:

a. The Company has updated Code of Good Corporate Governance (GCG).
b. The Board of Commissioners has increased the administrative discipline in good corporate governance implementation.
c. The Company has appointed a Corporate Secretary who is directly under the coordination of the President Director and equipped with the supporting units.
d. The Company has prepared an Annual Report based on ARA standards and has participated in the ARA.

MEKANISME DAN STRUKTUR TATA KELOLA

Perseroan meyakini bahwa implementasi GCG yang melebihi dari sekedar kepatuhan terhadap standar dan peraturan perundang-undangan, mampu menciptakan kinerja yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Tata Kelola Perseroan merujuk pada mekanisme yang harmonis sebagai realisasi dari Prinsip GCG, Struktur Kebijakan Perusahaan dan Organ Perusahaan. Dalam mekanisme tersebut, Prinsip GCG berkedudukan sebagai dasar bagi segala pemikiran, kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan dalam Struktur Kebijakan Perusahaan yang dipraktikkan oleh Organ Perusahaan sebagai bagian dari Manajemen Perusahaan.

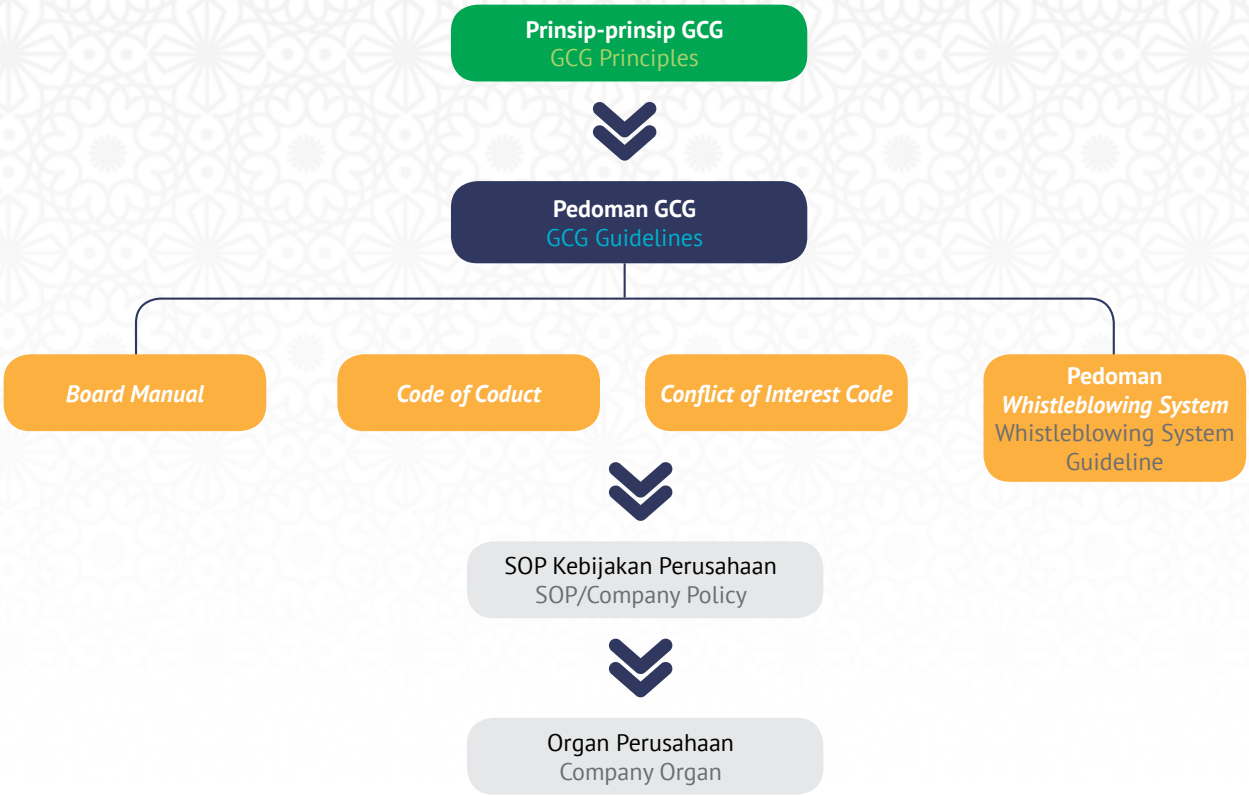
GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM

The Company believes that GCG implementation beyond compliance referring to the prevailing standards and laws and regulations will create highly competitive and sustainable performance.

Corporate Governance refers to a harmonious mechanism as a realization of GCG Principles, Company Policy Structure and Company Organs. In this mechanism, the GCG Principles are located as the basis for all thoughts, policies and actions carried out in the Corporate Policy Structure exercised by the Company's Organs as part of Company Management.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE



Guna menjamin pelaksanaan GCG yang fokus dan terarah, Perseroan telah memiliki struktur GCG yang meliputi struktur organ dan kebijakan Perseroan, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern dan Manajemen Risiko & Kepatuhan.

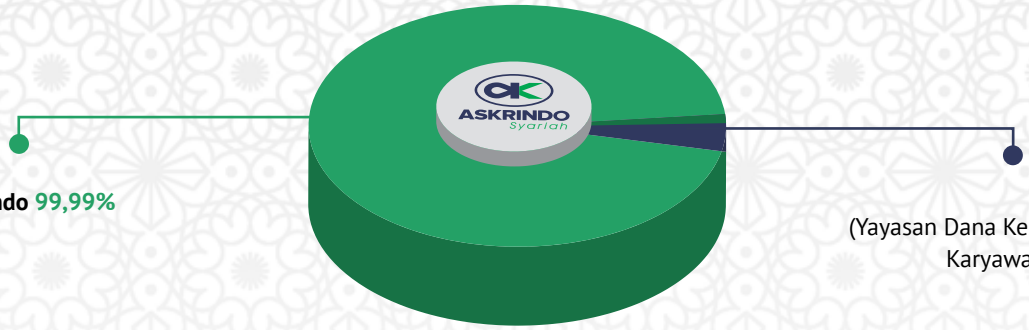
To ensure implementation of a focused and directed GCG, the Company has a GCG structure that includes the Company's organs and policies structures, such as: General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Secretary to the Board of Commissioners, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Risk & Compliance Management.

INFORMASI MEGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham utama dan pengendali PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah per 31 Desember 2019 adalah PT Asuransi Kredit Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% atau mewakili 249.999 lembar saham.

INFORMATION ABOUT MAJORITY AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

As of December 31, 2019, majority and controlling shareholders of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah is PT Asuransi Kredit Indonesia, with shares ownership of 99.99% or representing 249,999 shares.



PT Askrindo 99,99%

YDKKA
(Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo)
0,01%

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan strategis berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari kepentingan usaha Perseroan jangka pendek, menengah, dan panjang yang dilakukan secara wajar dan transparan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

Perseroan RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, meliputi:

a. Persetujuan Laporan Tahunan;
b. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
c. Penunjukan Akuntan Publik;
d. Putusan hal-hal lain yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dan atau seorang atau lebih Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan 2019

RUPS Tahunan tahun 2019 dilaksanakan tanggal 17 Juni 2019, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

- Persetujuan laporan tahunan & pengesahan laporan keuangan tahun buku 2018.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a corporate governance organ that holds the highest and all the authority that cannot be transferred to the Board of Directors and Board of Commissioners. GMS is the forum where Shareholders exercise their rights in making strategic decisions relating to the capital invested in the Company, by observing the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

The resolutions made at the GMS should be based on the short, medium and long-term business interests of the Company, which are carried out fairly and transparently, as stipulated in the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. Without prejudice to the rights of the GMS in accordance with the Articles of Association and Legislation, the Shareholders should not intervene in the duties, functions and authority of the Board of Commissioners and Directors, and the Sharia Supervisory Board.

GMS Mechanism and Implementation

Annual GMS is held annually and includes:

a. Approval of Annual Reports;
b. Approval of Corporate Work Plan and Budget (RKAP);
c. Appointment of Public Accountant;
d. Resolution of other matters as proposed by the Board of Commissioners and/or one or more Shareholder in accordance with the provisions of the Articles of Association.

AGMS 2019 Agenda and Resolutions

The Annual General Meeting of Shareholders 2019 was held on June 17, 2019, with agenda and resolutions, as follows:

- Approval on annual reports & ratification on financial statements for fiscal year 2018.
- Stipulation of the Use of the Company's Net Profit for fiscal year 2018.

- Penetapan Penghasilan Direksi & Dewan Komisaris.
- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019.

- Stipulation of Remuneration for Board of Directors & Board of Commissioners .
- Stipulation of the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2019.

Pelaksanaan RUPS Lainnya Tahun 2019

Selain RUPS Tahunan, Perseroan menyelenggarakan RUPS lainnya selama tahun 2019 dengan informasi penyelenggaraan dan agenda, sebagai berikut:

Implementation of Other General Meeting of Shareholders in 2019

In addition to the Annual General Meeting of Shareholders, the Company held another General Meeting of Shareholders during 2019 with organizing information and agenda, as follows:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat | Meeting Agenda
17 Januari | January 2019	• **Pengangkatan Direktur Pemasaran** Appointment of Director of Marketing • **Lain-lain berkaitan butir di atas** Other matters related with above agenda
29 Januari | January 2019	• **Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019 PT JPAS** Ratification of PT JPAS 2019 Corporate Work and Budget Plan (RKAP) 2019 • **Pengesahan Key Performance Indicator (KPI) Direksi & Dekom** Ratification of the Board of Directors & Board of Commissioners Key Performance Indicators (KPI) • **Dll | Others**
10 September 2019	• **Perubahan Pengurus PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah** Change in Management of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
30 Desember | December 2019	• **Penambahan modal disetor dari PT Asuransi Kredit Indonesia kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebesar Rp. 150.000.000.000** Additional paid-in capital from PT Asuransi Kredit Indonesia to PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah in the amount of Rp. 150,000,000,000

Status Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Status of Realization of Previous Year General Meeting Resolutions

No.	Keputusan | Decision	Realisasi Realization
1	**1. RUPS menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya;** **2. RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan dan pengawasan Perseroan selama tahun 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku dan tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2018.** 1. GMS has approved the Company's annual report and ratified the financial statements of the Company for the fiscal year 2018 and the Board of Commissioners' supervisory report as audited by Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahanto Bambang & Partners and disclosed in its report; 2. GMS granted responsibility release and discharge (*volledig acquit et decharge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management of the Company and the supervision of the Company throughout 2018, as long as these actions are not criminal or do not violate prevailing legal provisions/ procedures and such actions recorded and reported in the 2018 annual report and financial statements.	Sudah direalisasikan Realized
2	**Menetapkan penggunaan Laba Setelah Pajak dan Zakat Perseroan tahun buku 2018 sebesar Rp14.084.857.233 seluruhnya untuk Cadangan Umum.** Stipulated the use of the Company's Profit After Tax and Zakat for fiscal year 2018 amounting to Rp14,084,857,233 entirely for General Reserves.	Sudah direalisasikan Realized

No.	Keputusan | Decision	Realisasi Realization
3	**Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya tahun 2019 serta tantiem tahun buku 2018 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemegang Saham Mayoritas secara tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.** Stipulation of amount of salary/honorarium along with other facilities and benefits in 2019 and the 2018 fiscal year bonus for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be determined separately in the Decree of the Majority Shareholders, considering the prevailing regulations.	Sudah direalisasikan Realized
4	**Penetapan KAP untuk general audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan ditentukan kemudian dengan memperhatikan kesamaan KAP yang akan melakukan *general audit* atas laporan keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia tahun buku 2019 yang akan ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham serta mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.** Stipulation of KAP to perform general audit over the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2019 will be determined later by considering the similarity of the KAP who will conduct a general audit of the financial statements of PT Asuransi Kredit Indonesia 2019 for the fiscal year to be determined by the Ministry State-Owned Enterprises as Shareholders and comply with prevailing rules and regulations.	Sudah direalisasikan Realized

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, memberikan nasihat atau saran, serta memastikan bahwa Direksi telah menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan *stakeholders*. Dewan Komisaris bertanggung jawab memberikan laporan kepada RUPS serta memberikan rekomendasi remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta nominasi auditor eksternal.

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham dan/ atau Kementerian BUMN, serta memenuhi ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas serta prinsip-prinsip GCG. Perseroan mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik saham di Perseroan maupun di perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggung Jawaban kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Audit. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerjanya disampaikan dalam RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is the Company's organ that has the duty of conducting general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association and to provide advice to the Board of Directors as stipulated by the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The Board of Commissioners is responsible for overseeing the performance of the Board of Directors, providing advice, and ensuring that the Board of Directors has carried out their duties for the interests of stakeholders. The Board of Commissioners is responsible for submitting reports to the GMS and providing recommendations on the remuneration of members of the Board of Commissioners and Board of Directors and the nomination of the Company's external auditor.

The Board of Commissioners has met the fit & proper test by the Financial Services Authority (OJK) and Shareholders and/or the Ministry of SOES, as well as fulfilling the provisions in the Law of Limited Liability Company and the principles of GCG. The Company requires the Board of Commissioners to disclose their shares ownership, both in the Company and in other companies domiciled at home and overseas in a report that must be renewed annually.

The Board of Commissioners shall not take and or receive any personal benefits from the Company other than the remuneration and other facilities stipulated by the GMS. All members of the Board of Commissioners have the integrity, competence and adequate reputation.

In carrying out their duties, the Board of Commissioners answers directly to the GMS. It is the realization of accountability of the Board of Commissioners in conducting supervisory function over the management of the Company in the context of implementing the principles of GCG. The Board of Commissioners' performance is evaluated based on the criteria of performance prepared by the Audit Committee. Assessment is carried out at the end of each book closing period. Results of the performance assessment will be presented in the GMS.

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan telah sesuai undang-undang Nomor 40 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin dan Anggaran Dasar Perusahaan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan periode 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Composition

The composition of the Company's Board of Commissioners has complied with the Law Number 40 2007 concerning Limited Liability Companies, FSA Regulation No. 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantor Institutions and the Company's Articles of Association which states that the Board of Commissioners consists of at least 2 (two) persons and one of them was appointed as the President Commissioner. The President Commissioner also serves as the Independent Commissioner.

The composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2019 is as follows:

No.	Nama | Name	Jabatan | Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Period
1.	**Budi Wisakseno**	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Mei 2016. Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution on May 17, 2016.	2016 – 2021
2.	**Bambang Hermanto**	Komisaris Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 16 Mei 2018. Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution on May 16, 2018.	2018 – 2023
3.	**Firman Berahima**	Komisaris Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 September 2019. Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution on September 10, 2019.	2019 – 2024

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan atau kewajiban untuk:

a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi terhadap suatu permasalahan yang terjadi;
b. Memberikan pendapat atau arahan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris;

c. Kunjungan ke Divisi/Kantor Cabang tertentu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Perseroan seperti *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan aspek lainnya berjalan secara efektif. Dalam hal Dewan Komisaris akan melakukan kunjungan kerja ke Divisi/Kantor Cabang dan Unit Pemasaran, prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
    1. Dewan Komisaris menyampaikan rencana kunjungan kerja secara tertulis kepada Direksi dengan mencantumkan maksud dan tujuan, lokasi serta waktu kunjungan kerja yang akan dilakukan;

Duties and responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the duty and or obligation to:

a. Request written information from the Board of Directors regarding problems that occurred;
b. Provide opinions or directive during the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors, or in other meetings attended by the Board of Commissioners;
c. Visit certain Division/Branch Offices in order to ensure that the Company's operational activities, such as underwriting, claim settlement, marketing, human resources development, financial, and other aspects are carried out effectively. The procedures in the event that the Board of Commissioners to conduct a visit to the Division/ Branch Office and Marketing unit are as follows:
    1. The Board of Commissioners to submit a written plan of visit to the Board of Directors by stating the intention, purpose, location and time of the visit;

2. Direksi mempersiapkan kunjungan kerja tersebut termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai ketentuan tentang perjalanan dinas Dewan Komisaris;
3. Dalam hal kunjungan kerja dilakukan bersama sama dengan Direksi, prosedur tersebut di atas tidak diperlukan.

d. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang diberikan Direksi;
e. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS;
f. Beritikad baik, berhati-hati dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
g. Pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
h. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
i. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi tata urutan peraturan internal Perseroan;
j. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
k. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perseroan;
l. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap Jajarannya berkaitan dengan penyusunan visi, misi serta rencana-rencana strategis Perseroan lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar;
m. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam Perseroan;
n. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama;
o. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris;
p. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perusahaan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya;
q. Bila dipandang perlu, menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;
r. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan Perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perusahaan;
s. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan;

2. The Board of Directors to prepare the necessary facilities for the visit in accordance with the provisions regarding the official trip of the Board of Commissioners;
3. In the event that the work visit is carried out together with the Board of Directors, then the above procedure is not required.

d. Provide responses to periodic reports provided by the Board of Directors;
e. Comply with prevailing legislation, the Company's Articles of Association and GMS decisions;
f. Having good faith, careful and responsible in carrying out supervision and giving advice to the Board of Directors, only for the interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
g. Supervision is carried out for the interests of the Company by considering the interests of the Shareholders and being accountable to the GMS;
h. Carry out oversight duties on the policies of the Board of Directors in implementing Company management including compliance with prevailing laws and regulations, implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Corporate Work Plan and Budget (RKAP), Business Plans and provisions of the Articles of Association and GMS decisions;
i. Supervise the Board of Directors to ensure the Board of Directors adheres to the Company's internal regulation;
j. Provide advice to the Board of Directors in implementing the management of the Company;
k. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all staff related to the management of the Company;
l. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all of its Staffs regarding the preparation of the Company's vision, mission and strategic plans as stipulated in the Articles of Association;
m. Monitor the openness and effectiveness of communication within the Company;
n. To go over and review the reports from the Board of Directors and all staff, especially those related to specific tasks that have been jointly decided;
o. To examine and review reports from the Committees under the Board of Commissioners;
p. Keep updated with the development of the Company's activities both from internal information provided by the Company and from external information originating from the media as well as from other sources;
q. If deemed necessary, attending the work/coordination meetings with the Board of Directors and all staff;
r. Ensure that the Board of Directors and staff are in compliance with laws and other regulations in managing the Company;
s. Prepare the work plan and budget of the Board of Commissioners for the current year period;

t. Melakukan pembagian kerja diantara para Anggota Dewan Komisaris yang diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan;
u. Melakukan *self-assessment* atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik;
v. Menerapkan GCG secara konsisten; dan
w. Memantau efektivitas praktik GCG antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi GCG di Perseroan.

Uraian Tugas dan Tanggung jawab masing-masing Anggota Dewan Komisaris

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar Perusahaan serta membaut pembagian tugas yang diatur oleh Dewan Komisaris.

Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan, diberikan kegiatan Dewan Komisaris. Kemudian, untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian Perseroan secara maksimal, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

t. Managing the division of duties among the members of the Board of Commissioners, and to support their duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary to the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners at the expense of the Company;
u. Conduct periodic self-assessments on the performance of the Board of Commissioners;
v. Implement GCG consistently; and
w. Monitor the effectiveness of GCG practices, among others, by holding regular meetings with the Board of Directors to discuss the GCG implementation in the Company.

Duties and responsibilities of members of the board of Commissioners

As stipulated by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number PER-01/MBU/2011 on August 1, 2011, in carrying out their duties, the Board of Commissioners shall comply with the legislation and/or the Articles of Association of the Company and make distribution and make division of duties.

As primus inter pares, the duty of the President Commissioner is to coordinate the activities of the Board of Commissioners. Next, to carry out the Company's supervisory and controlling functions to the fullest, the Board of Commissioners distributes the tasks to each member of the Board of Commissioners as follows:

No.	Nama | Name	Jabatan | Position	Uraian Tugas | Duties
1.	**Budi Wisakseno**	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	- Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan; Fulfilling duties related to the functions of Board of Commissioners as Company's organ; - Melakukan pengawasan secara umum atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan Manajemen; Conducting general supervision over the management of the Company done by the BOD and management; - Pengawasan atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan Manajemen yang terkait dengan bidang Akuntansi dan Keuangan; Supervising the Company's Accounting and Financial management performed by BOD and management staff; - Mewakili pelaksanaan hubungan organ Dewan Komisaris dengan pihak internal dan eksternal Perseroan; Representing relationship between the Board of Commissioners as well as internal and external parties of the Company; - Koordinator pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris lainnya; Coordinating duties of other Board of Commissioners members; - Menunjuk anggota Komisaris untuk bertindak atas nama Dewan Komisaris; Appointing a member of Board of Commissioners to act on behalf of Board of Commissioners; - Menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris; Stipulate division of duties among the Board of Commissioners members; - Pengawasan atas kepengurusan perusahaan oleh Direksi dan manajemen yang terkait dengan bidang Organisasi dan SDM, serta Transformasi Budaya Kerja Perusahaan; Supervision over the Company's management by the Board of Directors and management related to Organization and HR, and Corporate Culture Transformation; - Menetapkan tugas Sekretaris Dewan Komisaris. Stipulation of Secretary to Board of Commissioners' duties.

No.	Nama | Name	Jabatan | Position	Uraian Tugas | Duties
2.	**Bambang Hermanto**	Komisaris Commissioner	- Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan; Fulfilling duties related to the functions of Board of Commissioners as an organ of the Company; - Pengawasan atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan Manajemen yang terkait dengan bidang *Good Corporate Governance*; Supervision over management of the Company by the Board of Directors and Management, related to Good Corporate Governance; - Pelaksanaan tugas lain di bidang Akuntansi, Keuangan, Investasi dan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan serta tugas lain yang disepakati oleh Dewan Komisaris; Supervision over other duties in Accounting, Finance, Investment and Internal Control System in the Company and other duties as agreed with the Board of Commissioners; - Pengawasan atas pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern Perusahaan. Supervision over Internal Control Unit duty implementation.
3.	**Firman Berahima**	Komisaris Commissioner	- Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan; Fulfilling duties related to the functions of Board of Commissioners as an organ of the Company; - Pengawasan atas kepengurusan Perusahaan oleh Direksi dan Manajemen yang terkait dengan kepatuhan dan Sumber Daya Manusia; Supervision over the Company's management done by the Board of Directors and Management Staff related to compliance and Human Resources; - Pelaksanaaan tugas di bidang Bisnis Perusahaan dan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan serta tugas lain yang disepakati oleh Dewan Komisaris; Implementation of duty in the Company's business line and Internal Control System as well as other duties as agreed by the Board of Commissioners; - Pengawasan atas pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern Perusahaan. Supervision over implementation of Internal Control Unit's duties.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan Anggaran Dasar Perusahaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas Dewan Komisaris yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Dewan Komisaris yang lowong untuk sementara. RUPS dapat memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Tidak lagi memenuhi yang berlaku;
4. Diberhentikan persyaratan Perundang-undangan; dan
5. Mengundurkan diri.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menjaga independensinya sehingga dapat bertugas sebaik-baiknya untuk kepentingan Perseroan. Perseroan menetapkan beberapa ketentuan untuk menjaga independensi Dewan Komisaris di antaranya:

1. Selain Dewan Komisaris, pihak lain tidak diperkenankan campur tangan dalam kepengurusan Perseroan;
2. Dewan Komisaris harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;

Terms of Office of the Board of Commissioners

The terms of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) terms of office. In the event that the terms of office of the Board of Commissioners has been ended while the GMS has yet determined the successor, then the vacant duties shall be carried out in accordance with the provisions on the temporary vacant position of the Board of Commissioners. The GMS can dismiss the Board of Commissioners at any time by stating the reasons, for the interests and objectives of the Company.

1. Passed-Away;
2. The term of office ended;
3. Failed to meet the requirements of prevailing law;
4. Dismissed based on GMS resolutions; and
5. Resigned.

Independency of Board of Commissioners

The Board of Commissioners shall stay independent in order to perform their duties at the best way possible for the interests of the Company. The Company stipulates several provisions to maintain the Independency of the Board of Commissioners including:

1. In addition to the Board of Commissioners, no other party is permitted to interfere in the management of the Company;
2. The Board of Commissioners must be able to take decisions objectively, without conflicts of interest and free from any pressure from any party;

3. Direksi tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensi Dewan Komisaris dalam mengurus Perseroan; dan

4. Dewan Komisaris wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmennya dalam melaksanakan kegiatan Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris tahun 2019

Dewan Komisaris secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui Komite.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan *monitoring* terhadap:

1. Kinerja Perseroan bidang Keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran.
2. Memberikan nasehat/saran untuk bidang *underwriting*, Investasi, Akuntansi & Keuangan, Organisasi & SDM, GCG, Manajemen Risiko dan Sistim Pengendalian Intern, Visi, Misi dan Budaya Kerja, TI dan lainnya (Reasuransi, Piutang, Aktiva Tetap, *Recoveries*).
3. Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan audit/ temuan auditor.
4. *Monitoring*/evaluasi Kinerja Kantor Cabang.

Dewan Komisaris juga telah menyampaikan beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi melalui Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (RADIKOM) yang meliputi:

1. Memberikan pengarahan kepada Direksi mengenai RKAP 2019 dan memantau pencapaiannya;
2. Mengevaluasi dan memberikan pengarahan terkait kinerja keuangan perusahaan secara bulanan;
3. Memberi perhatian mengenai RUPS dan RUPSLB; Mengevaluasi dan menyetujui keputusan Manajemen dan tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi;
4. Memantau penerapan manajemen risiko, memantau dan memperkuat kepatuhan;
5. Mengevaluasi tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal; dan
6. Memantau pelaksanaan GCG serta evaluasi kinerja Direksi.

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 14 kali dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (RADIKOM).

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RADIKOM)

Selain mengadakan rapat secara internal, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat dengan Direksi atau (RADIKOM) yang menekankan pentingnya hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Hubungan kerja harmonis yang terbuka dan saling menghormati ini penting untuk mendukung efektivitas dan produktivitas kinerja Perseroan.

3. The Board of Directors is not permitted to carry out activities that could interfere with the Independency of the Board of Commissioners in managing the Company; and
4. The Board of Commissioners must sign the Integrity Pact as a form of its commitment in carrying out the Company's activities which can lead to a conflict of interest.

Supervision and recommendation of the Board of Commissioners in 2019

Proactively, the Board of Commissioners supervises and provides input to the Board of Directors. The supervisory function is carried out directly, among others by monitoring follow-up actions on recommendations from the Board of Commissioners to the Board of Directors, as well as through the Committee.

In 2019, the Board of Commissioners has conducted supervision and monitoring, including as follows:

1. The Company's monthly, quarterly and semester financial performance.
2. Providing advice for underwriting, investment, accounting & finance, organization & HR, GCG, Risk Management and Internal Control Systems, Vision, Mission and Corporate Culture, IT and others (Reinsurance, Accountable Receivables, Fixed Assets, Recoveries).
3. Follow-up on the audit report/auditor's findings.
4. Monitoring/evaluation of Branch Office Performance.

The Board of Commissioners has also submitted several recommendations from the Board of Directors through the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (RADIKOM) which includes:

1. Providing direction to the Board of Directors regarding the 2019 RKAP and monitoring its achievements;
2. Evaluating and providing guidance regarding the Company's financial performance on a monthly basis;
3. Concern on the GMS and EGMS; Evaluating and giving approval on the Management's decisions and strategic actions proposed by the Board of Directors;
4. Monitoring the implementation of risk management, monitoring and strengthening the compliance;
5. Evaluating the followup of internal and external audit findings; and
6. Monitoring the implementation of GCG and evaluating the performance of the Board of Directors.

Board of Commissioners Meeting

In 2019, the Board of Commissioners held 14 meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners (RADIKOM).

Board of Commissioners and Board of Directors Meetings (RADIKOM)

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners also holds meetings with the Board of Directors (RADIKOM) emphasizing the importance of a fine working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The transparent and respectful harmonious working relationship is important to support the effectiveness and productivity of the Company.

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RADIKOM) diadakan satu kali dalam satu bulan atau kapan saja bila diperlukan.

Sepanjang tahun 2019, RADIKOM telah diselenggarakan sebanyak 14 kali. Tabel Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RADIKOM dan agendanya disampaikan sebagai berikut:

Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors (RADIKOM) are held at least once a month or at any time if deemed necessary.

Throughout 2019, RADIKOM was held 14 times. The table of attendance of the Board of Commissioners and Directors in the RADIKOM and its agenda are presented as follows:

Tabel Kehadiran dan Agenda Rapat Dewan Komisaris-Direksi Tahun 2019
Table of Board of Commissioners-Board of Directors Meeting Attendance and Agenda in 2019

Tanggal Rapat Meeting Date	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
16 Januari 2019 January 16, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Board of Commissioners • Board of Directors • Secretary to the Board of Commissioners • Audit Committee	• Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d Desember 2018 • Laporan Kesehatan Perusahaan 2018 berdasarkan POJK • Laporan Kepatuhan Perusahaan 2018 • dll • Discussion of Company Financial Performance as of December 2018 • Company Soundness Report for 2018 based on POJK • Corporate Compliance Report 2018 • others
26 Februari 2019 February 26, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Sekretaris Dewan Komisaris • Board of Commissioners • Board of Directors • Secretary to the Board of Commissioners	• Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d Januari 2019 • Penyampaian Format Laporan Berkala 2019 • dll • Discussion of Company Financial Performance as of January 2019 • Submission of Periodic Report in 2019 Format • others
20 Maret 2019 March 20, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Board of Commissioners • Board of Directors • Secretary to the Board of Commissioners • Audit Committee	• Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d februari 2019 • Penyampaian pending pekerjaan atas keputusan rapat sebelumnya • dll • Discussion of Company Financial Performance as of February 2019 • Submission of pending work based on the decision of the previous meeting • others
16 April 2019 April 16, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Sekretaris Dewan Komisaris • Board of Commissioners • Board of Directors • Secretary to the Board of Commissioners	• Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d Maret 2019 • Refleksi Kinerja Tw I terhadap anggaran 2019 • *Action plan* untuk TW II • dll • Discussion of Company Financial Performance as of March 2019 • Reflection of Performance as of 1st quarter compared to the 2019 budget • Action plan for 2nd Quarter • others
2 Mei 2019 May 2, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Board of Commissioners • Board of Directors	• *Action plan* Pemasaran PT JPAS 2019 • dll • PT JPAS 2019 Marketing Action Plan • others

Tanggal Rapat Meeting Date	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
15 Mei 2019 May 15, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Board of Commissioners • Board of Directors • Secretary to the Board of Commissioners • Audit Committee	• Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d April 2019 • Posisi saldo subrogasi per April 2019 • Posisi saldo piutang IJK • Laporan & informasi hasil KAP • Rencana RUPS • Status *Core System* • dll • Discussion of Company Financial Performance as of April 2019 • Position of subrogation outstanding as of April 2019 • IJK receivable balance position • KAP report & information • GMS plan • Core System Status • others
29 Mei 2019 May 29, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Kepala Divisi Pemasaran • Kepala Cabang Semarang • Board of Commissioners • Board of Directors • Head of Marketing Division • Head of Semarang Branch	• Pembahasan klaim *ex-gratia* PT KSS • Discussion of PT KSS ex-gratia claims
25 Juni 2019 June 25, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Board of Commissioners • Board of Directors • Secretary to the Board of Commissioners • Audit Committee	• Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d Mei 2019 • Pendapat BOD atas resume RUPS Pengesahan Laporan Keuangan 2018 • Tindak lanjut Radirkom April 2019 • dll • Discussion of Company Financial Performance as of May 2019 • BOD opinion on the GMS resume on Financial Statements 2018 • Follow-up on BOD – BOC Meeting in April 2019 • others
16 Juli 2019 July 16, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Board of Commissioners • Board of Directors	• Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d Juni 2019 • Laporan Kepatuhan & Kesehatan Perusahaan s.d Juni 2019 • Rincian piutang IJK • Laporan KPI Direksi • dll • Discussion of Company Financial Performance as of June 2019 • Company Compliance & Soundness Report June 2019 • Details of IJK receivables • Board of Directors KPI Report • others
20 Agustus 2019 August 20, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Komite Audit • Board of Commissioners • Board of Directors • Audit Committee	• Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d Juli 2019 • Laporan Kepatuhan & Kesehatan Perusahaan s.d Juli 2019 • Pembayaran klaim *ex-gratia* 2019 • dll • Discussion of Company Financial Performance as of July 2019 • Company Compliance & Soundness Report, July 2019 • Payment of ex-gratia 2019 claims • others

Tanggal Rapat Meeting Date	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
18 September 2019 September 18, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Board of Commissioners • Board of Directors • Secretary to the Board of Commissioners • Audit Committee	• Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d Agustus 2019 • *Crash program* Direktorat Pemasarana dalam Peningkatan IJK untuk 4 bulan • Laporan BOD tentang revitalisasi unit kepatuhan • Laporan Kinerja Perolehan Subrogasi s.d Agustus 2019 • Laporan Kinerja beban penjaminan ulang s.d Agustus • Laporan perkembangan pembangunan *system* aplikasi akuntansi & keuangan • dll • Discussion of Company Financial Performance as of August 2019 • Crash Program for the Directorate of Infrastructure in Improving IJK for 4 months • BOD report on the revitalization of the compliance unit • Subrogation Earnings Performance Report as of August 2019 • Performance report on re-guarantee burden as of August • Report on the development of accounting & financial application system development • others
17 Oktober 2019 October 17, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Komite Audit • Board of Commissioners • Board of Directors • Audit Committee	• Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d September 2019 • Laporan Kinerja Perolehan Subrogasi s.d September 2019 • Laporan pipeline perolehan IJK Nov & Des 2019 • Laporan realisasi belanja modal 2019 • Laporan Perkembangan Pembangunan sistem IT Laporan Pemenuhan struktur organisasi perusahaan • dll • Discussion of Company Financial Performance as of September 2019 • Subrogation Earnings Performance Report as of September 2019 • Pipeline report for acquisition of IJK Nov & Dec 2019 • 2019 capital expenditure realization report • Development Report on IT system development Report on Compliance with the company's organizational structure • others
19 November 2019 November 19, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Dewan Pengawas Syariah • Board of Commissioners • Board of Directors • Secretary to the Board of Commissioners • Audit Committee • Sharia Supervisory Board	• Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d Oktober 2019 • Pembahasan hasil semiloka Ijtima Tsanawi DPS 2019 • Rancangan kunjungan DPS ke KC semester II tahun 2019 • Permohonan BOD untuk review pelaksanaan transaksi syariah kepada DPS • dll • Company Financial Performance Report October 2019 • Discussion on results of DPS Ijtima Tsanawi seminar 2019 • DPS visit to Branch Office for 2nd semester of 2019 • Request BOD to review implementation of sharia transactions to DPS • others
23 Desember 2019 December 23, 2019	• Dewan Komisaris • Direksi • Sekretaris Dewan Komisaris • Board of Commissioners • Board of Directors • Secretary to the Board of Commissioners	• Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan s.d November 2019 • Strategi Pencapaian IJK sd Desember 2019 • Status pos terbuka transitoris • Rencana program • dll • Company Financial Performance Report as of November 2019 • Strategies for Achieving IJK as of December 2019 • Transitory open account status • Program planning • others

Arahan Dewan Komisaris Kepada Direksi

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat/masukan/arahan kepada Direksi terhadap 4 (empat) bidang.

Board of Commissioners' Direction to the Board of Directors

In 2019, the Board of Commissioners has provided advice/input/direction to the Board of Directors on 4 (four) aspects.

Tabel Arahan Dewan Komisaris Tahun 2019
Table of Board of Commissioners Direction in 2019

No.	Bidang | Aspects	Jumlah Arahan | Number of Direction
1.	*Underwriting* | Underwriting	14 kali | Times
2.	Investasi | Investment	14 kali | Times
3.	Keuangan & Umum | Financial & General Affair	14 kali | Times
4.	Pengendalian | Control	14 kali | Times

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Perseroan mengikut sertakan Dewan Komisaris dalam beberapa pelatihan guna mengasah kemampuan dalam memberikan *supervise* atas pengelolaan Perseroan. Realisasi pelatihan Dewan Komisaris untuk pengembangan kompetensi Dewan Komisaris adalah sebesar Rp38.800.000 dengan rincian sebagai berikut:

Board of Commissioners Training and Competency Development Program

Throughout 2019, the Board of Commissioners attended several trainings to hone their skills in providing supervision over the management of the Company. The realization of the Board of Commissioners' training for the competency development the Board of Commissioners is Rp38,800,000 with details as follows:

Tabel Informasi Pelatihan dan Pengembangan
Table of Training and Development Information

No.	Nama | Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Date	Persentase Percentage
1.	Budi Wisakseno	Komisaris Utama Komisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner	ISO 3100 Standar Internasional Manajemen Risiko ERM Fundamental	Februari | February 2019	CRMS Indonesia
			Refreshment CRMP	Agustus | August 2019	RAP Indonesia
			Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII National Risk Management Professional Conference VII	November 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
2.	Bambang Hermanto	Komisaris Commissioner	ISO 3100 Standar Internasional Manajemen Risiko ERM Fundamental	Februari | February 2019	CRMS Indonesia
			Refreshment CRMP	Agustus | August 2019	RAP Indonesia
			Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII	November 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)

Pengungkapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian saran atas pengelolaan Perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*). Tujuan *Board Charter* adalah memberikan pedoman kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. *Board Charter* Dewan Komisaris telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 054/KEP-DIR/XII/2018 pada 3 Desember 2018.

Disclosure of Board of Commissioners Work Guideline (Board Charter)

In order to carry out the duties of supervision and giving advice on the management of the Company performed by the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the Guidelines of the Board of Commissioners (Board Charter). The purpose of the Board Charter is to provide guidance for the Board of Commissioners and the Board of Directors in understanding the regulations elated to the working procedures of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners' Charter was determined through the BOD Decree Number: 054/KEP-DIR/XII/2018 on December 3, 2018.

Isi Board Charter Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Dewan Komisaris
Bab III : Dewan Pengawas Syariah
Bab IV : Direksi
Bab V : Kegiatan Antara Organ Perusahaan

Contents of the Board Charter for Board of Commissioners Board of Commissioners are as follows:
Chapter I : Introduction
Chapter II : Board of Commissioners
Chapter III : Sharia Supervisory Board
Chapter IV : Directors
Chapter V : Activity Among Company Organs

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah sebagai organ perusahaan memiliki fungsi sebagai pengawas atas kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Komposisi Dewan Pengawas pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Sharia Supervisory Board serves as the Company's organ overseeing the compliance of the Company's business activities with sharia principles.

Composition of the Sharia Supervisory board

The composition of the Supervisory Board as of December 31, 2019 is as follows:

No.	Nama | Name	Jabatan | Position	Dasar Pengangkatan | Appointment Letter	Periode Period
1.	**Daud Rasyid**	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018. Recommendation of National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018.	2018 - 2023
2.	**Muhammad Zubair**	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018. Recommendation of National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018.	2018 - 2023
3.	**Deni Nuryadin**	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018. Recommendation of National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018.	2018 - 2023

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

1) Dewan Pengawas Syariah berfungsi melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah sesuai dengan prinsip syariah;
2) Memastikan pemenuhan prinsip syariah atas akad, kegiatan operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan;
3) Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan;
4) Meminta fatwa Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Perseroan yang belum ada fatwanya;
5) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha tugasnya;
6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Duties and Authorities of the Sharia Supervisory board

The Sharia Supervisory Board has the following duties and authorities, among others:

1) Sharia Supervisory Board carries out the supervisory function and provision of advice to the Board of Directors so that the Company activities are in accordance with sharia principles;
2) Ensuring the Company's contracts (agreement), operational activities and products are in compliance with sharia principles;
3) Supervising the process of developing the Company's new products;
4) Requesting the fatwa of the National Sharia Council for new products of the Company which fatwa has not yet issued;
5) Periodically reviewing the compliance of sharia principles on the Company business activities;
6) Requesting relevant data and information from the Company's work units in order to carry out its duties.

Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Tahun 2019

Dewan Pengawas terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Komisaris. Dewan Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan termasuk terhadap prinsip-prinsip dasar atas penyelenggaraan penjaminan pembiayaan dengan prinsip syariah.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan secara berkala per tiga bulan, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan dari satu orang atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Berdasarkan Laporan Dewan Pengawas Syariah tahun 2019, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya:

1) Rapat koordinasi antara Dewan Pengawas Syariah dengan Manajemen Perseroan secara berkala sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan; dan
2) Pemberian rekomendasi atas seluruh perjanjian kerjasama dan pengembangan produk baru dalam tahun 2019.

Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota DPS dan agenda rapat sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Members of Sharia Supervisory Board are entitled to obtain complete and timely information of the Company from the Board of Directors.

Supervisory Board Duties and Responsibilities Implementation in 2019

The Supervisory Board consists of the Sharia Supervisory Board (DPS) and the Board of Commissioners. The Supervisory Board carries out the supervisory function including on the basic principles of implementing financing guarantees under sharia principles.

Sharia Supervisory Board Meeting

Sharia Supervisory Board meetings are held on regular basis every three months, or upon written request by one or more members of the Board of Commissioners, or upon request by one or more shareholders with voting rights.

Based on the Sharia Supervisory Board report for 2019, several activities that have been carried out are including:

1) Coordination meetings between Sharia Supervisory Board and the Management of the Company, conducted in 7 (seven) meetings; and
2) Providing recommendations on all cooperation agreements and the development of new products in 2019.

The attendance of each DPS members and meeting agenda throughout 2019 are as follows:

No.	Nama | Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
1.	**Daud Rasyid**	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman the Sharia Supervisory Board	7	7	100%
2.	**Muhammad Zubair**	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	7	3	43%
3.	**Deni Nuryadin**	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	7	6	86%

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Perseroan, Direksi bertanggung jawab secara kolektif, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan bisnis Perseroan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai pembagian tugas dan wewenang yang diatur Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the Company's organ fully responsible for the management of the Company for the interests and the objectives of the Company in accordance with the Articles of Association. In carrying out the management tasks, the Board of Directors are collectively responsible, in order to generate added values and to ensure the Company's business continuity. Each member of the Board of Directors carries out his/her duties and makes decisions in accordance with the division of duties and authorities regulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja Direksi.

Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Komposisi Anggota Direksi

Komposisi Direksi Perseroan terdiri dari anggota-anggota yang memiliki kompetensi di bidang Asuransi, Keuangan serta Manajemen sehingga memungkinkannya proses pengambilan putusan yang efektif, efisien dan segera. Berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 7 Februari 2019 tentang perubahan susunan pengurus perseroan, susunan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

In carrying out their duties, members of the Board of Directors answers directly to the GMS. The responsibility of the Board of Directors to the GMS is the realization of the accountability in managing the Company in the context of implementing the principles of GCG. The performance of the Board of Directors is evaluated by the Board of Commissioners both individually and collectively based on the criteria set for the Board of Directors' performance evaluation.

The assessment is carried out every end of fiscal year period. The result of the assessment of the Board of Directors performance by the Board of Commissioners is to be submitted at the GMS.

Board of Directors Composition

The Board of Directors consists of members who have competencies in the fields of insurance, finance and management, so that they can make decisions effectively, efficiently and immediately. Based on the notarial deed of No. 31 on February 7, 2019 concerning changes in the Company's management composition. As of December 31, 2019, composition of Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah is as follows:

No.	Nama | Name	Jabatan | Position	Dasar Pengangkatan | Appointment Basis	Periode Period
1.	**Soegiharto**	Direktur Utama President Director	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Januari 2018. General Meeting of Shareholders Resolutions on January 22, 2018.	Pertama First
2.	**Subagio Istiarno**	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2017. General Meeting of Shareholders Resolutions on October 19, 2017.	Pertama First
3.	**Supardi Najamuddin**	Direktur Pemasaran Director of Marketing	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Januari 2019. General Meeting of Shareholders Resolutions on January 17, 2019.	Pertama First

Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi bertugas secara kolektif menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.

Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu:

1. Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas

Duties and Obligations of the Board of Directors

In carrying out all actions relating to the management of the company, the Board of Directors must work collectively for the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company, and represent the Company inside and outside the Court regarding all matters and events related to the company, with restrictions regulated in legislation, Articles of Association and or GMS Resolutions.

The Board of Directors in carrying out their duties and obligations must always:

1. Discharge their duties in good faith for the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, and ensure that the Company carries out its social responsibilities and considering the interests of various Stakeholders in accordance with the provisions of legislation;

2. Comply with the prevailing laws and regulations, Articles of Association and GMS decisions and ensure that all activities of the Company are in accordance

Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
3. Menerapkan GCG secara konsisten;
4. Mematuhi tata urutan peraturan internal Perseroan;

5. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perseroan;
6. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
7. Bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
8. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan tertentu;
10. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham masing-masing Direktur dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
11. Bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
12. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perseroan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perusahaan lainnya;
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
14. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
15. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
    a. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Perseroan dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
    b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Anggota.

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Pembagian tugas masing-masing Direksi dilakukan guna menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian sasaran Perseroan pada masa mendatang secara lebih sistematis efisien dan efektif, sebagai berikut:

with the prevailing prevailing laws and regulations, Articles of Association and decisions of the GMS;

3. Implement GCG consistently;
4. Comply with the order of the Company's internal regulations;
5. Act as the leader in managing the Company;

6. Maintain and manage the Company's assets;
7. Take full responsibility for carrying out their duties for the interests of the Company in fulfilling its purposes and achieving objectives;
8. Be receptives to inputs from the Board of Commissioners;
9. Carry out all actions, both regarding the management and ownership of the Company's assets and binding the Company to other parties and/or other parties with the Company, under certain restrictions;

10. Must make and keep Special Register containing information on share ownership of each Director and member of the Board of Commissioners and their families in the Company and/or other companies as well as the date the shares were obtained;

11. Personally responsible for the loss of the Company should the person concerned is guilty or is negligent in carrying out his duties;
12. Maintain and keep the List of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Directors' Meetings, Annual Reports and Company financial documents and other Company documents at the Company's domicile;
13. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with prevailing regulations, as well as other reports, if requested by the Board of Commissioners and/ or Shareholders;
14. Provide explanation on everything requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders;
15. Members of the Board of Directors must disclose:
    a. Ownership of shares that reaches 5% (five percent) or more in the Company and/or other companies domiciled at home and abroad; and

    b. Financial relationships and family relationships with Members.

Scope of Board of Directors Individual Duty and Responsibility

Division of individual duties among the Board of Directors is aimed to ensure a more systematic, efficient and effective efforts on achieving the Company's target in the future, the distribution of duties between members of the Board of Directors are as follows:

No.	Nama | Name	Jabatan Position	Uraian Tugas | Description of Duties
1.	**Soegiharto**	Direktur Utama President Director	Memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Direksi dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan, membawahi Satuan Pengawasan Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, Kepatuhan & GCG. In charge of and is authorized to lead and coordinate all activities of the Board of Directors in managing the Company, in charge of the Internal Audit Unit (SPI), Corporate Secretary, Risk Management, Compliance & GCG.

No.	Nama | Name	Jabatan Position	Uraian Tugas | Description of Duties
2.	**Subagio Istiarno**	Direktur Keuangan Director of Finance	• Melaksanakan pengelolaan di bidang keuangan dan akuntansi, pengusahaan modal, perencanaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan Perseroan; Performing financial and accounting management, capital raising, planning and development of the Company's sources of income and expenditure, and managing assets; • Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis terkait fungsinya; Coordinating with the Business Units, in accordance with its functions; • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama; Performing other duties assigned given by the President Director; • Pengengolalaan sumber daya manusia. Managing human resources.
3.	**Supardi Najamuddin**	Direktur Pemasaran Director of Marketing	• Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya; Performing management in the marketing up to the production, and coordinating and coaching/assessing the performance of the Divisions under it; • Melakukan kajian pengembangan bisnis; Conducting business development studies; • Melaksanakaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama. Performing other duties assigned given by the President Director.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. Namun demikian RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
5. Mengundurkan diri.

Independensi (Kemandirian) Direksi

Direksi Perseroan wajib menjaga independensinya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya secara optimal. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi tidak boleh terpengaruh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak seoptimal mungkin demi kepentingan Perseroan.

Board of Directors Terms of Office

Based on the Company's Articles of Association, the term of office of the Board of Directors is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. In the event that the term of office of members of the Board of Directors ends and the GMS has yet determined a replacement, then the duties of the vacant members of the Board of Directors should be carried out in accordance with the provisions for filling in vacant members of the Board of Directors. However, the GMS has the rights to dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons, for the interests and objectives of the Company. The term of office of members of the Board of Directors ends if the concerned person is:

1. Passed-Away;
2. End of Terms of Office;
3. No longer meet the requirements of prevailing law;
4. Dismissed based on GMS decision; and
5. Resigned.

Independency of the Board of Directors

The Board of Directors members shall maintain their Independency in order to be able to carry out the tasks entrusted to them optimally. In carrying out their duties, the Board of Directors shall not be affected by any pressure from any party and shall act optimally for the benefit of the Company.

Untuk menjaga independensi, Perseroan menetapkan ketentuan mengenai independensi Direksi sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun tidak diperkenankan melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perseroan;
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
3. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan; dan
4. Menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Direksi dalam melaksanakan kegiatan Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Anggota Direksi beserta keluarganya tidak memiliki saham pada korporasi yang terafiliasi dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau dengan anggota Dewan Komisaris serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda. Dengan demikian, Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perusahaan.

Rapat Direksi

Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan dari satu orang atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Sepanjang tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 15 (lima belas) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dan agenda rapat adalah sebagai berikut:

To maintain the Independency of the Board, the Company establishes provisions regarding the Independency of the Board of Directors as follows:

1. Besides member of the Board of Directors, no other party is permitted to conduct or interfere in the management of the Company;
2. The Board of Directors must be able to make decisions objectively, without any conflict of interest and free from any pressure from any party;
3. The Board of Directors is prohibited from carrying out activities that may affect his/her ability to act independently in managing the Company; and
4. Sign the Integrity Pact as a form of commitment of the Board of Directors in carrying out the Company's activities which can lead to conflicts of interest.

Board of Directors Financial and Family Affiliation

Members of the Board of Directors and their families do not have any shares ownership in any affiliated company of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. All of the Board of Directors members do not have any family affiliation up to third degree, including vertical as well as horizontal affiliation, or relationship by marriage, with other members of the Board of Directors or with members of the Board of Commissioners. Therefore, the Board of Directors can carry out their duties and responsibilities independently without any conflict of interest between the interest of personal, family and relatives, of other positions or groups with the interests of the Company.

Board of Directors Meetings

Board of Directors meetings shall be held periodically, or upon written request from one or more members of the Board of Commissioners, or upon request from one or more shareholders with voting rights. In 2019, the Board of Directors convened 15 (fifteen) meetings. The attendance level of each member of the Board of Directors and meeting agenda are as follows:

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Direksi 2019
Table of Board of Directors Meeting Attendance in 2019

No.	Nama | Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
1.	**Soegiharto**	Direktur Utama President Director	15	15	100%
2.	**Subagio Istiarno**	Direktur Keuangan Director of Finance	15	15	100%
3.	**Supardi Najamuddin**	Direktur Pemasaran Director of Marketing	15	15	100%

Adapun agenda rapat Direksi di 2019 adalah sebagai berikut:

Board of Directors meeting agenda in 2019 are as follows:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat | Meeting Agenda
10 Januari 2019 January 10, 2019	• Persiapan Pra RUPS • Agenda *Event* Tahun 2019 • Raker Awal Tahun 2019 • *Souvenir* Perusahaan • KPI Pegawai Tahun 2018 • Pemantapan Mutasi/Rotasi/Promosi Pegawai • Kenaikan Gaji Pegawai Tahun 2019 • Evaluasi Plt Kadiv *Suretyship* • Pre-GMS Preparation • Event Agenda 2019 • Initial Meeting 2019 • Corporate Souvenir • Employee KPI in 2018 • Employee Mutation/Rotation/Promotion Strengthening • Increase in Employee Salaries in 2019 • Evaluation of Acting Head of Suretyship Division
23 Januari 2019 January 23, 2019	• Persiapan Rapat OJK tentang klaim SFK • *Excess* Biaya Pengobatan Asuransi • Rencana Kerjasama Pihak Ketiga untuk Penagihan Subrogasi • Pembentukan Unit Pelayanan Zakat • Pembuatan Juklak untuk Percepatan Bisnis • Rencanan Kerja Divisi SDM & Umum • Mutasi Kadept. Analis CBC • *Progress* Tindak Lanjut Pending Rakernas Tahun 2019 • Preparation of OJK Meetings regarding SFK claims • Excess Insurance Treatment Costs • Third Party Collaboration Plan for Subrogation Billing • Establishment of Zakat Service Unit • Making operational guidelines for business acceleration • HR & General Division Work Plan • Mutation of Head of CBC Analyst Division • Progress on National Conference 2019 Pending Matters Follow Up
13 Februari 2019 February 13, 2019	• Pemberian Insentif untuk Pegawai URT • Penetapan Kebutuhan SDM 2019 • *Progress* KPI • Rencana Renovasi Kantor & Kantor Cabang • Incentives Package for URT Employees • Stipulation of Manpower Planning in 2019 • KPI Progress • Office & Branch Office Renovation Plans
26 Februari 2019 February 26, 2019	• Kebutuhan penambahan SDM Kantor Pusat & cabang • Fasilitas kendaraan untuk Kadiv • Pengadaan *Laptop* • Employee recruitment plan at Head Office & Branch Offices • Vehicle facilities for Division Head • Laptops Procurement
5 April 2019 April 5, 2019	• Publikasi Laporan Keuangan • *Collecting Fee* Subrogasi • Kajian Tambahan modal • Evaluasi Kepala departemen *Suretyship* • Financial Report Publication • Subrogation Collecting Fee • Additional capital studies • Evaluation of Head of Surtyship Department

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat | Meeting Agenda
15 April 2019 April 15, 2019	• Persiapan Pengganti Kepala Divisi SPI • Rencana Pemberian Bonus Pegawai • Evaluasi Kinerja Cabang • Percepatan *Core System* TI • Preparation to replace Head of the SPI Division • Employee Bonus Plans • Branch Performance Evaluation • Acceleration of Core IT Systems
22 Mei 2019 May 22, 2019	• Penegasan Posisi Kadep *Suretyship* • dll • Affirmation of Head of Suretyship Department Position • others
23 Juli 2019 July 23, 2019	• Mutasi Pegawai • Pengelolaan Divisi SDM • Fasilitas Kendaraan Kepala Divisi • Employee Mutation • HR Division Management • Vehicle Facilities for Division Head
25 Juli 2019 July 25, 2019	• Rekrutmen Kepala SPI • Rencana Definitif Pjs Kadept *Surety* dan Subrogasi • dll • Head of SPI Recruitment • Definitive Plan for Acting Head of Surety and Subrogation Department • others
27 Agustus 2019 August 27, 2019	• Tindaklanjut surat dari PS terkait Evaluasi Kinerja TW II/2019 • Kandidat Kepala SPI • Rencana Pelaksanaan HUT Askrindo Syariah ke 7 • Penetapan Sekretaris Direksi • Progress Annual Report 2018 • Progress RKAP & RJPP • Follow up on the letter from the Shareholders related to Performance Evaluation as of 2nd Quarter of 2019 • SPI Head Candidates • Askrindo Syariah 7th Anniversary Celebration Plan • Stipulation of Secretary to the Board of Directors • Progress of Annual Report 2018 • Progress of RKAP & RJPP
29 Agustus 2019 August 29, 2019	• Hasil proyeksi Keuangan RJPP 2020-2024 • Perencanaan belanja Modal • Penunjukan Sdr. Nirwan sbg Plt Kadep Akuntansi & Keuangan • dll • RJPP Financial projection results for 2020-2024 • Capital expenditure planning • Appointment of Mr. Nirwan as Acting Head of Accounting & Finance • others
17 September 2019 September 17, 2019	• Permintan Manbis Askrindo tentang masukan perihal wewenang Anak Perusahaan • Posisi unit kepatuhan • Insentif Pegawai • Pembentukan Tim Pengadaan Gedung kantor • dll • Manbis Askrindo's request for input regarding the authority of the Subsidiary • Compliance unit position • Employee Incentives • Establishment of an office building procurement team • others

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat | Meeting Agenda
1 Oktober 2019 October 1, 2019	• Hasil *Exercise* produk BSM • Penetapan maksimal honor untuk Konsultan TI & Keuangan • Penetapan tgl *Outing* Pegawai 2019 • Penyesuaian jadwal Pakaian Pegawai • Exercise results of BSM products • Determination of the maximum fees for IT & Financial Consultants • Establishment of Employee Outing 2019 • Adjustment of Employee Uniform schedule
23 Oktober 2019 October 23, 2019	• *Review* Struktur Organisasi perusahaan • dll • Review the company's organization structure • others
3 Desember 2019 December 3, 2019	• Rotasi/Mutasi Karyawan Tahun 2019 • Promosi Karyawan • Peningkatan Status Aceh, Tangerang, dan Mataram menjadi Kantor Cabang • Employee Rotations/Mutation in 2019 • Employee Promotion • Status Upgrade for Aceh, Tangerang and Mataram into Branch Offices

Pelatihan Direksi

Selama 2019, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti beberapa pelatihan dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya mengelola Perseroan. Pelatihan yang diikuti sebagai berikut:

Board of Directors Training

In 2019, members of the Company's Board of Directors participated in several trainings to support their duties and responsibilities in managing the Company. The training is followed as follows:

No.	Nama | Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Date	Penyelenggara Provider
1.	**Soegiharto**	Direktur Utama President Director	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII National Risk Management Professional Conference VII	November 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
2.	**Subagio Istiarno**	Direktur Keuangan Director of Finance	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII National Risk Management Professional Conference VII	November 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
3.	**Supardi Najamuddin**	Direktur Pemasaran Director of Marketing	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII National Risk Management Professional Conference VII	November 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)

REMUNERASI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh RUPS serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh Pemegang Saham.

Prosedur Remunerasi Direksi

Pada tahun 2019, prosedur dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang–undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Bentuk *Honorarium*, Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-04/ MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Penetapan remunerasi Direksi terdiri dari beberapa komponen seperti:

1. *Honorarium;*
2. Tunjangan;
3. Fasilitas;
4. Tantiem/insentif kinerja.

Indikator Kinerja

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Remunerasi diberikan dalam hal Perseroan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan bisnis penjaminan;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan peer Perseroan lainnya;
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
8. Besaran remunerasi yang diterima adalah:
9. Anggota Dewan Komisaris 90% dari remunerasi Komisaris Utama.

REMUNERATION OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND SHARIA SUPERVISORY BOARD

Remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out on the basis of the formula stipulated by the GMS and reviewed by the Board of Commissioners through indepth review by the Shareholders.

Board of Directors' Remuneration Procedure

In 2019, the procedures for the determination of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors are carried out based on the Article 96 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 which regulates the amount of salaries and allowances of the Board of Directors determined based on the GMS resolutions. Honorarium, Allowances and Facilities, as well as other components included in the income component, refer to the provisions set forth in the State Minister of State Regulation Number: Per-02/ MBU /06/2016 on June 20, 2016 concerning Amendment to Regulation of the Minister of SOE State Number: Per-04/MBU/2014 on March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration for Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board in SOE and also disclosed in State Minister of SOE Regulation Number: Per-04/MBU/2014 on March 10, 2014 concerning Guidelines for Remuneration Policy for Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board in SOE.

Determination of remuneration for the Board of Directors consists of several components such as:

1. Honorarium;
2. Allowances;
3. Facilities;
4. Performance incentives/bonus.

Performance Indicators

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the following indicators:

1. Remuneration is given in the event that the Company gains profits in the relevant fiscal year;
2. Remuneration is given by referring to the development of the business;
3. Remuneration is given based on the performance of the Board of Commissioners and Directors, in accordance with their duties and responsibilities;
4. Financial performance and achievement of the Company's Key Performance Indicator (KPI);
5. Individual work performance;
6. Fairness with peers of the Company;
7. Consideration of the Company's long-term goals and strategies;
8. The amount of remuneration received is:
9. Members of the Board of Commissioners 90% of the remuneration of the President Commissioner.

Struktur Remunerasi Yang Menunjukkan Komponen Remunerasi dan Jumlah Nominal Per Komponen Untuk Setiap Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Pada tahun 2019, remunerasi yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS adalah sebagai berikut:

Remuneration Structure Indicating Remuneration Components and Amount by Component Individually for The Board of Commissioners and Board of Directors

In 2019, the remuneration for the Board of Directors, the Board of Commissioners and SSB are as follows:

Tabel Struktur Remunerasi Direksi 2019

Table of Board of Directors Remuneration Structure in 2019

No.	Jenis | Type	Komponen Component	Jumlah Amount
1.	Gaji Salary	Direktur Utama | President Director	840.000.000
		Direktur Keuangan | Director of Finance	756.000.000
		Direktur Pemasaran | Director of Marketing	714.000.000
2.	Tunjangan Allowance	**Hari Raya Keagamaan | Religious Holidays**	
		Direktur Utama | President Director	97.500.000
		Direktur Keuangan | Director of Finance	88.200.000
		Direktur Pemasaran | Director of Marketing	83.300.000
		Purna Jabatan | Post-Employment Benefit	
		Direktur Utama | President Director	292.500.000
		Direktur Keuangan | Director of Finance	264.600.000
		Direktur Pemasaran | Director of Marketing	249.900.000
		Perumahan | Housing Allowance	
		Direktur Utama | President Director	330.000.000
		Direktur Keuangan | Director of Finance	302.400.000
		Direktur Pemasaran | Director of Marketing	285.600.000
3.	Fasilitas Facilities	**Kendaraan Dinas | Operational Vehicle**	
		Direktur Utama | President Director	1 unit beserta biaya pemeliharaan dan operasional 1 unit altogether with maintenance and operational costs
		Direktur | Director	
		Fasilitas Kesehatan | Medical Allowance	
		Direktur Utama | President Director	
		Rawat Jalan | Outpatient	20.000.000
		Rawat Inap (kelas kamar/ hari) Inpatient (Room Class/Day)	2.000.000
		Direktur | Director	
		Rawat Jalan | Outpatient	20.000.000
		Rawat Inap (kelas kamar/ hari) Inpatient (Room Class/Day)	2.000.000
		Bantuan Hukum | Legal Assistance	**Sebesar pemakaian | At Cost**
4.	Tantiem Incentives	Direktur Utama | President Director (Gross)	221.811.460
		Direktur | Director (Gross)	188.539.741

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris 2019
Table of Board of Commissioners Remuneration Structure in 2019

No.	Jenis | Type	Komponen Component	Jumlah Amount
1.	Gaji Salary	Komisaris Utama | President Commissioner	378.000.000
		Komisaris | Commissioner	340.200.000
2.	Tunjangan Allowance	**Hari Raya Keagamaan | Religious Holidays**	
		Komisaris Utama | President Commissioner	37.800.000
		Komisaris | Commissioner	34.020.000
		Purna Jabatan | Post-Employment Benefit	
		Komisaris Utama | President Commissioner	113.400.000
		Komisaris | Commissioner	102.060.000
		Transportasi | Transportation	
		Komisaris Utama | President Commissioner	75.600.000
		Komisaris | Commissioner	68.040.000
3.	Fasilitas Facilities	**Fasilitas Kesehatan | Medical Allowance**	
		Komisaris Utama | President Commissioner	
		Rawat Jalan | Outpatient	10.000.000
		Rawat Inap (kelas kamar/ hari) Inpatient (Room Class/Day)	1.000.000
		Komisaris | Commissioner	
		Rawat Jalan | Outpatient	10.000.000
		Rawat Inap (kelas kamar/ hari) Inpatient (Room Class/Day)	1.000.000
		Bantuan Hukum | Legal Assistance	**Sebesar pemakaian | At Cost**
4.	Tantiem Incentives	Komisaris Utama | President Commissioner (Gross)	99.815.157
		Komisaris | Commissioner (Gross)	89.833.641

Tabel Struktur Remunerasi DPS 2019
Table of DPS Remuneration Structure in 2019

No.	Jenis | Type	Komponen Component	Jumlah Amount
1.	Gaji Salary	Ketua DPS | Chairman of DPS	144.000.000
		Anggota DPS | Member of DPS	129.600.000
2.	Tunjangan Allowance	**Hari Raya Keagamaan | Religious Holidays**	
		Ketua DPS | Chairman of DPS	12.000.000
		Anggota DPS | Member of DPS	10.800.000

HUBUNGAN AFILIASI

Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya tidak memiliki saham pribadi pada korporasi yang terafiliasi dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Selain itu antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Dengan demikian, Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perseroan.

AFFILIATIONS

The Board of Commissioners, as well as their families, do not have any shares ownership at affiliated companies of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. In addition, the Board of Commissioners members do not have any family affiliation with fellow members of the Board of Commissioners and Board of Directors, up to third degree, either vertically or horizontally, or relation by marriage (in-law). Therefore, the Board of Commissioners can perform their duties and responsibilities independently without any conflict between the interest of personal, family, relatives, other positions, other parties with the Company's interest.

Tabel Hubungan Keuangan
Table of Financial Affiliation

Nama | Name	Memiliki Hubungan Keuangan Dengan | Having Financial Affiliation With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No
Budi Wisakseno		v		v		v
Bambang Hermanto		v		v		v
Firman Berahima		v		v	v	

Nama | Name	Memiliki Hubungan Keuangan Dengan | Having Financial Affiliation With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No
Soegiharto		v		v		v
Subagio Istiarno		v		v		v
Supardi Najamuddin		v		v		v

Tabel Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor
Table of Disclosures of share ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors that reached 5% or higher of the paid-up capital

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham | Shares Ownership					
		Perseroan The Company		Perusahaan/ Lembaga Penjamin Lainnya Other Companies/ Guarantee Institutions		Perusahaan/Lembaga Non-Penjamin Lainnya Other Non-Guarantor Companies/ Institutions	
		Jumlah Saham Total Shares	%	Jumlah Saham Total Shares	%	Jumlah Saham Total Shares	%
Budi Wisakseno	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham | Shares Ownership					
		Perseroan The Company		Perusahaan/ Lembaga Penjamin Lainnya Other Companies/ Guarantee Institutions		Perusahaan/Lembaga Non-Penjamin Lainnya Other Non-Guarantor Companies/ Institutions	
		Jumlah Saham Total Shares	%	Jumlah Saham Total Shares	%	Jumlah Saham Total Shares	%
Bambang Hermanto	Komisaris | Commissioner	-	-	-	-	-	-
Firman Berahima	Komisaris | Commissioner	-	-	-	-	-	-
Soegiharto	Direktur Utama | President Director	-	-	-	-	-	-
Subagio Istiarno	Direktur Keuangan | Director of Finance	-	-	-	-	-	-
Supardi Najamuddin	Direktur Pemasaran | Director of Marketing	-	-	-	-	-	-

Tabel Hubungan Afiliasi
Table of Affiliated Relationship

Nama | Name	Memiliki Hubungan Afiliasi Dengan | Affiliated With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No
Budi Wisakseno		v		v		v
Bambang Hermanto		v		v		v
Firman Berahima		v		v		v
Soegiharto		v		v		v
Subagio Istiarno		v		v		v
Supardi Najamuddin		v		v		v

KOMITE AUDIT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris di mana Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris dari luar Perusahaan.

AUDIT COMMITTEE

As stipulated in the Regulation of the Minister of SOE Regulations Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs under the Board of Commissioners Organs/Supervisory Board in State Owned Enterprise, in order to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties, performing supervision effectively, the Board of Commissioners shall establish an Audit Committee. Appointment and dismissal of Audit Committee Members reported to the GMS. Chairman and members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Chairman of the Audit Committee is a member of the Board of Commissioners who is an Independent Board of Commissioners or members of the Board of Commissioners who can act independently. Audit Committee members may come from Board members Commissioners from external party of the Company.

Susunan Anggota Komite Audit
Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor KEP-003/DK/JPAS/2017 tentang Pengangkatan Komite Audit, dengan mempertimbangkan Surat Direktur SDM & Umum PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 195/DIR tanggal 13 Maret 2017 Perihal Komite Audit PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Audit Committee Composition
The Audit Committee was established pursuant to PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Board of Commissioners Number KEP-003/DK/JPAS/2017 concerning Appointment of Audit Committee, considering the LPT Asuransi Kredit Indonesia HR & General Affairs Director Letter Number 195/ DIR on March 13, 2017 concerning Audit Committee of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Tabel Susunan Komite Audit 2019
Table of Audit Committee Composition in 2019

No.	Nama | Name	Jabatan | Position	Dasar Pengangkatan | Appointment Basis
1.	**Budi Wisakseno**	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	Sesuai pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris. Based on appointment as Board of Commissioners Member.
2.	**Purwadi**	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	SK Dewan Komisaris No. KEP-003/DK/JPAS/2016. Board of Commissioners Decree No. KEP-003/DK/JPAS/2016.
3.	**Seny Saraswati**	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	SK Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/JPAS/2019. Board of Commissioners Decree No. KEP-02/DK/JPAS/2019.

Profil Komite Audit
Profile of the Audit Committee



Budi Wisakseno
Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil Budi Wisakseno telah disajikan dalam bahasan profil Dewan Komisaris dalam laporan tahunan ini.

Budi Wisakseno's profile has been presented in the Board of Commissioners profile discussion in this annual report.

Purwadi
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Warga Negara Indonesia. Lahir di Karanganyar, 3 April 1970. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta tahun 1993. Mengawali karir di Askrindo tahun 1996 dan dipercaya menempati berbagai posisi antara lain Kepala Bagian Keuangan & Penagihan (2006), Kepala bagian SDM (2007), Kepala Bagian SDM dan Umum (2009), Kepala Bagian Underwriting PK (2009) , *Deputy Division Head* Bagian Perencanaan dan Pengembangan (2012), *Deputy Division Head* Bagian Pengawasan Wilayah 1 (2013), Kepala Bagian Audit Internal (2017) dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Penjaminan KUR di PT Askrindo.

Indonesian Citizen. Born in Karanganyar, April 3, 1970. Graduated Bachelor's degree in Economics and Development Studies from Universitas Sebelas Maret, Surakarta in 1993. Started his career at Askrindo in 1996 and was assigned in several positions, such as Head of Finance & Collection Unit (2005), Head of HR Unit (2007), Head of HR and General Affairs Unit (2009), Head of Underwriting PK Unit (2009), Deputy Division Head, Planning and Development Unit (2012), Deputy Division Head Area 1 Supervision Unit (2013), Head of Internal Audit Unit (2017) and currently is assigned as Head of KUR Guarantee Operations Unit at PT Askrindo.

Beliau mengikuti berbagai pelatihan pada tahun 2019 antara lain Survey Interpersonal Value Budaya Perusahaan, Asesor KPKU BUMN Tahun 2019, *Public Training Batch* XI, Sertifikasi *Lead Auditor Course* BCMS 22301 2012 IRCA dan Pendidikan *Managing Organizational Change*.

He participated in various trainings throughout 2019 such as Corporate Culture Interpersonal Value Survey, SOEs KPKU Assessor in 2019, Public Training Batch XI, Lead Auditor Course BCMS 22301 Certification 2012 IRCA and Managing Organizational Change Training.

Seny Saraswati

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tanggal 4 Maret 1962. Menyelesaikan pendidikan Diploma dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1983), Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari STIE Yayasan Swadaya (2003) dan *Master of Management* dari Universitas Krisnadwipayana (2011). Mengawali karir di BPKP (1982 – 1993) dan kemudian melanjutkan karir di PT Pertamina (Persero) (1994) sebagai Junior Auditor dan menempati berbagai posisi penting antara lain Internal Audit Manager (2014), Kepala Internal Audit (2015) serta *Manager Support Function Internal Audit* (2018).

Indonesian Citizen. Born in March 4, 1962. Graduated Diploma degree from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1983), Bachelor Degree of Accounting from STIE Yayasan Swadaya (2003) and Master of Management from Universitas Krisnadwipayana (2011). Started her career at BPKP (1982 – 1993) and continued her career at PT Pertamina (Persero) (1994) as Junior Auditor and assigned in various key positions such as Internal Audit Manager (2014), Chief of Internal Audit (2015) and Manager Support Function Internal Audit (2018).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja tahunan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
2. Melakukan evaluasi atas pencapaian rencana kerja dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
3. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang mungkin dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi.
6. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris, yang meliputi antara lain:
   a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal, sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
   b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya.
   c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

Duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. Prepare and submit annual work plan to the Board of Commissioners for approval.
2. Evaluate achievement of the work plan and report to the Board of Commissioners.
3. Assist the Board of Commissioners to ensure effectiveness of the Internal Control System and implementation of external and internal auditors' duties by monitoring and evaluating the audit planning and implementation in order to assess adequacy of internal control, including the financial reporting process.
4. Report to the Board of Commissioners various risks that may be encountered by the Company and implementation of risk management by the Board of Directors.
5. Perform audit on any mistake indication in the Board of Directors meeting resolutions.
6. Providing independent professional opinion to the Board of Commissioners, which includes, among others:
   a. Assess implementation of activities as well as the results of audits conducted by the Internal Auditor and External Auditor thereby implementation and reporting that below the standards can be prevented.
   b. Provide recommendations regarding improvements on the Company's management control system and its implementation.
   c. Perform other duties assigned by the Board of Commissioners as long as under the scope of the duties and obligations of the Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.
7. Ensure that there is a satisfactory evaluation procedure for all information released by the Company.

8. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris, antara lain:
   a. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
   b. Penelaahan atas independensi dan obyektivitas Auditor Internal dan Eksternal.
   c. Penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Eksternal untuk memastikan semua risiko penting telah dikaji.
   d. Penelaahan atas efektivitas pengendalian intern Perusahaan.
   e. Penelaahan atas tingkat kepatuhan Perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
   f. Pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.

Masa tugas Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan paling lama sama dengan jabatan Dewan Komisaris dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Apabila diperlukan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli atau konsultan yang independen dari luar Perusahaan di bidang hukum maupun bidang lainnya yang dipandang perlu atas biaya Perusahaan untuk membantu Komite Audit.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi telah membentuk komite-komite yang bertugas membantu Direksi untuk menangani kebijakan Perseroan pada bidang khusus, untuk menangani strategi atau risiko dan kemudian melaporkan kembali kepada Direksi tentang keputusan yang diambil atau rekomendasi yang dibuat. Adapun komite-komite tersebut adalah:

1. Komite Produk

Tugas

a) Melakukan evaluasi atas usulan Kebijakan dan Prosedur Produk yang diajukan.
b) Melakukan evaluasi dan usulan atas konten Perjanjian Kerjasama (PKS) dan produk dengan mitra bisnis.
c) Melakukan evaluasi atas kinerja produk penjaminan yang telah dan akan dipasarkan dan membuat rekomendasi terkait upaya peningkatan yang diperlukan.

d) Menyelenggarakan rapat Komite Produk dalam hal (i) terdapat usulan PKS/produk baru atau perubahan atas PKS/produk yang telah ada yang perlu didaftarkan kepada regulator terkait dan/atau melibatkan DPS untuk memperoleh persetujuan dari aspek syariah; atau (ii) adanya ketentuan baru yang dikeluarkan oleh regulator terkait dengan produk penjaminan dan/atau pemasarannya; atau (iii) karena alasan lain sepanjang dianggap perlu oleh Komite Produk.

8. Identify matters that require concern and duties the Board of Commissioners, including:

   a. Review of financial information that will be issued by the Company, such as financial statements, projections and other financial information.
   b. Review independency and objectivity of the Internal and External Auditors.
   c. Review on adequacy of the audits performed by the Internal and External Auditors to ensure that all key risks have been reviewed.
   d. Review effectiveness of the Company's internal control.
   e. Review on the Company's compliance level with other laws and regulations related to the Company's activities.

   f. Audit on any mistake indication in the Board of Directors meeting resolutions or irregularities in the implementation of the Board of Directors meeting resolutions.

The term of office of the Audit Committee Members who are not members of the Board of Commissioners is no longer than the terms of office of the Board of Commissioners and can be extended for one more period, without reducing rights of the Board of Commissioners to grant incidental dismissal.

If necessary, with written approval from the Board Commissioners, Audit Committee is allowed to hire independent external staff experts or consultants in Legal and other fields that are deemed necessary at the Company's expense to assist the Committee Audit.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has formed committees whose task is to assist the Board of Directors in handling the Company's policies in specific areas, to handle strategy or risk and then report back to the Board of Directors about the decisions taken or recommendations made. The committees are:

1. Product Committee

Duty

a) Evaluate the proposed Product Policies and Procedures submitted.
b) Evaluating and proposing the contents of the Cooperation Agreement (PKS) and products with business partners.
c) Evaluate the performance of guarantee products that have been and will be marketed and make recommendations related to the necessary improvement efforts.
d) Hold a Product Committee meeting in the event that (i) there is a proposal for a PKS/new product or an amendment to an existing PKS/product that needs to be registered with the relevant regulator and/or involves a DPS to obtain approval from the sharia aspect; or (ii) there are new provisions issued by regulators related to the guarantee product and/or its marketing; or (iii) for other reasons as long as deemed necessary by the Product Committee

Keanggotaan

Ketua	: Direktur Bidang/Pejabat Setingkat
Sekretaris	: Kepala Divisi Pemasaran & Pengembangan Produk
Anggota	: Direksi & SEVP Kepala Divisi *Suretyship* Kepala Divisi Operasional Seluruh Kepala *Department* di Divisi Operasional Seluruh Kepala Departemen di Divisi PPP Kepala Manajemen Risiko Kepala Unit Legal *Drafting* Kepala Unit Subrogasi dan Penagihan Legal Korporat

2. Komite Penjaminan

Tugas

a) Melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman (termasuk kebijakan & SOP) penjaminan dengan pelaksanaan kegiatan penjaminan yang mencakup antara lain kegiatan akseptasi, aktuaria, penjaminan ulang, klaim, dan subrogasi;
b) Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat atas Kebijakan Penjaminan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan oleh regulator;
c) Memberikan rekomendasi atas setiap Kebijakan Penjaminan khususnya akseptasi dan klaim yang menjadi limit pejabat yang diberi kewenangan limit akseptasi dan klaim;
d) Memutuskan kegiatan penjaminan antara lain persetujuan akseptasi termasuk *terms* & kondisi yang disyaratkan;
e) Menjaga kehati-hatian dalam kegiatan akseptasi, aktuaria, *reguarantee*, klaim dan subrogasi agar dapat mendapatkan manfaat maksimal bagi setiap pemangku kepentingan;
f) Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup Komite Penjaminan.

Keanggotaan

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Kepala Divisi Operasional
Anggota	: Direksi Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk (PPP) Kepala Divisi *Suretyship* Seluruh Kepala *Department* di Divisi Operasional Kepala Manajemen Risiko Kepala Subrogasi dan Penagihan

3. Komite Manajemen Risiko

Tugas

a) Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas:
   1) Penyusunan kebijakan dan pedoman manajemen risiko termasuk strategi manajemen risiko, penetapan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang diambil;
   2) Penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko korporat;

Membership

Chairman	: Supervising Director/ Executive at equal level
Secretary	: Head of Marketing & Product Development Division
Members	: Directors & SEVP Head of Suretyship Division Head of Operations Division All Department Heads in the Operations Division All Department Heads in the PPP Division Head of Risk Management Head of Legal Drafting Unit Head of Subrogation and Billing Unit Corporate Legal

2. Guarantee Committee

Duty

a) Evaluate the suitability of the guideline (including policies & SOPs) of guarantees with the implementation of guarantee activities which include acceptance, actuarial, reinsurance, claims and subrogation activities;
b) Reviewing and providing opinions on the Guarantee Policy and other policies required by the regulator;
c) Provide recommendations on each Guarantee Policy, especially acceptances and claims that are the official limit that is given the authority of acceptance and claim limits;
d) Deciding guarantee activities including acceptance agreements including terms & conditions that are required;
e) Maintain prudence in acceptances, actuarial, regulatory, claims and subrogation activities in order to get maximum benefits for each stakeholder;
f) Carry out certain other tasks related to the function and scope of the Guarantee Committee.

Keanggotaan

Chairman	: President Director
Secretary	: Head of Operations Division
Members	: Directors Head of Marketing and Product Development (PPP) Division Head of Suretyship Division All Head of Departments in the Operations Division Head of Risk Management Head of Subrogation and Collection

3. Risk Management Committee

Duty

a) Evaluate and recommend:
   1) Formulation of policies and guidelines for risk management including risk management strategies, determination of risk appetite and risk tolerance taken;
   2) Improving the implementation of corporate risk management;

3) Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan/prosedur normal, regulasi dan melampaui rencana bisnis dan limit yang telah ditetapkan sebelumnya yang belum diatur dalam komite lainnya;
4) Budaya sadar risiko (*risk awareness*) agar terbentuk dalam setiap aktivitas perusahaan;
5) Pengambilan keputusan tentang kebijakan dan strategi perusahaan terkait dengan pengelolaan risiko operasional maupun non operasional yang bersifat strategis dan korporat yang dapat mempengaruhi terhadap kesinambungan usaha perusahaan.

b) Melakukan kajian dan pemantauan atas Profil Risiko Perusahaan serta upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh Manajemen terhadap faktor-faktor risiko utama.
c) Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
d) Melakukan pembahasan terhadap laporan-laporan risiko termasuk laporan tingkat risiko.
e) Melakukan pemantauan kepatuhan perusahaan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan per undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
f) Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan, asesor atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite.

Keanggotaan

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Kepala Manajemen Risiko (MR)
Anggota	: Direksi & SEVP Seluruh Kepala Divisi atau Pejabat Tertinggi di Unit Kerja dimaksud Kepala Perencanaan Strategis Kepala Sekretaris Perusahaan & Legal

4. Komite Personalia

Tugas

a) Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas rumusan kebijakan dan arahan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya insani di JPAS.
b) Tugas pada butir a. Tersebut diatas antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) Remunerasi dan insentif pegawai;
2) Mutasi dan rotasi pegawai;
3) Promosi, demosi, *detasering*, dan pemutusan hubungan kerja pegawai;
4) Disiplin pegawai;
5) Hal-hal lain yang terkait dengan penanganan masalah pegawai terkait dengan pihak eksternal dan hubungan industrial.
c) Melakukaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan personalia yang telah ditetapkan.
d) Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite.

3) Determination of matters related to business decisions that deviate from normal policies/ procedures, regulations and exceed business plans and predetermined limits that have not been regulated in other committees;
4) A risk awareness culture in order to be formed in every company activity;
5) Decision making regarding company policies and strategies related to strategic and corporate operational and non-operational risk management that can affect the sustainability of the company's business.

b) Conducting studies and monitoring of the Company's Risk Profile and mitigation efforts undertaken by Management of the main risk factors.
c) Monitor the adequacy of the process of identification, measurement, monitoring, control and risk management information systems.
d) Conduct discussions on risk reports including risk level reports.
e) Oversee the Company's compliance with the Articles of Association, Financial Service Authority Regulation as well as other laws and regulation related to risk management.
f) Engage in cooperation with external consultants, accountants, assessors or other external parties providing suggestion to the Committee.

Membership

Chairman	: President Director
Secretary	: Head of Risk Management (MR)
Members	: Directors & SEVP All Division Heads or Supreme Officials in the Work Unit concerned Head of Strategic Planning Chief Corporate & Legal Secretary

4. Human Resources Committee

Duty

a) Evaluating and recommending policy formulations and directives related to human resource management at JPAS.
b) Tasks in point a. The above include, among others, the following matters:
1) Remuneration and employee incentives;
2) Employee movements and rotation;
3) Promotion, demotion, detasering, and termination of employee employment;
4) Discipline of employees;
5) Other matters related to handling employee problems related to external parties and industrial relations.
c) Conduct an evaluation of the implementation of policies and personnel management that have been determined.
d) Establish cooperation with outside consultants or other external parties who provide advice to the Committee.

Keanggotaan

Ketua	: Direktur Keuangan & Umum
Sekretaris	: Kepala Divisi SDM & Umum
Anggota	: Direksi & SEVP Seluruh Kepala Divisi atau Pejabat Tertinggi di Unit Kerja dimaksud Kepala Manajemen Risiko Kepala Sekretaris Perusahaan & Legal

5. Komite Investasi

Tugas

a) Merumuskan kebijakan dan arahan investasi.
b) Memantau pelaksanaan kebijakan, SOP dan arahan investasi yang telah ditetapkan.
c) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan dan arahan investasi yang telah ditetapkan.
d) Menjaga kehati-hatian dalam kegiatan investasi agar dapat mendapatkan manfaat maksimal bagi setiap pemangku kepentingan.

Keanggotaan

Ketua	: Direktur Keuangan & Umum
Sekretaris	: Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Anggota	: Direksi & SEVP Seluruh Kepala Divisi atau Pejabat Tertinggi di Unit Kerja dimaksud Kepala Manajemen Risiko Kepala Departemen Akuntansi Kepala Departemen TI Kepala Perencanaan Strategis

6. Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Tugas

a) Melakukan evaluasi atas usulan Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Barang & Jasa yang diajukan.
b) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang & Jasa.
c) Melakukan evaluasi atas kinerja Pengadaan Barang & Jasa yang telah dilakukan termasuk vendor yang digunakan dan membuat rekomendasi terkait upaya perbaikan yang diperlukan.
d) Menyelenggarakan rapat Komite Pengadaan Barang & Jasa dalam hal (i) terdapat usulan PKS dengan vendor atas Pengadaan Barang & Jasa baru atau perubahan atas PKS yang telah dibuat; atau (ii) adanya ketentuan baru yang dikeluarkan oleh regulator terkait dengan Pengadaan Barang & Jasa; atau (iii) karena alasan lain sepanjang dianggap perlu oleh Komite Pengadaan Barang & Jasa.

Keanggotaan

Ketua	: Direktur Keuangan dan Umum
Sekretaris	: Kepala Divisi SDM & Umum
Anggota	: Direksi & SEVP Kepala Manajemen Risiko Kepala Departemen Akuntansi & Keuangan Kepala Perencanaan Strategis Kepala Bagian Umum

Membership

Chairman	: Finance & General Affairs Director
Secretary	: Head of HR & General Affairs Division
Members	: Directors & SEVP All Division Heads or Executives in the concerned Work Unit Head of Risk Management Head of Corporate Secretary & Legal

5. Investment Committee

Duty

a) Formulate investment policies and directions.
b) Monitor the implementation of policies, SOP and investment directives that have been determined.
c) Evaluate the implementation and direction of the investment that has been determined.
d) Maintain prudence in investment activities in order to get maximum benefit for each stakeholder.

Membership

Chairman	: Finance and General Director
Secretary	: Head of Finance and Accounting Division
Members	: Directors & SEVOP Head of Marketing and Product Development Division Head of Risk Management Head of the Accounting Department Head of IT Department Head of Strategic Planning

6. Goods and Services Procurement Committee

Duty

a) Evaluate the proposed Policies and Procedures for Procurement of Goods & Services submitted.
b) Evaluate the implementation of Goods & Services procurement activities.
c) Evaluate the performance of the procurement of Goods & Services that have been carried out including the vendors used and make recommendations related to the necessary improvement efforts.
d) Organize meetings of the Goods & Services Procurement Committee in the event that (i) there is a PKS proposal with a vendor for the procurement of new Goods & Services or changes to the PKS that have been made; or (ii) there are new provisions issued by regulators relating to the Procurement of Goods & Services; or (iii) for other reasons as long as deemed necessary by the Goods & Services Procurement Committee.

Member

Chairman	: Finance and General Director
Secretary	: Head of HR & General Division
Members	: Directors & SEVP Head of Risk Management Head of the Department of Accounting & Finance Head of Strategic Planning Head of General Affairs

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung (*liaison officer*) atau *contact person* antara Perseroan dengan masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 064/KEP-DIR/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 tentang Pedoman Sekretaris Perusahaan dan Legal. Sekretaris Perusahaan bertugas memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan *stakeholders* serta kepada pihak-pihak di luar Perseroan dan atau dalam Perseroan berkaitan dengan kondisi Perseroan. Penyelenggaraan fungsi tersebut diserahkan kepada pejabat setingkat Kepala Divisi yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary functions as a liaison office, or contact person, between the Company and the community. Based on Board of Directors Decree 064/KEP-DIR/X/2019 on October 13, 2019 concerning Corporate Secretary and legal Guidelines. Corporate Secretary is in charge to provide all information needed by stakeholders, as well as parties outside and/or within the Company relating to the condition of the Company. The function is carried out by officials at the level of Head of Division whose appointment and dismissal are carried out by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Profil Sekretaris Perusahaan
Profile of Corporate Secretary



Catur Heru Putranto

Kepala Sekretaris Perusahaan & Legal
Head of Corporate Secretary & Legal

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar S1 jurusan Manajemen Perbankan dari STIE Tri Dharma Widya Jakarta pada 2002.

Menjabat sebagai Kepala Sekretaris Perusahaan & Legal sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 021/KEP-DIR/SDM/IV/2018 tentang Mutasi Pegawai sdr. Catur Heru Putranto PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tanggal 9 April 2018. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *micro banking manager* Bank Syariah Mandiri (2011-2013), *manager* Divisi Kredit BPR Perdana (2008-2011), *cluster manager* Divisi *Consumer Mass Market* Bank Danamon (2005-2009), dan *Supervisor* Divisi Nestle Arina Multikarya (2002-2005).

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung (*liason officer*) atau *contact person* antara Perusahaan dengan masyarakat serta memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan *stakeholders* serta kepada pihak-pihak di luar Perseroan dan atau dalam Perseroan berkaitan dengan kondisi Perusahaan. Selain itu, fungsi Sekretaris Perusahaan yaitu memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Indonesian citizen, 46 years old. Currently domiciled in Jakarta, He earned his Bachelor's degree majoring in Banking Management from STIE Tri Dharma Widya Jakarta in 2002.

Served as Head of Corporate Secretary & Legal since 2018 based on Board of Directors Decree No. 021/KEP-DIR/SDM/ IV/2018 concerning Employee Transfer of Catur Heru Putranto of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah on April 9, 2018. Previously, he served as micro banking manager of Bank Syariah Mandiri (2011-2013), manager of Credit Division of BPR Perdana (2008-2011), cluster manager of Consumer Mass Market Division of Bank Danamon (2005-2009), and Supervisor of Nestle Division of Arina Multikarya (2002-2005).

Corporate Secretary Function

The Corporate Secretary acts as a liaison officer, or contact person, between the Company and the community in providing information needed by stakeholders, as well as those outside and/or within the Company relating to the condition of the Company. In addition, the function of the Corporate Secretary is to ensure that the Company complies with the regulations on disclosure of information, in line with GCG principles, as well as administers and keeps the Company's documents, including but not limited to Shareholders Register, Special List and minutes of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners and GMS.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi 0064/KEP-DIR/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 tentang Pedoman Sekretaris Perusahaan dan Legal, maka tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kesekretariatan

- Menyusun jadwal, membuat undangan dan mengatur pelaksanaan pertemuan/rapat Direksi baik dengan pihak internal, eksternal Perusahaan dan pertemuan penting lainnya, antara lain :
  - Rapat Direksi yang diadakan minimal 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
  - RUPS Pengesahan RKAP dan Pengesahan Laporan Keuangan yang diadakan masing-masing setiap tahun sekali;
  - Rapat Kerja yang diadakan pada tiap tahun dan Rapat Penyusunan Anggaran/RKAP tahun berikutnya.
- Menyiapkan dan memastikan agenda Rapat Direksi, RADIKOM dan RUPS Tahunan;
- Memastikan bahwa agenda rapat sudah termasuk masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan atau keputusan serta masalah non-rutin yang signifikan. Agenda rapat tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan;
- Menyampaikan Risalah Rapat kepada seluruh anggota Direksi;
- Melakukan perbaikan atas risalah Rapat Direksi (jika ada keberatan atau usulan perbaikan) yang disampaikan Direksi;
- Mengatur dan memastikan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri RUPS;
- Menyusun program kerja/kegiatan dan kebutuhan anggaran Unit Kerja Sekretaris Perusahaan dan Legal;
- Menghadiri rapat Direksi, RADIKOM, RUPS dan membuat Risalah Rapat serta proses pengesahannya;
- Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, pelaporan perusahaan dan tugas-tugas protokoler Direksi Lainnya; dan
- Membuat daftar khusus mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain.

2. Komunikasi Perusahaan

- Memastikan bahwa setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah menerima program pengenalan Perusahaan pada saat pertama kali menjabat. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menginformasikan anggota baru Direksi/ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah mengenai Perusahaan, sehingga anggota baru tersebut dapat memberikan kontribusinya secepat mungkin kepada

Corporate Secretary Duties & Responsibilities

In accordance with Board of Directors Decree 0064/KEP-DIR/X/2019 on October 13, 2019 concerning Corporate Secretary and legal Guidelines, for the the duties of the Corporate Secretary based on their functions are as follows:

1. Secretariat

- Prepare schedule, invitations and arrange implementation of Board of Directors meetings both with internal and external parties and other important meetings, including:
  - Board of Directors Meetings held at least 12 (twelve) times in 1 (one) year;
  - Board of Commissioners and the Board of Directors meetings quarterly (three) months or as needed;
  - Ratification of the RKAP and Ratification of Financial Statements which are held annually;
  - Work Meetings which are held every year and the Budget Preparation Meeting RKAP in the following year.
- Prepare and ensure the agenda of Board of Directors, BOD BOC Meetings and Annual GMS meetings;
- Ensure that the agenda of the meeting has covered issues that require concern and/or decisions and significant non-routine issues. The agenda for the meeting is submitted altogether with the invitation;
- Disseminate the Minutes of Meeting to all of the Board of Directors members;
- Revise the of the Board of Directors Meeting (if there are objections or suggestions for improvement) submitted by the Board of Directors;
- Manage and ensure that the Shareholders, Board of Commissioners and Directors has attended the GMS;
- Develop work programs/activities and budget requirements for the Corporate Secretary and Legal Work Unit;
- Attend meetings of the Board of Directors, RADIKOM, GMS and prepare Minutes of Meetings and the process of ratification;
- Carry out administrative activities, corporate reporting and other protocol duties of the Board of Directors; and
- Prepare a special list containing share ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as their families in other companies and companies.

2. Corporate Communications

- Ensure that every member of Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board has participated in to the Company's orientation program when first appointed. Purpose of the program is to inform the new Board of Directors/Board of Commissioners/Sharia Supervisory Board members about the Company thereby the new members can make their contribution as prompt as possible to the

Perusahaan. Materi pengenalan tersebut harus disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan dan Legal, yang meliputi antara lain:

1) Informasi atau Pengetahuan Internal
   - Anggaran Dasar Perusahaan;
   - Latar belakang dan sejarah Perusahaan;
   - Misi dan visi Perusahaan serta maksud dan tujuan Perusahaan;
   - Struktur organisasi Perusahaan;
   - Tugas, tanggung jawab dan hak/kewenangan serta fasilitas yang diperuntukan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
   - Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Perusahaan setiap tahun;
   - Perkembangan Kinerja Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir;
   - Program bisnis dan jenis produk Perusahaan;
   - Keberadaan bangunan dan lingkungan kantor, kantor cabang, Perusahaan Afiliasi, organisasi/ asosiasi; dan
   - Sumber Daya Manusia.
2) Informasi atau Pengetahuan Eksternal
   - Posisi Perusahaan dibandingkan dengan mitra usaha, kompetitor dan *stakeholders* lain;
   - Undang-undang dan peraturan terkait; dan
   - Hubungan dan kewajiban dengan regulator dan lembaga terkait lainnya.
3) Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan, perkenalan dengan para Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Cabang dan Karyawan di Perusahaan serta program lainnya.

- Menjalin hubungan dengan instansi luar, seperti Instansi Pemerintah, BUMN, Swasta, media massa dan masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan mempublikasikan informasi;
- Mengelola informasi dan mengkaji seluruh informasi termasuk dampak hukumnya dan mempersiapkan informasi tersebut secermat mungkin yang akan dikomunikasikan kepada pihak terkait;
- Membina hubungan dengan investor/mitra bisnis/ instansi luar Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
- Menyusun dan mempublikasikan tanggapan secara tepat waktu, akurat dan objektif atas pernyataan dari masyarakat, pemasok dan karyawan;
- Memberikan penjelasan jawaban dan informasi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait secara relevan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan ataupun kebingungan yang dapat mempengaruhi citra Perusahaan;
- Memastikan Laporan Tahunan Perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait;
- Memastikan bahwa persetujuan Laporan Tahunan harus tercantum di dalam agenda RUPS Tahunan;
- Memutkahirkan materi informasi yang disajikan dalam situs Perusahaan maupun situs Perusahaan online secara berkala;

Company. The orientation material shall be prepared by the Corporate Secretary and Legal, which includes, among others:

1) Internal Information or Knowledge
   - Company's articles of association;
   - Company background and history;
   - Mission, vision, as well as purpose and objectives of the Company;
   - Organization structure of the Company;
   - Duties, responsibilities and rights /authorities as well as facilities designated for Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board;
   - Annual Work and Budget Plan for the Company;
   - The Company's Performance growth for the last 5 (five) years;
   - The Company's business program and types of products;
   - Existence of buildings and office environment, branch offices, affiliated companies, organizations/associations; and
   - Human Resources.
2) External Information or Knowledge
   - Company's position compared to business partners, competitors and other stakeholders;
   - Related laws and regulations; and
   - Relationships and obligations with regulators and other relevant institutions.
3) The orientation program can be provided in form of presentations, meetings or visits to Company facilities, introductions to Division Heads, Department Heads, Branch Heads and Employees in the Company and other programs.

- Maintain relationships with external agencies, such as government agencies, state-owned enterprises, private sector, mass media and the public in order to collect and publish information;
- Manage information and review all information including its legal impact and prepare the information as prudent as possible which will be communicated to related parties;
- Fostering relationships with investors/ business partners/agencies outside the Company and Affiliated Companies;
- Timely and accurately prepare and publish objective responses to statements from the public, suppliers and employees;
- Provide explanations of answers and information provided to relevant parties, thereby not causing misleading or confusion that may affect the Company's reputation;
- Ensure that the Company's Annual Report is prepared in accordance with applicable regulations and submitted to related parties;
- Ensure that the approval of the Annual Report shall be included in the Annual GMS agenda;
- Update the information material presented on the Company's website and the Company's website online periodically;

- Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk *Press Release* atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi;
- Pemberian informasi yang dibutuhkan mengenai data atau kinerja (*performance*) Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Mendokumentasikan semua arsip Perusahaan, termasuk kegiatan program pengenalan dan pengembangan bagi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi;
- Memberikan informasi yang relevan kepada *stakeholders*; dan
- Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan. Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris tepat waktu.

3. Implementasi GCG

- Membina kerjasama yang baik dengan divisi atau unit terkait dalam rangka memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

4. Promosi dan Pencitraan Perusahaan

- Membangun terbentuknya citra Perusahaan (*image*) yang positif oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan;
- Mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi eksternal dan internal dengan segenap pemangku kepentingan untuk menyampaikan berita dari Perusahaan secara terbuka dan bertanggungjawab serta membangun citra positif Perusahaan;
- Menyampaikan perkembangan Perusahaan kepada masyarakat melalui pelaporan keterbukaan informasi dalam bentuk siaran pers, situs dan melayani permintaan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan.

- Coordinate preparation and provision of materials for Press Release regarding statements at the Board of Directors level;
- Providing required information regarding the data or performance of the Company in accordance with the laws and regulations;
- Documenting all Company records, including the introduction and development program activities for the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Directors members;
- Provide relevant information to stakeholders; and
- Coordinate the preparation of accurate and reliable Quarterly and Annual Management Reports. Quarterly and Annual Management Reports are submitted to the Board of Commissioners on time.

3. GCG Implementation

- Build a harmonious cooperation with related division or unit to oversee the Company's compliance with the law and regulation;
- Ensure that the Company has complied regulation on disclosure requirements in line with the GCG principles implementation.

4. Corporate Promotion and Reputation

- Build positive corporate image among the Company's interested parties;
- Control external and internal communication strategy management with all stakeholders to disseminate news from the Company transparently and with accountability as well as build positive image of the Company;
- Disseminate the Company's progress to the society through information disclosure reporting, such as press release, website and inquiry to information related to the Company.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Pada tahun 2019, Sekretaris Perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Corporate Secretary Training 2019

In 2019, the Corporate Secretary participated in the following training and competency development activities, as follows:

No.	Pelatihan Training	Waktu Date	Tempat Place	Penyelenggara Provider
1.	**Training Public Speaking**	Januari 2019 January 2019	Jakarta	Golden Mind
2.	**Manajemen Kehumasan** **PR Management**	Agustus 2019 August 2019	Bandung	PT Rekaaksara Mandiri Kreatif
3.	**Humas Online** **Online PR**	September 2019	Jakarta	PT Rekaaksara Mandiri Kreatif

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Bidang Promosi

Di bidang promosi, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan pengkinian konten situs perusahaan & portal BUMN, mendukung unit kerja pemasaran dalam penyelenggaraan pameran dan kemitraan.

Bidang Humas dan Publikasi

Dalam rangka meningkatkan citra positif perusahaan, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan promosi/iklan dalam rangka pendekatan kepada perbankan dan asosiasi, membuat dan menyelenggakan *event-event* korporat, publikasi perusahaan & pemasaran produk, melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dengan pemberian santunan sembako kepada kaum dhuafa, turut serta dalam berbagai kegiatan *sponsorhip*, serta melakukan pencetakan media promosi berupa brosur, *company profile*, Kalender dan Buku Agenda 2019. Disamping itu Perseroan juga melakukan sosialisasi & penilaian GCG dan KPKU untuk membangun konsep citra positif Perseroan yang ideal bagi Perseroan, meskipun nilai GCG dan KPKU Perseroan masih belum memuaskan dan bertekad untuk semakin ditingkatkan di masa depan.

Bidang Kesekretariatan

Di bidang kesekretariatan, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain melaksanakan kebijakan tata kelola persuratan dan tata kelola kearsipan, dan *customer care*, mengadakan sosialisasi untuk pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Cabang tentang pedoman tata persuratan Askrindo Syariah (Sistem Tata Persuratan).

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Perseroan membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai Unit Internal Audit yang menjadi mitra strategis Manajemen dalam pengelolaan dan pengawasan kinerja Perseroan. SPI Perseroan secara struktural bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama. SPI melakukan tugasnya berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2018 yang telah disetujui pada tanggal 29 Desember 2017.

Kedudukan dan Personil Internal Auditor

Jumlah tenaga SPI pada tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) orang dan dipimpin oleh seorang kepala setingkat Kepala Divisi. Pada tahun 2019, SPI menerbitkan sebanyak 2 (dua) Laporan Hasil Audit (LHA) dimana dari LHA tersebut sudah selesai ditindak lanjuti dengan persentase sebesar 60%. SPI telah melakukan monitoring tindak lanjut temuan auditor eksternal khususnya temuan audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Report on the Implementation of Duties of the Corporate Secretary in 2019

Promotion Sector

The Company carries out several promotional activities, including updating the content of the Company's website & Portal BUMN, supporting the marketing work units in organizing exhibitions and partnerships.

Public Relations and Publications Sector

To improve its positive image, the Company conducts promotional activities/advertising as an approach to banks and associations, create and hold corporate events, publications & product marketing, carrying out Corporate Social Responsibility activities by providing basic needs to the needy, participating in various sponsorship activities, as well as by printing various promotion media such as brochures, company profile, Calendar and Agenda Book 2019. In addition, the Company also conducted GCG and KPKU socialization and training to build positive and ideal corporate image for the Company, however, the Company's GCG and KPKU scores are still below expectation and the Company is committed to improve the scores in the future.

Secretarial Sector

In the secretarial sector, the Company has performed several activities, such as implementation of mailing and archive governance policy, and customer care, arrange socialization for the employees at Head Office and Branch Offices on Askrindo Syariah mailing procedure and guideline (Correspondence System).

INTERNAL AUDIT UNIT (IAU)

The Company established the unit Internal Audit as a strategic partner for the Management in managing and monitoring the performance of the Company. The Company's SPI is structurally directly responsible and submits reports to the President Director. SPI performs its duties under the 2018 Annual Supervision Work Program which was approved on December 29, 2017.

Internal Auditor Position and Personnel

The number of SPI personnel in 2019 is 2 (two) personnel and is led by a head at the level of a Division Head. In 2019, SPI issued 2 Audit Reports (LHA), of which the LHA has been followed up with a percentage of 60%. SPI has monitored the follow up of the findings of external auditors, especially the audit findings of the Financial Services Authority (OJK) and the Public Accountant Firm (KAP).

Bagan Struktur dan Kedudukan SPI

SPI Structure and Organization Structure Chart



Kedudukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) di dalam struktur organisasi dijelaskan sebagai berikut:

a. SPI dalam pelaksanaan tugasnya membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi *assurance* dan *advisory* bagi Perseroan;
b. SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal;
c. SPI berkedudukan dan bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama;
d. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
e. Kepala Satuan Pengawasan Internal bekerja secara independen dan obyektif serta ditempatkan sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan tugas pengawasan intern sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala SPI

Pihak yang mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal adalah Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab SPI adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan (audit) dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya, baik yang tertuang dalam rencana tahunan, maupun yang menjadi perhatian Direksi dan Komite Audit;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

The position of the Internal Audit unit (IAU) within the structure of organization can be explained as follow:

a. In performing its duties, IAU assisted the President Director in conducting the function of assurance and advisory for the Company;
b. IAU is led by Head of Internal Audit unit;
c. The IAU is under and answers directly to the President Director;
d. Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director, based on the approval of the Board of Commissioners;
e. Head of IAU works independently and objectively, and is positioned in such a way to enable him/her to perform internal audit duties as mandated by the prevailing rules and regulation.

Party who Appointed/Dismissed the Head of SPI

The party who appoints and dismisses the Head of the Internal Audit Unit is the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.

Description of Duties And Responsibilities of IAU

Duties and Responsibilities of IAU are as follow:

1. Preparing and implementing the Annual Monitoring Work Program (PKPT);
2. Auditing and evaluating the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with Company's policies;
3. Conducting audits and assessments on the efficiency and effectiveness regarding the finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities, both those stated in the annual plan, as well as those that need the attention of the Board Directors and Audit Committees;
4. Providing suggestions for improvement and objective information about the activities to be audited at all levels of management;

5. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
6. Memantau, menganalis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan berdasarkan penugasan khusus dari Direktur Utama atau sebagai pengembangan pemeriksaan sebelumnya. SPI dalam melaksanakan audit internal yang efektif, wajib memastikan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern serta kualitas kinerja Perseroan dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan.

Profil Kepala SPI
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.024/KET-DIR/III/2020, Kepala SPI Perseroan dijabat oleh Sumarjono. Profil Sumarjono telah disajikan dalam bahasan profil eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Sertifikasi/Kualifikasi Internal Auditor
Pada tahun 2019, 1 (satu) orang personil Internal Auditor memiliki sertifikasi profesi audit internal yaitu Sertifikasi *Professional Internal Auditor*.

5. Preparing Audit Report to be submitted to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee;
6. Monitoring, analyzing and reporting the implementation of follow-up corrections that have been suggested;
7. Cooperating with the Audit Committee;
8. Developing program to evaluate the quality of internal audit activities; and
9. Performing special audit whenever deemed necessary based on special assignments from the President Director or as further development of previous audit. In carrying out effective internal audits. The IAU should ensure the audit and assessment on the adequacy and effectiveness of internal control structure and the quality of the Company's performance in order to safeguard and secure the Company's business activities.

Head of SPI Profile
Pursuant to Board of Directors Decree No. 024/KET-DIR/III/2020, Head of SPI in the Company is served by Sumarjono. Profile of Sumarjono is presented in Profile of Executives Officers in this Annual Report.

Internal Auditor Certification/Qualification
In 2019, 1 (one) Internal Auditor personnel has an internal audit profession certification, which is Professional Internal Auditor Certification.

Pelatihan Tahun 2019
Training in 2019

No.	Pelatihan | Training	Waktu Date	Tempat Place	Penyelenggara Provider	Biaya Biaya
1.	Assessor Preparation Course (APC) KPKU Training	Februari | February 2019	Jakarta	Forum Ekselen BUMN	6.000.000
2.	Risk Based Internal Audit (RBA) Training	Desember | December 2019	Jakarta	Lembaga Pengembangan Auditor Internal	7.5000.000
3.	IIA Indonesia Professional Auditor Forum (PAF)	Desember | December 2019	Jakarta	The Institue of Internal Auditors Indonesia	Free
4	In House Training "ISO 27001:2013 Awareness"	Desember | December 2019	Jakarta	Proxis Global Solusi	25.000.000

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2019
Pada tahun 2019 SPI merencanakan audit terhadap 24 fokus audit namun realisasi yang telah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah 2 fokus audit dengan jumlah LHA yang diterbitkan 2 LHA terdiri dari 1 LHA Audit Proses Kerja-Unit Kerja Sekretaris Perusahaan dan 1 LHA-Dengan Tujuan Tertentu untuk fokus audit terhadap Laporan Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja (UMK) Kegiatan Unit Kerja Sekretaris Perusahaan atas kegiatan/event.

Brief Description of Duty Implementation in 2019
In 2019, SPI planned to conduct audit over 24 audit focuses, however the realization as of December 31, 2019 achieved 2 audit focuses with total LHA issued 2 LHA consisting of 1 LHA Audit Work Process - Work Unit of the Corporate Secretary and 1 LHA - With Specific Purposes to focus on the audit of the Work Advances Accountability Report (UMK) Activities of the Corporate Secretary Work Unit for the activities/events.

No.	Auditee	Temuan Temuan	Tempat Place			
			S	BS	BD	TD
1.	**Direktorat Utama-Unit Kerja Sekretaris Perusahaan** Main Directorate-Work Unit of Corporate Secretary	6	3	3	-	-
2.	**Direktorat Utama-Unit Kerja Sekretaris Perusahaan (ADTT)**	5	5	-	-	-
Jumlah | Total		11	8	3	-	-

Keterangan | Notes:
S = Selesai, BS = Belum Selesai, BD = Belum Ditindaklanjuti, TD = Tidak dapat Ditindaklanjuti
S = Closed, BS = Incomplete, BD = Not Followed Up, TD = Not Eligible for Further Process

Di tahun 2019 SPI juga melakukan review atas 2 proses kerja yaitu *review* atas pengadaan barang dan jasa dan reviu atas proses kerja investasi dan audit internal untuk ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) sebagai persyaratan *assessment* perpanjangan Sertifikat ISO 27001.

UNIT KEPATUHAN

Perseroan membentuk fungsi kepatuhan yang berada di Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan GCG. Satuan kerja ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dipimpin oleh Kepala satuan Kerja dengan rekomendasi Dewan Komisaris.

Uraian Tugas & Tanggung Jawab Unit Kepatuhan & GCG

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.213/KEP-DIR/SDM/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Struktur Organisasi, maka tugas dan tanggungjawab unit kepatuhan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan praktik pengelolaan kepatuhan dan GCG.
2. Menyusun pedoman praktik tata kelola perusahaan (GCG).
3. Melaksanakan program monitoring praktik pelaksanaan GCG pada fungsi perusahaan terkait.
4. Membina kerja sama yang baik dengan divisi atau unit usaha terkait dalam rangka memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Piagam Kepatuhan

Pada 16 Oktober 2017, telah dibuat Piagam kepatuhan dan SOP Kepatuhan yang merupakan bagian dari kebijakan dan proses pengelolaan kepatuhan di lingkungan Perseroan. Isi piagam tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Misi dan Tujuan Kepatuhan
Bab III : Prinsip Kepatuhan
Bab IV : Definisi dan Ruang Lingkup
Bab V : pengelolaan Risiko Kepatuhan
Bab VI : Wewenang dan Tanggung Jawab
Bab VII : Hubungan Kerja
Bab VIII : Pelaporan
Bab IX : Penutup

In 2019 SPI also reviewed of 2 work processes, a review of the procurement of goods and services and a review of the investment work process and an internal audit for ISO 27001 (Information Security Management System) as a requirement for the assessment of the extension of the ISO 27001 Certificate.

COMPLIANCE UNIT

The Company has established compliance function under the Risk Management, Compliance and GCG Work unit. This work unit answers directly to the President Director and is headed by the Head of the Work unit with the recommendation of the Board of Commissioners.

Description of Duties & Responsibilities of The Compliance & GCG Unit

In accordance with the Board of Directors Decree No.213/KEP-DIR/SDM/XI/2019 on November 26, 2019 concerning Organizational Structure, the duties and responsibilities of compliance units are as follows:

1. Organize and coordinate management of compliance and GCG.
2. Develop guidelines for corporate governance practices (GCG).
3. Carry out a monitoring program on GCG implementation practices in related company functions.
4. Build good cooperation with related divisions or business units in order to monitor the Company's compliance with laws and regulations.
5. Ensure that the Company complies with the regulations regarding disclosure requirements in line with the application of GCG principles.

Compliance Charter

Since Oktober 16, 2017, , the Company prepared a compliance Charter and Compliance SOP, which is part of the compliance management policies and processes within the Company:

Chapter I : Introduction
Chapter II : Mission and Compliance Objectives
Chapter III : Compliance Principle
Chapter IV : Definition and Scope
Chapter V : Compliance Risk management
Chapter VI : Authority and Responsibility
Chapter VII : Employment Relations
Chapter VIII : Reporting
Chapter IX : Closing

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan telah membentuk Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan, mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal Perseroan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
   a. Integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan.
   b. Filosofi dan gaya Manajemen Perseroan.
   c. Cara pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawabnya.
   d. Pengorganisasian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
   e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menilai pengelolaan risiko yang relevan;
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai: kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perseroan;
4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perseroan;
5. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan
6. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi dari SPI.

EVALUASI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2019

Penerapan Sistem Pengendalian Intern tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perseroan telah melakukan penilaian pengendalian internal yang berkaitan dengan proses pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan menggunakan kriteria yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commissions* (COSO). Berdasarkan hasil penilaian ini, manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Perseroan telah dilaksanakan secara efektif.

MANAJEMEN RISIKO

Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan & GCG merupakan unit kerja yang berada dibawah Direktur Utama. Satuan Kerja ini merupakan salah satu organ pendukung Tata Kelola Perusahaan selain Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company has established an effective Internal Control System to secure the Company's investments and assets, including:

1. The internal control environment, which is carried out in a disciplined and structured manner, consists of:
   a. Integrity, ethical values, and competence of employees.
   b. The philosophy and style of the Company's Management.
   c. Procedures for implementing their authority and responsibilities.
   d. Organizing and developing Human Resources.
   e. Attention and direction made by the Directors.
2. Assessment of business risk management, which is a process for identifying, analysing, and assessing relevant risk management;
3. Controlling activities, namely actions made in order to control the activities at each level and unit within the Company's organizational structure, including: authority, authorization, verification, reconciliation, performance appraisal, division of tasks and security of assets Company;
4. Information and communication systems, a process of presenting reports on operational, financial, and compliance and compliance with the provisions of the laws and regulations by the Company;
5. Monitoring, the process of assessing the quality of the internal control system, including the interna laudit function at each level and unit in the Company's organizational structure, so that it can be implemented optimally; and
6. Ensure follow-up on recommendations from SPI.

EVALUATION ON INTERNAL CONTROL SYSTEM IN 2019

Internal control system implementation in 2019 has been carried out properly and provides adequate assurance on reliability of financial reporting and consolidated financial statements preparation for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Company has conducted an internal control assessment related to the financial reporting process as of December 31, 2019 using criteria issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO). Based on the results of this assessment, the Company's management concluded that the internal control system of the Company's financial reporting has been implemented effectively.

RISK MANAGEMENT

The Risk Management, Compliance & GCG Work unit is a work unit under the President Director. This Work unit is one of the supporting organs of Corporate Governance in addition to the Corporate Secretary and the Internal Audit unit.

Perseroan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan GCG sebagai Unit Pengelolaan Risiko dan kepatuhan serta implementasi GCG. Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dipimpin oleh Kepala satuan Kerja atas rekomendasi Dewan Komisaris.

Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan & GCG merupakan unit kerja yang berada dibawah Direktur Utama. Satuan Kerja ini merupakan salah satu organ pendukung Tata Kelola Perusahaan selain Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

Profil Kepala Manajemen Risiko
Profile Head of Risk Management Department



Haryadi Rifai

Kepala Manajemen Risiko
Head of Risk Management Department

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidkan Diploma III jurusan Perikanan Kelautan dari Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Jakarta tahun 1992 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia tahun 1998 serta Magister bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia tahun 2009. Beliau memiliki berbagai gelar dan sertifikasi profesi antara lain Ajun Ahli Asuransi Kerugian (AAAI-K), *Certified Agency Licence of General Insurance*, *Certified Agency License of Unit-Linked Life Insurance*, *Associate Islamic Insurance Society* (AIIS), Ahli Asuransi Indonesia Keuangan (AAI-K) dan *Certified Risk Management Professional* (CRMP).

Mengawali karir sebagai Marine Surveyor di PT Alsum Prakarsa Corporation (1992 – 1996) dan melanjutkan karir di bidang asuransi sejak tahun 1996 di PT Asuransi Grasia Unisarana dengan jabatan terakhir sebagai RM *Assistant Manager* dan *Marketing Ast. Manager* (1996 – 2002), *Technical Manager* di PT Visi Proteksi Konsulindo (2002 – 2004), *Marine Underwriter* di PT QBE Pool Indonesia (2005 – 2007), PT Asuransi Dinamika sebagai *Sharia Office Head* dan jabatan terakhir sebagai *Senior Risk Management Analyst* (2007 – 2013). Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2013 dan menempati berbagai jabatan penting antara lain *Branch manager* Jakarta dan Banten Area (2013 – 2014), *Head of Internal Audit* (2014 – 2017) dan menjabat sebagai *Head of Risk Management* sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Pada tahun 2019, beliau berpartisipasi dalam berbagai pelatihan antara lain *Panel Discussion*: Tantangan Bisnis dengan MR Terintegrasi, *Panel Discussion: Building Integrated* GRC dan *Panel Discussion: Building Integrated* GRC oleh *Center of Risk Management Studies*, R*ound Table Discussion*: Mengembangkan Budaya Risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko, *Workshop*

The Company has established a Risk Management, Compliance and GCG Work Unit as the Risk Management, Compliance and GCG implementation Unit. This unit reports directly to the President Director and is led by the Head of the Work Unit on the recommendation of the Board of Commissioners.

The Risk Management, Compliance & GCG Work unit is a work unit under the President Director. This Work unit is one of the supporting organs of Corporate Governance in addition to the Corporate Secretary and the Internal Audit unit.

Indonesian citizen, 50 years. Currently lives in Jakarta. He graduated Diploma III majoring in Marine Fishery from Fishery Institute, Department of Marine Fisheries, Jakarta in 1992 and earned a Bachelor of Economics majoring in Financial Management from the Universitas Indonesia in 1998 and a Master's in Economics and Sharia Finance from the Universitas Indonesia in 2009. He held several professional degrees and certifications, such as Associate of Indonesian General Insurance Institute (AAAI-K), Certified Agency License of General Insurance, Certified Agency License of Unit-Linked Life Insurance, Associate Islamic Insurance Society (AIIS), Indonesian Financial Insurance Expert (AAI-K) and Certified Risk Management Professional (CRMP).

He started his career as a Marine Surveyor at PT Alsum Prakarsa Corporation (1992 - 1996) and continued his career in insurance since 1996 at PT Asuransi Grasia Unisarana with his last position as RM Assistant Manager and Marketing Ast. Manager (1996 - 2002), Technical Manager at PT Visi Proteksi Konsulindo (2002 - 2004), Marine Underwriter at PT QBE Pool Indonesia (2005-2007), PT Asuransi Dinamika as Sharia Office Head and last position as Senior Risk Management Analyst (2007 - 2013). He joined the Company in 2013 and has held various key positions including the Branch Manager of Jakarta and Banten Area (2013-2014), Head of Internal Audit (2014-2017) and appointed as Head of Risk Management from 2017 until now.

In 2019, he participated in various trainings including Panel Discussion: Business Challenges with Integrated MR, Panel Discussion: Building Integrated GRC and Panel Discussion: Building Integrated GRC by the Center of Risk Management Studies, Round Table Discussion: Developing Risk Culture by Certification Bodies Risk Management Professional, Reinsurance Optimization Workshop by

Optimalsiasi Reasuransi oleh Asrinda Re-Broker, Workshop ISO 31000 ERM *Fundamentals* oleh *Center for Risk Management Studies*, *Workshop Trade Credit Insurance*, KBG & LC oleh Asrinda Re-Broker, *Workshop Refreshment CRMP oleh Risk Advisory & Performance*, *Asia Credit Reporting Forum* 2019 oleh *Perfindo Credit Rating* dan *Indonesian Security Summit* oleh TradePass.

Tugas dan Tanggung Jawab
Manajemen Risiko memiliki tugas untuk:

1. Mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan manajemen dan pengelolaan risiko korporat maupun transaksional secara tepat dan sistematis, mulai dari pembuatan *review* risiko, penyusunan pedoman pengelolaan risiko, penyusunan rencana kerja. Mengorganisasikan proses pengelolaan risiko korporat mulai dari: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, pengujian dan monitoring pengendalian risiko.
2. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan praktik pengelolaan kepatuhan dan GCG, menyusun pedoman praktik tata kelola perusahaan (GCG). Melaksanakan program monitoring praktik pelaksanaan GCG pada fungsi perusahaan terkait.

Perseroan mengadopsi penilaian tingkat risiko sesuai ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB). Dari hasil penilaian self assessment, diperoleh nilai risiko Askrindo Syariah sebesar 1,22 yaitu pada tingkat risiko RENDAH. Dalam hal ini probabilitas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya relatif rendah, perusahaan telah membangun sistem pengendalian risiko yang kuat. Secara agregat perusahaan diindikasikan sangat sehat dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang sertifikat/nasabah.

Penilaian Tingkat Risiko Tahun 2019
Penilaian tingkat risiko ini mengikuti ketentuan POJK No 10 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB). Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dilakukan melalui penilaian terhadap risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko penjaminan (asuransi) dan risiko dukungan dana (permodalan).

Dari hasil penilaian, diperoleh nilai risiko Askrindo Syariah sebesar 1,12 yaitu pada tingkat risiko **RENDAH**. Dalam hal ini probabilitas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya relatif rendah, perusahaan telah membangun system pengendalian risiko yang kuat. Secara agregat perusahaan diindikasikan sangat sehat dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang sertifikat/nasabah.

Asrinda Re-Broker, ISO 31000 ERM Fundamentals Workshop by Center for Risk Management Studies, Trade Credit Insurance Workshop, KBG & LC by Asrinda Re-Broker, CRMP Refreshment Workshop by Risk Advisory & Performance, Asia Credit Risk Reporting Forum 2019 by Perfindo Credit Rating and Indonesian Security Summit by TradePass.

Duty and Responsibility
Risk Management is assigned to:

1. Organize and coordinate management activities and corporate risk management appropriately and systematically, start by reviewing risk, preparing risk management guidelines, preparing work plans. Organizing corporate risk management processes starting from: risk identification, risk measurement, risk control, testing and monitoring risk control.
2. To organize and coordinate compliance and GCG management practice, prepare Code of Corporate Governance, carry out monitoring program over the GCG implementation practice at related corporate functions.

The Company adopted a risk level assessment in accordance with the provisions of POJK No. 10/POJK.05/2014 on August 27, 2014 concerning the Assessment of the Risk Level of Non-Bank Financial Services Institutions (LJKNB). The self- assessment on the risk faced by Askrindo Syariah resulted in a score of 1.22, or at the level of LOW risk. In this case. the Company's probability of failure in meeting its obligations is relatively low, since the Company has built a strong risk control system. Aggregately, the Company is indicated to be very healthy and has the ability to fulfill its obligations to the policy holder/customer.

Risk Level Assessment in 2019
Risk level assessment refers to POJK Regulation No. 10 concerning Non-Bank Financial Service Institutions (LJKNB) Risk Rating. The assessment of the risk level of Non-Bank Financial Services Institutions is carried out through an assessment of management risk, governance risk, strategic risk, operational risk, asset and liability risk, guarantee risk (insurance) and fund support risk (capital).

From the results of the assessment, the risk value of Askrindo Syariah was obtained at 1.12, which is at the **LOW** level of risk. In this case the probability of failure of the company in meeting its obligations is relatively low, the company has built a strong risk control system. Aggregate companies are indicated to be very healthy and have the ability to fulfill their obligations to certificate holders/customers.

TABEL IKHTISAR PENILAIAN TINGKAT RISIKO PERSEROAN 2019
TABLE OF ENTERPRISE RISK LEVEL ASSESSMENT SUMMARY

Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko | Risk Level Assessment Summary
per tanggal 31 Desember 2019 | as of December 31, 2019

Jenis Risiko | Risk Type	Nilai Risiko Value At Risk (C)	Bobot Weight (D)	Risiko Bersih Net Risk (E)
1. Kepengurusan | Management	0.90	10%	0.07
2. Tata Kelola | Governance	1.27	10%	0.26
3. Strategi | Strategy	1.05	15%	0.18
3.1 Risiko Bawaan (A) | Inherent Risk (A)	1.09		
3.2 Manajemen & Pengendalian (B) Management & Control (B)	1.00		
4. Operasional | Operational	1.11	15%	0.22
4.1 Risiko Bawaan | Inherent Risk (A)	1.21		
4.2 Manajemen & Pengendalian (B) Management & Control (B)	1.00		
5. Aset dan liability | Asset & Liability	1.16	20%	0.36
5.1 Risiko Bawaan (A) | Inherent Risk (A)	1.21		
5.2 Manajemen & Pengendalian (B) Management & Control (B)	1.10		
6. Penjaminan | Guarantee	1.38	30%	1.07
6.1 Risiko Bawaan (A) | Inherent Risk (A)	1.40		
6.2 Manajemen & Pengendalian (B) Management & Control (B)	1.35		
(F)		100%	2.16
Total Nilai Bersih | Total Net Value			1.21
7. Dukungan Dana (Permodalan) Funds (Capital) Support			
7.1 Kemampuan Pendanaan (Permodalan) Funding Capacity (Capital)	1.00	55%	0.55
7.2 Tambahan Pendanaan (Permodalan) Additional Funding (Capital)	1.00	45%	0.45
(G)	0.96	100%	1.00
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (Permodalan) (I) Total Value of Funds (Capital) Support Risk (I)			1.00
Bobot Total Nilai Bersih dan Dukungan Dana 50%:50% Weighted Total Net Value and Funds Support 50%:50%			
Nilai Tingkat Risiko Keseluruhan (J) Overall Risk Level (J) Value			1.12
Tingkat Risiko | Risk Level			**Risiko Rendah | Low Risk**

Profil dan Mitigasi Risiko Tahun 2019
Risk Profile and Mitigation in 2019

No.	Profil Risiko Risk Profile	Penjelasan Singkat Risiko Brief Explanation of the Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1.	**Risiko Kepengurusan** Management Risk	Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud pengurus meliputi Direksi dan Dewan Komisaris atau yang setara dengan itu. Risiko yang muncul dari kepengurusan akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis, tertanggung, dan para pemangku kepentingan lainnya. Management risk is the risk of a company's failure to achieve its objectives due to the company's failure to maintain the best composition of management who has high competence and integrity. What is meant by the management includes the Board of Directors and the Board of Commissioners or its equivalent. Risks arising from the management will affect the company's ability to meet its obligations to policyholders, the insured, and other stakeholders.	• Proses penunjukan dan atau pemberhentian pengurus telah dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku melalui mekanisme RUPS yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan. • Komposisi dan proporsi pengurus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Kompetensi pengurus sangat memadai berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan serta dapat menunjang tugas dan wewenangnya sehingga sustainability pertumbuhan kinerja Askrindo Syariah diharapkan semakin baik. • The process of appointing and/or dismissing the management has been carried out through the mechanism in accordance with the provisions in force through the GMS mechanism stipulated in the company's Articles of Association. • The composition and proportion of management are in accordance with prevailing regulations. • The competence of the management is very adequate based on the results of the fit and proper test and can support their duties and authorities so that the sustainability of the growth of Askrindo Syariah's performance is expected to be better.
2.	**Risiko Tata Kelola** Governance Risk	Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.	• Telah memiliki dan review pedoman GCG, *Whistle Blowing System* (WBS), *Code Of Conduct* (COC) untuk Direksi dan Komisaris, pedoman tata laksana operasional dan pedoman tata laksana non-operasional. Telah diperolehnya sertifikat sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai Manajemen mutu. Khusus untuk bisnis proses di IT, tata kelola security sistem informasi mengacu pada sertifikasi ISO 27001-2013. • Proses penyusunan, evaluasi dan penyempurnaan pedoman/SOP mengacu kepada pedoman penyusunan SOP. • Telah dilakukan sosialisasi terhadap Pedoman tata kelola perusahaan. • Struktur organisasi telah direvisi yang mengakomodasi kebutuhan bisnis & tata kelola perusahaan yang baik.

No.	Profil Risiko Risk Profile	Penjelasan Singkat Risiko Brief Explanation of the Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
		Governance risk is the potential for failure in implementing good governance, inaccurate management style, the control environment, and the behavior of each party directly or indirectly involved with the company.	• Has owned and reviewed GCG guidelines, Whistle Blowing System (WBS), Code of Conduct (COC) for Directors and Commissioners, operational governance guidelines and non-operational governance guidelines. An ISO 9001: 2015 certification certificate was obtained regarding quality management. Specifically for business processes in IT, information system security governance refers to ISO 27001-2013 certification. • The process to prepare, evaluate and enhance guidelines/SOPs refers to SOP preparation. • Information about the corporate governance guidelines has been carried out. • Revised organizational structure that accommodates business needs & good corporate governance.
3.	**Risiko Strategi** Strategic Risk	Risiko strategi adalah potensi kegagalan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung akibat ketidakyakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal yang terjadi. Strategic risk is the potential for a company's failure to realize obligations to the insured due to failure or failure to plan, determine and implement strategies, make appropriate business decisions, and/or the company's lack of responsiveness to external changes that occur.	Mengoptimalkan kerjasama selain dengan Bank Umum Syariah dan/atau UUS juga dengan Bank Pembangun Daerah. Penetrasi ke ceruk *market* non perbankan yang memberikan kinerja positip, Penguatan SDM khususnya di bisnis melalui pembentukan divisi yang lebih spesifik yaitu divisi surety dan unit subrogasi serta penguatan agen dengan mendirikan Teras Mitra di Kantor Cabang & KPS. Optimizing cooperation in addition to Sharia Commercial Banks and/or UUS as well as regional development banks. Penetration into non-banking market niches that provide positive performance, Strengthening HR especially in business through the formation of more specific divisions namely surety divisions and subrogation units as well as strengthening agents by establishing Teras Mitra in Branch & KPS Offices.
4.	**Risiko Operasional** Operational Risk	Risiko operasional adalah potensi kegagalan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan.	• Struktur organisasi Askrindo Syariah dibuat berdasarkan aktivitas fungsional, lini bisnis serta lingkup pekerjaan, dan batas kewenangan. Struktur organisasi akan disesuaikan dengan perkembangan bisnis. • Seluruh proses bisnis Askrindo Syariah baik yang operasional maupun non operasional telah didukung oleh sistem & teknologi informasi yang tersentralisasi dan telah didukung oleh sistem DRC untuk menjaga kesinambungan proses operasional.

No.	Profil Risiko Risk Profile	Penjelasan Singkat Risiko Brief Explanation of the Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
		Operational risk is the potential failure of a company to realize obligations to the insured and policy holders as a result of improper or failure of internal processes, human, information technology systems, and/or events that originate from outside the company environment.	• Organization structure of Askrindo Syariah is based on functional activities, business lines and scope of work, and authority limits. The organizational structure will be adjusted to business development. • The entire business process of Askrindo Syariah, both operational and non-operational, has been supported by a centralized system & information technology and has been supported by the DRC system to maintain the sustainability of operational processes.
5.	**Risiko Aset dan Liabilitas** **Asset and Liability Risks**	Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis.	• Melakukan pengelolaan aset dengan baik. • Liabilitas perusahaan telah ter*backup* dengan komposisi aset yang memadai mengingat penempatan investasi perusahaan lebih banyak ditempatkan pada portofolio jangka pendek yaitu deposito. • Perusahaan telah menerapkan pengelolaan kesesuaian aset dan liabilitas sesuai dengan POJK No. 2/POJK.05/2017. • Dalam rangka meningkatkan pengelolaan risiko investasi, perusahaan membentuk komite Investasi yang berfungsi untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi investasi perusahaan, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. • Kebijakan valuasi aset khusus untuk aset investasi telah diatur dalam pedoman investasi, untuk deposito menggunakan nilai nominal, untuk surat berharga menggunakan nilai pasar wajar.
		Asset and liability risks are risks that occur due to potential failures in managing company assets and liabilities, resulting in a lack of funds in fulfilling company obligations to policyholders.	• Manage assets properly. • The company liabilities have been backed up with an adequate asset composition given that the investment placement of the company is more placed in the short-term portfolio, namely deposits. • The company has implemented asset and liability suitability management in accordance with POJK No. 2/POJK.05/2017.

No.	Profil Risiko Risk Profile	Penjelasan Singkat Risiko Brief Explanation of the Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
			• In order to improve investment risk management, the company established an Investment committee that functions to assist the Directors in formulating the company investment policies and strategies, as well as evaluating the implementation of the policies and strategies that have been set. • Specific asset valuation policies for investment assets have been set in the investment guidelines, for deposits using nominal values, for securities using fair market values.
6.	**Risiko Penjaminan** Guarantee Risk	Risiko penjaminan adalah potensi kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi (*underwriting*), penetapan ujrah (*Pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau pengananan ta'widh.	• Melaksanakan sertifikasi Risk Management CRGP dari Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko (LSPMR) untuk Manajemen. • Penanganan desain produk dikelola oleh unit Pengembangan Produk dibawah Direktorat Pemasaran & Pengembangan Produk dengan berpedoman kepada Prosedur Pengembangan produk. • Penetapan IJK/premi dilakukan merujuk pada profil risiko data estimasi klaim / *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat keuntungan dan kerugian, hasil investasi dan reguarante. Imbal Jasa Kafalah (IJK) dapat dilakukan review sesuai dengan tuntutan pasar. • Secara umum proses *underwriting* dilakukan baik untuk penutupan dengan cara *Conditional Automatic Cover* (CAC) dan *Case By Case* (CBC) secara *four eyes principal* dengan melibatkan Komite Akseptasi di kantor pusat. Untuk CAC proses underwriting dilakukan pada saat penetapan syarat dan ketentuan yang disepakati di PKS, sedangkan untuk CBC dilakukan sebelum transaksi dilakukan. • Dalam rangka mengamankan bisnis akseptasi kafalah dan memenuhi ketentuan regulasi maka telah dilakukan penyebaran risiko dengan mendapatkan *back up reguarantee* dari perusahaan reasuransi maupun perusahaan asuransi dalam negeri dalam bentuk treaty maupun fakultatif. • Penanganan klaim dilakukan oleh unit kerja tersendiri dan perusahaan telah memiliki pedoman penyelesaian klaim yang mengatur baik kebijakan maupun prosedur penanganan klaim.

No.	Profil Risiko Risk Profile	Penjelasan Singkat Risiko Brief Explanation of the Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
		Guarantee risk is the potential failure of the company to fulfill obligations to the insured and policy holders as a result of inadequate selection process (underwriting), determination of the Ujrah (Pricing), the use of reinsurance, and/or ta'widh security.	• Perform CRGP Risk Management certification from the Risk Management Certification Institute (LSPMR) for Management. • Product design handling is managed by the Product Development unit under the Directorate of Product Marketing & Development based on the Product Development Procedure. • The determination of the IJK/premium is carried out referring to the risk profile data of claim estimation/Non Performing Financing (NPF) and the level of profit and loss, investment returns and regulations. Kafalah Service Fee (IJK) can be reviewed according to market demands. • In general, the underwriting process is carried out both for closure by means of Conditional Automatic Cover (CAC) and Case By Case (CBC) in four eyes principal by involving the Acceptance Committee at the head office. For CAC, the underwriting process is carried out when the terms and conditions are agreed upon in the PKS, while the CBC is done before the transaction is carried out. • In order to secure the business of accepting kafalah and fulfilling regulatory requirements, risk distribution has been carried out by getting back up reguarantee from reinsurance companies and domestic insurance companies in the form of treaty and facultative. • Claims handling is carried out by a separate work unit and the company has a claim settlement guideline governing both the policy and procedure for claim handling.
7.	**Risiko Dukungan Dana dan Permodalan** **Risk of Funding and Capital Support**	Risiko dukungan dana adalah potensi ketidakmampuan perusahaan dalam menyerap kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain meningkatnya rasio *tawidh* diluar perkiraan, hasil investasi yang buruk, ataupun hal tak terduga lainnya. Financial support risk is the potential for the company's inability to absorb unexpected losses caused by, among other, unexpected *ta'widh* ratios, poor investment returns, or other unexpected things.	Penanganan klaim dilakukan oleh unit kerja tersendiri dan perusahaan telah memiliki pedoman penyelesaian klaim yang mengatur baik kebijakan maupun prosedur penanganan klaim. Claim handling is carried out by a separate work unit and the company has a claim settlement guideline governing both the policy and procedure for claim handling.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko Perseroan yang dilakukan melalui masing-masing divisi. Direksi dibantu oleh Satuan Manajemen Risiko dan Satuan Pengawas Internal serta saran dari Dewan Komisaris melakukan kajian dan merumuskan strategi pengelolaan dan mitigasi yang diperlukan. Evaluasi terhadap Sistem Manajemen Risiko Perseroan pada 2019 telah berjalan efektif. Hasil kajian menjadi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam perbaikan Sistem Manajemen Risiko Perseroan yang lebih baik pada masa mendatang.

AUDITOR EKSTERNAL

Sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019, RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam rangka pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. Guna menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham yang memiliki integritas, Perseroan menggunakan jasa auditor eksternal Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Nomor Izin Akuntan Publik No. 477/KM.1/2015). Untuk melakukan Selain audit Laporan Keuangan, Perseroan tidak menggunakan jasa lain dari Akuntan Publik.

Evaluation of The Effectiveness of The Risk Management System

The Company periodically evaluates the effectiveness of the Company's risk management system carried out through each division. The Board of Directors is assisted by the Risk Management unit and the Internal Control unit and gained advice from the Board of Commissioners about conducting studies and formulate management and mitigation strategies. The evaluation of the Company's Risk Management System in 2019 has been done effectively. The results of the study are recommendations that must be followed up in improving the Company's Risk Management System in the future.

EXTERNAL AUDITORS

In accordance with the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) stated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah on Ratification of Financial Statements for Fiscal Year 2019, the GMS delegated authority to the Board of Commissioners to establish a Public Accounting Firm (KAP), in the context of conducting an audit of Financial Statements for Fiscal Year 2019. In order to present financial statements to shareholders who have integrity, the Company uses the services of an external auditor Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Public Accountant Firm (Registered Accountant Number 477/KM.1/2015). To audit the Company's Financial Statements, in addition to auditing the Financial Statements, the Company does not hire other services from a Public Accountant.

Tabel Informasi Akuntan Publik 5 (lima) Tahun Terakhir

Table of Public Accountant Information for 5 (Five) Recent Years

Tahun | Years	Nama KAP KAP Name	Nama Akuntan Accountant Name	Biaya Fee	Jasa yang Diberikan Service Provided
2019	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rudi Hartono Purbo	Rp108 juta | million	Audit Laporan Keuangan Financial Statements Audit
2018	KAP Tanubrata Sutanto Bambang & Rekan	E. Wisnu Susilo Broto	Rp90 juta | million	Audit Laporan Keuangan Financial Statements Audit
2017	Mirawati Sensi Indris	Jacinta Mirawati	Rp70 juta | million	Audit Laporan Keuangan Financial Statements Audit
2016	Soejatna, Mulyana & Rekan	Safaat Widjajabrata	Rp60 juta | million	Audit Laporan Keuangan Financial Statements Audit
2015	Soejatna, Mulyana & Rekan	Safaat Widjajabrata	Rp60 juta | million	Audit Laporan Keuangan Financial Statements Audit

KETERBUKAAN INFORMASI

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Perseroan secara berkala menyebarluaskan informasi yang terkait dengan aktivitas dan kinerja keuangan. Keterbukaan informasi tersebut dalam rangka memenuhi amanat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk itu pula maka Manajemen telah menetapkan sebuah Pedoman Transparansi & Disclosure melalui Surat Keputusan Direksi No. 055/KEP-DIR/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018. Sarana atau media yang digunakan untuk menyampaikannya antara lain situs dan media surat kabar dalam bentuk *press release* tentang kinerja dan hasil usaha Perseroan.

Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi perusahaan antara lain situs, *email* Korporat, intranet, media surat kabar dan media *online*.

Situs

Pengelolaan Situs Perseroan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Situs Perseroan di bawah Sekretaris Perusahaan, yang tugasnya antara lain menjaga/ memastikan Situs Perseroan tetap memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada pihak eksternal dan update/pembaharuan isi konten secara berkala. Hal-hal yang disampaikan, khususnya dalam penyampaian laporan dan informasi penting lainnya yang dimuat dalam Situs Perseroan www.askrindosyariah.co.id adalah sebagai berikut: Kinerja Keuangan yang berisi Laporan Keuangan Penting (5 tahun), Laporan Keuangan tahun berjalan, Laporan Tahunan (*Annual Report*), Pedoman dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Struktur Organisasi, Produk Perseroan, Visi dan Misi serta CSR, Peluang untuk Karir, Pengadaan Barang dan Konten Publik mengenai Aktivitas Manajemen.

E-Mail Korporat

Agar komunikasi dapat dilakukan secara lebih efektif Perseroan telah memiliki jaringan intranet yang memadai. Salah satunya dengan menggunakan sarana *corporate e-mail* sehingga antar unit kerja dan antar pegawai dapat melakukan korespondensi surat menyurat secara lebih efisien berkat pengurangan penggunaan kertas (*paperless*).

BENTURAN KEPENTINGAN TERKAIT HUBUNGAN BERELASI

Kebijakan mengenai benturan kepentingan terdapat di dalam Buku Pedoman *Good Corporate Governance* yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 055/KEP-DIR/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain melarang setiap Insan Perseroan memiliki saham atau melakukan investasi dengan badan usaha lain yang bermitra bisnis atau memiliki keterkaitan bisnis dengan Perseroan, memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Perseroan, merangkap bekerja di perusahaan lain atau memegang jabatan pada

INFORMATION DISCLOSURE

As a form of transparency to the public, the Company periodically disseminates information related to its activities and financial performance. The information disclosure is to fulfill the mandate and provisions stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and for this reason, the Management established a Guidelines for Transparency & Disclosure through the Board of Directors Decree No. 055/KEP-DIR/XII/2018 on December 3, 2018. The means or media used to deliver it include website and newspaper media, through press release about the performance and results of the Company's operations.

The media used to deliver company information include websites, corporate e-mails, intranets, newspaper media and online media.

Website

The Company's Website Management Team is under the Corporate Secretary, with the task of maintaining/ ensuring that the Company's Website always complies with the provisions on information disclosure to external parties and updating content regularly. Matters submitted on the Company's website www.askrindosyariah.co.id, specifically related to important reports and information, are as follows: Financial Performance that contains Important Financial Reports (5 years), current year Financial Reports, Annual Reports. Guidelines and Implementation of Corporate Governance, Organizational Structure, Company Products, Vision and Mission and CSR, Opportunities for Career, Procurement of Goods and Public Content regarding Management Activities.

Corporate E-Mail

In order to carry out communication more effectively, the Company already has installed sufficient intranet networks. One of the network is by using corporate e-mail facilities to facilitate efficient correspondence between work units and employees while reducing paper consumption.

CONFLICTS OF INTERESTS WITH RELATED PARTIES

The policy regarding conflicts of interest is stipulated in the Good Corporate Governance Handbook which is ratified by Board of Directors Decree No. 055/KEP-DIR/XII/2018 on December 3, 2018. Conflict of interest policies, among others, prohibit all Company Employees from owning shares or investing with other business entities that have business partnerships or relationships with the Company, have businesses that are directly related to the activities of the Company, concurrently work in other companies or hold positions in institutions in any form, without written approval from the Board of Directors and/or the Board of

lembaga lembaga/institusi lain dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan melakukan perbuatan/ tindakan atau menempatkan diri pada posisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Perseroan, untuk menghindari konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan.

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat transaksi dengan benturan kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan.

KODE ETIK

Perseroan menyadari akan pentingnya arti implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk berinteraksi & berkomunikasi yang etis, tidak hanya kepada Pemilik Modal (*shareholders*) namun juga segenap Pemangku Kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen mengimplementasikan yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) secara konsisten.

Kebijakan Manajemen untuk hal tersebut adalah melalui Surat Keputusan Direksi No. 055/KEP-DIR/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018, tentang Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) yang diberlakukan untuk seluruh individu yang bertindak atas nama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi maupun Pegawai yang selanjutnya disebut Insan Perseroan, Pemegang Saham serta seluruh *stakeholder* atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja terdiri dari etika bisnis Perseroan dan Etika Kerja Insan Perseroan dari Jajaran Manajemen yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan misi Perseroan. Perseroan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perseroan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman etika bisnis dan etika kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Implementasi Kode Etik

Sebagai bentuk pernyataan bahwa pedoman Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik, maka kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan setiap individu (karyawan) diwajibkan untuk menandatangani pernyataan secara pribadi pada setiap tahunnya.

Sosialisasi Kode Etik

Penyebaran *Code of Conduct* dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media seperti situs, surat edaran dan sosialisasi kepada segenap Pegawai, Direksi & Dewan Komisaris.

Commissioners and carry out actions or hold positions that can cause a conflict of interest between themselves and the Company.

Throughout 2019, there were no transactions containing conflicts of interest, thus there are no losses incurred or things that might reduce profits.

CODE OF CONDUCT

The Company realizes the importance of implementing GCG as one of the tools to interact & communicate ethically, not only to shareholders but also to all stakeholders. Therefore, the Company is committed to implement the Code through the application of Business Ethics and Code of Conduct, consistently.

The Management's policy regarding this matter is outlined in the Board of Directors Decree No. 55/KEP-DIR/XII/2018 on December 3, 2018. Concerning the Code of Conduct which applies to all individuals acting on behalf of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, both the Board of Commissioners, Directors and Employees, hereinafter referred to as Company Personnel, Shareholders and all stakeholders or business partners who conduct business transactions with the Company.

The Guidelines for Business Ethics and Work Ethics, which consist of the Company's business ethics and the Code of Conducts, are prepared to influence, shape and regulate behavior, so that output is consistent with the Company's culture in order to achieve the Company's vision and mission. The Company always encourages compliance with ethical standards and commits to its implementation, and requires all leaders from every level in the Company, to be responsible for ensuring that the guidelines are adhered to and executed properly in their respective sections.

Implementation of the Code of Conduct

As a form of statement that the guidelines for the Code of Business Ethics and Work Ethics are adhered to and executed properly, all members of the Board of Commissioners, Board of Directors and individuals (employees) are required to sign statements individually, annually.

Dissemination of the Code of Conduct

The dissemination of the Code of Conduct is done by utilizing various media such as websites, circulars and outreach to all employees, Board of Directors & Board of Commissioners.

Isi Kode Etik

Kode etik Perseroan mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus menjadi pedoman seluruh insan Perseroan. Isi Kode Etik Perseroan yang dihimpun menjadi satu buku pegangan bagi seluruh tenaga kerja Perseroan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Etika Bisnis
Bab III : Etika Kerja
Bab IV : Penerapan dan Penegakan
Bab V : Penutup

Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Salah satu bentuk tanggung jawab Insan Perusahaan adalah menyangkut kesediaan Insan Perusahaan untuk melaporkan setiap tindakan rekan kerja yang diyakini merupakan suatu pelanggaran dari *Code of Conduct* dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya kepada pemimpin unit kerja/bagian dengan tembusan Direktur Keuangan dan Umum. Atas setiap pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan dilakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Setiap Insan Perusahaan yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran *Code of Conduct* harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
2. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Jika laporan benar, pelapor tidak dikenakan sanksi atau hukuman apapun, namun apabila pelapor juga terlibat dalam pelanggaran tersebut dan/atau laporannya terbukti palsu, maka pelapor dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Atasan langsung harus menindaklanjuti laporan tersebut dan segera melaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Atasan langsung secara proaktif meneliti dan mengawasi seluruh pegawai yang mungkin terkait dengan pelanggaran *Code of Conduct* tanpa menunggu laporan tentang dugaan pelanggaran *Code of Conduct* dari pegawai/pelapor maupun berdasarkan informasi dari pihak luar Perusahaan.

Setiap dugaan pelanggaran yang dilaporkan akan ditindaklanjuti melalui pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut guna proses pembuktian dan penentuan bobot pelanggaran serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian tindakan disiplin atau sanksi. Penanganan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh Tim yang diberi tugas menangani pelanggaran kode etik yang dibentuk oleh Direktur Utama. Tim tersebut mengkaji, melakukan verifikasi dan melaksanakan penyelidikan atas informasi pelanggaran yang diterimanya. Hasil kajian Tim tersebut berupa kesimpulan yang merupakan usulan tindakan-tindakan pembinaan, hukuman disiplin, dan tindakan perbaikan lainnya yang kemudian disampaikan kepada Direktur Keuangan dan Umum untuk dikaji antara kesesuaian keputusan yang diambil dengan kebijakan maupun aturan yang berlaku. Apabila hasil kajian tersebut telah sesuai dengan kebijakan, maka kajian tersebut disampaikan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan mengenai tindakan yang akan diambil.

Code of Conduct Contents

The Code of Conduct Content regulates ethical values policy stated explicitly as a behavior standard that should guide all components of the Company. The Code of Conduct Content is summarized as one guide book for all employees of the Company. The content is as follows:

Chapter 1 : Introduction
Chapter 2 : Business Ethics
Chapter 3 : Work Ethics
Chapter 4 : Application and Enforcement
Chapter 5 : Closing

Code of Conducts Enforcement and Sanctions for Violations

As manifestation of the Company's Personnel responsibility with regards to willingness of Company Personnel to report any actions of co-workers that are believed to be a violation of the Code of Conduct and convey any facts of fraud that are known to the leader of the work unit/ section with a copy of Finance and General Affairs Director. For every violation of the Code of Conduct actions will be taken in accordance with prevailing regulations, the things that must be considered are:

1. All Company Persons who report suspected violations of the Code of Conduct must disclose their identity clearly.
2. The company must maintain the confidentiality of the reporter's identity, except if necessary in following up on the report in accordance with Company policy.
3. If the report is true, the reporter is not subject to any sanctions or penalties, but if the reporter is also involved in the violation and/or the report is proven to be false, then the reporter is subject to sanctions in accordance with prevailing regulations.
4. Direct superiors must follow up on the report and immediately report to the Directors to take action in accordance with prevailing regulations.
5. Direct supervisors proactively examine and supervise all employees who may be related to violations of the Code of Conduct without waiting for reports of violations indication against Code of Conduct from employees/reporters or based on information from outside parties of the Company.

Every violation indication reported will be followed up through a review or further examination for the process of proving and determining the weight of the violation and as a material consideration in the provision of disciplinary action or sanctions. Handling of violations indication is carried out by a Team that is tasked with handling violations of the code of ethics established by the President Director. The team reviews, verifies and carries out investigations on the infringement information it receives. The results of the Team's study were in the form of conclusions which were suggestions for coaching actions, disciplinary penalties, and other corrective actions which were then submitted to the Director of Finance and General to be reviewed between the suitability of the decisions taken with the policies and regulations in force. If the results of the study are in accordance with the policy, then the study is submitted to the President Director for approval of the actions to be taken.

Jika dugaan pelanggaran yang dilakukan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka sebelum usulan sanksi diputuskan Tim, Direktur Utama dapat memerintahkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk melakukan pemeriksaan investigasi dan hasilnya disampikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Keuangan dan Umum dan Tim yang ditugaskan menangani pelanggaran.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2019
Perseroan mencatat tidak terdapat pelanggaran atas Kode Etik selama tahun 2019.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI SELAMA 2019

Sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum baik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun seluruh pegawai Perseroan.

INFORMASI SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak menerima sanksi adminsitrasi yang dikenakan kepada Entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya).

PERNYATAAN ANTI GRATIFIKASI, KORUPSI DAN PENYUAPAN

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi atas program pengendalian gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan *board manual*, Perseroan menetapkan bahwa Dewan Komisaris dan pejabat satu level di bawah Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukan dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat satu level di bawah Direksi juga diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada Lembaga Pemerintah yang berwenang. Selain itu juga untuk senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi, gratifikasi, dan penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dianggap dapat merugikan Perseroan.

PERNYATAAN PENOLAKAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Sejalan dengan *board charter*, Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat satu level di bawah Direksi tidak diperkenankan menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan instansi Pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perseroan.

If the violation indication that is done requires further examination, then before the sanction proposal is decided on by the Team, the President Director can order the Internal Supervision Unit (SPI) to conduct an investigative investigation and the results are submitted to the President Director with a copy to the Finance and General Director and the Team assigned to handle the violations .

Total Code of Conducts Violations in 2019
The Company recorded there is no violations against the Code of Conducts in 2019.

LEGAL CASES IN 2019

Throughout 2019, the Company did not encounter any legal cases either by members of the Board of Commissioners, Board of Directors or all employees of the Company.

INFORMATION ABOUT ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Throughout 2019, the Company did not get administrative sanctions from related authorities (capital markets, banking and others), imposed on Entities, or members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

ANTI GRATIFICATION, CORRUPTION AND BRIBERY STATEMENTS

The Company continues to socialize gratification control programs in accordance with prevailing laws and regulations. Based on the manual board, the Company stipulates that the Board of Commissioners, the Board of Directors and officials of one level below the Board of Directors are prohibited from giving or offering or receiving directly or indirectly anything of value to government officials and other parties that influence or in return has been done and other actions are in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, and officials of one level below the Board of Directors are also required to report assets to the authorized Government Institutions, in order to prevent and avoid corruption, gratuity, and bribery in any way and any form for any interest that can be detrimental to the Company.

DECLARATION OF PROHIBITION TO FUND POLITICAL ACTIVITIES

In accordance with the board charter, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Executives one level below the Board of Directors are not permitted to respond to any requests from any party and for any reason, directly from certain parties including and not limited to officials/employees of Government agencies and political parties, relating to donations, and the procurement of goods and services in the Company.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Keberadaan dan Tujuan *Whistle Blowing System*

Perseroan senantiasa mendorong setiap karyawan untuk berperilaku adil dan terbuka dalam melaksanakan seluruh kegiatan dengan mengedepankan nilia-nilai profesionalisme, kejujuran, integritas, dan etika yang tinggi. Dalam lingkup lingkungan Perseroan, upaya ini mendapatkan penekanan melalui serangkaian kebijakan terkait prinsip-prinsip dan standar tingkah laku yang ditetapkan bagi seluruh karyawan dalam Kode Etik Perseroan.

Sejalan dengan komitmen menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik, Perseroan pada 23 Desember 2015 telah membentuk Pedoman *Whistle Blowing System* yang kemudian kembali disempurnakan pada 3 Desember 2018.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan kebijakan dan mekanisme bagi seluruh karyawan dalam melaporkan setiap perilaku tidak etis,baik telah terjadi maupun masih berupa kecurigaan, kecurangan atau pelanggaran atas Kode Etik Perseroan.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Lingkup pelaporan/penyingkapan yang dapat ditindak lanjuti oleh Tim meliputi:

1. Korupsi
2. Suap
3. Benturan Kepentingan
4. Pencurian
5. Kecurangan
6. Melanggar hukum dan peraturan perusahaan

Pengelola Laporan

1. Direksi, jika terlapor adalah insan Perseroan selain Tim Pengelola pelaporan Pelanggaran, Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi;

2. Dewan Komisaris, jika terlapor adalah Direksi; dan

3. Direktur Utama, jika terlapor adalah Dewan Komisaris, DPS, dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

a. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai ditujukan kepada Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
b. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
c. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris, DPS, dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran ditujukan kepada Direktur Utama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
d. Apabila penerima pelaporan pelanggaran bukan Dewan Komisaris, Direktur Utama atau Direksi maka yang bersangkutan wajib meneruskan pelaporan pelanggaran tersebut kepada Dewan Komisaris, Direktur Utama atau Direksi.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Existence And Purpose of Whistle Blowing System

The Company always encourages every employee to demonstrate fair and transparent conduct in carrying out all activities by upholding the values of professionalism, honesty, integrity, and high ethics. In the Company's environment, this effort is promoted through a series of policies on the principles and standards of behavior set out for all employees in the Company's Code of Ethics.

In line with the commitment to uphold the values set forthin the Code of Ethics, the Company on December 23, 2015 established the Whistle Blowing System Guidelines on December 23, 2015 which were further improved on December 3, 2018.

These guidelines are intended as guides to policy and mechanism for all employees in reporting any unethical behavior, whether it has occurred or is suspected to have occured, fraud or violation to the Company's Code of Ethics.

Types of Violations That Can be reported

The scope of reporting/disclosure that can be followed up by the Team includes:

1. Corruption
2. Bribes
3. Conflict of Interest
4. Theft
5. Fraud
6. Violation to company laws and regulations

Report Management

1. Board of Directors, if the reported is a member of the Company other than the Whistleblowing Management Team, the Board of Commissioners, DPS, and the Board of Directors;
2. Board of Commissioners, if the reported is the Board of Directors; and
3. President Director, if the reported is the Board of Commissioners, DPS, and the Whistleblowing Management Team.

Submission of Violation reports

a. Violation report allegedly committed by employees is addressed to the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
b. Violation report allegedly committed by the Board of Directors is addressed to the Board of Commissioners of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
c. Violation report allegedly committed by the Board of Commissioners, DPS, and Whistleblowing Management Team is addressed to the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
d. If the recipient of a violation report is not the Board of Commissioners, the President Director or the Board of Directors, the person concerned must forward the report of the violation to the Board of Commissioners, the President Director or the Board of Directors.

e. Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan dari *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis.
f. Perusahaan dalam hal ini Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* mengajukan pelaporan pelanggaran.
g. Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:
   1) Melalui situs Perseroan www.askrindosyariah.co.id
   2) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perseroan dengan alamat:

Direksi
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Jalan Gedung Kesenian No. 3-7 Jakarta Pusat 10710.

h. Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut :
   1) Melalui situs Perseroan yaitu www.askrindosyariah. co.id
   2) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perseroan dengan alamat:

Dewan Komisaris
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Jalan Gedung Kesenian No. 3-7 Jakarta Pusat 10710.

i. Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris, DPS, dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:
   1) Melalui situs Perseroan www.askrindosyariah.co.id
   2) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direktur Utama, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perseroan dengan alamat:

Direktur Utama
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Jalan Gedung Kesenian No. 3-7 Jakarta Pusat 10710.

j. Pelaporan pelanggaran secara tertulis dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/ atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
k. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/ atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

e. The company receives every violation report submitted from stakeholders and/or stakeholder representatives both verbally and in writing.
f. The company, in this case the Whistleblowing Management Team, provides an explanation of the policies and procedures for reporting violations when stakeholders and/or representatives of stakeholders submit violation report.
g. Submission of violation report allegedly committed by Employees is done in writing with the following mechanism:
   1) Through the company's website www.askrindosyariah. co.id
   2) Delivering official letters addressed to the Directors, by direct delivery or by post to the Company at:

Board of Directors
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Attn. Whistleblowing Management Team Jalan Gedung Kesenian No. 3-7 Central Jakarta 10710.

h. Submission of violation report allegedly commited by the Board of Directors is done in writing with the following mechanism:
   1) Through the Company's website, www.askrindosyariah. co.id
   2) Delivering official letters addressed to the Board of Commissioners, by direct delivery or by post to the Company at:

Board of Commissioners
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Attn. Whistleblowing Management Team Jalan Gedung Kesenian No. 3-7 Central Jakarta 10710.

i. Submission of violation report allegedly commited by the Board of Commissioners, DPS, and Whistleblowing Management Team is done in writing with the following mechanism:
   1) Through the Company's website www.askrindosyariah. co.id
   2) Delivering official letters addressed to the Board of Commissioners, by direct delivery or by post to the Company at:

President Director
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Attn. Whistleblowing Management Team Jalan Gedung Kesenian No. 3-7 Central Jakarta 10710.

j. Written violation report is accompanied by a photocopy of identity card and supporting evidence such as documents relating to the transaction carried out and/or violation reports to be submitted.
k. Written violation report made by anonymous must be accompanied by supporting evidence such as documents relating to the transaction carried out and/or violation reports to be submitted.

l. Perseroan wajib memberikan tanda terima jika pelaporan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.

m. Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan *stakeholders*, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
   1) Fotokopi bukti identitas *stakeholders* dan perwakilan stakeholders.
   2) Surat Kuasa dari *stakeholders* kepada perwakilan stakeholders yang menyatakan bahwa stakeholders memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama *stakeholders*.
   3) Jika perwakilan *stakeholders* adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

n. Perseroan wajib menyampaikan bukti tanda terima pelaporan pelanggaran kepada *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* yang mengajukan pelaporan.

Penanganan Pengaduan

a. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
b. Apabila hasil verifikasi sebagaimana ayat 1 (satu) menunjukkan bahwa pelaporan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
c. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan dapat diproses ke tahap investigasi.
d. Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan oknum Pegawai yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran tingkat Direksi untuk diinvestigasi.
e. Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Direksi yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran tingkat Dewan Komisaris dan Direktur Utama untuk diinvestigasi.
f. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
g. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh Pegawai, maka dapat ditindaklanjuti sidang disiplin sesuai ketentuan yang berlaku dengan Direksi sebagai hakim, Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai penuntut, Bagian Hukum sebagai pembela dan pendapat atau masukan dari atasan yang bersangkutan.
h. Hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh Pegawai yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai pejabat penyerah perkara.

l. The Company `must provide a receipt if the violation report is submitted in writing and complemented with an identity.
m. If violation report is submitted by stakeholder representatives, in addition to the above documents, other documents are also submitted, namely:
   1) Photocopy of proof of identity of stakeholders and stakeholder representatives.
   2) Power of Attorney from stakeholders to stakeholder representatives stating that stakeholders give authority to act for and on behalf of stakeholders.
   3) If the stakeholder representative is an institution or legal entity, then it must be accompanied by a document that states that the party submitting the report has the authority to represent the institution or legal entity.
n. The Company is required to submit proof of receipt of violation report to stakeholders and/or stakeholder representatives who submit reports.

Complaint Handling

a. The Whistleblowing Management Team verifies the incoming reports based on team records. The Whistleblowing Management Team will decide whether or not an investigation is required for the violation report within 30 (thirty) days and can be extended for a maximum of 30 (thirty) working days.
b. If the verification results as referred to in paragraph 1 (one) indicate that the report is untrue and there is no evidence for it, then it will not be processed further.
c. If the verification results show an indication of a violation as supported by sufficient evidence, then the reporting can be processed to the investigation stage.
d. In respect of violation report involving employees who need investigation, the report must be followed up by the Whistleblowing Management Team on the Board of Directors level to be investigated.
e. In respect of violation report involving the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Supporting Organs of the Board of Commissioners and the Supporting Organs of the Board of Directors who need investigation, the report must be followed up by the Whistleblowing Management Team on the Board of Directors level and the President Director to be investigated.
f. The offender proven guilty based on the investigation result will be processed in accordance with prevailing regulations.
g. If the investigation results prove that there is a disciplinary violation by the Employee, then to follow up the report, a disciplinary hearing can be initiated according to the prevailing provisions with the Board of Directors as judges, Internal Audit (SPI) as prosecutors, the Legal Department as defenders and opinions or input from the relevant supervisors.
h. If the investigation results prove that there is a violation by an employee leading to a criminal offense, then to follow up the report, legal process to be managed by the prevailing law enforcement agency will be carried out with the Board of Directors as the case forwarder officer.

i. Skema proses pelaporan pelanggaran sebagaimana terlampir.
j. Investigasi semua laporan mengenai pelanggaran yang masuk dilakukan verifikasi, dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan bukti awal yang cukup memadai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya ditemukan tidak cukup bukti untuk diteruskan pada tahap investigasi.
k. Proses investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang azas praduga tidak bersalah dan objektifitas. Hasil dari proses investigasi berupa laporan hasil investigasi yang disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik serta bukti non fisik. Hasil laporan investigasi tidak berupa opini atau pendapat tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang digunakan sebagai dasar putusan pengambilan tindakan.
l. Investigasi dapat dilakukan baik oleh *Independent* Investigator (eksternal) maupun oleh Tim Investigasi internal. Tim investigasi internal mencakup namun tidak terbatas pada Satuan Pengawasan Intern (SPI).
m. Independent Investigator dapat ditunjuk untuk melakukan investigasi apabila terlapor adalah Direksi dan Pimpinan satu tingkat di bawah Direksi (Pejabat) atau laporan bersifat materials dan mempengaruhi citra Perusahaan. Diluar kriteria tersebut, maka Investigasi akan dilakukan oleh Tim Investigasi Internal.
n. Perusahaan harus dapat memilih dan menyediakan Auditor/investigator yang berintegritas untuk menjaga objektifitas hasil investigasi, sehingga kepercayaan terhadap WBS dapat dijaga.
o. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor.
p. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.
q. Integritas Laporan dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah setiap tindakan (*Action*) ataupun pembiaran (*Omission*) yang dilakukan/didesain/direkayasa untuk menipu/ mengelabui/memanipulasi pihak lain sehingga menjadi korban dan menderita kerugian dan/atau pelakunya memperoleh keuntungan.

Perlindungan Pelapor dan Terlapor

Perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas Pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan Pelapor. Bagi Perusahaan, perlindungan Pelapor akan menumbuhkan rasa aman bagi Insan Perusahaan dan Pelapor lainnya.

Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap Insan Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran.

i. Violation Reporting Process Scheme is as attached.
j. Investigation of All incoming violation report is done starting with a verification, with the purpose of gathering sufficient initial evidence, so that a conclusion can be drawn whether the violation report is true or even found to have insufficient evidence to be continued at the investigation stage.
k. The report investigation process shall be carried out by keep upholding the presumption of innocence and objective principles. Results of the investigation process in form of an investigation report accompanied by some supporting evidence which is physical evidence as well as non-physical evidence. Results of the investigative report are not in the form of opinions or opinions but in the form of a final conclusion regarding the results of the investigation which is used as the basis for the decision to take action.
l. Investigations can be carried out both by Independent Investigators (external) and by the Internal Investigation Team. The internal investigation team includes but is not limited to the Internal Audit Unit (SPI).
m. Independent Investigators can be appointed to perform the investigations if the reported parties are the Directors and Executives one level below the Board of Directors (Officials) or reports are material and affect the Company's reputation. Beyond these criteria, an Investigation will be carried out by the Internal Investigation Team.
n. The Company shall be able to choose and provide auditors/investigators with integrity to maintain the objectivity of the results of the investigation thereby accountability of the WBS can be preserved.
o. The investigation process shall be free from any bias and carried out without discriminating the whistleblower or reported party.
p. The reported party shall be given the full opportunity to provide an explanation of the evidence found, including a defense if needed.
q. Integrity of the report processed the Whistleblowing System includes any action or omission carried out/ designed /created to deceive/trick /manipulate other parties so that they become victims and suffer losses and/or the perpetrators gain profits.

Protection of the Reporting and Reported Party

Protection of the Reporting Party aims to provide guarantees on the confidentiality of the identity of the Whistleblowers and protection from actions that harm the Reporting Party. For the Company, the protection of the Whistleblowers will foster a sense of security for employees of the Company and other Whistleblowers.

The Whistleblower's protection policy is also intended to encourage all Company Personnel and other Whistleblower to have the courage to report violations.

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem perlindungan Pelapor.

Perusahaan memberikan sanksi bagi pelaporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan misalnya fitnah atau pelaporan palsu.

Semua laporan pelanggaran dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.

Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya. Pengaduan harus disampaikan kepada Tim Perusahaan melalui mekanisme yang telah ditetapkan Perusahaan. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, Pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perusahaan, seperti misalnya mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban atas biaya Perusahaan.

Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor, atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut:
a. Pemecatan yang tidak adil;
b. Penurunan jabatan atau pangkat dengan alasan yang tidak jelas;
c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur Undang-Undang No. 15 tahun 2002 dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 pada Pasal 43 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
b. Perlindungan atas keamanan pribadi, Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
c. Perlindungan terhadap harta Pelapor; dan/atau
d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Dalam hal Pelapor merasa perlu, maka dia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang Undang No.13 tahun 2006.

The Company is committed to protecting the Whistleblowers that acts in good faith and the Company complies with all prevailing and relevant laws and best practices in the implementation of the protection system of the Whistleblower.

The Company provides sanctions in relation to violation report that do not comply with the purpose and objective of this policy; such as defamation or false reporting.

All violation reports are guaranteed for its confidentiality and security by the Company. The rights of the whistleblower to obtain information regarding the followup of his/her report is guaranteed.

The Whistleblower is eligible to submit report if they obtain feedbacks in the form of pressure or threats or other acts of retaliation they experience. Complaints must be submitted to the Company Team through a mechanism established by the Company. In the event that this problem cannot be solved internally, the right of the Whistleblower to bring the case to an independent institution outside the Company, such as a mediator, witness and victim protection agency, is guaranteed and made at the Company's expense.

The Company provides protection to the Whistleblower, for the possibility of the following matters:
a. Unfair dismissal;
b. Demotion or promotion for no apparent reason;
c. Harassment or discrimination in all its forms;
d. An adverse record in his personal data file (personal file record).

In addition to the above protection, for Whistleblower who have good intention, the Company will also provide legal protection, in accordance with Law No. 15 of 2002 in conjunction with Law No. 25 of 2003 in Article 43 concerning Criminal Acts of Money Laundering and Article 13 of Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Article 5 of Government Regulation No.57 of 2003 concerning Procedures for Special Protection for Whistleblowers and Witnesses in Money Laundering Crime, namely:

a. Protection from criminal and/or civil charges;
b. Protection of personal, and or family security of the Whistleblower from physical and/or mental threats;
c. Protection of assets of the Whistleblower; and/or
d. Provision of information without face to face with the Reported Party, at each level of examination of cases in the event that the violations entered court disputes.

In the event the Whistleblower feels it is necessary, they can also ask for assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), in accordance with Law No.13 of 2006.

Apresiasi Pelapor

a. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat diselamatkan.
b. Penghargaan diberikan melalui Kebijakan Direksi.

Sanksi

Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Perseroan melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) kepada seluruh karyawan Perseroan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Perseroan juga melakukan sosialisasi kepada *stakeholders* lainnya.

Laporan Tahun 2019

Pada 2019, tidak terdapat laporan pelanggaran atas "Pengungkapan yang dilindungi".

Appreciation of whistleblower

a. The Company can give awards to the Whistleblowers for violations that can be proven so that the Company's assets/finance can be saved.

b. Awards are provided through Board of Directors' Policy.

Sanctions

The form of sanctions to the Reported Party who is proven guilty is given in accordance with the prevailing provision in the Company.

Dissemination of Whistleblowing System

The Company disseminates the Whistleblowing System to all employees of the Company to provide an understanding of the policies and mechanisms for reporting violations. The Company also conducts dissemination to other stakeholders.

Report In 2019

In 2019, there is no violation report concerning the "protected disclosures."



07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility




bmm
ASKRINDO
Qurban Prioritas
SERAH TERIMA HEWAN QURBAN
PT ASKRINDO SYARIAH - BAITULMAAL MUAMALAT
Untuk Masyarakat Lingkungan Mushola Al Ikhlas
Kampung Cileting
RT 01 RW01Kelurahan Sumur Batu
Kecamatan Bantar Gebang

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Sesuai dengan visi untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional, Perseroan menempatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan Perseroan. Seiring dengan langkah untuk menjadi perusahaan penjamin berbasis syariah terkemuka, Perseroan mengadaptasi pendekatan *triple bottom line* untuk membangun pertumbuhan berkelanjutan berfokus pada peningkatan nilai khususnya untuk masyarakat (*people*), keberlangsungan Perseroan (*profit*) dan lingkungan.

Rencana Kerja dan Realisasi Anggaran CSR Tahun 2019

Implementasi kegiatan CSR dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan alokasi anggaran secara khusus setiap tahunnya. Pada tahun 2019, Perseroan mengalokasikan total anggaran CSR sebesar Rp680 juta melalui kegiatan CSR yang berfokus pada 4 (empat) aspek utama yaitu:

1. Lingkungan;
2. Sosial Kemasyarakatan;
3. Karyawan atau aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
4. Produk/Jasa atau perlindungan terhadap pelanggan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan

Lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam keberlanjutan Perseroan. Meskipun bergerak dalam bidang usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan eksplorasi maupun ekstraksi Sumber Daya Alam (SDA), Perseroan tetap mengedepankan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam kegiatan bisnis dan operasional, Perseroan menerapkan proses kerja yang ramah lingkungan dengan mengadaptasi pendekatan efisiensi sumber daya serta 3R yaitu *reduce, reuse* dan *recycle*.

Kegiatan

Beberapa inisiatif terkait lingkungan yang dilaksanakan selama tahun 2019, antara lain:

1. Penghematan energi dan sumber daya
   Perseroan mendorong program penghematan energi antara lain melalui penghematan energi listrik dan air dalam kegiatan operasional.
2. *Paperless Office*
   Perseroan mendorong pelaksanaan *paperless office* khususnya dalam kegiatan komunikasi dan administrasi internal melalui sarana dan media yang disediakan antara lain surat elektronik dan berbagai saluran komunikasi lainnya.

In line with our vision to support national economy development, the Company places Corporate Social Responsibility (CSR) activity as integrated part in the Company's growth. In line with our steps towards a prominent sharia-based guarantee company, the Company has adapted triple bottom line approach to build a sustainable growth focusing on added-value especially for the society (people), continuity of the Company (profit) and environment.

CSR Work Plan and Budget Realization in 2019

Implementation of CSR activity is done according to dedicated work plan and budget that have been prepared every year. In 2019, the Company allocated total CSR budget realization of Rp680 million through CSR activities focusing on 4 (four) main aspects, as follows:

1. Environment;
2. Social Community;
3. Employees or Occupational Health and Safety Aspect;
4. Products/Services or protection to our customers.

SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

Policy

Environment is one of important aspect for the Company's sustainability. Although operating in business that is not directly engaged in Natural Resources exploration or extraction, the Company keeps promoting the commitment on environmental conservation. In our business and operational activities, the Company has implemented an eco-friendly work process by adapting resources efficiency and 3R (reduce, reuse and recycle) approaches.

Activities

Some environmental initiatives done in 2019 are as follows:

1. Energy and Resources Efficiency
   The Company encourages save energy program including through save the electricity and water in operational activities.
2. Paperless Office
   The Company encourages implementation of paperless office, particularly in internal communication and administration through available channels and media, such as electronic mail and other communication channels.

3. Pengelolaan limbah terpadu
   Perseroan telah memiliki mekanisme pengelolaan limbah secara terpadu dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki ijin dari Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Go Green Save The Generation

Pada tanggal 25 November 2019, sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan Milad ke-7 Askrindo Syariah, Perseroan melaksanakan kegiatan Penghijauan, CSR dan *Fun Bike* dengan tema *Go Green Save The Generation*. Kegiatan ini dilaksanakan di Tandon Ciater, Tangerang Selatan, Banten di mana Perseroan menyerahkan bantuan tempat sampah dan bangku taman untuk Tandon Ciater serta memberikan Wakaf kepada Yayasan Ashabul Ardhi dan Yayasan Ibnu Abbas.

3. Integrated waste treatment
   The Company has an integrated waste treatment mechanism by involving third party with permit from local government Environmental Office.

Go Green Save The Generation

On November 25, 2019, as part of Askrindo Syariah's 7th Anniversary celebration, the Company held Greening, CSR and Fun Bike events with theme "Go Green Save The Generation." This event was held at Ciater Reservoirs, South Tangerang, Banten where the Company donated waste bin and park bench for Ciater Reservoirs as well as Wakaf for Ashabul Ardhi and Ibnu Abbas Foundations.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Kebijakan

Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, Perseroan melakukan kegiatan CSR yang melibatkan, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat sekitar sehingga turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan

Pada tahun 2019, Perseroan merealisasikan kegiatan tanggung jawab sosial bidang kemasyarakatan dalam beberapa bidang, sebagai berikut:

- **Kegiatan Inklusi Keuangan Berbasis Pondok Pesantren**
  Untuk mendukung inisiatif inklusi keuangan syariah, bekerja sama Bank Indonesia, OJK, Komite Nasional Keuangan syariah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), BAZNAS dan berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan syariah lainnya, Perseroan berpartisipasi dalam pelaksanaan *pilot project* pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah berbasis pondok pesantren.

  Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi pesantren dengan lokasi pertama yaitu Pondok Pesantren KHAS Kempek, Kabupatan Cirebon tanggal 17 Desember 2019. Dalam kegiatan ini Perseroan memberikan bantuan pendidikan bagi para santri dan santunan pendidikan bagi santri yatim.

SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL COMMUNITY ASPECT

Policy

In social and community aspect, the Company conducted CSR activities that involved, developed and empowered surrounding society thereby also contributes in improving public welfare.

Activity

In 2019, the Company carried out social responsibility activities in community aspect at some fields, as follows:

- **Islamic Board School Based Financial Inclusion**
  Activity In order to support sharia financial inclusion initiative, in cooperation with Bank Indonesia, OJK, sharia Financial National Committee, Halal Product Assurance Provider Agency (BPJPH), BAZNAS and other various government institutions as well as other sharia companies, the Company participates in implementation of Islamic boarding school-based Sharia economy and financial development pilot project.

  This activity aims to increase sharia financial inclusion and economic empowerment for the Islamic boarding school with the first loation at KHAS Kempek Islamic Boarding School, Cirebon Regency on December 17, 2019. In this activity, the Company gave educational donation for the students as well as donation for orphan students.



- **Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Mataram, Nusa Tenggara Barat**
  Sebagai perusahaan penjaminan, Perseroan salah satunya turut berpartisipasi dalam penjaminan pembiayaan khususnya bidang KUR yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengembangkan perekonomian nasional. Pada tanggal 24 Maret 2019, sebagai bagian dari program penyaluran KUR, Perseroan memberikan bantuan CSR kepada Kelompok Pengolah Hasil Perikanan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peningkatan hasil pengolahan hasil perikanan masyarakat khususnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

- **Miro Loans (KUR) Disbursement in Mataram, West Nusa Tenggara**
  As a guarantee company, the Company also participates namely in financing guarantee, specifically in Micro Loans (KUR) aspect with the purpose to empower public economy and develop national economy. On March 24, 2019, as part of KUR disbursement program, the Company also gave CSR donation to Fisheries Products Manufacturing Group in Mataram, West Nusa Tenggara. This activity aims to support in increasing outcome of local fisheries products manufacturing in Mataram, West Nusa Tenggara.



- **CSR Untuk Petani Kopi di Yogyakarta**
  Pada tanggal 8 November 2019, bertepatan dengan pelaksanaan *Employee Gathering* 2019 di Yogyakarta, Perseroan melaksanakan kegiatan CSR bagi petani kopi di Condongcatur, Depok, Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan produk kopi dan peningkatan usaha bagi petani kopi dengan menyerahkan bantuan berupa mesin giling kopi.

- **CSR for Coffee Farmers in Yogyakarta**
  On November 8, 2019, simultaneously with Employee Gathering 2019 in Yogyakarta, the Company held CSR activity for coffee farmers at Condongcatur, Depok, Yogyakarta. This activity aims to develop coffee product and to upgrade business for coffee farmers by donating coffee grinding machine.



- **Bidang Keagamaan**
  Pada tahun 2019, Perseroan juga melaksanakan beberapa kegiatan CSR dalam bidang kegamaan, antara lain:
  1. Bantuan CSR untuk Masjid Suciati, Yogyakarta.
  2. Kegiatan CSR berupa hewan kurban 1 ekor sapi kepada pihak Baitul Maal Muamalat (BMM) Lembaga Zakat Nasional yang bertempat di Bantar Gebang, Bekasi serta pemberian hewan kurban oleh kantor Cabang dan KPS antara lain Cabang Semarang, Cabang Bandung, Cabang Palembang, KPS Mataram, KPPS Aceh dan KPPS Batam.

- **Bantuan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan**
  Perseroan memberikan bantuan langsung berupa Pembuatan Sumur Air Bersih serta bantuan lainnya untuk korban bencana banjir di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu korban bencana banjir terkait ketersediaan air bersih melalui pembuatan sumur air bersih yg berlokasi di Desa Sapanang yang diharapkan dapat membantu meringankan beban yang dialami oleh masyararat terkena bencana.

- **Religious Aspect**
  In 2019, the Company also held some CSR activities in religious aspect, among others:

  1. CSR Donation for Suciati Mosque, Yogyakarta.
  2. CSR Activity in form of 1 cow as scarifying animal to Baitul Maal Muamalat (BMM) National Zakah Institute located at Bantar Gebang, Bekasi as well as sacrificial animal donation by branch office and KPS, such as Semarang Branch, Bandung Branch, Palembang Branch, KPS Mataram, KPPS Aceh and KPPS Batam.

- **Flood Disaster Relief for Janeponto Regency, South Sulawesi**
  The Company gave direct donation in form of Ground Water Well Construction and other donations for flood disaster survivors in Janeponto Regency, South Sulawesi. This activity aims to support the flood survivors related to clean water supply through the construction of ground water wells located in Sapanang Village, which are intended to ease the burden of society as victims of the disaster.



TANGGUNG JAWAB BIDANG KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN KETENAGAKERJAAN

Perseroan senantiasa memerhatikan tingkat kepuasan setiap karyawan dan secara berkala menjalankan program pembinaan, pengembangan, dan menciptakan hubungan yang sehat antara atasan dengan bawahan, memberikan remunerasi yang adil, memastikan keselamatan dan keamanan kerja, serta menjunjung tinggi kesetaraan seluruh karyawan.

Kebijakan

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab praktik ketenagakerjaan, Perseroan berpijak pada UU RI No.13/2013 tentang ketenagakerjaan.

a. Praktik Ketenagakerjaan
   Perseroan menyadari bahwa hubungan kerja yang baik dengan seluruh karyawan merupakan prasyarat utama dalam mencapai visi dan misi. Kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar, dan Perseroan meraih laba serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan target yang ditetapkan apabila lingkungan kerja sehat serta saling bersinergi. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menyelenggarakan praktik ketenagakerjaan yang sehat dengan seluruh karyawan dan menjamin hak dan kesejahteraan seluruh karyawan.

RESPONSIBILITY IN OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND EMPLOYMENT ASPECT

The Company always pays attention to satisfaction level of each employee and regularly runs a program of coaching, developing, and creating healthy relationships between superiors and subordinates, providing fair remuneration, ensuring work safety and security, and upholding the equality of all employees.

Policy

In implementing the responsibilities of labor practices, the Company refers to RI Law No.13/2013 concerning employment.

a. Employment Practices
   The Company realizes that a good working relationship with all employees is the main prerequisite in achieving its vision and mission. Business activities can run smoothly, and the Company generates profit and grows and develops according to the targets set if the work environment is healthy and synergizes with each other. Therefore, the Company always organizes healthy employment practices with all employees and guarantees the rights and welfare of all employees.



Di sisi lain, Perseroan juga senantiasa menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan tidak membedakan SDM berdasarkan jenis kelamin maupun ras. Penerapan prinsip non-diskriminasi ini menjadi dasar Perseroan dalam berinteraksi dengan karyawan dalam kerangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Perseroan menyadari bahwa kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dalam menunjang keberhasilan aktivitas usaha Perseroan. Bagi kami, keselamatan dan kesehatan kerja memiliki makna strategis yang menjaga eksistensi bisnis Perseroan. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kegiatan operasional bisnis Perseroan.

Kegiatan

1. Praktik Ketenagakerjaan
Di bidang ketenagakerjaan, Perseroan membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi bagian dari Perseroan sebagai karyawan sesuai dengan kualifkasi yang dibutuhkan. Perseroan juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan karyawan, termasuk dalam memenuhi hak-haknya, baik dari segi pelatihan, hak cuti, remunerasi, maupun kebebasan berserikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Guna meningkatkan kebersamaan antar karyawan dan manajemen, Perseroan pada tahun 2019 juga menyelenggarakan kegiatan bersama, antara lain:
   - *Employee gathering* di Jogja, tanggal 8 – 10 November 2019;
   - *Family gathering* di The Green BSD, Tangerang Selatan tanggal 1 Desember 2019;
   - Program rutin temu karyawan dengan manajemen (*face to face*) meliputi doa pagi bersama, rapat koordinasi divisi dan forum antar divisi setiap minggu.

TINGKAT *TURNOVER* SDM

Melalui berbagai upaya pengelolaan SDM yang dilakukan secara adil, transparan dan berimbang, Perseroan menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi seluruh insan Perseroan. Hal ini antara lain ditujukan untuk mengelola tingkat *turnover* karyawan Perseroan. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 12 karyawan berhenti bekerja, yang terdiri dari 11 karyawan mengundurkan diri, dan 1 karyawan pensiun. Tingkat *turnover* tersebut cenderung lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencapai 8 karyawan. Tingkat *turnover* karyawan komparatif 2 tahun disajikan dalam tabel berikut:

On the other hand, the Company also always upholds the principle of equality and employment opportunities by not differentiating HR based on gender or race. Implementation of non-discriminative principle manifests basis of the Company in interacting with employees within the framework of creating harmonious industrial relations.

b. Occupational Health and Safety
The Company realizes that occupational health and safety is very important in supporting the Company's success of the business activities. For us, occupational safety and health have a strategic meaning that maintains the existence of the Company's business. Occupational safety and health aspects are placed as the main priority in the Company's business operations.

Activity

1. Employment Practices
In employment aspect, the Company provides the broadest opportunity for the surrounding society to join as our employees based on the required qualification. The Company also gives major concern on employee welfare, including in fulfilling their rights including in terms of training, leaves, remuneration and freedom to unite according to prevailing regulation.

2. To strengthen togetherness between employees and management, in 2019, the Company also held joint events, among others:
   - Employee gathering in Jogja on 8 – 10 November 2019;
   - Family gathering at The Green BSD, South Tangerang on December 1, 2019;
   - Regular employee and management (face-to-face) program including morning prayers, division coordination meeting and weekly division forum.

EMPLOYEE TURNOVER RATE

Through various HR management initiatives that are implemented fairly, transparently and balance, the Company has created a favorable work environment for all Company's personnel. This aims namely to manage employee turnover rate in the Company. In 2019, there are 12 employees stopped working, comprising of 11 resigned employees and 1 retired employee. The turnover rate is higher form 8 employees in 2018. Comparative employee turnover rate in recent 2 years is presented in table below:

Tabel Tingkat *Turnover* SDM
Table of Employee Turnover Rate

2019				2018			
Pensiun Retired	Mengundurkan Diri Resigned	Meninggal Dunia Passed-Away	Total	Pensiun Retired	Mengundurkan Diri Resigned	Meninggal Dunia Passed-Away	Total
1	11	0	12	0	8	0	8

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK DAN JASA

Kebijakan

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Bagi Perseroan, pelanggan merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai kinerja dan hasil usaha yang lebih baik. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menyediakan layanan informasi yang memudahkan seluruh pihak dalam mencari informasi layanan maupun produk yang dimiliki Perseroan secara mudah, serta layanan pengaduan.

Kegiatan

Perseroan senantiasa mengutamakan kepuasan mitra dengan melakukan peningkatan kualitas produk, layanan, dan profesionalitas kerja. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan program rekonsiliasi produk dengan mitra bisnis setiap tiga bulan sekali.

Survei Kepuasan Pelanggan

Perseroan melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan sebagai salah satu upaya untuk memperoleh umpan balik dari Mitra Bisnis guna perbaikan kualitas layanan kepada Mitra Bisnis. Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan melalui kuesioner terkait eksistensi dan mutu layanan untuk periode tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2019, Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan tanggal 9 – 20 Desember 2019 melalui penyebaran kuesioner ke seluruh Kantor Cabang (KC) atau Kantor Pemasaran Syariah (KPS) Perseroan. Analisa hasil kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan 2019 dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu Analisa *Customer Satisfaction Index* (CSI) dan Analisa *Service Quality*.

Hasil Survei Kepuasan Pelanggan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

RESPONSIBILITY ON PRODUCTS AND SERVICES

Policy

The Company has a commitment to always deliver excellent services to all customers. The Company views customers as a vital element in achieving higher performance and business result. Therefore, the Company always provides information service to ease everyone in seeking information about the Company's products and services easily, including the complaint (customer care) service.

Activity

The Company always prioritizes satisfaction of our partners through improvement of quality in our products, services and work professionality. In addition, the Company also conducts product reconciliation program with business partners quarterly.

Customer Satisfaction Survey

The Company conducts Customer Satisfaction Survey as an effort to gain feedback from Business Partners with regards to improvement quality of services to the Business Partners. The Customer Satisfaction Survey is done through questionnaire related to existence and service quality for 2018 and 2019 periods. In 2019, the Customer Satisfaction Survey was conducted on 9 – 20 December 2019 through questionnaire distribution to all Branch Offices (KC) or Sharia Marketing Offices (KPS). Result of the Customer Satisfaction Survey in 2019 is analyzed using 2 (two) methods, Customer Satisfaction Index (CSI) and Service Quality analysis.

Customer Satisfaction Survey Result

Based on result of above data analysis and discussion, the conclusion is as follows:

No.	Indikator Indicators	Hasil Result	Keterangan Predicate
1.	**Tingkat Kepuasan Pelanggan** Customer Satisfaction Level	36,67%	Puas Satisfied
		56,44%	Sangat Puas Very Satisfied
		8,89%	Cukup Puas Fairly Satisfied
2.	**Tingkat *Engagement* Pelanggan** Customer Engagement Level	20,00%	Puas Satisfied
		55,56%	Sangat Puas Very Satisfied
		23,11%	Cukup Puas Fairly Satisfied
3.	**Customer Satisfaction Index (CSI)**	83.09 %	Sangat Puas Very Satisfied


ASKRINDO
Syariah
2019
2018
2017
2016
2019
2018
2017
2016

08

LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Financial Statements
For the Year Ended
December 31, 2019 and 2018

Daftar Isi **Halaman/ *Page*** ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018		***Financial Statements For the Years Ended December 31, 2019 and 2018***
Laporan Posisi Keuangan	211	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	212	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	213	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	214	*Statements of Cash Flows*
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	215	*Statements of Sources and Distribution of Zakah Fund*
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	216	*Statement of Sources and Implementation Benefit*
Catatan atas Laporan Keuangan	217	*Notes to the Financial Statements*

ASKRINDO Syariah

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
No. 0101/KP/B.3/DIR-JPAS/2020

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING TO THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 DAN 2018
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
No. 0101/KP/B.3/DIR-JPAS/2020

Kami yang bertanda tangan dibawah ini: / *We the undersigned:*

1.	Nama	Soegiharto	*Name*
	Alamat Kantor	Jl. Gedung Kesenian No.3, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710	*Office Adress*
	Nomor Telepon	021 - 3517525	*Phone Number*
	Jabatan	Direktur Utama/*President Director*	*Title*
2.	Nama	Subagio Istiarno	*Name*
	Alamat Kantor	Jl. Gedung Kesenian No.3, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710	*Office Adress*
	Nomor Telepon	021 - 3517525	*Phone Number*
	Jabatan	Direktur Keuangan/ *Financial Director*	*Title*

Menyatakan bahwa: / *State that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah; / *We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah;*
2. Laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information contained in the PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*

   b. Laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan / *PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. / *We are responsible for PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *We certify the accuracy of this statement.*

Jakarta, 20 Maret/*March 20, 2020*
Atas Nama dan Mewakili Direksi/*For and on Behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL
ODEBBAHF354354281
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Soegiharto	**Subagio Istiarno**
Direktur Utama/*President Director*	**Direktur Keuangan/*Financial Director***

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00324/2.1030/AU.4/09/0501-1/1/III/2020

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dana dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, its the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of sources and distributions of zakah funds, and statement of sources and implementation benefit for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah as of December 31, 2019, its financial performance, cash flows, sources and distributions of zakah funds, and sources and uses of charity funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penekanan suatu hal
Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3.b atas laporan keuangan, metode perhitungan pendapatan Imbal Jasa Kafalah (IJK) diakui secara sekaligus ditahun berjalan, dan dikurangkan dengan penurunan IJK yang belum merupakan pendapatan yang dihitung berdasarkan 20% dari IJK neto. Apabila pengakuan pendapatan mengikuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit, maka jumlah pendapatan akan berbeda dan tidak ada angka pengurang dan terdapat pendapatan di tangguhkan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian atas pencatatan dari awal tanggal 1 Januari 2020.

Emphasis of matter
As stated in Note 3.b to the financial statements, the method of calculating income from Kafalah Fee is recognized simultaneously in the current year, and deducted by the decrease in the IJK that does not yet constitute income calculated based on 20% of the net IJK. if the income recognition follows the Financial Services Authority Circular Letter No. 11/SEOJK.05/ 2013 concerning the Credit Guarantee Company Monthly Reports, the amount of income will be different and there is no deduction figure and there is deferred income. The Company will make adjustments to this listing starting January 1, 2020.

Kami membawa perhatian ke Catatan 35 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang dampak dari wabah virus corona (dikenal juga sebagai Covid-19) terhadap kondisi perekonomian

We draw attention to Note 35 to the accompanying financial statements which explains the impact of the corona virus (also named as Covid-19) to condition of the Indonesian economy. The resolution of this

Indonesia. Resolusi kondisi ekonomi ini tergantung pada tindakan pemerintah dan regulator yang berada diluar kendali Perusahaan. Oleh karena itu, pada saat ini dampak masa depan terhadap Perusahaan belum dapat diperkirakan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

economic conditions depends on the actions of the government and regulators which are beyond the Company's control. Therefore, the future impact on the Company cannot be estimated at this time Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Hal lainnya

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other matters

We also have tested the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls. The compliance with certain laws and regulations and internal controls are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express a conclusion on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls based on our audit. The testing of compliance with certain laws and regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami No. R/134.AAT/rhp/2020 dan No. R/135.AAT/rhp/2020 tanggal 20 Maret 2020.

The compliance reports on certain regulations and internal controls are submitted to the management separately in our reports No. R/134.AAT/rhp/2020 and No. R/135.AAT/rhp/2020, respectively, dated March 20,2020.

Laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No.00161/2.1068/AU.4/0.9/0117/1/II/2019 bertanggal 25 Februari 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

The financial statements of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah as of December 31, 2019 and for the year then ended, were audited by other independent auditors with report No.00161/2.1068/AU.4/0.9/0117/1/II/2019 dated February 25, 2019 which expressed an unmodified opinion on such financial statements.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501/
Public Accountant License Number: AP.0501

Jakarta, 20 Maret/*March 20, 2020*

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2019 Rp	2018 Rp	
ASET				***ASSETS***
Kas dan bank	4	24,312,454,495	15,711,757,402	*Cash on hand and in banks*
Piutang imbal jasa kafalah	5	18,295,926,872	6,750,855,864	*Kafalah fee receivables*
Piutang penjaminan ulang	6	23,061,558,013	7,988,726,802	*Re-guarantee receivables*
Piutang hasil investasi	7	1,609,128,897	381,286,784	*Investment income receivables*
Investasi				*Investments*
Deposito berjangka	8.a	436,450,000,000	279,051,439,088	*Time deposits*
Surat berharga syariah negara	8.b	65,205,312,842	--	*Government sharia bond*
Reksadana	8.c	25,606,394,884	70,796,670,934	*Mutual fund*
Biaya dibayar di muka	9	6,793,104,450	3,666,479,780	*Prepaid expenses*
Aset tetap	10	13,982,637,462	11,314,634,637	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan	18.d	5,853,677,416	3,520,960,945	*Deferred tax assets*
Aset tidak berwujud	11	1,331,992,573	1,848,645,472	*Intangible assets*
Aset lain-lain		206,500,000	196,500,000	*Other assets*
JUMLAH ASET		**622,708,687,904**	**401,227,957,708**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Utang ta'widh	14	6,809,345,835	1,733,582,361	*Ta'widh payables*
Utang penjaminan ulang	15	11,703,991,381	11,989,422,741	*Re-guarantee payables*
Pendapatan IJK diterima di muka	16	10,503,496,559	8,253,338,901	*Kafalah fee income in advance*
Utang zakat	17	2,392,108,130	962,416,208	*Zakah payables*
Utang pajak	18.b	8,388,056,927	5,911,509,051	*Taxes payables*
Biaya yang masih harus dibayar	19	5,230,389,206	2,846,872,467	*Accrued expenses*
Estimasi ta'widh retensi sendiri	12	24,905,276,157	18,519,750,447	*Estimated ta'widh reserved*
Estimasi IJK yang belum merupakan pendapatan	13	37,494,713,246	22,125,368,273	*Estimated unearned kafalah fee income*
Liabilitas imbalan pascakerja	20	4,227,306,074	2,206,202,034	*Post-employment benefits liabilities*
Utang lain-lain		678,778,641	1,148,128,478	*Other payables*
JUMLAH LIABILITAS		**112,333,462,156**	**75,696,590,961**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				*Share capital - Rp 1,000,000 par value per share*
Modal - 250.000 saham telah ditempatkan dan disetor penuh 250.000 saham	21	250,000,000,000	250,000,000,000	*Authorized - 250,000 shares issued and paid-up capital 250,000 shares*
Tambahan modal disetor	21, 22	150,000,000,000	--	*Paid in capital*
Komponen ekuitas lainnya		(1,726,986,844)	(9,183,092)	*Other equity component*
Saldo laba:				*Retained earnings:*
Telah ditentukan penggunaannya	23	75,540,549,839	61,455,692,606	*Appropriate*
Belum ditentukan pengunaannya		36,561,662,753	14,084,857,233	*Unappropriate*
JUMLAH EKUITAS		**510,375,225,748**	**325,531,366,747**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**622,708,687,904**	**401,227,957,708**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
As of December 31, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2019 Rp	2018 Rp	
Pendapatan Kafalah				***Kafalah Income***
Imbal jasa kafalah bruto	24	317,279,785,137	223,484,500,864	*Gross kafalah fee*
Beban penjaminan ulang	25	(92,714,729,299)	(66,953,938,613)	*Reguarantee expenses*
Penurunan IJK yang belum merupakan pendapatan		(15,369,344,973)	(5,314,627,392)	*Decrease in unearned kafalah fee revenue*
Penerimaan kafalah lain		7,777,779,001	4,814,515,090	*Other kafalah income*
Jumlah Pendapatan Kafalah		216,973,489,866	156,030,449,949	***Total Underwriting Income - net***
Beban Kafalah				***Kafalah Expenses***
Ta'widh	26	131,847,921,791	126,990,102,499	*Ta'widh*
Ta'widh reasuransi	27	(54,392,748,261)	(46,446,761,165)	*Ta'widh reinsurance*
Beban komisi		25,590,752,579	17,990,825,774	*Commission expenses*
Pendapatan subrogasi		(17,366,045,797)	(11,085,443,572)	*Subrogation income*
(Kenaikan) penurunan estimasi ta'widh retensi sendiri		6,385,525,710	(13,414,173,279)	*(Increase) decrease in estimated ta'widh own retention*
Beban kafalah lain		1,956,705,316	1,064,350,781	*Other kafalah expenses*
Jumlah Beban Kafalah		94,022,111,338	75,098,901,038	***Total Kafalah Expenses***
Pendapatan Kafalah Bersih		122,951,378,528	80,931,548,911	***Net Kafalah Income***
Pendapatan investasi	28	20,027,811,231	12,655,131,361	*Investment income*
Beban usaha	29	87,485,235,872	66,609,072,438	*Operating expenses*
Laba Usaha		55,493,953,887	26,977,607,834	***Operating Income***
Beban Lain-lain	30	(3,063,366,934)	(4,248,541,162)	*Other expenses*
Laba Sebelum Zakat dan Pajak		52,430,586,953	22,729,066,672	***Profit Before Zakah and Income Tax***
Zakat		(1,310,764,674)	(568,226,667)	*Zakah*
Laba Sebelum Pajak		51,119,822,279	22,160,840,005	***Profit Before Income Tax***
Beban Pajak penghasilan	18.a	(14,558,159,526)	(8,075,982,772)	***Income tax expense***
Laba bersih Tahun Berjalan		36,561,662,753	14,084,857,233	***Net income for The Year***
Penghasilan Komprehensif Lain				***Other Comprehensive Income***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will not be reclassified to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) aktuaria	20	(2,036,703,603)	221,611,931	*Gain (loss) actuarial*
Pajak penghasilan terkait	18.d	509,175,901	(55,402,983)	*Related income tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that may be reclassified to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual		(190,276,050)	644,758,951	*Unrealized gain (loss) on available-for -sale securities*
Pendapatan Komprehensif Lain		(1,717,803,752)	810,967,899	***Other Comprehensive Income***
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		**34,843,859,001**	**14,895,825,132**	***Total Comprehensive Income for The Year***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended
As of December 31, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Paid - up capital stock* Rp	Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital* Rp	Penghasilan komprehensif lain /*Others comprehensive income*		Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
				Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual/ *Unrealized gain (losses) on available for sale marketable securities* Rp	Keuntungan (kerugian) aktuaria/Gain *(loss) actuarial* Rp	Ditentukan Pengunaannya/ *Appropriated* Rp	Belum ditentukan Pengunaannya/ *Unappropriated* Rp		
Saldo 31 Desember 2017		**250,000,000,000**	**--**	**84,943,616**	**(905,094,607)**	**55,229,488,051**	**6,226,204,555**	**310,635,541,615**	***Balance as of December 31, 2017***
Pembentukan cadangan umum	23	--	--	--	--	6,226,204,555	(6,226,204,555)	--	*Allowances for general reserves*
Laba bersih tahun berjalan		--	--	--	--	--	14,084,857,233	14,084,857,233	*Net income for the year*
Pendapatan komprehensif lainnya		--	--	644,758,951	166,208,948	--	--	810,967,899	*Other comprehensive income*
Saldo 31 Desember 2018		**250,000,000,000**	**--**	**729,702,567**	**(738,885,659)**	**61,455,692,606**	**14,084,857,233**	**325,531,366,747**	***Balance as of December 31, 2018***
Pembentukan cadangan umum	23	--	--	--	--	14,084,857,233	(14,084,857,233)	--	*Allowances for general reserves*
Setoran modal	22	--	150,000,000,000	--	--	--	--	150,000,000,000	*Paid up capital*
Laba bersih tahun berjalan		--	--	--	--	--	36,561,662,753	36,561,662,753	*Net income for the year*
Pendapatan komprehensif lainnya		--	--	(190,276,050)	(1,527,527,702)	--	--	(1,717,803,752)	*Other comprehensive income*
Saldo 31 Desember 2019		**250,000,000,000**	**150,000,000,000**	**539,426,517**	**(2,266,413,361)**	**75,540,549,839**	**36,561,662,753**	**510,375,225,748**	***Balance as of December 31, 2019***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Years Ended
As of December 31, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Note*	2019 Rp	2018 Rp	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows From Operating Activities***
Penerimaan kas dari kafalah		309,735,291,613	218,863,222,616	*Kafalah receipts*
Penerimaan dari kafalah lain		7,777,779,001	57,222,373,649	*Other kafalah receipts*
Penerimaan kas dari hasil investasi		18,799,969,118	12,325,588,744	*Investment income receipts*
Penerimaan kas dari lain-lain		--	3,876,708,251	*Other receipts*
Pengeluaran beban kafalah		(190,633,814,024)	(208,499,136,324)	*Payment for kafalah expenses*
Pengeluaran untuk beban usaha		(87,436,370,433)	(62,774,287,602)	*Payment for operating expenses*
Pengeluaran untuk pajak penghasilan		(14,366,234,674)	(2,638,067,878)	*Payment for income taxes*
Pengeluaran untuk zakat		(434,311,200)	(568,226,667)	*Payment for zakat*
Pengeluaran lain-lain		(1,799,613,348)	(4,323,460,481)	*Payment for others*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		41,642,696,053	13,484,714,308	***Cash provided by operating activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				***Cash Flows From Investing Activities***
Penempatan deposito berjangka		(370,800,000,000)	(95,950,000,000)	*Time deposit investment*
Pencairan deposito berjangka		213,401,439,088	65,800,000,000	*Time deposit withdrawals*
Penempatan Surat berharga syariah negara	8.b	(65,660,621,138)	--	*Government sharia bond investment*
Penempatan investasi jangka pendek		(30,724,894,987)	(50,000,000,000)	*Short term investment*
Pencairan investasi jangka pendek		75,915,171,037	50,098,021,464	*Short term investment withdrawals*
Penambahan aset tetap	10	(4,547,083,029)	(2,564,820,403)	*Acquisition of fixed assets*
Penambahan aset tidak berwujud	11	(616,009,931)	(918,200,000)	*Additional of intangible assets*
Pembelian aset lain-lain		(10,000,000)	--	*Purchases of other assets*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(183,041,998,960)	(33,534,998,939)	***Cash used in investing activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				***Cash Flows From Financing Activities***
Penerimaan atas tambahan modal disetor	22	150,000,000,000	--	*Receipt of additional paid-in capital*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		150,000,000,000	--	***Net cash provided by financing activities***
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank		8,600,697,093	(20,050,284,631)	***Net Increase (Decrease) in Cash and in Banks***
Saldo Kas dan Bank awal tahun		15,711,757,402	35,762,042,033	***Cash and Banks at Beginning of year***
Saldo Kas dan Bank akhir tahun		**24,312,454,495**	**15,711,757,402**	***Cash and Banks at End of year***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAH FUND
For The Years Ended
As of December 31, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Sumber Dana Zakat			***Source of Zakah Funds***
Zakat dari dalam pembiayaan syariah	1,310,764,674	568,226,667	*Zakah from sharia financing*
Zakat dari karyawan	553,238,448	550,523,834	*Zakah from employees*
Jumlah sumber dana zakat	1,864,003,122	1,118,750,501	***Total source of zakah funds***
Penyaluran Dana Zakat kepada			***Distribution of Zakah Funds to***
Entitas Pengelola Zakat	(434,311,200)	(383,987,650)	***Zakah Management Entity***
Kenaikan dana zakat	1,429,691,922	734,762,851	*Increasing of zakah funds*
Saldo awal dana zakat	962,416,208	227,653,357	*Beginning balance of zakah funds*
Saldo akhir dana zakat	**2,392,108,130**	**962,416,208**	***Ending balance of zakah funds***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCE AND IMPLEMENTATION BENEFIT
For The Years Ended
As of December 31, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Sumber Dana Kebajikan			***Source of benefit***
Pendapatan non halal	--	--	*Non halal income*
Jumlah	--	--	***Total***
Penggunaan Dana Kebajikan	**--**		***Establishment of Benefit***
Kenaikan (penurunan)	--	--	*Increasing (decreasing)*
Saldo awal	--	--	*Beginning balance*
Saldo Akhir	**--**	**--**	***Ending Balance***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

1. Umum / *1. General*

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU- 61610.AH.01.01 tanggal 3 Desember 2012. Anggaran dasar Perusahaan beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta No. 24 tanggal 14 Juni 2016 oleh Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03- 0058308 tanggal 17 Juni 2016.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi penjaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada bulan Desember tahun 2012. Kantor pusat Perusahaan terletak di Gedung Primagraha Persada Lantai 1, 2, dan 6 Jl. Gedung Kesenian No. 3-7, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710. Perusahaan memiliki 2 kantor cabang yang terletak di Jakarta dan 6 kantor cabang diluar Jakarta.

1.a. General Information and Establishment

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Company") was established based on Notarial Deed No. 45 dated November 29, 2012 of Hadijah, S.H., notary in Jakarta. The Deed of establishment had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-61610.AH.01.01 dated December 3, 2012. The Company's articles of association were amended several times, most recently by Deed No. 24 dated June 14, 2016 by Hadijah, S.H., notary in Jakarta, regarding the changes of the Directors and Commissioners. The amendment of the articles of association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0058308 dated June 17, 2016.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities mainly covers financing guarantees in accordance with sharia principles.

Companies are incorporated into business group PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The company commercially started its business in December 2012. The Company's Headquarters is located at Gedung Primagraha Persada 1st, 2nd and 6th Floor Jl. Gedung Kesenian No. 3-7, Pasar Baru, Central Jakarta 10710. The company has 2 branch offices located in Jakarta and 6 branch offices outside Jakarta.

1.b. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Penunjukan Dewan Komisaris yang diadakan tanggal 08 Oktober 2019, didokumentasikan dalam Akta No.04 dari Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1.b. Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board

Based on Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders regarding Appointment of Board of Comissioners dated October 08, 2019, documented in Deed No.04 from Hadijah S.H., notary in Jakarta the composition of the Company's management as of December 31, 2019 are as follows:

	2019	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioner***
Komisaris Utama	Budi Wisakseno	*President Commissioner*
Komisaris	Bambang Hermanto	*Commissioner*
Komisaris	Firman Berahima	*Commissioner*

2019

Dewan Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Soegiharto	*President Director*
Direktur Keuangan	Subagio Istiarno	*Finance Director*
Direktur Pemasaran	Supardi Najamuddin	*Marketing Director*
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Daud Rasyid	*Chairman*
Anggota	Muhamad Zubair	*Member*
Anggota	Denny Nuryadin	*Member*

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Pengangkatan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diadakan tanggal 16 Mei 2018, didokumentasikan dalam Akta No.45 dari Hadijah S.H., notaris di Jakarta, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Based on Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders regarding Appointment of Board of Comissioners and Sharia Supervisory Board dated May 16, 2018, documented in Deed No.45 from Hadijah, S.H., notary in Jakarta, the composition of the Company's management as of December 31, 2018 are as follows:

2018

Dewan Komisaris		***Board of Commissioner***
Komisaris Utama	Budi Wisakseno	*President Commissioner*
Komisaris	Bambang Hermanto	*Commissioner*
Dewan Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Soegiharto	*President Director*
Direktur Keuangan	Subagio Istiarno	*Finance Director*
Direktur Pemasaran	Soegiharto (Plt.)	*Marketing Director*
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Daud Rasyid	*Chairman*
Anggota	Muhamad Zubair	*Member*
Anggota	Denny Nuryadin	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing sebanyak 167 dan 126 karyawan (tidak diaudit).

As of December 31, 2019 and 2018 there were 167 employees and 126 employees (unaudited) respectively.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntasi Penting

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.a. Kepatuhan kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), dan Standar

2.a. Statements of Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK –

Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS – IAI).

IAI), and Financial Accounting Standards issued by Sharia Accounting Standard Board - Indonesian Accounting Association (DSAS - IAI).

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas Perusahaan. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas Perusahaan disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Laporan keuangan perusahaan telah disusun berdasarkan biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas.

2.b. The Basis of Measurement and Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with PSAK 101 "Presentation of Sharia Financial Statements".

The Company's financial statements are prepared and presented based on business continuity assumptions and on an accrual basis, except for the Company's cash flow statements. The basis of measurement in the preparation of these financial statements is the concept of cost, except for certain accounts based on other measurements as described in the accounting policies of each of these accounts. Cost is generally based on the fair value given in acquiring assets.

The Company's cash flow statement is presented using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Company.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for the statement of cash flows.

2.c. Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interprestasi atas SAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): "Kombinasi Bisnis";
- PSAK 24 (Amandemen 2018): "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): "Biaya Pinjaman";

2.c. New standards, amendments, improvements and interpretations of financial accounting standards

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of standards which effectively applied for the year starting on or after January 1, 2019:

- *PSAK 22 (Improvement 2018): "Business Combination";*
- *PSAK 24 (Amendment 2018): "Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement";*
- *PSAK 26 (Improvement 2018): "Borrowing Cost";*

- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): "Pengaturan Bersama";
- ISAK 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"; dan
- ISAK 34: "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

- *PSAK 66 (Improvement 2018): "Joint Arrangement";*
- *ISAK 33: "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"; and*
- *ISAK 34: "Uncertainty over Income Tax Treatments".*

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

2.d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan *kurs spot* antara Rupiah dan valuta asing pada jangka transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah ke dalam kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia, pada 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

2.d. Foreign Currency Transactions and Balance

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah amount based on the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, middle rate of Bank of Indonesia, at December 31, 2019 and 2018 as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
1 Dolar Amerika Serikat	13,901	14,481	*United States Dollar (USD) 1*

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items and on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.e. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelaporan jika orang tersebut:
   i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelaporan;
   ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelaporan; atau
   iii) Personil manajemen kunci entitas pelaporan.

   i) Entitas dan entitas pelaporan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;

2.e. Transactions and Balances with Related Parties

Related parties are people or entities related to the reporting entity:

a. Person or immediate family member who has a relationship with the reporting entity if the person:
   i) has joint control or control over the reporting entity;
   ii) has significant influence over the reporting entity; or
   iii) is a key management personnel of the reporting entity.

   i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others;

ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;
vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
viii) Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity organizes the plan itself, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
vii) A person identified in (a) (i) has a significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity);
viii) The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOEs Ministry as a shareholder's representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 31.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 31.

2.f. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan Perusahaan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

2.f. Financial Instrument

Initial recognition and measurement

The Company recognizes a financial assets or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Company measures all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Company classifies financial assets in one of the following four categories:

i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
a. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
b. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
c. Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)
Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iv) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

ii) Loans and Receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

a. those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

b. those that upon initial recognition designated as available for sale; or

c. those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

iv) *Available-for-Sale (AFS) Financial Assets*

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The company classifies financial liabilities into one of the following categories:

i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan

ii) *Other Financial Liabilities*
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at

dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

amortized cost using the effective interest method.

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Company classifies the financial instruments into classificiation that reflects the nature of information and takes into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

	Jenis Instrumen Keuangan/ ***Type of Financial Instrument***	**Klasifikasi saat Pengukuran Awal/** ***Classification during Initial Measurement***
Aset Keuangan/ *Financial Assets*	Piutang Imbal Jasa Kafalah/ *Kafalah Fee Receivables*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loan and receivables*
	Piutang Penjaminan Ulang/ *Re-guarantee receivables*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loan and receivables*
	Deposito Berjangka/ *Time Deposits*	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity*
Aset Keuangan/ *Financial Assets*	Surat Berharga Syariah Negara/ *Government Sharia Bonds*	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Hold to maturity*
	Reksadana/ *Mutual Funds*	Tersedia untuk di jual/ *Available for sale*
Liabilitas Keuangan/ *Financial Liabilities*	Utang Ta'widh/ *Ta'widh Payables*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*
	Utang Penjaminan Ulang/ *Re-guarantee Payables*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian,

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Company derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Company transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Company transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Company continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial

maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

asset, the Company continues to recognize the financial asset.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Company assesess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assesses is impaired. A financial asset or group of financial assets is impared and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occured after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;
b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;
c) It becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortization) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Reklasifikasi

Perusahaan tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Reclassification

The Company shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company as at fair value through profit or loss. The Company may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

If, as a result of a change in Company's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability
A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Company currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

a) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
b) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
c) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

a) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
b) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);
c) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hierarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.g. Kas dan Bank
Kas dan bank meliputi kas dan simpanan di bank yang bersifat jangka pendek yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

2.g. Cash and Bank
Cash and bank include cash on hand short-term deposits banks which not used as collateral and not restricted.

2.h. Investasi
Deposito Berjangka
Investasi dalam deposito berjangka disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai wajar dengan penilaiannya berdasarkan nilai nominal penempatan.

Surat Berharga Syariah Negara
Penilaiannya didasarkan pada nilai pasar pada saat tanggal pelaporan atau nilai nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia. Selisih antar nilai pasar dan harga perolehan yang belum direalisasikan akibat kenaikan /(penurunan) harga pasar disajikan sebagai komponen ekuitas. Investasi dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara diklasifikasikan sebagai yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Reksadana
Penilaian penyertaan reksadana berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat tanggal pelaporan yang bersangkutan. Sedangkan penyertaan reksadana berupa kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar. Selisih antar nilai pasar dan harga peolehan yang belum direalisasikan akibat kenaikan/(penurunan) harga pasar disajikan sebagai komponen ekuitas. Investasi dalam bentuk reksadana diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

2.h. Invesments
Time Deposits
Time deposits are presented in the financial statements on the fair value valuation was based on the face value at placement.

Government Sharia Bonds
The assessment was based on the market value at the time of reporting date or face value in terms of market price is not available. The difference between the market value and unrealized acquisition cost due to the increase/(decrease) of the market price are presented as an equity component. Investments in the form of Government Sharia Bonds are classified as hold-to-maturity.

Mutual Funds
The assessment of mutual fund investment based on Net Assets (NA) at the reporting date. Whereas the mutual fund investments with collective investment contract in units are traded on the stock exchange ownership, was based on the market price. The difference between the market price and unrealized acquisition cost due to the increase/(decrease) the market price are presented as equity an component. Investment in the form of mutual funds areclassified as securities available-for-sale.

2.i. Piutang Imbal Jasa Kafalah
Piutang atas imbal jasa kafalah (IJK) kepada perbankan atau perusahaan pembiayaan sehubungan dengan penjaminan atas falisitas pembiayaan dan/ atau kepada terjamin sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan.

2.i. Kafalah Fee Receivables
Receivables from kafalah fee to banks or finance companies in connection with guarantees of financing facilities and / or to be guaranteed in connection with insurance business activities.

2.j. Piutang Penjaminan Ulang
Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan penjamin ulang dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan penjamin ulang.

2.j. Re-guarantee Receivables
Payment of claims to the sole recipent of a guarantee that partners re-guarantee are recorded as a receivable in the settlement.

The recognition of receivables in the settlement of claims payments made every occurence in re-guarantor's responsibility.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai penjamin ulang mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan penjamin ulang), namun pembayaran belum dilakukan.

Receivables in settlement are recognized as co-guarantee receivables in the completion of when partners re-guarantee accept in settlement of the accounts (in accordance with a term of the agreement of cooperation between the Company with partners re-guarantee), but payment has not been done.

2.k. Aset Tetap

Pada pengakuan awal, aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset meliputi harga pembelian dan semua biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke kondisi kerja dan kondisi lokasi bagi tujuan penggunaannya.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akusisi tanah, biaya- biaya tersebut tidak disusutkan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

2.k. Fixed Asset

Fixed Asset are initially carried at cost. The cost of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the asset to the working condition and location for its intended use.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortised during the period of the landrights.

Depreciation is calculated on the straight line method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/ ***Years***	**Metode Penyusutan/** ***Depreciation Method***	
Bangunan dan renovasi	8-20	Garis lurus/*Straight line*	*Building and renovation*
Peralatan komputer	4	Garis lurus/*Straight line*	*Computer equipment*
Peralatan nonkomputer	4	Garis lurus/*Straight line*	*Non-computer equipment*
Kendaraan	4	Garis lurus/*Straight line*	*Vehicle*
Perabot kantor	8	Garis lurus/*Straight line*	*Office furniture*

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi di periode yang sama pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan.

Repair and maintenance expenses are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred. Expenditure which extends the useful lives of the assets or provides further economic benefits is capitalised and depreciated.

Apabila aset tetap dihentikan penggunaannya atau dijual, harga perolehan dan akumulasi depresiasi yang terkait dengan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and any resulting gains or losses are recognized in the profit or loss.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai.

When the carrying amount of fixed asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its re coverable amount, which is determined based on the higher of net selling price or value in use.

2.l. Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari peranti lunak.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

2.l. Intangible Asset

Intangible assets consist of software.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss.

Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method method based on the estimated useful lives of assets as follows:

	Tahun/ ***Years***	**Metode Penyusutan/** ***Amortisation Method***	
Peranti lunak	4	Garis lurus/*Straight line*	*Software*

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya.

Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year-end.

2.m. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.m. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortised on a straight-line basis over the expected periods of benefits.

2.n. Pendapatan Kafalah
Imbal Jasa Kafalah Bruto

Imbal jasa kafalah bruto merupakan pendapatan Imbal Jasa Kafalah (IJK). Berdasarkan Surat Edaran Ootoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit, IJK yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan basis akrual yang dialokasikan secara proporsional selama jangka waktu penjaminan.

2.n. Kafalah Income
Gross Kafalah Fees

Gross kafalah fee is Kafalah fee income. Based on the Financial Services Authority Circular Letter No. 11/SEOJK.05/ 2013 concerning the Credit Guarantee Company Monthly Reports, the IJK obtained is recognized as income on an accrual basis allocated proportionally during the guarantee period.

IJK yang Belum Merupakan Pendapatan
IJK yang belum merupakan pendapatan adalah bagian IJK yang diterima yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan, yang dihitung secara individual dari tiap penjaminan dan besarnya ditetapkan secara proporsional untuk tiap periode penjaminan yang bersangkutan.

Kenaikan atau penurunan IJK yang belum merupakan pendapatan merupakan selisih antara saldo IJK yang belum merupakan pendapatan tahun berjalan dan tahun lalu.

Unearned Kafalah Fee Revenue
Unearned kafalah fee revenue is the portion of kafalah fee received that has not been recognized as income at the report date, which is calculated individually from each guarantee and the amount is set proportionally for each guarantee period concerned.

The increase or decrease in unearned kafalah fee income is the difference between the balance of unearned kafalah fee income the current year and last year.

2.o. Beban Ta'widh
Beban ta'widh merupakan klaim atas penjaminan yang terdiri atas ta'widh disetujui, ta'widh dalam proses penyelesaian termasuk ta'widh yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian ta'widh. Beban ta'widh tersebut diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi ta'widh. Pendapatan ta'widh penjaminan ulang diakui dan dicatat sebagai pengurang beban ta'widh pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban ta'widh.

2.o. Ta'widh Expenses
Ta'widh's expense is a claim on the guarantee consisting of approved ta'widh, ta'widh in the settlement process including ta'widh incurred but not reported, and the settlement cost of ta'widh. The ta'widh expense is recognized when the obligation arises to fulfill ta'widh. The guaranteed underwriting income is recognized and recorded as a deduction from ta'widh's expenses in the same period as the recognition period for ta'widh's expenses.

Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri
Jumlah ta'widh dalam proses penyelesaian (estimasi ta'widh retensi sendiri) dihitung berdasarkan estimasi kerugian retensi sendiri dari ta'widh yang pada tanggal laporan posisi keuangan masih dalam proses penyelesaian, termasuk ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan dalam estimasi ta'widh retensi sendiri diakui dalam laba rugi di periode terjadinya perubahan. Kenaikan (penurunan) estimasi ta'widh retensi sendiri adalah selisih antara ta'widh retensi sendiri tahun berjalan dengan tahun lalu.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05.2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, lembaga penjamin wajib membentuk cadangan ta'widh paling sedikit 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri atau penjumlahan dari 100% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat ta'widh dilaporkan, dengan ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan *(incurred but not reported)*. Ta'widh yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan *(incurred but not reported)* dihitung berdasarkan rata-rata ta'widh ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 bulan terakhir.

Estimated Ta'widh Own Retention
The amount of ta'widh in the settlement process (estimated ta'widh reserves) is calculated based on the estimation of reserves losses from ta'widh which at the report date the financial position is still in the process of completion, including ta'widh incurred but not reported. Changes in the estimated ta'widh reserves are recognized in profit or loss in the period in which the changes occur. The increase (decrease) in estimated ta'widh reserves is the difference between the ta'widh reserves for the year and last year.

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.05.2017 concerning the Implementation of the Business Guarantee Institution, the guarantor institution is obliged to form a ta'widh reserve of at least 0.01% of the guaranteed underwriting value or the sum of 100% of the guarantee value borne by itself when the incurred but not reported ta'widh. Incurred but not reported ta'widh is calculated based on the average self-borne ta'widh paid in the last 3 months.

2.p. Pendapatan Investasi

1. Pendapatan investasi dari deposito berjangka dan obligasi diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bagi hasil yang berlaku.
2. Pendapatan dividen diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.
3. Keuntungan atau kerugian dari penjualan saham diakui pada saat transaksinya.

2.p. Investment Income

1. Interest income from investment in time deposits and bonds is recognized on a time proportion basis, based on principal outstanding and prevailing profit sharing rates.
2. Dividend income is recognized when the stockholders right to receive payment is established.
3. Gains or losses on sale of securities are recognized at the time of the transactions.

2.q. Beban Usaha

Beban usaha dan beban lain-lain diakui pada saat terjadinya *(accrual basis).*

2.q. Operating Expenses

Operating expenses and other expenses are recognized when incurred (accrual basis).

2.r. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, dan bonus.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“UU 13/2003”).

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

2.r. Employement Benefits Liabilities

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when the employee has rendered his services in an accounting period, at an undiscounted sum of the short-term employee benefits expected to be paid in return for the services.

Short-term employee benefits include wages, salaries, and bonuses.

Post-Employment Rewards

Post-employment benefits such as pensions, separations and gratuity pay are calculated under the Labor Code No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Company recognizes the amount of the net defined benefit obligation at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets as determined by an independent actuary using the Projected Unit Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the benefits.

The Company records not only the legal obligations under the formal terms of the defined benefit plan, but also the constructive obligations arising from the informal practices of the entity.

Current service costs, past service costs and gains or losses on settlement, and net interest on the net defined benefit obligation (asset) are recognized in profit or loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The measurement of the net defined benefit obligation (net) benefit liability consisting of actuarial gains and losses, return on plan assets and any changes in the impact of the asset limit are recognized as other comprehensive income.

2.s. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perusahaan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.s. Impairment of Non-Financial Asset

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there are indications of impaired assets. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount is determined on an individual asset, and if not possible, the Company determines the recoverable amount of the cash-generating unit of the asset.

The recoverable amount is the higher of the fair value minus the disposal cost and its life value. Value in use is the present value of the expected cash flows to be received from assets or cash generating units. The present value is calculated using the pre-tax discount rate that reflects the time value of money and the specific risk to the asset or unit whose impairment is measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than the carrying amount, then the carrying amount of the asset is reduced to a recoverable amount. The impairment is an impairment loss and is immediately recognized in profit or loss.

Impairment losses recognized in the previous period for assets other than goodwill are reversed if, and only if, there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount of the asset since the last impairment loss is recognized. If so, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. This increase represents a reversal of an impairment loss.

2.t. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing- masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

2.t. Taxation

The tax expense consists of current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi.

The current income tax expense is calculated based on the tax regulation applicable on the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation.

Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak. Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities. Deferred income tax is recognized, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final diakui sebagai perbedaan tetap dalam perhitungan pajak penghasilan dan tidak ada aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui.

Income subject to final income tax is recognized as permanent difference in the corporate income tax calculation and there is no deferred tax asset or liability is recognized.

2.u. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

2.u. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisi dikaji pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dicadangkan.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabiltias. Kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan, ketika pendiskontoan digunakan.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

2.v. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

2.v. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

3. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

3. Critical Accounting Estimates and Judgements

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh standar akuntansi keuangan adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with financial accounting standard are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Estimasi ta'widh retensi sendiri

Estimasi ta'widh retensi sendiri merupakan pembentukan cadangan teknis yang digunakan untuk mencatat estimasi retensi sendiri atas kemungkinan ta'widh yang berpotensi menjadi beban di masa mendatang berdasarkan estimasi wajar. Pembentukan estimasi ta'widh retensi sendiri dilakukan dengan melakukan estimasi atas ta'widh yang sudah diajukan namun masih dalam proses penyelesaian dan ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.

Nilai tercatat estimasi ta'widh retensi sendiri Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan diungkapkan di dalam Catatan 12 di dalam laporan keuangan.

b. Estimasi IJK yang belum merupakan pendapatan

Perhitungan IJK yang belum merupakan pendapatan terkait dan disesuaikan dengan IJK yang telah diakui sebagai pendapatan. Masa pengakuan pendapatan IJK adalah lama masa proteksi ditambah 1 (satu) tahun untuk masa hak pengajuan ganti rugi. Pengakuan pendapatan atas IJK tersebut dilakukan sesuai dengan proporsi risiko atau proporsi jangka waktu proteksi yang diberikan.

Bagian IJK yang sudah diterima namun belum dapat diakui sebagai pendapatan karena pertimbangan tersebut, diakui sebagai pendapatan IJK yang belum merupakan pendapatan dan dicatat di kelompok liabilitas.

Estimasi IJK yang belum merupakan pendapatan dihitung berdasarkan berdasarkan:

20%* IJK Neto

IJK Neto = IJK Gross (Ujroh) – Ujroh< 1 Tahun – Reasuransi – Biaya Akusisi

Nilai tercatat estimasi IJK yang belum merupakan pendapatan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan diungkapkan di dalam Catatan 13 di dalam laporan keuangan.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Estimated ta'widh reserves

The estimated ta'widh reserves is the formation of a technical reserve that is used to record the estimated reserves of the possibility of ta'widh which has potential to become a future expense based on a reasonable estimate. The estimation of ta'widh reserves is done by estimating ta'widh which has been submitted but is still in the process of completion and ta'widh incurred but not reported.

The carrying amount of the Company's estimated ta'widh reserves at the statement of financial position date is disclosed in Note 12 to the financial statements.

b. Unearned estimated kafalah fee

The unearned kafalah fee calculation is adjusted to kafalah fee which has been recognized as income. The period of revenue recognition for kafalah fee is the duration of the protection period plus 1 (one) year for the period of the right to apply for compensation. The revenue recognition for kafalah fee is carried out in accordance with the proportion of risk or the proportion of the protection period given.

The kafalah fee portion that has been received but cannot be recognized as income because of this consideration is recognized as unearned kafalah fee income and recorded in the liability group.

Unearned estimated kafalah fee is calculated based on:

20%* Kafalah fee Nett

Kafalah Fee Nett = Kafalah Fee Gross– Kafalah Fee < 1 Year – Reinsurance – Acquisition Cost

The carrying amount of the Company's estimated unearned kafalah fee at the statement of financial position date is disclosed in Note 13 to the financial statements.

c. Liabilitas imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria (Catatan 20). Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkanatas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

c. Post-employment benefits liabilities

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions (Note 20). The assumptions used in determining the net cost for post-employments include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

The expected return on plan assets assumption is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term investment returns.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty*. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian piutang IJK ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan analisa umur piutang per sertifikat. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk

d. Allowance for impairment losses on financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses on financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed allowances of impairment losses of kafalah fee receivable, when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers analysis of aging receivable per certificate. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these

cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

estimated future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

e. Penurunan nilai aset yang bukan merupakan aset keuangan
Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, Perusahaan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
i. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
ii. telah atau akan terjadi perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
iii. terdapat bukti bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau lebih buruk dari yang diharapkan;
iv. aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.

e. Impairment of assets value of nonfinancial assets
In identifying whether or not there is an impairment over asset, the Company considers the following matters:
i. there is evidence of obsolescence or physical damage to assets;
ii. has or will occur detrimental to significant changes with respect to how the assets used;
iii. there is evidence that the economic performance of the asset does not meet expectations or worse than expected;
iv. actual cash flow is materially smaller than the estimated cash flow, before discount taken into account.

f. Nilai wajar dari instrumen keuangan
Jika nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat dalam neraca tidak dapat diperoleh dari pasar aktif, nilai wajar ditentukan dari beberapa teknik penilaian termasuk model matematika, seperti teknik penilaian analisa arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

f. Fair value of financial instruments
Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the balance sheet cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques, including mathematical models, such as discounted future cash flows analysis by using prevailing market rate.

g. Aset pajak tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan *(recoverable)* pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

g. Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

4. Kas dan Bank / *4. Cash on Hand and in Banks*

	2019 Rp	2018 Rp
Kas/*Cash on hand*		
Rupiah	117,360,586	90,954,233
Bank/ *Cash in Banks*		
Rupiah		
Pihak berelasi/*Related parties* (Catatan/*Note* 31)	**6,846,855,470**	**4,648,207,578**
Pihak ketiga/*Third parties*		
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	6,436,222,610	2,288,450,870
PT CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	3,058,835,229	3,022,291,611
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	2,336,308,536	2,420,038,148
PT BPD Jawa Tengah - Unit Syariah	1,463,968,629	387,749,520
PT Bank Jabar Banten Syariah	1,114,348,346	448,459,659
PT Bank Syariah Bukopin	655,563,100	1,076,158,305
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Unit Syariah	648,830,464	569,353,306
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) - Unit Syariah	494,858,058	208,122,909
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat - Unit Syariah	306,295,450	89,798,859
PT BPD Jawa Timur Tbk - Unit Syariah	178,149,525	20,152,348
PT Bank Aceh Syariah	168,721,592	--
PT BPD Kalimantan Selatan - Unit Syariah	75,876,330	24,203,237
PT BPRS Dinar Ashri	44,928,289	43,255,209
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta-Unit Syariah	39,631,690	--
PT BPD Sumatera Utara - Unit Syariah	29,182,760	28,924,696
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	19,392,632	19,993,925
PT Bank Mega Syariah	11,817,182	3,812,076
PT Bank Victoria Syariah	4,953,696	57,187,163
Sub Jumlah/*Sub Total*	**23,934,739,588**	**15,356,159,419**
Dolar Amerika Serikat/*US Dollar*		
Pihak berelasi/*Related party* (Catatan/Note 31)	**260,354,321**	**264,643,750**
Jumlah/*Total*	**24,312,454,495**	**15,711,757,402**

Ekuivalen tingkat bunga dari nisbah yang diperoleh dari Bank adalah sebesar 0,69% dan 1,26% pada tahun 2019 dan 2018.

The equivalents interest rate from profit sharing obtained from Bank are 0.69% and 1.26% in 2019 and 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat kas dan bank Perusahaan yang dibatasi penggunaannya.

As of December 31, 2019 and 2018, there were no cash and bank the Company which were restricted in use.

5. Piutang Imbal Jasa Kafalah / *5. Kafalah Fee Receivables*

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak berelasi/*Related parties* (Catatan/*Note* 31)	**18,608,284,110**	**5,382,064,246**
Pihak ketiga/*Third parties*		
PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	1,010,232,424	1,180,332,858

	2019 Rp	2018 Rp
PT BPD Jawa Timur Tbk - Unit Syariah	241,572,531	--
PT Bank Syariah Bukopin	161,399,420	--
PT Bank Aceh Syariah	149,317,252	--
PT Bank Jabar Banten Syariah	147,108,859	246,439,521
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	124,575,000	--
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Syariah	--	247,025,128
PT Bahana Artha Ventura	--	243,200,000
Lain-lain (dibawah 100 juta)/*Others (below 100 million)*	507,829,919	355,766,928
Sub Jumlah/*Sub Total*	**2,342,035,405**	**2,272,764,435**
Jumlah/*Total*	**20,950,319,515**	**7,654,828,681**
Dikurangi/*Less:*		
Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(2,654,392,643)	(903,972,817)
Jumlah - Bersih/*Total - Net*	**18,295,926,872**	**6,750,855,864**

Berdasarkan jadwal umur piutang:

Based on receivable aging schedule:

	2019 Rp	2018 Rp	
0-90 hari	15,060,634,911	7,654,828,681	*0-90 days*
91-180 hari	710,961,825	--	*91-180 days*
181-270 hari	311,173,540	--	*181-270 days*
271-365 hari	702,480,891	--	*271-365 days*
>365 hari	4,165,068,348	--	*>365 days*
Jumlah	**20,950,319,515**	**7,654,828,681**	***Total***
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,654,392,643)	(903,972,817)	*Less: Allowance for Impairment losses*
Jumlah	**18,295,926,872**	**6,750,855,864**	***Total***

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang IJK pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Based on management's evaluation of the collectibility of the balances of each kafalah fee receivables as of December 31, 2019 and 2018, management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from the uncollectible accounts.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Allowance for Impairment Losses

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo awal	903,972,817	903,972,817	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 30)	1,750,419,826	--	*Provision during the current year (Note 30)*
Jumlah	**2,654,392,643**	**903,972,817**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

Management believes that there is no significant concentrated risk of receivables from third parties.

6. Piutang Penjaminan Ulang / *6. Re-Guarantee Receivables*

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak berelasi/*Related parties* (Catatan/*Note* 31)	**23,061,558,013**	**7,670,543,957**
Pihak ketiga/*Third parties*		
PT Avrist Assurance	--	318,182,845
Sub Jumlah/*Sub Total*	**--**	**318,182,845**
Jumlah/*Total*	**23,061,558,013**	**7,988,726,802**

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang IJK pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, piutang penjaminan ulang berumur 1-60 hari, sehingga manajemen berpendapat bahwa tidak perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjaminan ulang.

Based on management's evaluation of the collectibility of the balances of each kafalah fee receivables as of December 31, 2019 and 2018, re-guarantee receivables are aged 1-60 days, thus management believes that there is no need to establish an allowance for impairment losses on re-guarantee receivables.

7. Piutang Hasil Investasi / *7. Investment Income Receivables*

	2019 Rp	2018 Rp	
Surat berharga negara syariah	1,209,637,404	--	*Government sharia bonds*
Deposito berjangka	399,491,493	381,286,784	*Time deposits*
Jumlah	**1,609,128,897**	**381,286,784**	***Total***

8. Investasi / *8. Investments*

Investasi terdiri dari: / *Investment consist of:*

	2019 Rp	2018 Rp	
Deposito berjangka	436,450,000,000	279,051,439,088	*Time deposits*
Surat berharga negara syariah	65,205,312,842	--	*Government sharia bond*
Reksadana	25,606,394,884	70,796,670,934	*Mutual fund*
Jumlah	**527,261,707,726**	**349,848,110,022**	***Total***

a. Deposito berjangka / ***a. Time deposits***

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak berelasi/*Related parties* (Catatan/*Note* 31)	**334,950,000,000**	**189,901,439,088**
Pihak ketiga/*Third parties*		
PT BPD Nusa Tenggara Barat - Unit Syariah	30,000,000,000	17,200,000,000
PT Bank Syariah Bukopin	20,000,000,000	17,000,000,000
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk	9,500,000,000	--
PT Bank Jabar Banten Syariah	7,000,000,000	1,750,000,000
PT BPD Jawa Tengah - Unit Syariah	6,500,000,000	6,500,000,000
PT Bank Aceh Syariah	6,000,000,000	--
PT BPRS Harta Insan Karimah	6,000,000,000	--
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5,000,000,000	--
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Unit Syariah	5,000,000,000	5,000,000,000
PT BPD Jawa Timur Tbk- Unit Syariah	4,000,000,000	4,000,000,000
PT BPD Kalimantan Selatan - Unit Syariah	1,000,000,000	1,000,000,000
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) - Unit Syariah	1,000,000,000	1,000,000,000
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta - Unit Syariah	500,000,000	500,000,000
PT BPD Kalimantan Barat - Unit Syariah	--	1,000,000,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Syariah	--	24,200,000,000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	--	6,000,000,000
PT Bank Victoria Syariah	--	4,000,000,000
Sub Jumlah/*Sub Total*	**101,500,000,000**	**89,150,000,000**
Jumlah/*Total*	**436,450,000,000**	**279,051,439,088**

Berdasarkan perjanjian sejak penempatan awal / *Based on agreement since initial placement*

	2019 Rp	2018 Rp	
1 Bulan	161,650,000,000	19,700,000,000	*1 Month*
3 Bulan	48,600,000,000	18,750,000,000	*3 Months*
6 Bulan	226,200,000,000	240,601,439,088	*6 Months*
Jumlah	**436,450,000,000**	**279,051,439,088**	***Total***

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *Based on the remaining maturity*

	2019 Rp	2018 Rp	
1 Bulan	419,450,000,000	261,051,439,088	*1 Month*
3 Bulan	5,000,000,000	15,000,000,000	*3 Months*
6 Bulan	12,000,000,000	3,000,000,000	*6 Months*
Jumlah	**436,450,000,000**	**279,051,439,088**	***Total***

Ekuivalen tingkat bunga dari nisbah yang diperoleh dari deposito berjangka adalah sebesar 4 -7,5% pada tahun 2019 dan 2018.

The equivalents interest rate from profit sharing obtained from time deposits are 4 - 7.5% in 2019 and 2018.

b. Surat berharga syariah negara / ***b. Government sharia bonds***

Surat Berharga Syariah Negara/ *Government Sharia Bonds*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	2019 Tingkat Bagi Hasil/*Profit Rate* (%)	Peringkat/ *Rating*	Nilai Nominal/ *Par Value* Rp	Nilai Perolehan/ *Acquisition Cost* Rp	Nilai Tercatat/ *Carrying Value* Rp
SBSN SERI PBS012	15/11/2031	8.875	*Gov*	28,500,000,000	30,582,205,440	30,451,280,248
SBSN SERI PBS006	15/09/2020	8.250	*Gov*	19,000,000,000	19,429,287,200	19,218,909,900
SBSN SERI PBS019	15/09/2023	8.250	*Gov*	3,051,000,000	3,340,915,173	3,308,914,024
SBSN SERI PBS016	15/03/2020	6.250	*Gov*	1,475,000,000	1,516,723,325	1,488,785,240
SBSN SERI PBS011	15/08/2023	8.750	*Gov*	10,000,000,000	10,791,490,000	10,737,423,430
Jumlah/*Total*				**62,026,000,000**	**65,660,621,138**	**65,205,312,842**

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan mengategorikan kepemilikan atas SBSN sebagai kategori dimiliki hingga jatuh tempo.

As of December 31, 2019, the Company categorizes ownership of Government Sharia Bonds as hold to maturity.

c. Reksadana / ***c. Mutual fund***

	2019 Jumlah unit/ *Number of units*	Biaya perolehan/ *Acquisition cost*	Keuntungan yang belum direalisasi/ *Unrealized gain*	Nilai wajar/ *Fair value*
Pihak berelasi/*Related parties* (Catatan/*Note* 31)				
Reksadana Syariah				
PNM Sukuk Negara Syariah	10,079,840	10,066,968,367	601,646,517	10,668,614,884
Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas				
PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III	10,000,000	10,000,000,000	11,580,000	10,011,580,000
Pihak ketiga/*Third Party*				
Reksadana Avrist Proteksi				
Sukuk Berkah Syariah 3	5,000,000	5,000,000,000	(73,800,000)	4,926,200,000
Jumlah/*Total*	**25,079,840**	**25,066,968,367**	**539,426,517**	**25,606,394,884**

	2018 Jumlah unit/ *Number of units*	Biaya perolehan/ *Acquisition cost*	Keuntungan yang belum direalisasi/ *Unrealized gain*	Nilai wajar/ *Fair value*
Pihak berelasi/*Related parties* (Catatan/*Note* 31)				
Reksadana Syariah				
Terproteksi PNM Investa 19	50,000,000	50,000,000,000	472,505,000	50,472,505,000
Reksadana Syariah				
PNM Sukuk Negara Syariah	10,079,840	10,066,968,367	223,786,567	10,290,754,934
RDST PNM Investa 12	10,000,000	10,000,000,000	33,411,000	10,033,411,000
Jumlah/*Total*	**70,079,840**	**70,066,968,367**	**729,702,567**	**70,796,670,934**

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan mengategorikan kepemilikan atas reksadana sebagai tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company categorizes ownership of mutual fund as available for sale.

Reksadana berdasarkan penerbit:

Mutual fund based on issuer:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/Related Party (Catatan/*Note* 13)		
PT PNM Investment Management	20,680,194,884	70,796,670,934
Pihak Ketiga/*Third Party*		
PT Avrist Asset Management	4,926,200,000	--
Jumlah/*Total*	**25,606,394,884**	**70,796,670,934**

Mutasi keuntungan (kerugian) reksadana yang tersedia untuk dijual yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

Movements of unrealized gain (losses) of available-for-sale mutual funds are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo awal	729,702,567	84,943,616	*Beginning balance*
Realisasi atas keuntungan (kerugian) penjualan	(505,916,000)	164,989,697	*Realized gain (loss) on sale*
Perubahan nilai wajar	315,639,950	479,769,254	*Change in fair value*
Jumlah	**539,426,517**	**729,702,567**	***Total***

Nilai wajar reksadana diperoleh dari harga kuotasi pasar aktif atas reksadana tersebut.

Fair value of mutual funds was obtained from quoted price in active market for these mutual funds.

Underlying reksadana yang dimiliki oleh Perusahaan adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk.

The underlying Company mutual funds are Government sharia bond and Sukuk.

9. Biaya Dibayar Di Muka / *9. Prepaid Expenses*

	2019 Rp	2018 Rp	
Sewa	4,021,402,849	2,238,031,030	*Rent*
Asuransi	2,576,772,301	1,096,959,250	*Insurance*
Uang muka kerja	194,929,300	331,489,500	*Work advances*
Jumlah	**6,793,104,450**	**3,666,479,780**	***Total***

10. Aset Tetap / *10. Fixed Assets*

	2018 Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	2019 Rp	
Biaya Perolehan:					***Acquisition cost:***
Tanah	4,150,998,529	--	--	4,150,998,529	*Land*
Bangunan dan renovasi	5,262,078,516	628,774,948	--	5,890,853,464	*Buildings and renovation*
Peralatan komputer	6,394,634,428	2,703,667,343	--	9,098,301,771	*Computer equipment*
Peralatan nonkomputer	872,810,335	48,937,800	--	921,748,135	*Non-Computer equipment*
Kendaraan	--	871,200,000	--	871,200,000	*Vehicle*
Perabot kantor	2,359,223,610	294,502,938	--	2,653,726,548	*Office furniture*
Jumlah	19,039,745,418	4,547,083,029	--	23,586,828,447	***Total***

	2018 Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	2019 Rp	
Akumulasi Penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Bangunan dan renovasi	1,207,739,924	585,855,798	--	1,793,595,722	*Buildings and renovation*
Peralatan komputer	5,048,355,427	841,725,970	--	5,890,081,397	*Computer equipment*
Peralatan nonkomputer	610,778,123	116,123,960	--	726,902,083	*Non-Computer equipment*
Kendaraan	--	18,150,000	--	18,150,000	*Vehicle*
Perabot kantor	858,237,307	317,224,476	--	1,175,461,783	*Office furniture*
Jumlah	7,725,110,781	1,879,080,204	--	9,604,190,985	***Total***
Nilai Buku	**11,314,634,637**			**13,982,637,462**	***Book value***

	2017 Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	2018 Rp	
Biaya Perolehan:					***Acquisition cost:***
Tanah	4,150,998,529	--	--	4,150,998,529	*Land*
Bangunan dan renovasi	3,445,051,288	1,817,027,228	--	5,262,078,516	*Buildings and renovation*
Peralatan komputer	6,140,385,428	254,249,000	--	6,394,634,428	*Computer equipment*
Peralatan nonkomputer	688,279,335	184,531,000	--	872,810,335	*Non-Computer equipment*
Perabot kantor	2,050,210,435	309,013,175	--	2,359,223,610	*Office furniture*
Jumlah	16,474,925,015	2,564,820,403	--	19,039,745,418	***Total***
Akumulasi Penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Bangunan dan renovasi	795,475,285	412,264,639	--	1,207,739,924	*Buildings and renovation*
Peralatan komputer	4,299,392,731	748,962,696	--	5,048,355,427	*Computer equipment*
Peralatan nonkomputer	508,846,655	101,931,468	--	610,778,123	*Non-Computer equipment*
Perabot kantor	582,231,383	276,005,924	--	858,237,307	*Office furniture*
Jumlah	6,185,946,054	1,539,164,727	--	7,725,110,781	***Total***
Nilai Buku	**10,288,978,961**			**11,314,634,637**	***Book value***

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban usaha masing-masing adalah sebesar Rp1.879.080.204 dan Rp1.539.164.727 pada tahun 2019 dan 2018 (Catatan 29).

The amount of depreciation charged to operating expense amounted to Rp1,879,080,204 and Rp1,539,164,727 for the year 2019 and 2018 (Note 29).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Management believes that there is no impairment in value of the assets as of December 31, 2019 and 2018.

Perusahaan memiliki sebidang tanah yang terletak di Medan, Sumatera Utara dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat diperbarui dan berjangka waktu dua puluh (20) tahun yang akan jatuh tempo tahun 2037. Berdasarkan data tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa HGB akan dapat diperpanjang pada akhir periode HGB, karena masing-masing tanah diperoleh secara legal dan didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai.

The Company has a plot of land located in Medan, North Sumatra with legal rights in the form of renewable Building Rights for twenty (20) years that will mature in 2037. Based on these data, management believes that the Building Rights will be renewable at the end of the Building Rights period, because each land is obtained legally and is supported by sufficient evidence of ownership.

Aset tetap Perusahaan berupa bangunan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, pihak ketiga, terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp12.181.533.509 di tahun 2019 dan Rp829.810.000 di tahun 2018. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

The Company's fixed assets such as building have been insured with PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, a third party, against the risk of fire, theft and other risks with a total coverage amounting to Rp12,18,533,509 in 2019 and Rp829,810,000 in 2018. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the insured assets.

11. Aset Tidak Berwujud / *11. Intangible Assets*

	2019 Rp	2018 Rp	
Perangkat lunak	5,281,744,778	4,665,734,847	*Software*
Amortisasi perangkat lunak	(3,949,752,205)	(2,817,089,375)	*Software - amortization*
Jumlah	**1,331,992,573**	**1,848,645,472**	***Total***

Beban amortisasi perangkat lunak yang dibebankan pada beban usaha masing-masing adalah sebesar Rp1.132.662.830 dan Rp1.003.895.299 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 29).

The amortization of software expenses charged to operating expense amounted Rp1,132,662,830 and Rp1,003,895,299 for the year ended December 31, 2019 and 2018 respectively (Note 29).

12. Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri / *12. Estimated Ta'widh Reserved*

Estimasi ta'widh retensi sendiri masing-masing sebesar Rp24.905.276.157 dan Rp18.519.750.447 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Estimated ta'widh reserved amounting to Rp24,905,276,157 and Rp18,519,750,447 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

Dalam estimasi ta'widh retensi sendiri termasuk estimasi atas ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR) masing-masing sebesar Rp4.655.369.199 dan Rp4.999.390.350 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

The estimated ta'widh reserves includes estimates of ta'widh that incurred but not reported (IBNR) amounting to Rp4,655,369,199 and Rp 4,999,390,350 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

13. Estimasi IJK Yang Belum Merupakan Pendapatan / *13. Estimated Unearned Kafalah fee Income*

Estimasi IJK yang belum merupakan pendapatan masing-masing sebesar Rp37.494.713.246 dan Rp22.125.368.273 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Estimated unearned kafalah fee income that have not yet amounted to Rp37,494,713,246 and Rp22,125,368,273 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

14. Utang Ta'widh / *14. Ta'widh Payables*

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak berelasi/*Related parties* (Catatan/*Note* 31)	**6,694,632,463**	**1,727,174,278**
Pihak ketiga/*Third parties*		
Koperasi PP - Bank Bumi Daya - Budayatama	43,893,409	--
PT BPD Sumatera Barat - Unit Syariah	35,340,257	6,408,083
PT BPD Nusa Tenggara Barat - Unit Syariah	22,256,782	--
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Unit Syariah	13,222,924	--
Sub Jumlah/*Sub Total*	**114,713,372**	**6,408,083**
Jumlah/*Total*	**6,809,345,835**	**1,733,582,361**

15. Utang Penjaminan Ulang / *15. Re - Guarantee Payables*

a. Berdasarkan reasuradur / *a. Based on reinsurance*

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak berelasi/*Related parties* (Catatan/*Note* 31)	**11,674,206,789**	**11,883,060,935**
Pihak ketiga/*Third parties*		
PT Asuransi Tri Pakarta	29,784,592	--
PT Avrist Assurance	--	69,350,659
PT Asuransi Staco Mandiri	--	25,528,622
PT Chubb Life Insurance Indonesia	--	11,482,525
Sub Jumlah/*Sub Total*	**29,784,592**	**106,361,806**
Jumlah/*Total*	**11,703,991,381**	**11,989,422,741**

b. Berdasarkan umur (hari) / *b. Based on age (days)*

	2019 Rp	2018 Rp	
1-60 hari	9,331,062,147	5,482,290,713	*1-60 days*
Lebih dari 60 hari	2,372,929,234	6,507,132,028	*More than 60 days*
Jumlah	**11,703,991,381**	**11,989,422,741**	***Total***

16. Pendapatan IJK Diterima Di Muka / *16. Kafalah fee Income in Advance*

Pendapatan IJK diterima di muka masing-masing sebesar Rp10.503.496.559 dan Rp8.253.338.901 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Kafalah fee income received in advance amounted to Rp10,503,496,559 and Rp8,253,338,901 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

17. Utang Zakat / *17. Zakah Payables*

Utang zakat masing-masing sebesar Rp2.392.108.130 dan Rp962.416.208 pada 31 Desember 2019 dan 2018. Akun ini merupakan akumulasi dana zakat yang belum disalurkan.

Zakah payables amounted to Rp2,392,108,130 and Rp962,416,208 as of December 31, 2019 and 2018, respectively. This account is an accumulation of zakat funds that have not been distributed.

18. Perpajakan / *18. Taxation*

a. Beban pajak penghasilan / *a. Income tax expenses*

	2019 Rp	2018 Rp	
Kini	(16,652,506,500)	(9,571,834,250)	*Current*
Tangguhan	2,094,346,974	1,495,851,478	*Deferred*
Jumlah	**(14,558,159,526)**	**(8,075,982,772)**	***Total***

b. Utang pajak / ***b. Taxes payable***

	2019 Rp	2018 Rp	
Pajak penghasilan pasal 21	46,524,807	174,270,772	*Income tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 23	45,553,307	46,826,289	*Income tax article 23*
Pajak pasal 4 ayat 2	105,385,000	5,200,000	*Tax article 4 sub article 2*
Pajak penghasilan 25	1,812,775,895	355,197,938	*Income tax article 25*
Pajak penghasilan badan 29	6,377,817,918	5,330,014,052	*Corporate income tax article 29*
Jumlah	**8,388,056,927**	**5,911,509,051**	***Total***

c. Pajak penghasilan kini
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba menurut pajak adalah sebagai berikut:

c. Current tax
The reconsiliation between profit before tax per of profit or loss and company's taxable income statement are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba sebelum pajak	**52,430,586,953**	**22,729,066,672**	***Income before tax***
Koreksi Fiskal			***Fiscal adjustments***
Perbedaan waktu:			***Timing Differences:***
Ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan	4,655,369,199	4,999,390,350	*Incurred but not reported of Ta'widh*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang imbal jasa kafalah	1,750,419,826	--	*Allowance for Impairment losses kafalah fee receivabels*
Imbalan pascakerja	1,971,598,868	984,015,565	*Long-term employee benefit*
Sub Jumlah	**8,377,387,893**	**5,983,405,915**	***Sub Total***
Perbedaan tetap:			***Permanent differences:***
Cadangan IJK	15,369,344,973	5,314,627,392	*Kafalah fee reserves*
Pph Pasal 28a	--	3,962,957,690	*Income tax article 28a*
Entertainment dan representasi	660,205,432	4,494,790,447	*Entertainment and representation*
Beban kendaraan dinas	673,200,000	2,046,125,598	*Office vehicle expenses*
Tunjangan PPh Pasal 21	3,673,417,791	2,426,177,658	*Income tax article 21 allowance*
Beban pengobatan dan rumah sakit	1,829,255,151	1,173,505,563	*Medical and hospital expenses*
Beban perjalanan dinas	785,666,240	756,874,812	*Office travel expenses*
Beban olahraga dan rekreasi	263,605,406	659,697,719	*Sport and recreational expenses*
Beban zakat pegawai	553,238,448	550,523,834	*Employee zakah expenses*
Beban perumahan	409,566,777	420,612,501	*Housing expenses*
Iuran keanggotaan	204,065,709	278,709,986	*Membership fee*
Sumbangan pegawai	95,607,500	87,103,657	*Employee donations*
Beban listrik, air dan gas	165,000,000	58,289,758	*Electricity, water, and gas expenses*
Sanksi administrasi	1,147,689,644	--	*Adminitrative pinalty*

	2019 Rp	2018 Rp	
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(20,027,811,231)	(12,655,131,361)	*Income subjected to final tax*
Sub Jumlah	**5,802,051,840**	**9,574,865,254**	***Sub Total***
Laba kena pajak	**66,610,026,000**	**38,287,337,841**	***Taxable income***
Beban pajak kini	16,652,506,500	9,571,834,250	*Current tax expenses*
Dikurangi:			*Less:*
Uang Muka PPh Pasal 25	(10,274,688,582)	(4,241,820,198)	*Prepaid taxes - Income tax article 25*
Estimasi Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan	**6,377,817,918**	**5,330,014,052**	***Estimation of Under Payment of Corporate Tax***

d. Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

d. Deferred tax

Deferred tax is calculated based on the tax effect of temporary differences between the tax bases for assets and liabilities and their carrying amount for financial reporting purpose.

The details of the Company's deferred tax assets are as follows:

	2018 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke Laporan laba rugi/ *Credited to (charged to) profit or loss* Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke Ekuitas/ *Credited to Other Comprehensive Income* Rp	Penyesuaian *Adjustment* Rp	2019 Rp	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang imbal jasa kafalah	--	437,604,957	--	225,993,204	663,598,161	*Allowance for Impairment losses ujrah kafalah fee receivables*
Ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan	2,759,774,887	1,163,842,300	--	--	3,923,617,187	*Incurred but not reported of Ta'widh*
Imbalan pascakerja	761,186,058	492,899,717	509,175,901	(496,799,608)	1,266,462,068	*Post-employment benefit*
Jumlah	**3,520,960,945**	**2,094,346,974**	**509,175,901**	**(270,806,404)**	**5,853,677,416**	***Total***

	2017 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke Laporan laba rugi/ *Credited to (charged to) profit or loss* Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke Ekuitas/ *Credited to Other Comprehensive Income* Rp	2018 Rp	
Ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan	1,509,927,299	1,249,847,588	--	2,759,774,887	*Incurred but not reported of Ta'widh*
Imbalan pascakerja	570,585,151	246,003,890	(55,402,983)	761,186,058	*Post-employment benefit*
Jumlah	**2,080,512,450**	**1,495,851,478**	**(55,402,983)**	**3,520,960,945**	***Total***

19. Biaya Akrual / *19. Accrued Expenses*

	2019 Rp	2018 Rp	
Pegawai	4,686,016,851	1,628,963,489	*Employee*
Jasa profesional	86,640,000	72,000,000	*Professional fee*
Sewa kendaraan	--	909,600,000	*Vehicle rent*
Lain-lain	457,732,355	236,308,978	*Others*
Jumlah	**5,230,389,206**	**2,846,872,467**	***Total***

20. Liabilitas Imbalan Pascakerja / *20. Post-employment Benefits Liabilities*

Pada tanggal 25 Maret 2003, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 untuk mengganti Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000. Perusahaan telah membuat cadangan pensiun karyawan sesuai dengan Undang-Undang tersebut, yang dihitung oleh aktuaris independent PT Prima Aktuaria dengan laporannya No. 054/PBL/KE/I/2020 tanggal 08 Januari 2020. Metode perhitungan aktuaria yang digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini adalah "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi dasar sebagai berikut:

On March 25, 2003, Government issued Labour Act No.13/2003 to replace Minister of Labour Decision Letters No. Kep-150/Men/2000. The company has formed post-employment reserves in accordance to the act, which was calculated by Independent Actuary PT Prima Aktuaria on its report No. 054/PBL/KE/I/2020 dated January 08, 2020. Actuarial calculation method used to determine present value of post-employment benefits liabilities and present service expense are "Projected Unit Credit", by using the following assumptions:

	2019	2018	
Tingkat bunga	7.79%	8.66%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	10%	10%	*Future salary increment rate*
Usia pensiun normal	56 Tahun/Years	56 Tahun/*Years*	*Normal retirement age*
Table mortalitas	TMI-III - 2011	TMI-III - 2011	*Mortality table*
Tingkat kecacatan	5% di usia/ *in age* 0-39	5% di usia/ *in age* 0-39	*Level of disability*
Tingkat pengunduran diri	Tahun menurun secara proporsional hingga 0% di usia > 50 tahun/ *Year down proportionally up to% at age> 50 years*	Tahun menurun secara proporsional hingga 0% di usia > 50 tahun/ *Year down proportionally up to% at age> 50 years*	*Rate of resignation*

Rincian beban liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of the post-employment benefit expense recognized in the statements of profit or loss are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya jasa kini	1,866,587,464	1,007,569,326	*Current service cost*
Biaya bunga	105,011,404	76,486,142	*Interest cost*
Beban liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan laba rugi	1,971,598,868	1,084,055,468	*Post-employment benefits expense recognized in the statement of profit or loss*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja			*Remeasurement of liabilities post employee benefits liabilities*
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:			*Actuarial gains (losses) arising from:*
Perubahan asumsi keuangan	615,306,790	(395,553,560)	*Changes in financial assumptions*
Penyesuaian pengalaman	1,172,899,836	82,152,814	*Adjustment of experience*
Lain-lain	248,496,977	91,788,815	*Others*
(Penghasilan) beban liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain	2,036,703,603	(221,611,931)	*Post-employment benefits (income) expense recognized in other comprehensive income*
Jumlah	**4,008,302,471**	**862,443,537**	***Total***

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements of the post-employment benefit recognized in the statement of financial position are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo awal	2,206,202,034	2,282,340,604	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja jangka panjang tahun berjalan	1,971,598,868	1,084,055,468	*Long-term employee benefits expense during the year*
(Penghasilan) beban komprehensif lain	2,036,703,603	(221,611,931)	Other comprehensive *(income) expense*
Kontribusi Perusahaan	(1,987,198,431)	(938,582,107)	*Company's contribution*
Saldo akhir tahun	**4,227,306,074**	**2,206,202,034**	***Ending balance***

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo awal	1,700,854,283	864,358,276	*Beginning balance*
Pendapatan bunga dari aset program	232,608,890	89,742,618	*Interest income from plan assets*
Iuran dari perusahaan	1,987,198,431	938,582,107	*Contributions from the company*
Pembayaran imbalan pascakerja	(8,438,602)	(100,039,903)	*Payment of post-retirement benefits*
Keuntungan/ (kerugian) aktuaria	(248,496,977)	(91,788,815)	*Actuarial gain/ (losses)*
Saldo akhir	**3,663,726,025**	**1,700,854,283**	***Ending balance***

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	2019		
	1% Kenaikan/ *Increase*	**1% Penurunan/ *Decrease***	
Tingkat diskonto	7.79%	7.79%	*Discount rate*
Dampak kewajiban manfaat pasti bersih	6,948,268,481	9,021,826,805	*Impact on the net defined benefits obligations*
Tingkat kenaikan gaji	10%	10%	*Salary increment rate*
Dampak kewajiban manfaat pasti bersih	8,981,688,551	6,961,669,842	*Impact on the net defined benefits obligations*

	2018		
	1% Kenaikan/ *Increase*	**1% Penurunan/ *Decrease***	
Tingkat diskonto	8.66%	8.66%	*Discount rate*
Dampak kewajiban manfaat pasti bersih	3,496,591,788	4,394,759,926	*Impact on the net defined benefits obligations*
Tingkat kenaikan gaji	10,00%	10,00%	*Salary increment rate*
Dampak kewajiban manfaat pasti bersih	3,907,056,317	3,499,581,769	*Impact on the net defined benefits obligations*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajian imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analyses are based on a change in assumption while all other assumptions are held constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the post-employment liability recognized within the statement of financial position.

21. Modal Saham / *21. Share capital*

Jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Capital issued and fully paid as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019 dan/and 2018		
Pemegang Saham/*Stockholders*	**Jumlah Saham/ *Number of Share***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)**	**Jumlah/*Total* Rp**
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	249,999	99.9996	249,999,000,000
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	0.0004	1,000,000
Jumlah/*Total*	**250,000**	**100.0000**	**250,000,000,000**

Pada tahun 2019, terdapat penambahan modal disetor sebesar Rp150.000.000.000 sebagaimana tertuang dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) No.34 tanggal 20 Januari 2020 yang aktanya dibuat oleh Hadijah, S.H., notaris di Jakarta. Penambahan modal tersebut belum dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta. Jumlah modal saham yang dimiliki oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp400.000.000.000.

In 2019 there was an additional paid-in capital amounting to Rp150,000,000,000 as stated in the deed of the Annual General Meeting of Shareholders (RUPST) No.34 dated January 20, 2020 notarial made by Hadijah, S.H., notary in Jakarta. The addition is not yet recorded in the administration of Financial Servies Authority (OJK) Jakarta. Total paid-in share capital owned by PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah as of December 31, 2019 amounted to Rp400,000,000,000.

Perubahan tersebut masih dalam proses pencatatan pada *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

The changes are still in the recording process from the Legal Entity Administration system database of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights Administration system.

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Capital Management

The main objective of the Company's capital management is to ensure that the Company maintains a healthy capital ratio in order to support the business and maximize shareholder value.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Perusahaan penjaminan syariah dengan lingkup nasional diwajibkan memiliki modal sendiri (ekuitas) minimum sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut.

In accordance with Article 31 paragraph 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.05/2017 concerning the Implementation of Business Guarantee Institutions, sharia guarantee companies with a national scope are required to have their own minimum capital (equity) amounting to Rp100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) within a maximum period of 3 (three) years after obtaining a business license. As of December 31, 2019 and 2018, the Company has complied with these regulations.

Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi.

The Company manages the capital structure and makes adjustments to the capital structure due to changes in economic conditions.

22. Tambahan Modal Disetor / *22. Additional Paid-in Capital*

Berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-872/MBU/11/2019 tentang Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 30 Desember 2019, dicatat dalam Akta No.34 tanggal 20 Januari 2020 yang aktanya dibuat oleh Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, terdapat penambahan modal disetor sebesar Rp150.000.000.000 per 31 Desember 2019.

Based on Letter of Ministry of SOEs No. S-872/MBU/11/2019 about Agreement on Additional Paid-in Capital for PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah and Annual General Meeting of Shareholders dated December 30, 2019, recorded in Notarial Deed No.34 dated January 20, 2020 made by Hadijah, S.H., notary in Jakarta, there was additional paid-in capital amounted to Rp150,000,000,000 as of December 31, 2019.

23. Cadangan Umum / *23. General Reserves*

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Juni 2019 dan 16 Mei 2018, para pemegang saham telah menyetujui pembagian laba tahun 2019 dan 2018 dengan membentuk cadangan umum masing-masing sebesar Rp14.084.857.233 dan Rp6.226.204.555 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Based on the General Meeting of Shareholders dated June 17, 2019 and May 16, 2018 the shareholders approved the distribution of profits in 2019 and 2018 by forming general reserves amounting to Rp14,084,857,233 and Rp6,226,204,555 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

24. Imbal Jasa Kafalah Bruto / *24. Gross Kafalah Fee*

	2019 Rp	2018 Rp	
Konsumtif	81,838,554,763	51,241,763,330	*Consumptive*
Produktif	222,883,840,606	168,573,512,301	*Productive*
Surety	12,557,389,768	3,669,225,233	*Surety*
Jumlah	**317,279,785,137**	**223,484,500,864**	***Total***

25. Beban Penjaminan Ulang / *25. Reguarantee Expenses*

	2019 Rp	2018 Rp	
Konsumtif	62,862,433,659	15,725,621,078	*Consumptive*
Produktif	25,928,111,337	50,093,150,979	*Productive*
Surety	3,924,184,303	1,135,166,556	*Surety*
Jumlah	**92,714,729,299**	**66,953,938,613**	***Total***

26. Beban Ta'widh / *26. Ta'widh Expenses*

	2019 Rp	2018 Rp	
Produktif	106,962,253,668	94,212,115,596	*Productive*
Konsumtif	24,404,948,086	32,777,986,903	*Consumptive*
Surety	480,720,037	--	*Surety*
Jumlah	**131,847,921,791**	**126,990,102,499**	***Total***

27. Ta'widh Reasuransi / *27. Ta'widh Reinsurance*

	2019 Rp	2018 Rp	
Konsumtif	10,606,406,786	13,349,629,049	*Consumptive*
Produktif	43,786,341,475	33,097,132,116	*Productive*
Jumlah	**54,392,748,261**	**46,446,761,165**	***Total***

28. Pendapatan Investasi / *28. Investment Income*

	2019 Rp	2018 Rp	
Bagi hasil deposito berjangka	13,929,072,132	11,031,089,793	*Profit sharing time deposits*
Surat berharga syariah negara	4,448,735,470	--	*Government sharia bond*
Reksadana	1,650,003,629	1,624,041,568	*Mutual funds*
Jumlah	**20,027,811,231**	**12,655,131,361**	***Total***

29. Beban Usaha / *29. Operating Expenses*

	2019 Rp	2018 Rp	
Pemasaran			***Marketing***
Jamuan	2,455,393,998	1,920,609,741	*Banquet*
Iklan dan promosi	1,345,375,996	1,446,036,627	*Advertising and promotion*
Perjalanan dinas	1,220,012,576	800,297,589	*Travel allowance*
Sosialisasi	858,088,939	1,838,583,481	*Socialization*
Lainnya	3,072,058,428	798,171,287	*Others*
Subjumlah	8,950,929,937	6,803,698,725	*Subtotal*
Biaya kepegawaian			***Employee Expenses***
Gaji	26,317,834,177	21,460,722,331	*Salary*
Tunjangan	6,414,101,873	6,168,192,057	*Allowance*
Jasa produksi	3,953,804,919	500,000,000	*Productivity bonus*
Imbalan kerja	1,971,598,868	1,084,055,468	*Employed benefit*
Pelatihan dan Pendidikan	1,948,296,635	403,430,454	*Training and education*
Asuransi	2,593,638,834	1,699,530,918	*Inssurance*
Perjalanan dinas	916,505,518	1,117,820,244	*Travel allowance*
Tantiem	1,568,096,850	1,050,000,000	*Tantiem*
Lembur	814,221,677	556,106,220	*Overtime*
Lainnya	7,533,884,514	5,421,014,233	*Others*
Subjumlah	54,031,983,865	39,460,871,925	*Subtotal*
Beban Umum			***General Expenses***
Sewa	9,498,220,485	8,000,628,791	*Rent*
Listrik, telpon dan internet	3,431,712,631	2,983,465,005	*Electricity, telephone and internet*
Transportasi	1,975,393,119	1,269,467,424	*Transportation*
Penyusutan (Catatan 10)	1,879,080,204	1,539,164,727	*Depreciation (Note 10)*
Profesional	1,467,033,548	1,393,332,963	*Professional*
Amortisasi (Catatan 11)	1,132,662,830	1,003,895,299	*Amortization (Note 11)*
Perlengkapan kantor	1,266,155,383	713,880,373	*Office equipment*
Publikasi dan humas	1,121,933,998	1,171,060,201	*Publication and PR*
Rapat	311,359,688	739,020,228	*Meeting*
OJK dan keanggotaan	204,065,709	491,711,501	*OJK and membership*
Pemeliharaan dan perbaikan	759,138,591	387,290,690	*Maintenance and repair*
Lain-lain	1,455,565,884	651,584,586	*Others*
Subjumlah	24,502,322,070	20,344,501,788	*Subtotal*
Jumlah	**87,485,235,872**	**66,609,072,438**	***Total***

30. Pendapatan (Beban) Lain-lain / *30. Other income (Expenses)*

	2019 Rp	2018 Rp	
Jasa giro	161,866,515	222,964,983	*Current account service*
Administrasi bank	(81,365,108)	(46,349,825)	*Bank admistration*
Penyisihan piutang imbal jasa kafalah (Catatan 5)	(1,750,419,826)	--	*Impairment on for kafalah fee receivables (Note 5)*
Pendapatan (beban) lainnya	(1,393,448,515)	(4,425,156,320)	*Other income (expense)*
Jumlah	**(3,063,366,934)**	**(4,248,541,162)**	***Total***

31. Sifat Dan Transaksi Pihak Berelasi / *31. Nature and Transaction of Related Parties*

Sifat Hubungan dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan dalam Grup atau memiliki manajemen yang sama.

Nature of Transactions with Related Partied

The related parties are all government-owned companies and company that belongs to same Group or has same key management.

Transaksi Hubungan Berelasi

Rincian saldo akun-akun dengan pihak berelasi:

Transaction of Related Parties

The details of the balances of accounts with related party are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	Persentase terhadap jumlah Aset dan Liabilitas/*Percentage of total Assets and Liabilities* 2019 %	2018 %
Aset				
Bank/*cash in banks* Rupiah (Catatan/Note 4)				
PT Bank Syariah Mandiri	2,352,013,281	1,962,488,490	0.38	0.49
PT Bank BRI Syariah	3,001,268,720	1,916,607,920	0.48	0.48
PT Bank BNI Syariah	1,132,502,902	615,342,231	0.18	0.15
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Syariah	361,070,567	153,768,937	0.06	0.04
Subjumlah/*subtotal*	**6,846,855,470**	**4,648,207,578**	**1.04**	**1.16**
Bank/*cash in banks* US Dollar (Catatan/Note 4)				
PT Bank BNI Syariah	260,354,321	264,643,750	0.04	0.07
Subjumlah/*subtotal*	260,354,321	264,643,750	0.04	0.07
Jumlah/*Total*	**7,107,209,791**	**4,912,851,328**	**1.08**	**1.22**
Piutang imbal jasa kafalah/*Kafalah fee receivables* (Catatan/*Note* 5)				
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	13,016,794,535	965,459,532	2.09	0.24
PT Bank Syariah Mandiri	2,854,718,529	2,378,709,175	0.46	0.59
PT Bank BRI Syariah	1,652,704,548	1,092,923,194	0.27	0.27
PT Bank BNI Syariah	1,075,008,545	944,972,345	0.17	0.24
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	9,057,953	--	0.00	0.00
Jumlah/*Total*	**18,608,284,110**	**5,382,064,246**	**2.99**	**1.34**
Piutang penjaminan ulang/*Re-guarantee receivables* (Catatan/*Note* 6)				
PT Asrinda Arthasangga	20,621,445,968	844,051,303	3.31	0.21
PT Reasuransi Syariah Indonesia	2,440,112,045	6,460,777,556	0.39	1.61
PT Reasuransi Nasional Indonesia	--	--	0.00	0.00
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	--	331,014,911	0.00	0.08
PT BNI Life Insurance	--	34,700,187	0.00	0.01
Jumlah/*Total*	**23,061,558,013**	**7,670,543,957**	**3.70**	**1.91**

	2019 Rp	2018 Rp	Persentase terhadap jumlah Aset dan Liabilitas/*Percentage of total Assets and Liabilities* 2019 %	2018 %
Deposito berjangka /*Time deposits*				
(Catatan/*Note* 8.a)				
PT Bank Syariah Mandiri	101,750,000,000	94,351,439,088	16.34	23.52
PT Bank BNI Syariah	141,400,000,000	46,650,000,000	22.71	11.63
PT Bank BRI Syariah	91,300,000,000	47,650,000,000	14.66	11.88
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Syariah	500,000,000	1,250,000,000	0.08	0.31
Jumlah/*Total*	**334,950,000,000**	**189,901,439,088**	**53.79**	**0.47**
Reksadana/*Mutual fund* (Catatan/*Note* 8.c)				
PT PNM Investment Management	20,680,194,884	70,796,670,934	3.32	17.64
Liabilitas/*Liabilities*				
Utang ta'widh/*Ta'widh payables*				
(Catatan/*Note* 14)				
PT Bank Syariah Mandiri	1,069,112,260	861,531,706	0.95	1.14
PT Bank BRI Syariah	782,871,996	769,419,616	0.70	1.02
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	4,808,283,300	65,331,000	4.28	0.09
PT Bank BNI Syariah	34,364,907	30,891,956	0.03	0.04
Jumlah/*Total*	**6,694,632,463**	**1,727,174,278**	**5.96**	**2.28**
Utang penjaminan ulang/*Re-guarantee payables*				
(Catatan/*Note* 15)				
PT Asrinda Arthasangga	10,120,812,928	6,382,160,153	9.01	8.43
PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah	1,483,576,268	4,496,487,559	1.32	5.94
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	--	810,012,290	0.00	1.07
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	--	164,308,340	0.00	0.22
PT Asuransi Asei Indonesia	20,115,000	20,115,000	0.02	0.03
PT Reasuransi Syariah Indonesia	49,702,593	9,977,593	0.04	0.01
Jumlah/*Total*	**11,674,206,789**	**11,883,060,935**	**10.39**	**15.70**

32. Aset Dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing / *32. Financial Assets and Liabilities Denominated In Foreign Currencies*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018, the Company had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2019		2018		
	Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*	Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*	
Aset moneter					***Monetary assets***
Bank	18,737	260,354,321	18,275	264,643,750	*Cash in banks*

Kurs konversi yang digunakan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah 1 USD: Rp13.901 dan Rp14.481.

The exchange rates on December 31, 2019 and 2018 for 1 USD: Rp13,901 and Rp14,481, respectively.

33. Aset Dan Liabilitas Keuangan / *33. Financial Assets and Liabilities*

Ikhtisar instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan kategori, disajikan sebagai berikut:

A summary of the financial instruments held by category is provided below:

	2019				
	Tersedia untuk dijual/ *Available-for-sale*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ *Liabilities at amortized cost*	Jumlah/ *Total*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas dan bank	--	24,312,454,495	--	24,312,454,495	*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka mudhrabah	--	436,450,000,000	--	436,450,000,000	*Time deposits mudharabah*
Surat berharga negara syariah	--	--	65,205,312,842	65,205,312,842	*Government Syariah Bonds*
Reksadana	25,606,394,884	--	--	25,606,394,884	*Mutual fund*
Piutang imbal jasa kafalah	--	18,295,926,872	--	18,295,926,872	*Kafalah fee receivables*
Piutang ta'widh	--	23,061,558,013	--	23,061,558,013	*Ta'widh receivables*
Piutang hasil investasi	--	1,609,128,897	--	1,609,128,897	*Investment income receivables*
Jumlah	**25,606,394,884**	**503,729,068,277**	**65,205,312,842**	**594,540,776,003**	***Total***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Utang ta'widh	--	--	6,809,345,835	6,809,345,835	*Ta'widh payables*
Utang penjaminan ulang	--	--	11,703,991,381	11,703,991,381	*Re-guarantee payables*
Utang pajak	--	--	8,388,056,927	8,388,056,927	*Taxes payable*
Biaya yang masih harus dibayar	--	--	5,230,389,206	5,230,389,206	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	--	--	678,778,641	678,778,641	*Other payables*
Jumlah	**--**	**--**	**32,810,561,990**	**32,810,561,990**	***Total***

	2018				
	Tersedia untuk dijual/ *Available-for-sale*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ *Liabilities at amortized cost*	Jumlah/ *Total*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas dan bank	--	15,711,757,402	--	15,711,757,402	*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka mudhrabah	--	279,051,439,088	--	279,051,439,088	*Time deposits mudharabah*
Reksadana	70,796,670,934	--	--	70,796,670,934	*Mutual fund*
Piutang imbal jasa kafalah	--	6,750,855,864	--	6,750,855,864	*Kafalah fee receivables*
Piutang ta'widh	--	7,988,726,802	--	7,988,726,802	*Ta'widh receivables*
Piutang hasil investasi	--	381,286,784	--	381,286,784	*Investment income receivables*
Jumlah	**70,796,670,934**	**309,884,065,940**	**--**	**380,680,736,874**	***Total***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Utang ta'widh	--	--	1,733,582,361	1,733,582,361	*Ta'widh payables*
Utang penjaminan ulang	--	--	11,989,422,741	11,989,422,741	*Re-guarantee payables*
Utang pajak	--	--	5,911,509,051	5,911,509,051	*Taxes payable*
Biaya yang masih harus dibayar	--	--	2,846,872,467	2,846,872,467	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	--	--	1,148,128,478	1,148,128,478	*Other payables*
Jumlah	**--**	**--**	**23,629,515,098**	**23,629,515,098**	***Total***

34. Manajemen Risiko Keuangan / *34. Management of Financial Risk*

a. Risiko Keuangan

Perusahaan menampilkan rentang risiko keuangan melalui aset keuangan, liabilitas keuangan (investasi dan pinjaman), aset reasuransi dan liabilitas asuransi. Khususnya risiko keuangan kunci yang dalam jangka panjang hasil investasinya tidak menutupi jumlah kewajibannya yang timbul dari kontrak asuransi dan investasi. Komponen yang paling penting risiko keuangan adalah risiko mata uang dan risiko kredit.

a. Financial Risk

The Company is exposed to a range of financial risks through its financial assets, financial liabilities (investment contracts and borrowings), reinsurance assets and insurance liabilities. In particular, the key financial risk is that the in the long-term its investment proceeds are not sufficient to fund the obligations arising from its insurance and investment contracts. The most important components of this financial risk are foreign currency risk and credit risk.

Risiko ini muncul dari produk ekuitas dan mata uang, yang semuanya dinyatakan dalam pergerakan pasar umum dan khusus. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan berkaitan dengan investasi dan kewajibannya adalah risiko harga ekuitas.

These risks arise from open positions in currency and equity products, all of which are exposed to general and specific market movements. The risks that the Company primarily faces due to the nature of its investments and liabilities are equity price risk.

Analisa sensitivitas - risiko mata uang
Perusahaan memiliki kas di bank dalam mata uang lokal dan asing. IJK jangka pendek Perusahaan diinvestasikan dalam aset dengan denominasi mata uang yang sama seperti kewajibannya, untuk mengeliminasi risiko kurs mata uang. Risiko kurs mata uang timbul dari pengakuan aset dan kewajiban dengan denominasi mata uang selain Rupiah.

Sensitivity analysis - currency risk
The Company underwrites short-term insurance contracts in local and foreign currencies. The Company's kafalah fee are invested in assets denominated in the same currencies as their insurance liabilities, which eliminates the foreign currency exchange rate risk for these operations. Foreign exchange risk arises from recognized assets and liabilities that are denominated in currencies other than Rupiahs.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika IDR melemah/ menguat sebesar 10% terhadap USD dengan seluruh variabel lain konstan, laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp26.046.665 terutama diakibatkan kerugian dari penjabaran kas dan bank. Dampak terhadap ekuitas sama dengan dampak terhadap laba setelah pajak tahun berjalan.

As of December 31, 2019, if IDR had weakened/ strengthened by 10% against USD with all other variables held constant, pre-tax profit for the year would have been increase/decrease Rp26,046,665 mainly as a result of foreign exchange losses on the translation of cash and banks. The impact on equity would have been the same as the impact on post-tax profit for the year.

b. Risiko Kredit
Perusahaan mempunyai eksposure risiko kredit, yaitu risiko ketidakmampuan debitur membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Area kunci dimana Perusahaan memiliki risiko kredit adalah:
- Bagian reasuradur atas kewajibannya;
- Jumlah yang menjadi kewajiban reasuradur dalam hal ta'widh yang sudah dibayar.

b. Credit Risk
The Company has exposure to credit risk, which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due. Key areas where the Company is exposed to credit risk are:
- *Reinsurers' share of liabilities;*
- *Amounts due from reinsurers in respect of ta'widh already paid.*

Perusahaan menyusun struktur tingkat risiko kredit yang dapat diterima dengan menentukan limit atas eksposurnya masing-masing debitur, atau Perusahaan debitur, dan terhadap segmen geografis dan industri. Suatu risiko tergantung pada reviu tahunan atau lebih.

The Company structures the levels of credit risk it accepts by placing limits on its exposure to a single counterparty, or the Company's of counterparties, and to geographical and industry segments. Such risks are subject to an annual or more frequent review.

Reasuransi digunakan untuk mengelola risiko penjaminan. Namun demikian bukan untuk membebaskan kewajiban Perusahaan sebagai penanggung utama. Jika reasuradur gagal untuk membayar ta'widh karena suatu alasan, Perusahaan tetap berkewajiban untuk membayar kepada pemegang polis. Kesehatan reasuradur dipertimbangkan atas dasar tahunan dengan me- reviu kesehatan keuangan sebelum meminta dukungan reasuransi.

Reinsurance is used to manage guarantee risk. This does not, however, discharge the Company's liability as primary insurer. If a reinsurer fails to pay a ta'widh for any reason, the Company remains liable for the payment to the policy holder. The creditworthiness of reinsurers is considered on an annual basis by reviewing their financial strength prior to finalisation of any contract.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

	2019				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *impaired*	Jumlah/ *Total*	
Aset Keuangan					***Financial assets***
Kas dan bank	24,312,454,495	--	--	24,312,454,495	*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka mudhrabah	436,450,000,000	--	--	436,450,000,000	*Time deposits mudharabah*
Reksadana	25,606,394,884	--	--	25,606,394,884	*Mutual fund*
Surat berharga negara syariah	65,205,312,842	--	--	65,205,312,842	*Government sharia bond*
Piutang ujrah	8,859,116,481	9,436,810,391	--	18,295,926,872	*Ujrah receivables*
Piutang ta'widh	23,061,558,013	--	--	23,061,558,013	*Ta'widh receivables*
Piutang hasil investasi	1,609,128,897	--	--	1,609,128,897	*Investment income receivables*
Jumlah	**585,103,965,612**	**9,436,810,391**	**--**	**594,540,776,003**	***Total***

	2018				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *impaired*	Jumlah/ *Total*	
Aset Keuangan					***Financial assets***
Kas dan bank	15,711,757,402	--	--	15,711,757,402	*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka mudhrabah	279,051,439,088	--	--	279,051,439,088	*Time deposits mudharabah*
Reksadana	70,796,670,934	--	--	70,796,670,934	*Mutual fund*
Piutang ujrah	--	6,750,855,864	--	6,750,855,864	*Ujrah receivables*
Piutang ta'widh	7,988,726,802	--	--	7,988,726,802	*Ta'widh receivables*
Piutang hasil investasi	381,286,784	--	--	381,286,784	*Investment income receivables*
Jumlah	**373,929,881,010**	**6,750,855,864**	**--**	**380,680,736,874**	***Total***

c. Risiko Penjaminan

Seperti halnya dengan perbankan konvensional, risiko yang masih membayangi perbankan syariah adalah meningkatnya NPF (*Non Performing Financing*). Menurut *outlook* perbankan syariah, pertumbuhan pembiayaan syariah akan meningkat pada tahun 2019, seiring dengan pertumbuhan tersebut, NPF juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan NPF ini disebabkan antara lain ketidakstabilan kondisi ekonomi yang menyebabkan banyak pelaku usaha mengalami penurunan bisnis. Peningkatan NPF juga dikhawatirkan oleh entitas perbankan syariah dan perusahaan multijasa syariah. Namun untuk mengurangi tingkat rasio NPF, disisi lain entitas pembiayaan syariah akan lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan.

Pertumbuhan agresif pembiayaan tersebut merupakan potensi bagi Perusahaan, namun disisi lain mempunyai konsekuensi bisnis berupa kualitas pembiayaan yang lebihrendah. Risiko ini akan memunculkan dampak potensi pertumbuhan ta'widh bagi Perusahaan, akan tetapi terhadap kondisi demikian, Perusahaan telah mempersiapkan strategi antara lain memperkuat kualitas akseptasi (penerapan *prudent underwritting*),

c. Guarantee Risk

As is the case with conventional banking, risks are still looming sharia banking is increasing NPF (Non Performing Financing). According to sharia banking outlook, sharia financing growth will increase in 2019, along with this growth, NPF will also increase. The increase in NPF was caused by, among others, the instability of economic conditions which caused many business players to experience a decline in business. The increase in NPF is also feared by sharia banking entities and multi-service sharia companies. But to reduce the level of the NPF ratio, on the other hand Islamic financing entities will be more aggressive in channeling financing.

The aggressive growth of the financing is a potential for the Company, but on the other hand it has business consequences in the form of more quality financing low. This risk will have a potential impact on ta'widh growth for the Company, but on such conditions, the Company has prepared strategies such as strengthening the quality of acceptances (applying prudent underwritting), selecting its NPF controlled product segments, prioritizing

memilih segmen produk yang terkendali NPF nya, mengutamakan mitra bisnis *top five* perbankan syariah nasional, melakukan ekspansi penjaminan syariah dengan entitas multijasa syariah dan entitas *(financial technology)* Fintech berbasis syariah serta upaya lainnya yang dapat meminimalkan risiko.

the top five business partners of national sharia banking, expanding sharia underwriting with sharia-based multi-service entities and sharia-based financial technology entities and other efforts that can minimize risk

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan tidak dapat memenuhi semua kewajibannya pada saat jatuh tempo seperti pembayaran ta'widh, dana komitmen kontraktual, atau arus kas keluar lainnya. Suatu arus keluar mengurangi sumber kas untuk aktivitas operasional, perdagangan dan investasi. Keadaan yang ekstrem, kekurangan likuidaitas dapat mengakibatkan penurunan laporan posisi keuangan dan penjualan aset atau potensi ketidakmampuan dalam memenuhi komitmen dengan pemegang polis. Risiko Perusahaan tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya adalah *inheren* dalam semua operasional asuransi dan dapat dipengaruhi oleh skala khusus institusi dan kejadian di industri meliputi, tetapi tidak terbatas pada, peristiwa kredit, kegiatan merger dan akuisisi, kejutan sistemik dan bencana alam.

Monitoring dan pelaporan dilakukan dalam bentuk pengukuran dan proyeksi arus kas untuk beberapa hari, minggu dan bulan kedepan, karena ini periode penting dalam mengelola likuiditas. Titik awal untuk proyeksi ini adalah analisa jatuh tempo kontrak dari liabilitas keuangan dan tanggal penerimaan aset keuangan yang diharapkan.

d. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Company is unable to meet its obligations when they fall due as a result of policyholder benefit payments, cash requirements from contractual commitments, or other cash outflows. Such outflows would deplete available cash resources for operational, trading and investments activities. In extreme circumstances, lack of liquidity could result in reductions in the statements of financial position and sales of assets, or potentially an inability to fulfill policyholder commitments. The risk that the Company will be unable to do so is inherent in all insurance operations and can be affected by a range of institution-specific and market-wide events including, but not limited to, credit events, merger and acquisition activity, systemic shocks and natural disasters.

Monitoring and reporting take the form of cash flow measurement and projections for the next day, week and month respectively, as these are key periods for liquidity management. The starting point for those projections is an analysis of the contractual maturity of the financial liabilities and the expected collection date of the financial assets.

	2019			
	Jatuh tempo/*Maturity*			
	<= 1 tahun/*year*	1 - 2 tahun/year	Jumlah/*Total*	
Aset				***Assets***
Kas dan bank	24,312,454,495	--	24,312,454,495	*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka mudhrabah	436,450,000,000	--	436,450,000,000	*Time deposits mudharabah*
Reksadana	--	25,606,394,884	25,606,394,884	*Mutual fund*
Surat berharga negara syariah	--	65,205,312,842	65,205,312,842	*Government sharia bond*
Piutang Imbal jasa kafalah	18,295,926,872	--	18,295,926,872	*Kafalah fee receivables*
Piutang ta'widh	23,061,558,013	--	23,061,558,013	*Ta'widh receivables*
Piutang hasil investasi	1,609,128,897	--	1,609,128,897	*Investment income receivables*
Jumlah	**503,729,068,277**	**90,811,707,726**	**594,540,776,003**	***Total***
Liabilitas				***Liabilities***
Utang ta'widh	6,809,345,835	--	6,809,345,835	*Ta'widh payables*
Utang penjaminan ulang	11,703,991,381	--	11,703,991,381	*Re-guarantee payables*
Utang pajak	8,388,056,927	--	8,388,056,927	*Taxes payable*
Biaya yang masih harus dibayar	5,230,389,206	--	5,230,389,206	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	678,778,641	--	678,778,641	*Other payables*
Jumlah	**32,810,561,990**	**--**	**32,810,561,990**	***Total***

	2018			
	Jatuh tempo/*Maturity*			
	<= 1 tahun/*year*	1 - 2 tahun/year	Jumlah/*Total*	
Aset				***Assets***
Kas dan bank	15,711,757,402	--	15,711,757,402	*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka mudhrabah	279,051,439,088	--	279,051,439,088	*Time deposits mudharabah*
Reksadana	--	70,796,670,934	70,796,670,934	*Mutual fund*
Piutang imbal jasa kafalah	6,750,855,864	--	6,750,855,864	*Kafalah fee receivables*
Piutang ta'widh	7,988,726,802	--	7,988,726,802	*Ta'widh receivables*
Piutang hasil investasi	381,286,784	--	381,286,784	*Investment income receivables*
Jumlah	**309,884,065,940**	**70,796,670,934**	**380,680,736,874**	***Total***
Liabilitas				***Liabilities***
Utang ta'widh	1,733,582,361	--	1,733,582,361	*Ta'widh payables*
Utang penjaminan ulang	11,989,422,741	--	11,989,422,741	*Re-guarantee payables*
Utang pajak	5,932,043,551	--	5,932,043,551	*Taxes payable*
Biaya yang masih harus dibayar	2,846,872,467	--	2,846,872,467	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	1,148,128,478	--	1,148,128,478	*Other payables*
Jumlah	**23,650,049,598**	**--**	**23,650,049,598**	***Total***

35. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca / *35. Subsequent Event*

Pada awal tahun 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona" setelah ditemukannya beberapa orang yang teridentifikasi terpapar virus corona. Kondisi darurat ini, bersamaan dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi corona, menyebabkan penurunan dalam perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020, yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic" after the discovery of several people who were identified as being affected by the corona virus. This emergency condition, together with the global economic situation affected by the corona pandemic, caused a downturn in the domestic economy in early 2020, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa Perusahaan tidak mengalami dampak signifikan per tanggal posisi keuangan karena tidak signifikannya eksposure kedua hal tersebut.

The Company's management states that the Company did not experience a significant impact as of the financial position date due to the insignificant exposure of these matters.

Kegiatan operasional yang mengalami dampak adalah, yaitu:

1. Aktivitas investasi, akan terjadi penurunan hasil investasi dari Reksadana; dan

2. Aktivitas pejaminan pembiayaan, akan berdampak pada kenaikan beban ta'widh sebagai akibat penurunan kualitas pembiayaan menjadi *Non Performing Financing* (NPF) di perbankan syariah.

The Company's operations facing impacts are:

1. *Investment activities, there will be a decrease in investment returns from mutual funds; and*
2. *Financing guarantee activities will have an impact on the increase in ta'widh expenses as a result of the decline in the quality of financing to Non-Performing Financing (NPF) in sharia banking.*

Manajemen berkeyakinan bahwa pandemi Covid-19 saat ini memiliki dampak yang tidak material terhadap kinerja usaha Perusahaan meskipun terdapat ketidakpastian signifikan mengenai dampak kondisi ini terhadap kegiatan usaha Perusahaan dimasa mendatang.

Manejemen Perusahaan akan meninjau situasi secara berkelanjutan, dan berusaha untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis Perusahaan.

The management believes that the pandemic Covid-19 at this time has an immaterial impact on the Company's business performance however there is significant uncertainty about the impact of the current conditions on the Company' business in the future.

The Company's management will review the situation on an ongoing basis, and try to minimize the impact on the Company's business.

36. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

36. New Accounting Standards and Interpretations of Standards which Have Been Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2019.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amendemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2019.

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 71: "Financial Instrument";*
- *PSAK 72: "Revenue from Contract with Customer";*
- *PSAK 73: "Lease";*
- *PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract";*
- *PSAK 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures";*
- *PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation";*
- *ISAK 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements";*
- *PSAK 1 (Amendment 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";*
- *PSAK 1 (Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements";*
- *PPSAK 13: "Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting";*

- PSAK 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"; dan
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf"; dan
- PSAK 22 (Amendemen 2019): "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis".

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

- *PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimatesand Errors";*
- *PSAK 102 (Revised 2019): "Accounting for Murabahah"; and*
- *ISAK 101: "Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership"*
- *ISAK 102: "Impairment on Murabahah Receivable".*

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows :

- *PSAK 112: "Accounting for Endowments"; and*
- *PSAK 22 (Amendment 2019): "Business Combinations regarding Definition of Business".*

Until the date of the financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

37. Informasi Penting Lainnya / *37. Other Important Informations*

Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjaminan

Pada tahun 2019 dan 2018, tingkat kesehatan keuangan Perusahaan telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 18/POJK.05/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjaminan yang berlaku efektif 18 Desember 2018. Pengukuran Kesehatan Keuangan bagi Lembaga Penjamin meliputi:

Financial Soundness of Financial Guarantee Insurance Institutions

In 2019 and 2018, the Company's financial soundness complied with Financial Services Authority Regulation (SEOJK) No. 18/POJK.05/2018 dated December 18, 2018 about Financial Soundness of Financial Guarantee Insurance Institutions, went into effect by December 18, 2018. Financial Soundness Measurement for Financial Guarantee Insurance Institutions are as follows:

a. Rasio Likuiditas

Berdasarkan SEOJK No. 18/POJK.05/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjaminan yang berlaku efektif 18 Desember 2018, Lembaga Penjamin wajib menjaga Rasio Likuiditas paling rendah 120%. Rasio Likuiditas Perusahaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 556% dan 523%.

a. Liquidity Ratio

Based on SEOJK No. 18/POJK.05/2018 dated December 18, 2018 about Financial Soundness of Financial Guarantee Insurance Institutions, went into effect by December 18, 2018, Financial Guarantee Insurance Institutions is required to maintain a Liquidity Ratio at least 120%. Company's Liquidity Ratio per December 31, 2019 and 2018 are 558% and 523%, respectively.

b. *Gearing Ratio*

Gearing Ratio per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

b. Gearing Ratio

Gearing Ratio as of 31 December 2019 and 2018 is as follows:

	2019 %	2018 %
Nilai penjaminan yang ditanggung sendiri / *The value of guarantees that are borne by themselves*		
Usaha produktif/*Productive business*	6,034,267,022,341	6,119,967,702,171
Usaha non produktif/*Non productive business*	4,052,594,410,027	4,305,639,052,007
Jumlah/*Total*	**10,086,861,432,368**	**10,425,606,754,178**
Modal sendiri bersih/*Net own capital*	**510,375,225,748**	**325,531,366,747**
Gearing ratio	**19.76**	**32.03**

Berdasarkan SEOJK No. 18/POJK.05/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjaminan yang berlaku efektif 18 Desember 2018 Lembaga Penjamin wajib menjaga *Gearing Ratio* untuk penjaminan bagi usaha produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali dan Lembaga Penjamin wajib menjaga total *Gearing Ratio* paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

Based on SEOJK No. 18/POJK.05/2018 dated December 18, 2018 about Financial Soundness of Financial Guarantee Insurance Institutions, went into effect by December 18, 2018, Guarantee Institution is required to maintain a Gearing Ratio for productive business guarantee at most 20 (twenty) times and total Gearing Ratio at most 40 (forty) times.

c. Rasio Rentabilitas

c. Rentability Ratio

	2019 %	2018 %
Return On Assets	9.98%	5.59%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional/*Ratio of operating expenses to operating income*	27.57%	29.80%
Rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa/ *Ratio of claims to service fee*	24.41%	36.04%

d. Penilaian sendiri (*self assessment)* tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin

Pengukuran terhadap komponen penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan oleh Lembaga Penjamin dengan mengacu kepada SEOJK No. 3/SEOJK.05/2017 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin yang berlaku efektif tanggal 11 Januari 2017.

d. Self assessment on good corporate governance for Financial Guarantee Insurance Institutions

The measurement of the self assessment component of the implementation of good corporate governance is carried out by the Guarantor Institution with reference to the SEOJK No.3/SEOJK.05/2017 about Good Corporate Governance for Financial Guarantee Insurance Institutions, went into effect by January 11, 2017.

38. Tanggung Jawab Atas Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah selesai dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 20 Maret 2020.

38. Responsibility of The Financial Statements Preparation

These financial statements have been completed and authorized for issue by the Directors of the Company on March 20, 2020.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank